



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, terarah dan terpadu sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

2. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 13 Pebruari 2018

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 13 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI
JAWA TENGAH : (2/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021

I. UMUM.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas pembangunannya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) dan tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut : standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana dan prasarana, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam peraturan daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan kebijakan, peningkatan kemampuan capaian *impact* atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik di masa datang.

Melalui paradigma yang baru, perencanaan pembangunan mencoba mengadaptasi paradigma *new public management* untuk mendapatkan konsep *new public service* dan *reinventing government*. Diharapkan kedepan, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana.

Selanjutnya, indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diterjemahkan dalam *impact*, *outcome*, dan *output* membentuk satu arsitektur kinerja pembangunan daerah yang masing-masing secara spesifik dapat diketahui penanggungjawabnya: bupati, sekretaris daerah, kepala Perangkat Daerah dan aparatur daerah lainnya. Agar kinerja pembangunan menjadi satu kesatuan dalam aktivitas birokrasi maka dibutuhkan sistem pengukuran kinerja (*performance measurement system*) yang didukung oleh implementasi *reward and punishment system*. Di atas pondasi sistem yang baik, hal berikut yang tak kalah penting adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan komitmen bagaimana kinerja harus dicanangkan dan dicapai.

Kemudian berdasarkan diktum KEDUA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah Kabupaten Kendal yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ini telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan di Kabupaten Kendal menyusut. Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana wajah Kabupaten Kendal kini dan masa akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara lebih baik, fokus, dan konsisten.

Salah satu upaya agar kita dapat memproyeksikan diri di masa depan adalah dengan sungguh-sungguh memahami kondisi Kabupaten Kendal pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih terus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di masa datang. Langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal untuk dikembangkan demi meningkatnya kemakmuran masyarakat di masa yang akan datang. Pemahaman yang demikian dijaring melalui pendekatan sektoral dan kewilayahan serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kendal, termasuk pelibatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat.

Dalam rangka peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi di Kabupaten Kendal tersebut, dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensif dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Kendal. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal sebagaimana dijabarkan dalam dokumen ini. Merujuk pernyataan sebelumnya dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal harus menyusun RPJMD dengan berpedoman

kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025.

Sejak ditetapkan pada Tanggal 30 Agustus 2016, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal 2016-2021 telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 dan 2017. RPJMD juga akan memasuki perencanaan tahun kedua (RKPD 2018) yang segera akan dilaksanakan melalui APBD tahun 2018 untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV 2016 memberi kesimpulan bahwa dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.

Alasan utama perlunya dilakukan perubahan RPJMD adalah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kendal dengan kebijakan pembangunan perangkat daerah. Disamping itu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diamanatkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Berdasarkan hal tersebut perlunya adanya penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana

pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

- b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- c) Terjadi perubahan yang mendasar (terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional); dan atau

Secara ringkas, Perubahan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2016-2021 dilakukan dengan perbaikan perumusan dan penyajian dokumen sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Rincian Perubahan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

BAB PERDA No. 07 Tahun 2016	PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN KENDAL 2016-2021
BAB I	Penajaman latar belakang dan penyebutan alasan PERUBAHAN
	Melengkapi dasar hukum dengan peraturan perundangan terbaru yang relevan untuk dirujuk
BAB II	Memperbaharui data kinerja sampai dengan Tahun 2015 dan/atau 2016
BAB III	Memperbaharui proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Tahun 2018-2021
BAB IV	Memperbaharui permasalahan pembangunan daerah
	Menganalisis/memasukkan RPJMN 2015-2019
	Menyelaraskan dengan RTRW Kabupaten Kendal
	Memperbaharui isu strategis
BAB V	Merumuskan indikator tujuan yang menjadi indikator IKU daerah
	Memperbaharui sasaran, indikator sasaran dan target pada tiap sasaran RPJMD
	Merumuskan keterkaitan IKU Perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah
BAB VI	Penajaman arah kebijakan Tahun 2018 - 2021
	Menambahkan keterkaitan antara nawacita dan prioritas pembangunan daerah
	Penajaman program pembangunan daerah Tahun 2018 - 2021
	Perbaikan indikator dan terget program RPJMD

BAB PERDA No. 07 Tahun 2016	PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN KENDAL 2016-2021
BAB VII	Memperbaharui program, indikator, target dan pagu Tahun 2018 - 2021
	Menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah dan program prioritas perangkat daerah
BAB VIII	Memperbaharui indikator dan terget kinerja daerah
BAB IX	Memperbaharui kaidah pelaksanaan

Penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Kendal kini dan masa yang akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara baik, fokus, dan konsisten pada sisa periode RPJMD. Perbaikan-perbaikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memerhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada Tahun 2017 dimana masih tersisa empat periode RKPD didalamnya, salah satu fokus perubahan adalah menentukan agenda pembangunan untuk periode RKPD 2018 - 2021 sebagai landasan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Kendal pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

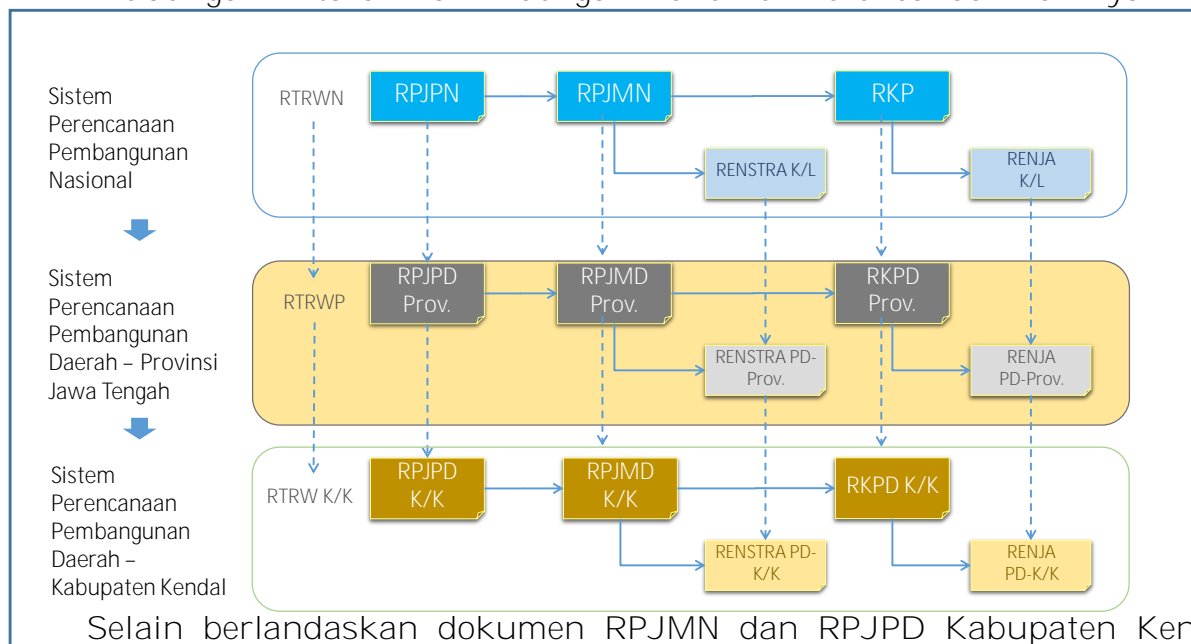
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 seri E Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 seri E Nomor 4); dan

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah: (8/2016); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Selain itu, RPJMD merupakan rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang tidak saja merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJPD), tetapi juga akan menjadi rujukan perencanaan sektoral dan kewilayahan bagi seluruh lini pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, RPJMD bukan hanya berdasarkan kepentingan saja, namun harus diselaraskan dengan kemampuan sumberdaya daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. RPJMD Kabupaten Kendal merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk didalamnya adalah sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi. Diagramatika keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selain berlandaskan dokumen RPJMN dan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 juga harus mengacu pada dokumen RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Kendal. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat sehingga RPJMD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu.

Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kendal

RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kendal 2005-2025 tahap keempat. RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2010-2015 yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh Bupati. Secara substantif, isi RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Kabupaten Kendal pada Tahun 2025 menjadi Kabupaten Kendal yang Mandiri, Maju dan Sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kendal. Berbagai evaluasi RJPMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RJPMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.

Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra PD Kabupaten Kendal

Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan *gradasi* dari Renstra Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Kendal dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Bupati bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Bupati yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Bupati dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan,

klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah.

Hubungan Antara RPJMD dan RTRW Kabupaten Kendal

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRWD Kabupaten Kendal, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Kendal. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kendal dalam RPJMD merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

Hubungan Antara RPJMD dan RPJMN

RPJMD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPJMD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

Hubungan Antara RPJMD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

RPJMD juga harus memedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang segera berakhir saat penyusunan RPJMD ini maka arah kebijakan pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah periode berikutnya menjadi sumber acuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan perubahan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 didasarkan pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan perubahan dokumen RPJMD Kabupaten Kendal. Perubahan menekankan pada penjelasan alasan formil dan materiil mengapa perubahan RPJMD ini dilakukan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Kendal sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan perubahan kebijakan RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Perubahan menekankan pada analisis kinerja pembangunan sampai dengan Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 sesuai ketersediaan data.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Perubahan akan menekankan pada analisis realisasi kinerja keuangan daerah sampai dengan Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan prediksinya sampai dengan Tahun 2021. Alokasi pendanaan pembangunan dalam lima tahun terakhir dan kapasitas riil di sisa waktu empat tahun sampai akhir periode RPJMD menjadi sandaran penting untuk menentukan (kembali) fokus atau prioritas pembangunan tahun 2021.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling pokok dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan

pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional). Perubahan menekankan pada analisis isu strategis dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Kendal dewasa ini dengan memerhatikan isu dan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi maupun pembangunan global internasional.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi bupati ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah. Perubahan menekankan pada penajaman dan penentuan target sasaran pembangunan yang lebih realistis dapat dicapai sesuai kondisi riil capaian pembangunan dan kemampuan pendanaan keuangan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan pencapaian sasaran ke berbagai strategi yang akan diselenggarakan selama periode pelaksanaan pembangunan. Masing-masing strategi dijabarkan ke dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD baik kebijakan sektoral maupun kewilayahan. Perubahan RPJMD lebih menekankan pada arah kebijakan untuk sisa periode kebijakan sebagai dasar penentuan kebijakan pada RKPD Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Selain itu juga menjelaskan berbagai Arah kebijakan ke dalam program pembangunan untuk mengoperasionalkan strategi dalam mencapai sasaran. Perubahan menekankan pada penajaman arah kebijakan dan program pembangunan untuk Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang nantinya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKPD tahun berkenaan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kendal serta pagu anggaran setiap tahunnya. Untuk tahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021, penanggungjawab bidang urusan/program Perangkat Daerah disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah terbaru.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisikan indikator kinerja *impact* dan *outcome* terpenting sebagai hasil kinerja dari kebijakan pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum, dan daya saing daerah pada realisasi pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Perubahan dilakukan dengan memperbaiki indikator dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dan/atau 2016 dan prediksinya sampai dengan tahun 2021.

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021. Perubahan RPJMD, menekankan pada kaidah pelaksanaan agar kebijakan pembangunan untuk sisa periode dapat benar-benar dipedomani sampai dengan penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun berkenaan sehingga sasaran pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD dapat benar-benar tercapai.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 dengan peraturan perundangan yang berlaku, fenomena pembangunan dan permasalahan/isu strategis pembangunan paling *update*. Dokumen hasil perubahan RPJMD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Kendal secara berkesinambungan. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 adalah:

1. Perbaiki sistematika dan substansi RPJMD Kabupaten Kendal;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal dan kabupaten/kota sekitar.
4. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;

5. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2016-2021.
6. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sisa periode pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kendal; serta
7. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Kendal adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, ibukotanya adalah Kendal dan masuk dalam wilayah metropolitan kedungsapur yang merupakan wilayah metropolitan terbesar keempat setelah Jabodetabek, Gerbangkertosusila dan Bandung Raya. Kabupaten Kendal berbatasan dengan laut Jawa di utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di Timur, Kabupaten Temanggung di Selatan, serta Kabupaten Batang di Barat. Kendal juga di kenal dengan Kota Santri karena terdapat ratusan Ponpes terutama di Kecamatan Kaliwungu dan juga di kenal dengan Kota Seni dan Budaya.

Nama kendal diambil dari nama sebuah pohon yakni Pohon Kendal. Pohon itu pada mulanya tidak ada yang tahu namanya tetapi ketika Pakuwojo bersembunyi di pohon itu di dalam pohon itu terang benderang akhirnya pohon itu dinamakan pohon *Qondhali* yang berarti penerang dan akhirnya daerah tempat pohon itu dinamakan *Qondhali* karena orang Jawa tidak fasih berbahasa Arab maka jadi Kendal. Pohon yang berdaun rimbun itu sudah dikenal sejak masa Kerajaan Demak pada Tahun 1500 - 1546 M yaitu pada masa pemerintahan Sultan Treggono. Pada awal pemerintahannya Tahun 1521, Sultan Trenggono pernah memerintah Sunan Katong untuk memesan Pusaka Kepada Pakuwojo. Peristiwa yang menimbulkan pertentangan dan mengakibatkan kematian itu tercatat dalam Prasasti, bahkan hingga sekarang makam kedua tokoh dalam sejarah kendal yang berada di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu itu masih dikeramatkan masyarakat secara luas. Menurut kisah, Sunan Katong pernah terpana memandang keindahan dan kerindangan pohon Kendal yang tumbuh di lingkungan sekitar. Sambil menikmati pemandangan pohon Kendal yang tampak "sari" itu, dia menyebut bahwa di daerah tersebut kelak bakal disebut "Kendalsari". Pohon besar yang oleh warga masyarakat disebut-sebut berada di pinggir jalan Pemuda Kendal itu juga dikenal dengan nama Kendal Growong karena batangnya berlubang atau *Growong*. Dari kisah tersebut diketahui bahwa Kendal dipakai untuk menyebutkan suatu wilayah atau daerah setelah Sunan Katong menyebutnya. Kisah penyebutan nama itu didukung oleh berita-berita perjalanan orang-orang Portugis yang oleh Tom Peres dikatakan bahwa pada abad ke-15 di Pantai Utara Jawa terdapat pelabuhan terkenal yaitu Semarang, Tegal dan Kendal. Bahkan oleh Dr. H.J. Graaf dikatakan bahwa pada abad 15 dan 16 sejarah Pesisir tanah Jawa itu memiliki arti sangat penting.

Kabupaten Kendal terdiri atas 20 Kecamatan, yang terbagi lagi atas sejumlah 266 desa dan 20 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kota Kendal. Disamping Kota Kendal, Kota-Kota kecamatan yang cukup signifikan adalah Kaliwungu dan Weleri.

Kaliwungu (Basis Keagamaan)

Kota ini tak pernah sepi dari kehidupan keislaman. Banyak pesentren dengan santri dari berbagai kota dari berbagai wilayah negeri. Kota ini selalu khas dengan berlalulalangnya orang-orang yang berpakaian muslim, dengan sarung dan penutup kepala (peci atau kerudung) dengan Al-Quran dan/atau kitab-kitab tertentu ditangan. Selain itu alunan ayat-ayat suci Al-Quransenantiasa menggema sepanjang hari hampir setiap sudut kotanya.

Weleri (Basis Perdagangan)

Kota paling barat kabupaten ini memang tak pernah sepi dari perdagangan. Kota ini menjadi transit dan tujuan dari para pedagang dari seluruh penjuru Kabupaten bahkan wilayah Indonesia. Dengan fasilitas transportasi (adanya 2 terminal dan 1 stasiun KA) dan fasilitas komunikasi yang lebih lengkap daripada Kecamatan lainnya, Weleri berkembang menjadi sebuah kota yang ramai dan mudah untuk diakses. Selain itu, secara sosial, dengan adanya para pedagang dari Klaten-Solo yang membentuk suatu perkampungan khusus (Kampung Solo), perkampungan tersebut terletak di dukuh Kendonsari kelurahan Penyangkiran. Dari pengaruh perubahan sosial inilah menjadikan Weleri sebagai kecamatan yang perkembangan perdagangan semakin pesat dengan ditandai banyaknya pasar tradisional, sampai saat ini terdapat 3 (tiga) pasar besar yang terlentang di jantung Kecamatan Weleri.

Analisis tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kendal terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, yang tersaji sebagai berikut:

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk memahami kondisi atau gambaran umum daerah Kabupaten Kendal. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Kendal baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana. Adapun, aspek

demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara *series* maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

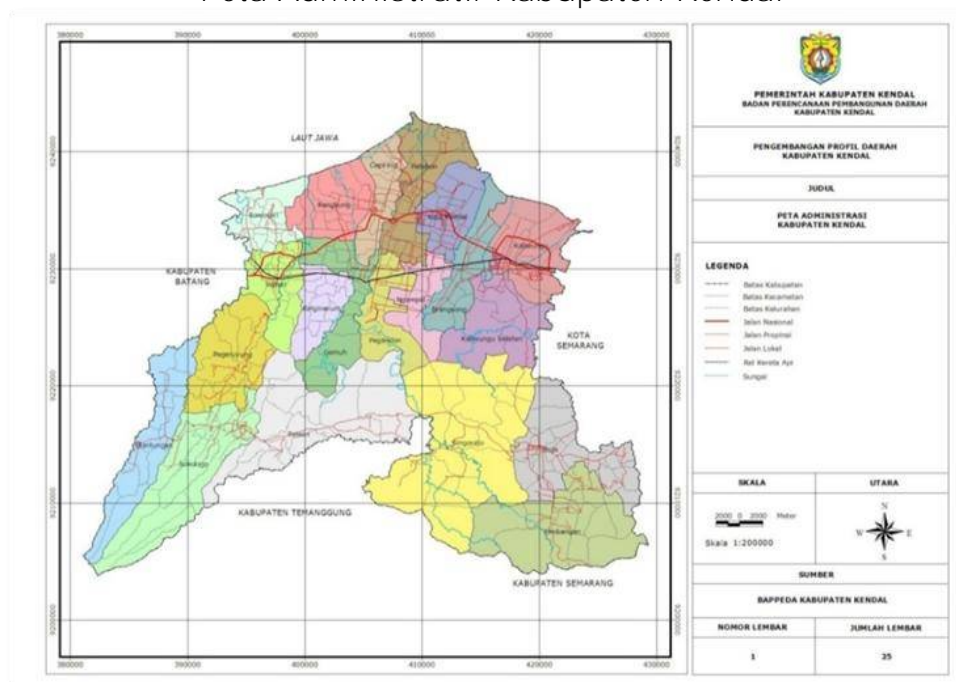
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Kabupaten Kendal. Karakteristik lokasi dan wilayah akan menjelaskan berbagai hal terkait potret wilayah baik dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, hingga penggunaan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Kendal.

a. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar 1.002,23 Km². Jumlah kecamatan di Kabupaten Kendal sebanyak 20 kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 286 yang terdiri 266 desa dan 20 kelurahan. Terdiri dari 1.140 dukuh, 1.490 RW dan 6.351 RT. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Peta Administratif Kabupaten Kendal



Sumber: Baperlitbang Kabupaten Kendal

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kota Semarang
Sebelah Selatan	: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
Sebelah Barat	: Kabupaten Batang

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal terletak pada posisi geografis 109°40' - 110°18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°24' Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Kendal berada pada jalur penghubung Pulau Jawa bagian utara (Pantura) sehingga posisinya menjadi sangat strategis. Selain itu juga Kabupaten Kendal letaknya berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Kendal merupakan wilayah dengan karakter agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Menurut data dari Kendal dalam angka tahun 2016, dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal pada tahun 2015, 70% digunakan untuk usaha pertanian (sawah dan tegalan) dan hutan serta perkebunan. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya), dan lain-lain.

c. Topografi

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis, yaitu: daerah pegunungan yang terletak di bagian selatan dengan ketinggian sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 25°C. Daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27°C. Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dalam wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 697 m dpl. Begitu pula dengan Kecamatan Sukorejo dengan ketinggian 524 m dpl. Sedangkan Kecamatan Kaliwungu adalah Kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut, dengan ketinggian 22 m dpl.

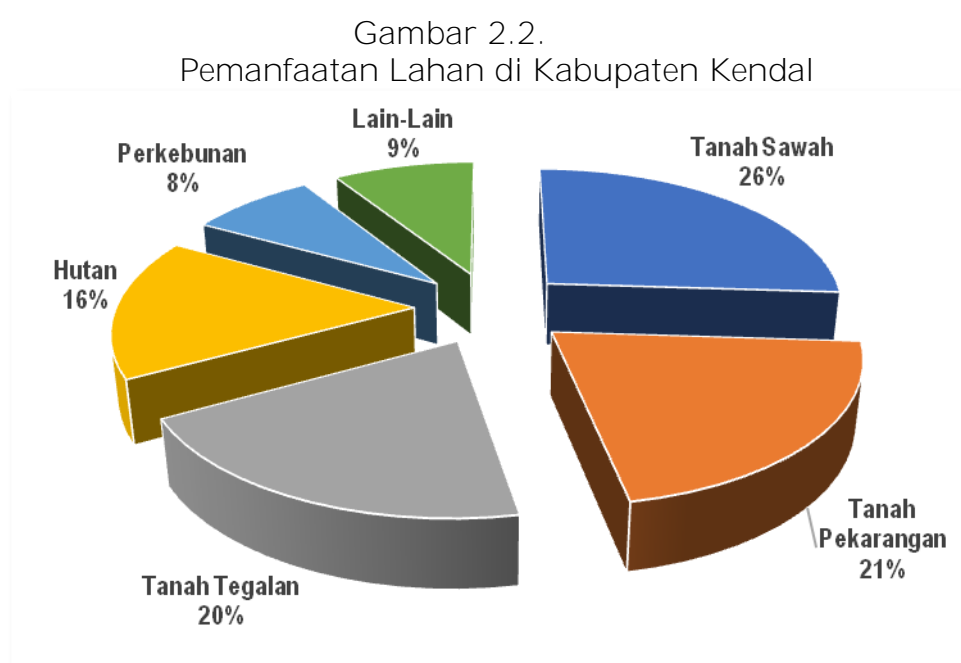
d. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara yang berdekatan dengan Laut Jawa (dataran rendah), kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih panas. Sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan (dataran tinggi), kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih sejuk.

Tahun 2015 di Kabupaten Kendal memiliki curah hujan yang cukup tinggi, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, adapun curah hujan terendah terjadi pada bulan September. Jumlah curah hujan pada tahun 2015 lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Tahun 2014 curah hujan sebesar 2.644 mm, sedangkan tahun 2015 berkisar 1.780 mm. Rata-rata hari hujan selama tahun 2015 adalah 97 hari.

e. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Kendal menurut buku Kendal Dalam Angka 2016 adalah 1.002,3 Km². Total luas tersebut terdiri atas tanah sawah seluas 259,64 Km², tanah pekarangan 210,74 Km², tanah tegalan 203,13 Km², perkebunan 78,65 Km², hutan 157,21 Km², dan lahan untuk lain-lain (perumahan, fasilitas umum, industri, dsb) seluas 92,86 Km². adapun persentase pemanfaatan lahan/tanah di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:



Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2016

Adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1) Kawasan Budidaya.

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;

Kawasan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Limbangan; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Plantungan; dan di Kecamatan Singorojo. Sedangkan Kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 15.225 (lima belas ribu dua ratus dua puluh lima) hektar berada di Kecamatan Limbangan; Kecamatan Singorojo; Kecamatan

Kaliwungu Selatan; Kecamatan Ringinarum; Kecamatan Boja; Kecamatan Pageruyung; Kecamatan Weleri; Kecamatan Plantungan; Kecamatan Kaliwungu; dan Kecamatan Sukorejo.

b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;

Kawasan hutan rakyat berupa hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat meliputi: sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Singorojo; sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan; sebagian Kecamatan Ringinarum; sebagian Kecamatan Boja; sebagian Kecamatan Pageruyung; sebagian Kecamatan Gemuh; sebagian Kecamatan Weleri; sebagian Kecamatan Plantungan; sebagian Kecamatan Kaliwungu; dan sebagian Kecamatan Sukorejo.

c) Kawasan Peruntukan Pertanian;

Kawasan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan perkebunan; dan kawasan peternakan.

Kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar meliputi: sebagian Kecamatan Rowosari; sebagian Kecamatan Kangkung; sebagian Kecamatan Cepiring; sebagian Kecamatan Patebon; sebagian Kecamatan Kendal; sebagian Kecamatan Brangsong; sebagian Kecamatan Kaliwungu; sebagian Kecamatan Ngampel; sebagian Kecamatan Pegandon; sebagian Kecamatan Gemuh; sebagian Kecamatan Weleri; sebagian Kecamatan Ringinarum; sebagian Kecamatan Sukorejo; sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Singorojo; sebagian Kecamatan Boja; sebagian Kecamatan Patean; sebagian Kecamatan Plantungan; sebagian kecamatan Kaliwungu Selatan; dan sebagian kecamatan Pageruyung.

Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 5.723 (lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektar meliputi: sebagian Kecamatan Rowosari; sebagian Kecamatan Kangkung; sebagian Kecamatan Cepiring; sebagian Kecamatan Patebon; sebagian Kecamatan Kendal; sebagian Kecamatan Brangsong; sebagian Kecamatan Kaliwungu; sebagian Kecamatan Ngampel; sebagian Kecamatan Ringinarum; sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan; sebagian Kecamatan Gemuh; dan sebagian Kecamatan Pegandon.

Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 20.135 (dua puluh ribu seratus tiga puluh lima) hektar meliputi sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Boja; sebagian Kecamatan Singorojo; sebagian Kecamatan Patean; sebagian Kecamatan Pageruyung; sebagian Kecamatan

Plantungan; sebagian Kecamatan Sukorejo; dan sebagian Kecamatan Ngampel.

Kawasan peternakan menyebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal. Adapun komoditas dari industri peternakan yang ada di Kabupaten Kendal adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, kelinci, itik, dan ayam ras.

d) Kawasan Peruntukan Perikanan;

Rencana pengembangan kawasan perikanan terdiri dari kawasan pengembangan perikanan tangkap; kawasan pengembangan budidaya air payau; kawasan pengembangan budidaya air tawar; dan kawasan pengembangan budidaya laut.

Kawasan pengembangan perikanan tangkap terdiri dari perikanan tangkap di laut yang memanfaatkan potensi perairan pantai utara; dan perikanan tangkap di perairan umum yang memanfaatkan potensi waduk, rawa, sungai, dan embung.

Kawasan pengembangan budidaya air payau dengan luas kurang lebih 3.531 (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar meliputi Kecamatan Rowosari; Kecamatan Kangkung; Kecamatan Cepiring; Kecamatan Patebon; Kecamatan Kendal; Kecamatan Brangsong; dan Kecamatan Kaliwungu. Sementara itu kawasan pengembangan budidaya air tawar hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan pengembangan budidaya laut dengan jarak sampai dengan 4 (empat) mil laut, sepanjang pesisir utara meliputi Kecamatan Kaliwungu; Kecamatan Brangsong; Kecamatan Kendal; Kecamatan Patebon; Kecamatan Cepiring; Kecamatan Kangkung; dan Kecamatan Rowosari.

e) Kawasan Peruntukan Pertambangan;

Pengembangan kawasan pertambangan terdiri atas mineral; minyak dan gas bumi; panas bumi;

Kawasan pertambangan mineral terdiri atas mineral logam; mineral bukan logam; dan batuan. Kawasan pertambangan mineral logam berada di kawasan Pantai Muara Desa Pidodo Kulon Kecamatan Patebon dan di kawasan Pantai Ngebom Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu. Kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi Kecamatan Pegandon Kecamatan Weleri; Kecamatan Pageruyung; Kecamatan Patean; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Singorojo; dan sepanjang Sungai Bodri. Adapun Kawasan pertambangan batuan meliputi Kecamatan Limbangan;

Kecamatan Boja; Kecamatan Ngampel; Kecamatan Brangsong; Kecamatan Kaliwungu Selatan; Kecamatan Kaliwungu; Kecamatan Weleri; Kecamatan Pageruyung; Kecamatan Sukorejo; sepanjang Sungai Bodri.

Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berskala kecil berada di Kecamatan Gemuh. Sedangkan Kawasan Pertambangan Panas bumi berada di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Gunung Ungaran.

f) Kawasan Peruntukan Industri;

Pengembangan kawasan industri terdiri atas industri besar; industri sedang; dan industri kecil atau mikro. Kawasan industri besar dan industri sedang berada di Kecamatan Kaliwungu. Pengembangan kawasan industri besar dan industri sedang memiliki luas total kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar. Sedangkan kawasan industri kecil atau mikro berada di seluruh kecamatan.

g) Kawasan Peruntukan Pariwisata;

Pengembangan kawasan pariwisata difokuskan kepada pariwisata budaya; pariwisata alam; dan pariwisata buatan.

Kawasan pariwisata budaya meliputi Makam Pangeran Juminah dan Makam Sunan Katong berada di Kaliwungu Selatan; Makam Nyai Dapu dan Makam Sunan Bromo berada di Kecamatan Boja; Situs Batu Seloarjo dan Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan; dan Goa Maria berada di Kecamatan Weleri.

Kawasan pariwisata alam meliputi Pantai Sendangkulon, Pantai Jungsemi, dan Pantai Tanjungmojo berada di Kecamatan Kangkung; Pantai Sendangsikucing berada di Kecamatan Rowosari; Wana Wisata berada di Kecamatan Ringinarum; Curug Semawur, Tuk Air Hangat Tirtomoyo, dan Agrowisata Ngebruk berada di Kecamatan Patean; Curug Sewu berada di Kecamatan Patean; Goa Kiskendo dan Bendung Singorojo berada di Kecamatan Singorojo; Air Panas Gonoharjo, Goa Jepang, dan Air Terjun Panglebur gongso berada di Kecamatan Limbangan; dan Pantai Muara Kencan di Kecamatan Patebon.

Kawasan pariwisata buatan meliputi: Plantera berada di Kecamatan Patean; Agrowisata Ngadiwarno berada di Kecamatan Sukorejo; Wisata Kuliner Pemancingan berada di Kecamatan Weleri; Pantai Cahaya/Atraksi Lumba-lumba berada di Kecamatan Rowosari; dan Agrowisata Darupono, Agrowisata Kedungsuran, dan Agrowisata Jerukgiling berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan.

h) Kawasan Peruntukan Permukiman;

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perkotaan dengan luas rencana peruntukan kurang lebih 8.734 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) hektar, dan kawasan permukiman perdesaan dengan luas rencana peruntukan kurang lebih 10.132 (sepuluh ribu seratus tiga puluh dua) hektar.

Kawasan permukiman perkotaan meliputi permukiman berada di perkotaan Kendal, dan permukiman yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan berada di seluruh kecamatan.

i) Kawasan Peruntukan Pesisir;

Kawasan pesisir di Kabupaten Kendal meliputi Kecamatan Rowosari; Kecamatan Kangkung; Kecamatan Cepiring; Kecamatan Patebon; Kecamatan Kendal; Kecamatan Brangsong; dan Kecamatan Kaliwungu.

j) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan;

Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi Komando Distrik Militer (Kodim) 0715 yang berada di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal, Komando Daerah Militer (Kodam) 408 yang berada di Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri, dan Kepolisian Resor (Polres) Kendal yang berada di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal.

2) Kawasan Lindung.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Kendal terdiri atas:

a) Hutan Lindung;

Hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.704 (seribu tujuh ratus empat) hektar meliputi Kecamatan Limbangan; Patean; Plantungan; Singorojo; Sukorejo, dan Boja.

b) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya;

Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya berupa kawasan resapan air. Kawasan resapan air di Kabupaten Kendal meliputi sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Boja; sebagian Kecamatan Singorojo; sebagian Kecamatan Patean; sebagian Kecamatan Sukorejo; sebagian Kecamatan Plantungan; dan Kecamatan Pageruyung.

c) Kawasan Perlindungan Setempat;

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai; kawasan sempadan sungai; kawasan sekitar danau/waduk; kawasan terbuka hijau perkotaan; kawasan dengan kemiringan 40 % (empat puluh persen) atau lebih; kawasan sempadan rel kereta api.

Kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi pantai meliputi Kecamatan Rowosari; Kecamatan Kangkung; Kecamatan Cepiring; Kecamatan Patebon; Kecamatan Kendal; Kecamatan Brangsong; dan Kecamatan Kaliwungu.

Kawasan sempadan sungai meliputi sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan (sungai bertanggung dan sungai tidak bertanggung); sempadan sungai di luar kawasan perkotaan; sempadan sungai di luar permukiman; dan sempadan sungai di dalam permukiman;

Kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota berfungsi untuk menjaga fungsi hidrologis, memelihara keindahan, mikrolimat, ekosistem, dan habitat fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luas 2.683 (dua ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan perkotaan.

Kawasan dengan kemiringan 40% (empat puluh persen) atau lebih meliputi sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Plantungan; dan sebagian Kecamatan Sukorejo.

Kawasan sempadan rel kereta api ditetapkan 6 (enam) meter dari batas luar pengamanan rel kereta api meliputi: sebagian Kecamatan Weleri; sebagian Kecamatan Ringinarum; sebagian Kecamatan Gemuh; sebagian Kecamatan Pegandon; sebagian Kecamatan Ngampel; sebagian Kecamatan Brangsong; sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan sebagian Kecamatan Kaliwungu.

d) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya;

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kawasan suaka alam; pantai berhutan bakau; dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan suaka alam di Kabupaten Kendal adalah kawasan Suaka Alam Pagerwunung Darupono berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar.

Kawasan pantai berhutan bakau meliputi Kecamatan Rowosari; Kecamatan Kangkung; Kecamatan Cepiring; Kecamatan Patebon; Kecamatan Kendal; Kecamatan Brangsong; dan Kecamatan Kaliwungu.

Kawasan cagar budaya yaitu situs Seloarjuno berada di Kecamatan

Limbangan; tugu gerbang Kabupaten Lama berada di Kecamatan Kaliwungu; tugu gerbang Pasarean berada di Kecamatan Kendal; dan Candi Gunung Gentong berada di Kecamatan Limbangan.

e) Kawasan Lindung Geologi;

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air. Kawasan ini meliputi kawasan imbuhan air, dan kawasan sempadan mata air.

Kawasan imbuhan air dengan luas kurang lebih 17.876 (tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektar berada di sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Boja; dan sebagian Kecamatan Singorojo.

Kawasan sempadan mata air ditetapkan selebar 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air meliputi sebagian Kecamatan Boja; sebagian Kecamatan Plantungan; sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Sukorejo; sebagian Kecamatan Patean; dan sebagian Kecamatan Singorojo.

f) Kawasan Rawan Bencana;

Berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal, terdapat 8 ancaman bencana yang terdapat di Kabupaten Kendal. Delapan ancaman bencana tersebut adalah banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran gedung dan pemukiman, cuaca ekstrim, gelombang tinggi dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta gempa bumi.

Kawasan yang masuk dalam daerah rawan banjir adalah Kecamatan Kaliwungu (daerah muara atau hilir Kali Aji pada Desa Mororejo dan muara Kali Waridin pada Desa Wonorejo), Kecamatan Brangsong (daerah hilir Sungai Waridin pada Desa Turunrejo), Kecamatan Kota Kendal (daerah hilir Kali Blorong pada Desa Bandengan dan Banyutowo, bagian hilir Kali Kendal pada daerah Bandengan dan Karang Sari), Kecamatan Patebon (daerah hilir Kali Buntu pada Desa Wonosari serta daerah hilir Kali Bodri pada Desa Pidodo Wetan dan Pidodo Kulon), Kecamatan Rowosari (daerah hilir Kali Kutho pada Desa Jatipurwo, Gempolsewu dan Rowosari), dan Kecamatan Kangkung (daerah hilir Kali Blukar pada Desa Jungsemi, Kangkung, Tanjungmojo dan Rejosari serta daerah hilir Kali Damar pada Desa Sendang Dawung, Laban dan Karangmalang Wetan.

Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Kendal berdasarkan data dan pemetaan dari dokumen RPB terdapat di 286 desa. Potensi bahaya kekeringan yang dimaksud adalah jumlah ketersediaan air untuk

kebutuhan hidup manusia, dan biota lain termasuk tanaman dan ternak dimana jika keadaan kering bertambah panjang waktunya akan menimbulkan kerugian sedikitnya harta benda patut diwaspadai dan dilakukan tindakan penanganan. Kekeringan yang terjadi biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik yaitu; bentuk lahan, curah hujan, kedalaman air tanah, dan tekstur tanah bagian atas yg berpengaruh terhadap daya meresapkan air hujan..

Kawasan rawan bencana longsor ada di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kendal. Dalam dokumen RPB disebutkan ada 135 desa yang berpotensi rawan longsor atau gerakan tanah. Gerakan tanah yang terjadi pada daerah bahaya tanah longsor tinggi berupa gerakan tanah dangkal dengan kedalaman bidang gelincir sekitar 1-3 m, kemiringan lereng 50o - 70o. Gerakan tanah yang terjadi karena kondisi litologi berupa tanah pelapukan dari breksi vulkanik yang matriksnya tersusun oleh lempung pasir yang memiliki sifat semi impermeable sehingga apabila hujan dengan intensitas yang tinggi air permukaan akan menggenangi pada tanah pelapukan dan akan tertahan pada bidang kontak antara tanah pelapukan dan batuan breksi vulkanik di bawahnya. Akibat tekanan air pada tanah meningkat menyebabkan kuat geser mengecil dan menyebabkan tanah pelapukan menjadi labil dan cenderung bergerak ke lereng bagian bawah.

Potensi bencana berikutnya adalah kebakaran gedung dan permukiman. Kebakaran gedung dan permukiman didefinisikan sebagai bentuk kebakaran yang diakibatkan oleh nyala api yang sukar dikendalikan pada tempat yang tidak dikehendaki sehingga merugikan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk peta bahaya kebakaran gedung dan permukiman adalah frekuensi jumlah kejadian kebakaran, nilai kerugian ekonomi (miliar rupiah), jumlah korban meninggal dan jumlah korban luka berat. Semua desa di Kabupaten Kendal memiliki potensi terjadi bencana kebakaran gedung dan permukiman.

Pemetaan bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Kendal menggunakan parameter yang sudah ditetapkan oleh BNPB melalui Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Pada peta zonasi bencana daerah rawan cuaca ekstrim disusun berdasarkan parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, curah hujan tahunan yang divalidasi dengan data kejadian sebagai indikatornya. Dari parameter tersebut dapat disimpulkan, bahwa semakin luas area yang masuk dalam zonasi daerah rawan cuaca ekstrim, semakin besar ancaman terhadap bahaya cuaca ekstrim di wilayah tersebut. Wilayah rawan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Kendal berdasarkan

data dari BPBD meliputi 203 desa.

Kawasan rawan bencana gelombang tinggi dan abrasi (sebagian Kecamatan Rowosari; sebagian Kecamatan Kangkung; sebagian Kecamatan Cepiring; sebagian Kecamatan Patebon; sebagian Kecamatan Kendal; sebagian Kecamatan Brangsong; dan sebagian Kecamatan Kaliwungu). Adapun desa-desa tersebut adalah Turunrejo, Purwokerto, Juwiring, Kaliayu, Kalirandu Gede, Korowelang Kulon, Korowelang Anyar, Margorejo, Sidomulyo, Mororejo, Wonorejo, Karangmalang Wetan, Tanjungmojo, Kadilangu, Kalirejo, Kalibuntu Wetan, Banyutowo, Karang Sari, Wonosari, Kartikajaya, Pidodo Wetan, Pidodo Kulon, Gempolsewu, dan Sendang Sikucing.

Potensi bencana berikutnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan berdampak negatif bagi tumbuhan/tanaman, sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Dampak negatif kebakaran hutan dan lahan tidak hanya bagi hutan dan lahannya itu sendiri, tetapi lebih jauh akan mengganggu kehidupan dan proses pembangunan. Kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah/dikendalikan, karena secara umum sudah diketahui bahwasannya kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi saat musim kemarau. Oleh karena itu, pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak hanya tertuju pada usaha pemadaman apinya saja, tetapi upaya pencegahan yang terencana dan berkelanjutan perlu diupayakan secara maksimal, baik saat musim kemarau ataupun saat musim penghujan. Desa di Kabupaten Kendal yang memiliki potensi bencana ini berjumlah 218 desa.

Potensi bencana terakhir adalah gempa bumi. Berdasarkan peta bahaya gempabumi, maka diindikasikan wilayah yang rawan bencana gempabumi di Kabupaten Kendal adalah di semua desa (286 desa).

Berdasarkan penilaian dan identifikasi kebencanaan di Kabupaten Kendal, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi bencana di Kabupaten Kendal dibagun atas tiga tingkat ancaman yaitu:

Tingkat ancaman rendah berpotensi terjadi pada ancaman gelombang ekstrim-abrasi;

Tingkat ancaman sedang berpotensi terjadi pada ancaman banjir, tanah longsor;

Tingkat ancaman tinggi berpotensi terjadi pada ancaman banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kebakaran gedung dan permukiman dan gempabumi.

g) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Kendal berupa kawasan perlindungan plasma nutfah. Kawasan perlindungan plasma nutfah terdiri atas kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan, dan kawasan perlindungan plasma nutfah di lautan.

Luas Kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan dengan luas kurang lebih 1.736 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam) hektar meliputi Kecamatan Limbangan; Kecamatan Plantungan; Kecamatan Sukorejo; dan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

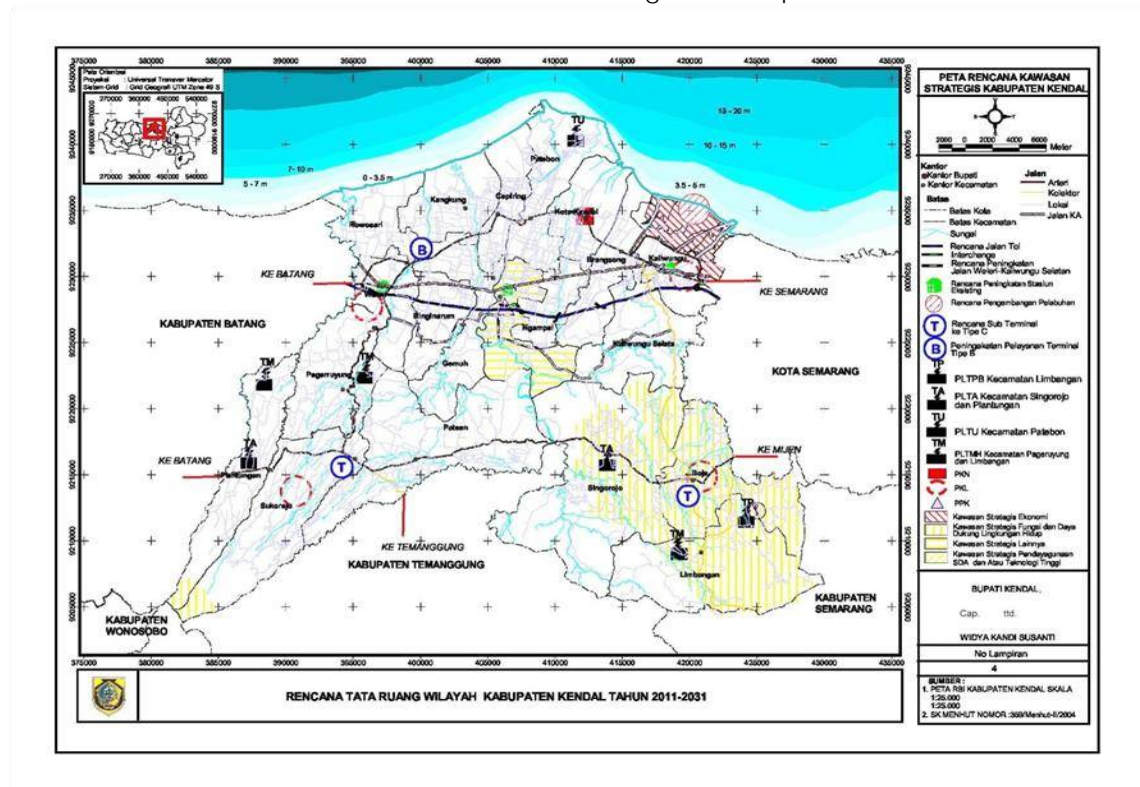
Kawasan perlindungan plasma nutfah di lautan meliputi Kecamatan Rowosari; Kecamatan Kangkung; Kecamatan Cepiring; Kecamatan Patebon; Kecamatan Kendal; Kecamatan Brangsong; dan Kecamatan Kaliwungu.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa Kabupaten Kendal merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi. Selain itu di dalam Perda tersebut juga direncanakan pengembangan sistem transportasi laut dan Kendal sebagai kawasan strategis ekonomi.

Potensi pengembangan wilayah dapat diketahui dari Rencana Tata dan Ruang Wilayah Kabupaten Kendal. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal mengklasifikasikan rencana pola ruang di Kabupaten Kendal kedalam dua kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Gambar 2.3.
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kendal



Sumber: RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031

Dari peta di atas, dapat dilihat bahwa ke depan rencananya akan terdapat kawasan yang akan dikembangkan di Kabupaten Kendal. Kawasan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Kawasan Strategis Ekonomi. Kawasan ini berada di Kecamatan Kaliwungudengan luas kurang lebih 1.064 (seribu enam puluh empat) hektar, meliputi: Desa Mororejo; Desa Wonorejo; Desa Krajan Kulon; dan Desa Kutoharjo.
- b) Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. Kawasan ini berada di kawasan panas bumi Gunung Ungaran.

Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini memiliki luas kurang lebih 17.876 (tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektar. Kawasan ini meliputi: Kecamatan Limbangan; dan Kecamatan Boja.

2.1.3. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2016 tercatat sebanyak 949.682 jiwa, terdiri atas 481.382 (50,68%) laki-laki dan 468.300 (49,31%) perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja dengan jumlah penduduk 76.780 (8,08%). Sedangkan Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 29.425 jiwa (3,10%).

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin,
Tahun 2015

No	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		Laki - laki	Perempuan	
1	Plantungan	14.977	14.448	29.425
2	Sukorejo	30.879	30.412	61.291
3	Pageruyung	16.435	16.145	32.580
4	Patean	25.093	24.766	49.859
5	Singorojo	24.968	24.653	49.621
6	Limbangan	16.328	16.122	32.450
7	Boja	38.331	38.449	76.780
8	Kaliwungu	32.045	30.735	62.780
9	Kaliwungu Selatan	24.073	23.668	47.741
10	Brangsong	23.922	23.277	47.199
11	Pegandon	17.938	16.766	34.704
12	Ngampel	16.665	15.663	32.298
13	Gemuh	23.921	22.602	46.523
14	Ringinarum	17.402	15.227	32.679
15	Weleri	29.135	28.511	57.646
16	Rowosari	23.764	23.509	47.273
17	Kangkung	21.979	22.134	44.113
18	Cepiring	24.805	23.859	48.664
19	Patebon	29.783	28.450	58.233
20	Kota Kendal	28.939	28.884	57.823
Jumlah		481.382	468.300	949.682

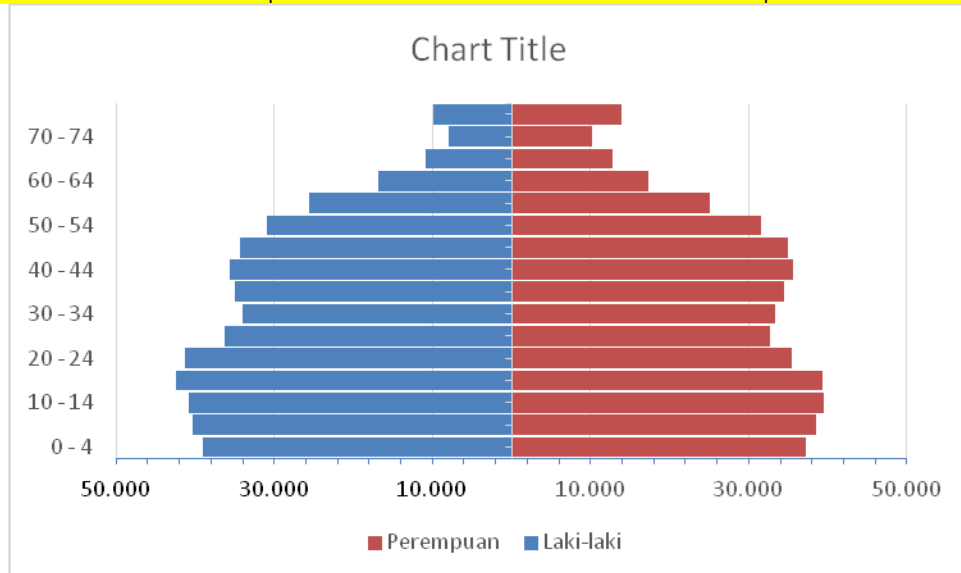
Sumber: Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kendal sebesar 960 jiwa per km². Penyebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Wilayah kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi adalah Kecamatan Kendal (2.021 jiwa/km²). Sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Singorojo (422 jiwa/km²).

Jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2015 (terbanyak berada pada strata 15 - 19 tahun, dengan jumlah jiwa 81.793. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada strata 70-74 tahun berjumlah 18.083 jiwa. Dilihat dari piramida penduduk Kabupaten Kendal maka kelompok umur usia produktif lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.

Gambar 2.4.

Komposisi Penduduk Kabupaten Kendal Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2016

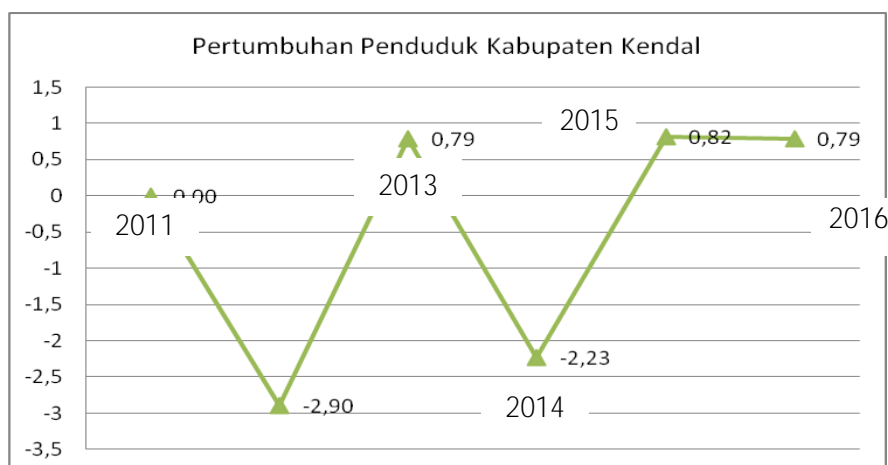


Sumber: Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2017

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang meningkat meskipun angkanya fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015, yakni dari posisi negatif (-2,23%) pada tahun 2015 menjadi 0,82% pada tahun 2015.

Gambar 2.5.

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2012-2016



Sumber: Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2017 diolah 2012

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Kendal yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah "potret kehidupan" masyarakat Kabupaten Kendal serta analisis dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

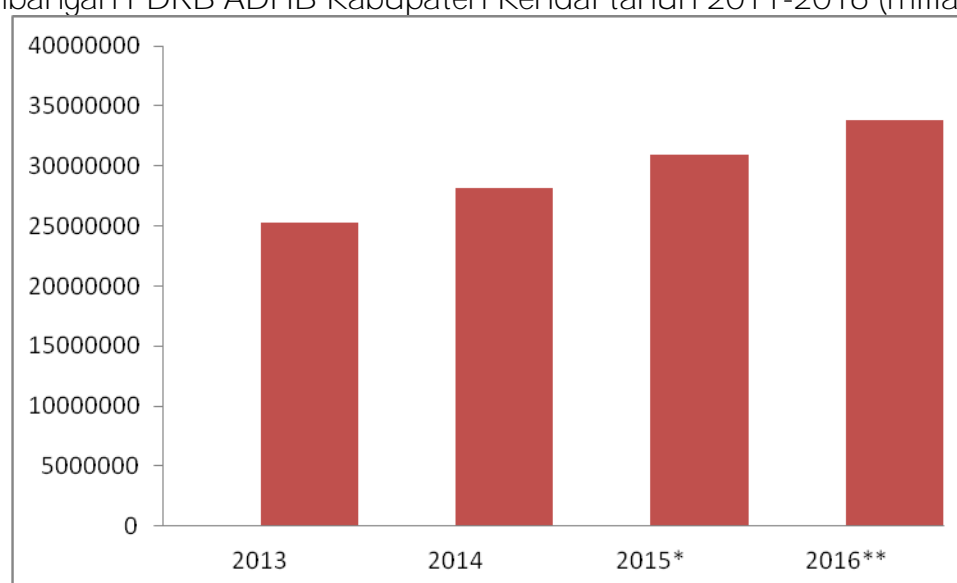
Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Kendal utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Kendal. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Kendal antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, hingga angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

a. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2011 PDRB ADHB sebesar Rp 21.121,51 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp. 33.776,40 miliar pada tahun 2016 (angka sangat sementara). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.6 di bawah ini.

Gambar 2.6.
Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Kendal tahun 2011-2016 (miliar rupiah)



Keterangan:

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2017

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kendal adalah sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lebih lengkapnya distribusi masing-masing sektor dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga berlaku
Kabupaten Kendal Tahun 2013-2016 (%)

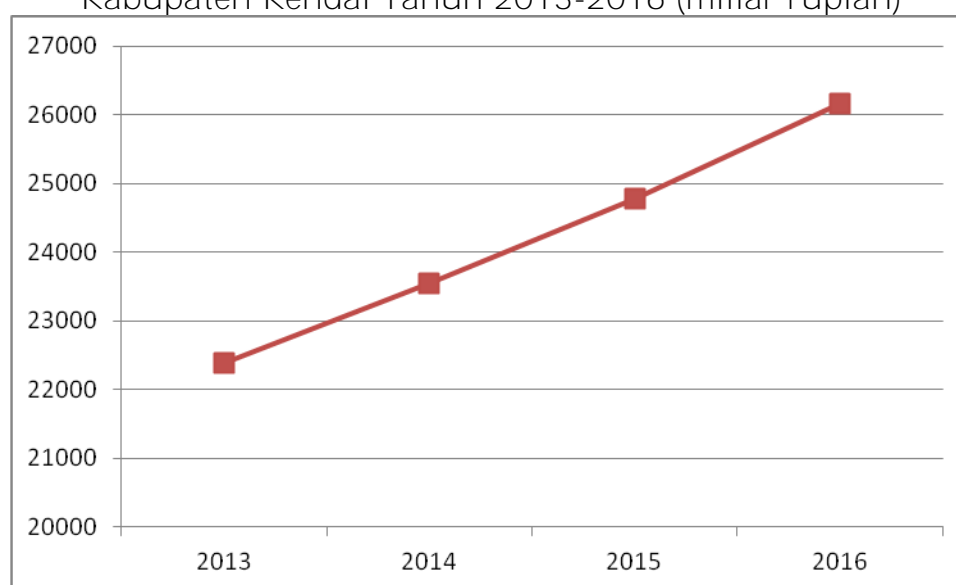
No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,13	21,52	21,21	20,37
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,40	0,45	0,58	1,06
3.	Industri Pengolahan	40,82	41,03	41,19	41,45
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,19	0,18	0,17	0,18
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07
6.	Konstruksi	6,54	6,49	6,55	6,51
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,10	12,56	12,39	12,29
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,85	1,84	1,94	1,89
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	3,05	3,01	2,23	3,32
10.	Informasi dan Komunikasi	3,20	3,01	2,78	2,80
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,00	2,02	2,03	2,09
12.	Real Estate	0,78	0,78	0,91	0,90
13.	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,27	0,29

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,23	2,22	2,18	2,16
15.	Jasa Pendidikan	2,45	2,58	2,54	2,61
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,71	0,72	0,74
17.	Jasa Lainnya	1,22	1,27	1,22	1,27

Sumber: *Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2017*

Sementara itu perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kendal dalam kurun waktu lima tahun (2013-2016) trennya juga meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2011 PDRB ADHK tahun 2010 Kabupaten Kendal adalah Rp 20.032,43 miliar, dan meningkat menjadi Rp 26.159,09 miliar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 2.7 di bawah ini:

Gambar 2.7.
Perkembangan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010
Kabupaten Kendal Tahun 2013-2016 (miliar rupiah)

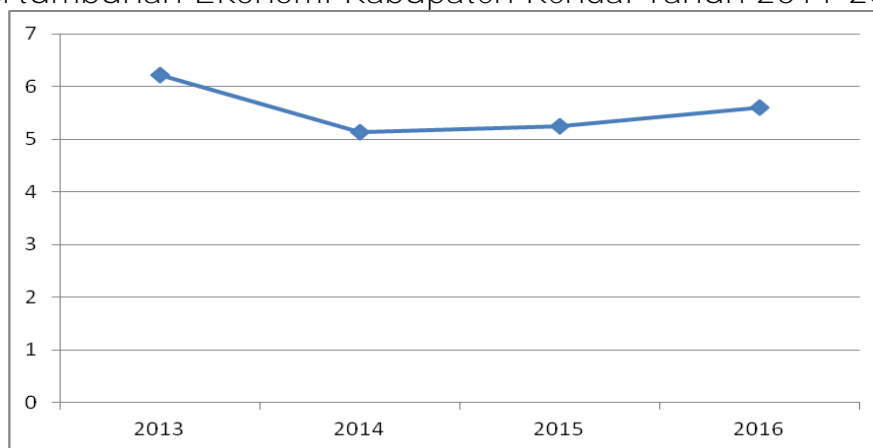


Sumber: *Kabupaten Kendal Dalam Angka 2017*

b. Pertumbuhan Ekonomi

Dari data di atas maka dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal sejak tahun 2011 sampai 2016 cenderung mengalami penurunan. Jika pada tahun 2011 angkanya sebesar 6,57%, pada tahun 2016 turun menjadi 5,6%.

Gambar 2.8.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

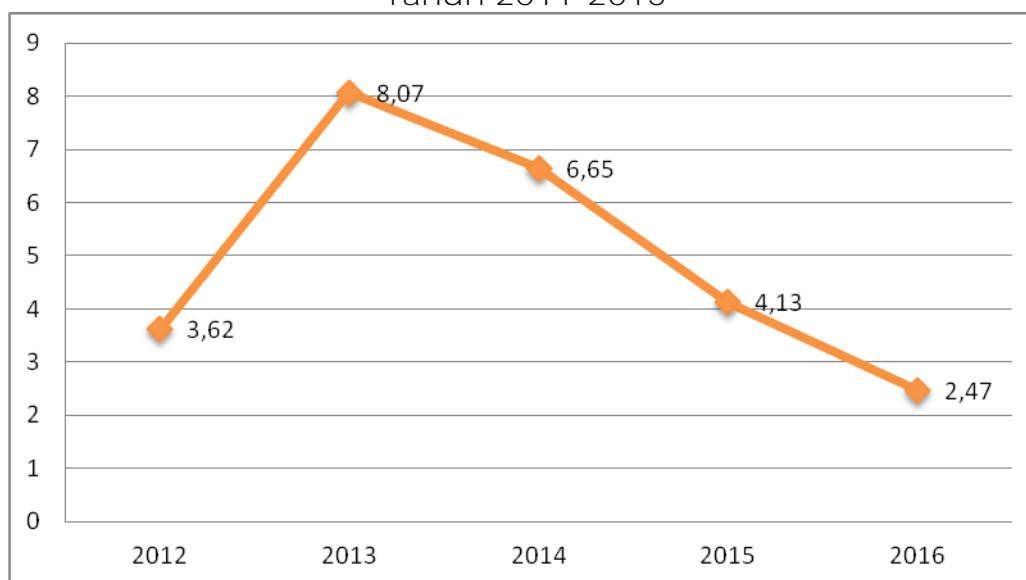


Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2017

c. Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Kendal menunjukkan tren menurun. Inflasi tahun 2016 sebesar 2,47% (dua koma empat puluh tujuh persen), angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada angka 4,13% (empat koma tiga belas persen). Penurunan angka inflasi tersebut diantaranya dikarenakan stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat, biaya kesehatan, biaya transportasi, serta penurunan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Perkembangan laju inflasi dari tahun 2012-2016 digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.9.
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015



Sumber: <https://jateng.bps.go.id>

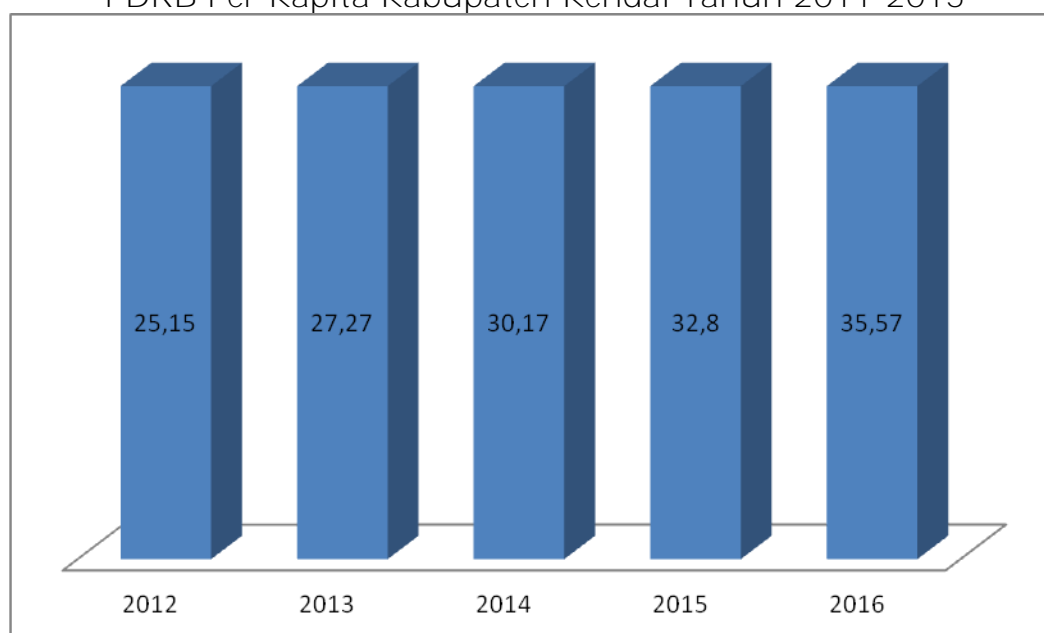
d. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang)

penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan atas harga konstan dalam kurun 2012-2016 naik dari 25,15 juta rupiah per penduduk menjadi 35,57 juta rupiah per penduduk di tahun 2017. Secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut.

Gambar 2.10.
PDRB Per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



Sumber: Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2017 diolah

e. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di wilayah tersebut.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami penurunan dari 11,80% (sebelas koma delapan puluh persen) pada tahun 2014 menjadi 11,10 (sebelas koma sepuluh persen) pada tahun 2017. Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal selengkapnya dapat dilihat Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

Keterangan	Data Kemiskinan						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin	128584	121241	117748	110484	109270	107810	106070
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	234475	253275.66	275016	289485	301449	323078	335497
Persentase Penduduk Miskin (%)	14.26	13.17	12.68	11.80	11.62	11.37	11.10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2.21	1.59	1.95	1.71	2.17	2.13	1.69
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.59	0.30	0.46	0.39	0.57	0.61	0.39

Sumber: <https://kendalkab.bps.go.id>

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, rumah tangga miskin menggunakan sumber basis data terpadu untuk program perlindungan sosial (2015) maka rumah tangga miskin pada desil 1 dan 2 paling banyak ada di Kecamatan Sukorejo. Penduduk miskin Desil 3 paling banyak ada di Kecamatan Boja. Adapun untuk desil 4 ada di Kecamatan Kaliwungu.

Sedangkan kalau dilihat dari individu, paling banyak pada desil 1 adalah Kecamatan Plantungan. Desil 2 paling banyak ada di Kecamatan Sukorejo. Desil 3 paling banyak di Kecamatan Boja, dan desil 4 paling banyak ada di Kecamatan Brangsong.

Tabel 2.4.
Sebaran Penduduk Miskin Kabupaten Kendal Menurut Kecamatan
Berdasarkan PBDT 2015

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL
Plantungan	2.740	1.392	666	274	5.072	11.728	4.227	1.846	729	18.530
Sukorejo	2.744	1.969	1.157	613	6.483	10.941	5.663	2.914	1.646	21.164
Pagerruyung	2.327	1.451	712	335	4.825	9.104	4.178	1.927	900	16.109
Patean	2.451	1.632	810	339	5.232	9.094	4.173	1.854	756	15.877

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL
Singorojo	2.034	1.915	1.346	827	6.122	8.460	5.964	3.745	2.275	20.444
Limbangan	934	1.111	997	721	3.763	3.963	3.611	2.981	2.150	12.705
Boja	1.177	1.763	1.586	1.429	5.955	4.929	5.598	4.717	4.286	19.530
Kaliwungu	622	1.081	1.371	1.519	4.593	2.858	3.898	4.202	4.726	15.684
Kaliwungu Selatan	1.198	1.392	1.178	1.117	4.885	4.963	4.298	3.589	3.616	16.466
Brangsong	1.162	1.631	1.458	1.452	5.703	5.164	5.474	4.716	4.797	20.151
Pegandon	1.109	1.277	897	560	3.843	4.449	3.260	2.232	1.467	11.408
Ngampel	947	1.010	669	332	2.958	3.801	2.489	1.442	806	8.538
Gemuh	1.788	1.804	1.057	711	5.360	7.111	4.904	2.885	1.990	16.890
Ringinarum	1.683	1.673	835	469	4.660	6.169	4.078	2.141	1.291	13.679
Weleri	1.621	1.756	1.358	899	5.634	6.703	5.048	3.662	2.491	17.904
Rowosari	1.812	1.746	1.178	732	5.468	7.754	5.009	2.982	1.907	17.652
Kangkung	1.429	1.683	1.082	680	4.874	5.744	4.442	2.636	1.796	14.618
Cepiring	1.147	1.430	1.122	834	4.533	4.750	3.809	2.718	2.101	13.378
Patebon	981	1.300	1.263	1.107	4.651	4.459	4.495	3.719	3.414	16.087
Kota Kendal	524	633	817	983	2.957	2.520	2.396	2.530	2.814	10.260
TOTAL	30.430	29.649	21.559	15.933	97.571	124.664	87.014	59.438	45.958	317.074

Sumber: PBDT Tahun 2015

Catatan:

Desil 1: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)

Desil 2: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia)

Desil 3: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia)

Desil 4: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31% - 40% terendah di Indonesia)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Kabupaten Kendal dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

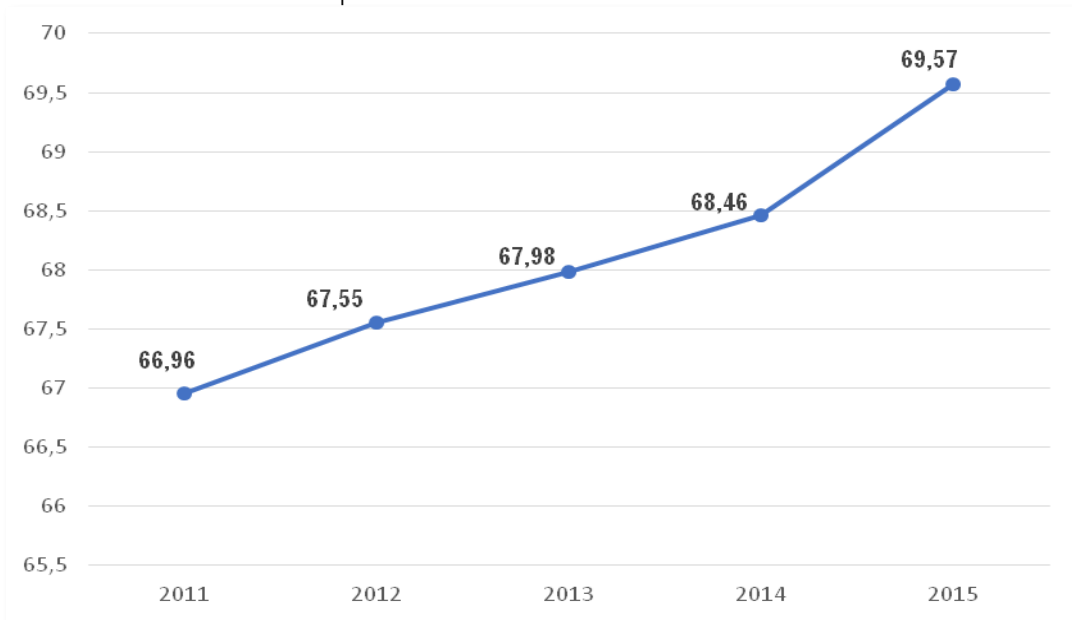
a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah.

Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, indikator dari bidang pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita.

Perkembangan IPM (dengan metode baru dari BPS) di Kabupaten Kendal dalam periode 2011-2015 menunjukkan peningkatan. Tahun 2011 IPM Kabupaten Kendal sebesar 66,96 kemudian meningkat menjadi 69,57 pada tahun 2015. Perkembangan IPM Kabupaten Kendal sejalan dengan peningkatan perkembangan IPM di Provinsi Jawa Tengah yang meningkat dari 66,08 menjadi 68,78 pada tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.11 di bawah ini

Gambar 2.11.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



Sumber: Sumber: <https://kendalkab.bps.go.id> (diolah)

b. Pendidikan

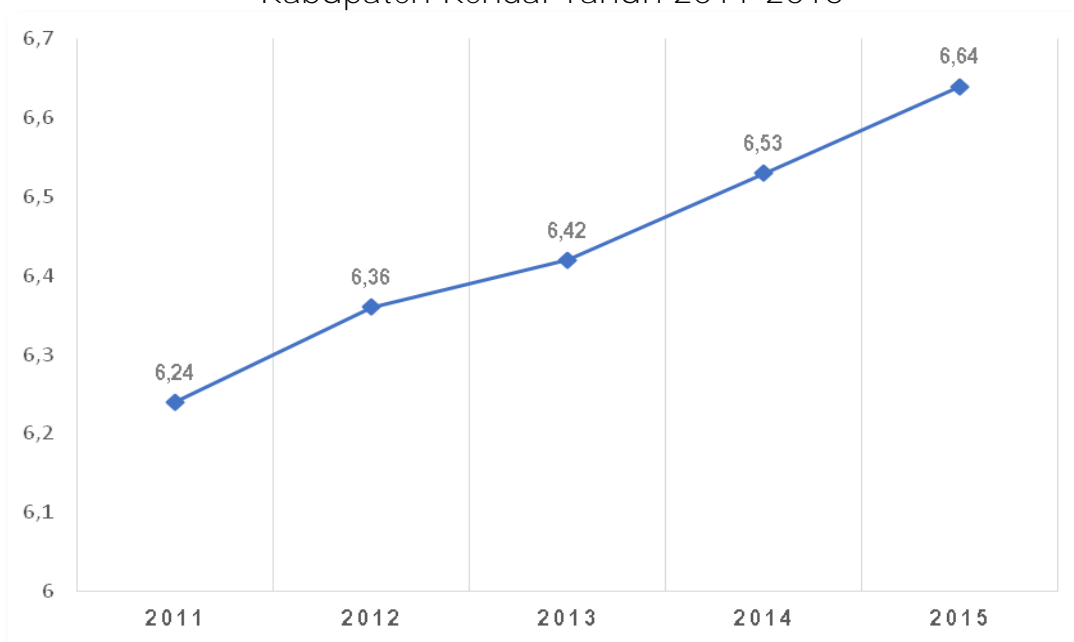
Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan.

✚ Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan tingkat rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal cenderung stabil pada 5 tahun terakhir. Peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Jika diakumulasikan, perkembangan rata-rata lama dari tahun 2011 sampai 2015 adalah sebesar 0,4. Peningkatan capaian yang tidak terlalu signifikan adalah tanda bagi pemerintah daerah bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan upaya-upaya guna meningkatkan kemampuan masyarakat supaya masyarakat dapat mendapatkan pendidikan yang layak.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.12 di bawah ini.

Gambar 2.12.
Perkembangan Rata-Rata Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



Sumber: <https://kendalkab.bps.go.id> (diolah)

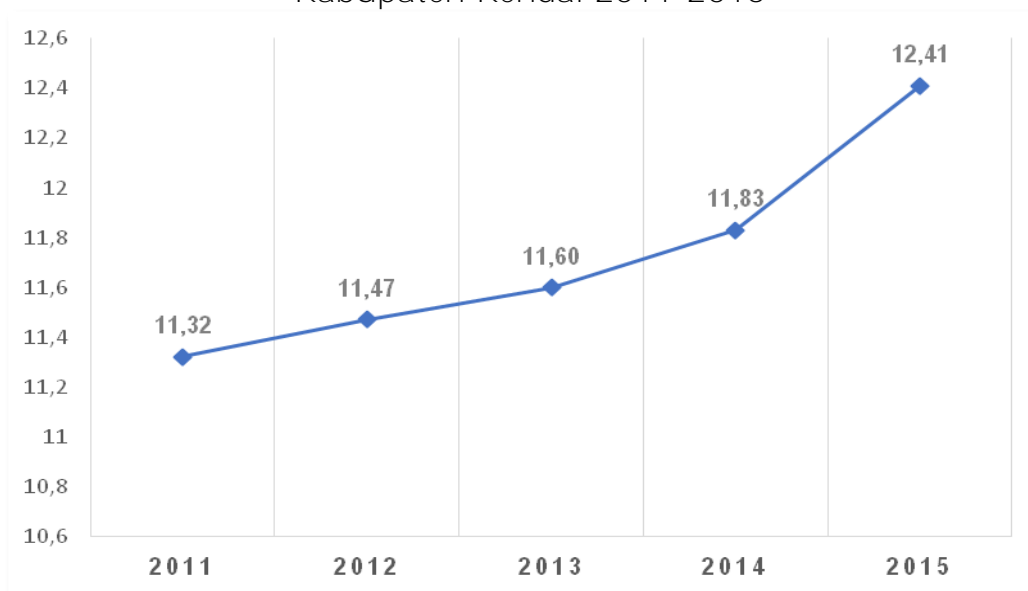
✚ Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, capaian angka HLS adalah

11,32 tahun kemudian meningkat menjadi 12,41 tahun pada tahun 2015. Tahun 2011 sampai 2012 dan 2015. Perkembangan harapan lama sekolah di Kabupaten Kendal lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.13 di bawah ini.

Gambar 2.13.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Kendal 2011-2015



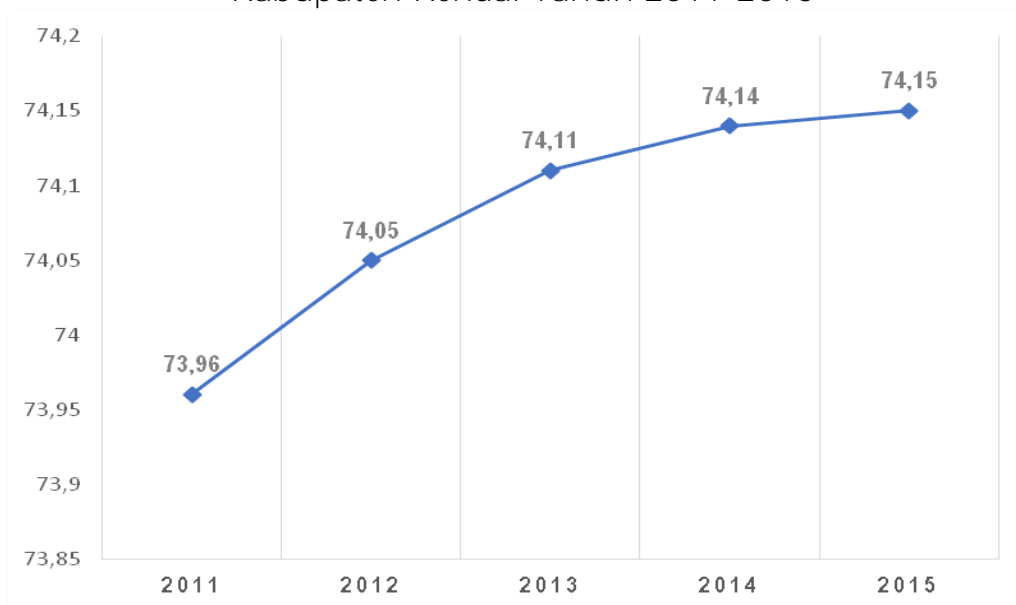
Sumber: <https://kendalkab.bps.go.id> (diolah)

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 5 tahun (2011-2015) menunjukkan peningkatan. Capaian selama lima tahun meningkat dari 73,92 tahun kemudian meningkat menjadi 74,15 tahun pada tahun 2015. AHH di Kabupaten Kendal setiap tahun capaiannya selalu di atas capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 2.14 di bawah ini.

Gambar 2.14.
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



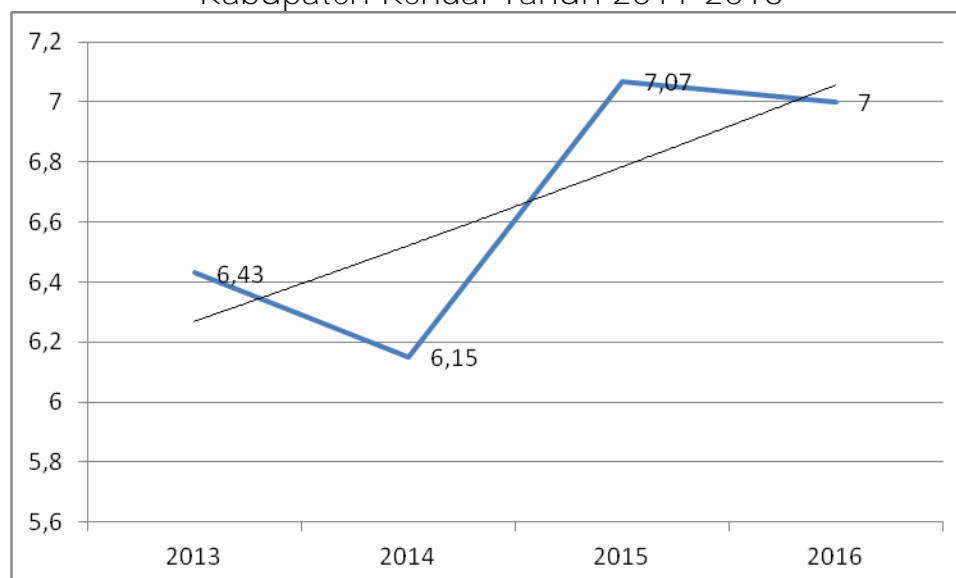
Sumber: <https://kendalkab.bps.go.id> (diolah)

d. Ketenagakerjaan

Pada fokus kesejahteraan masyarakat di bidang ketenagakerjaan akan menyoroti perihal pengangguran terbuka. Pengangguran atau tuna karya adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Persentase pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal, selama periode 2011-2016 kondisinya fluktuatif dengan tren negatif karena meningkat. Kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kondisi tahun 2 tahun terakhir yang persentasenya naik cukup signifikan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2016 persentase TPT di Kabupaten Kendal adalah yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 7%.

Gambar 2.15.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal

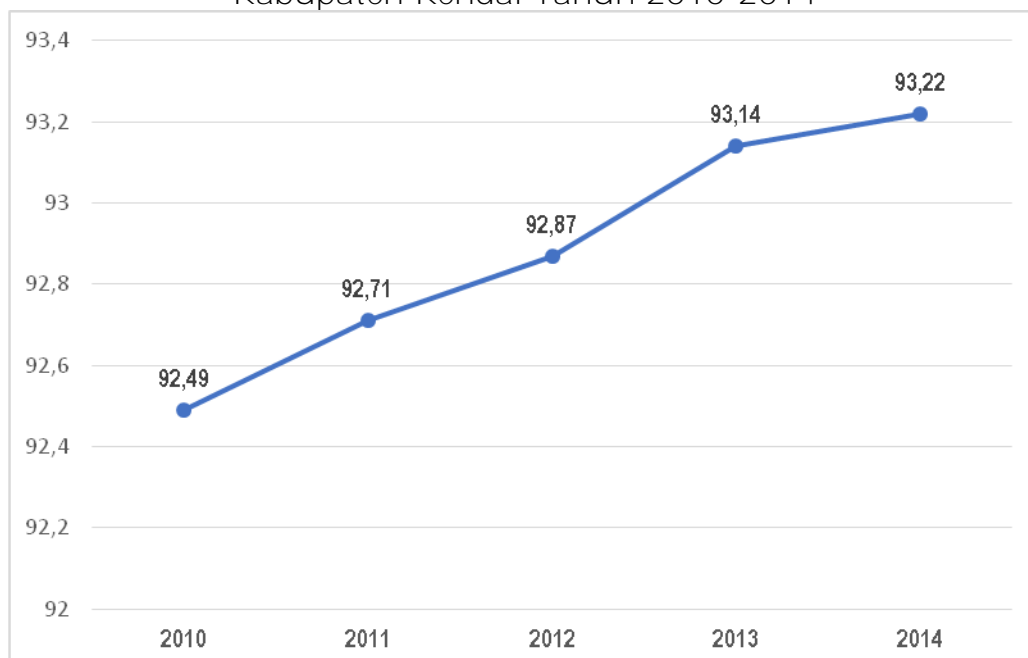
e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian penuh kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan esensi yang selalu diperjuangkan ditengah masih adanya ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan. Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, hal ini dampak dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kendal yang masih belum optimal, masih saja percepatan pembangunan untuk perempuan masih lebih lambat dari laki-laki. Berbagai bentuk hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses pembangunan bagi perempuan harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada, dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

✚ Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG mendekati angka 100. Tahun 2011-2015 capaian IPG Kabupaten Kendal mengalami kenaikan dari 92,49 menjadi 93,22 pada Tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.16 di bawah ini.

Gambar 2.16.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014

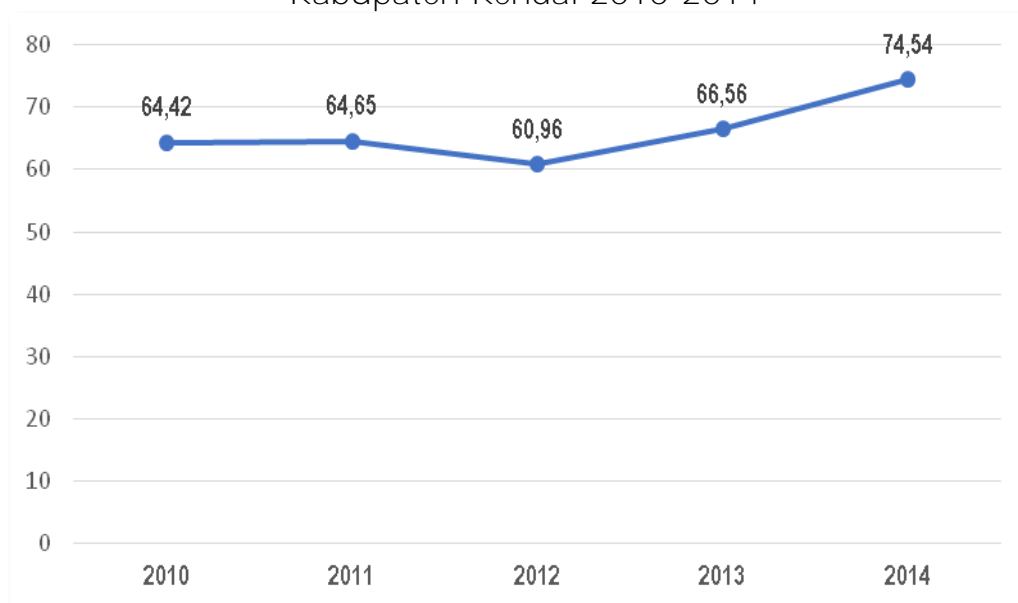


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

✚ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan angka pembentuk IPG yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Pada kurun waktu 2010-2014 Kabupaten Kendal mengalami peningkatan capaian IDG yang cukup signifikan yaitu sebesar 64,42 menjadi 74,54 pada tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.17 di bawah ini.

Gambar 2.17.
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Kendal 2010-2014



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2015

2.2.3. Fokus Seni dan Budaya

Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama merupakan aspek yang fundamental dan berperan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan manusia yang diejawantahkan dalam wujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup masyarakat. Pada titik ini, nilai-nilai budaya bangsa yang mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945 perlu direvitalisasi ke dalam suatu pranata-pranata yang aplikatif sehingga secara substansial mampu menaungi sekaligus menjadi pijakan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam prakteknya selama ini, ternyata nilai-nilai ideologis bangsa ini masih belum terimplementasikan secara utuh dan nyata. Lebih dari itu, sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan yang mengacu kepada karakteristik dan spesifikasi daerah, serta dalam kerangka memperkuat kohesi dan ketahanan sosial yang menyangkut interaksi antar individu atau kelompok masyarakat dapat dirasakan adanya kecenderungan terabaikannya budaya daerah yang memuat nilai-nilai, sikap, perilaku, kebiasaan (*custom*), tradisi, adat istiadat, dan bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya.

a. Kebudayaan

Kelompok seni di Kabupaten Kendal jumlahnya cukup banyak, jumlahnya pada tahun 2015 sebanyak 602 kelompok. Jumlah kelompok seni yang begitu banyak belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai, khususnya adalah tersedianya gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya, sektor kebudayaan sudah didukung dengan keberadaan gedung kesenian yang ada. Jumlah gedung kesenian di Kabupaten Kendal hanya ada 1 unit.

b. Pemuda dan Olahraga

Prestasi keolahragaan di Kabupaten Kendal memang belum begitu bagus di wilayah Jawa Tengah. Pada pelaksanaan Pekan Olahraga daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, peringkat Kabupaten Kendal di urutan 23 dari 35 Kabupaten Kota dengan perolehan 5 medali emas, 5 medali perak, dan 20 medali perunggu. Oleh karena itu upaya pembinaan terhadap berbagai cabang olahraga perlu ditingkatkan. Pembinaan tersebut bisa dilakukan melalui klub-klub olahraga yang ada. Tahun 2015 organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Kendal sebanyak 29. Sedangkan sarana prasarana gedung olahraga maupun lapangan yang ada sebanyak 665 unit.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal, baik pada urusan pelayanan wajib dasar dan non dasar, urusan pilihan serta penunjang urusan. Berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini.

2.3.1. Pelayanan Urusan Wajib Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Kendal memang sudah mulai ada perbaikan, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas wilayah, penyediaan perumahan yang layak, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat hingga sosial. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib dasar pemerintah kabupaten hingga saat ini.

a. Pendidikan

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan suatu daerah. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anak-anak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan anak sejak dini sehingga tumbuh kembang anak dan perkembangan emosional dan juga psikomotorik anak menjadi terpanut dan terbina.

Kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar, yaitu APK PAUD usia 0-6 tahun dan APK PAUD usia 0-6 tahun. APK PAUD Usia 4-6 tahun di Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan. Jika pada tahun 2011 hanya sebesar 49,24% saja, maka pada tahun 2015 sudah mampu mencapai 52,92%. Demikian halnya APK PAUD usia 0-6 tahun juga mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebesar 31,14% meningkat menjadi 38,17% pada tahun 2015.

Mendukung pelaksanaan dan kesuksesan pendidikan anak usia dini, hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana belajar mengajar. Jumlah TK/RA/BA pada tahun 2011 di Kabupaten Kendal sebanyak 471 lembaga, meningkat menjadi 530 lembaga pada tahun 2015. Jumlah murid TK/RA/BA pada tahun 2011 sebanyak 23.567 orang, meningkat menjadi 25.307 orang pada tahun 2015. Sementara itu, jumlah guru TK/RA/BA mengalami penurunan yang mana pada tahun 2011 sebanyak 1.927 orang menjadi 1.429 di tahun 2015.

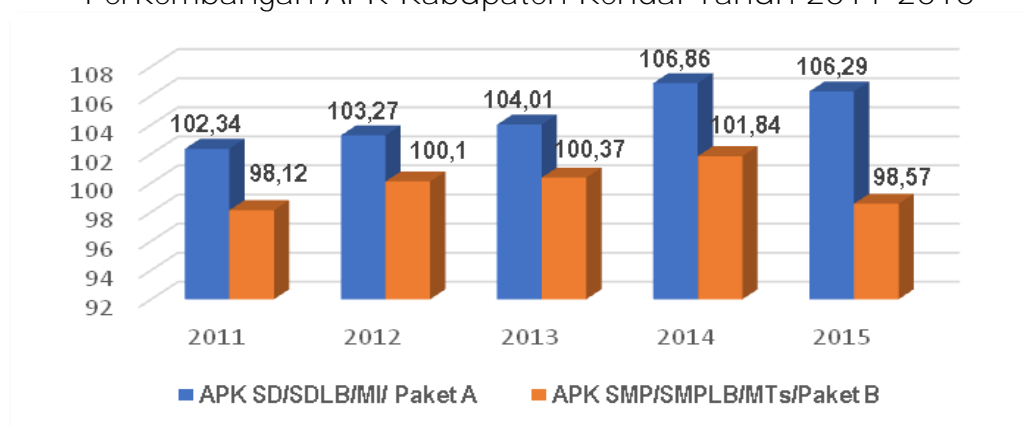
Dengan memperbandingkan antara jumlah guru dan murid TK/RA/BA tersebut dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid TK/RA/BA di Kabupaten Kendal. Rasio murid TK/RA/BA terhadap guru di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebesar 12 : 1 (12 orang murid diajar satu orang guru). Pada tahun 2015 rasio guru terhadap murid TK/RA/BA di Kabupaten Kendal meningkat menjadi 18 : 1 (18 murid diajar satu orang guru). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 17 menyatakan bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru untuk TK/RA, atau yang sederajat adalah 15 : 1 agar guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi.

✚ Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu.

Angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kendal selama 5 tahun terakhir angkanya fluktuatif. Jenjang pendidikan SD sederajat capaian terakhir di atas 100%, sedangkan untuk SMP sederajat capaiannya 98,57%. Lebih lengkap perkembangan APK di Kabupaten Kendal dapat dilihat dalam Gambar 2.18 berikut:

Gambar 2.18.
Perkembangan APK Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



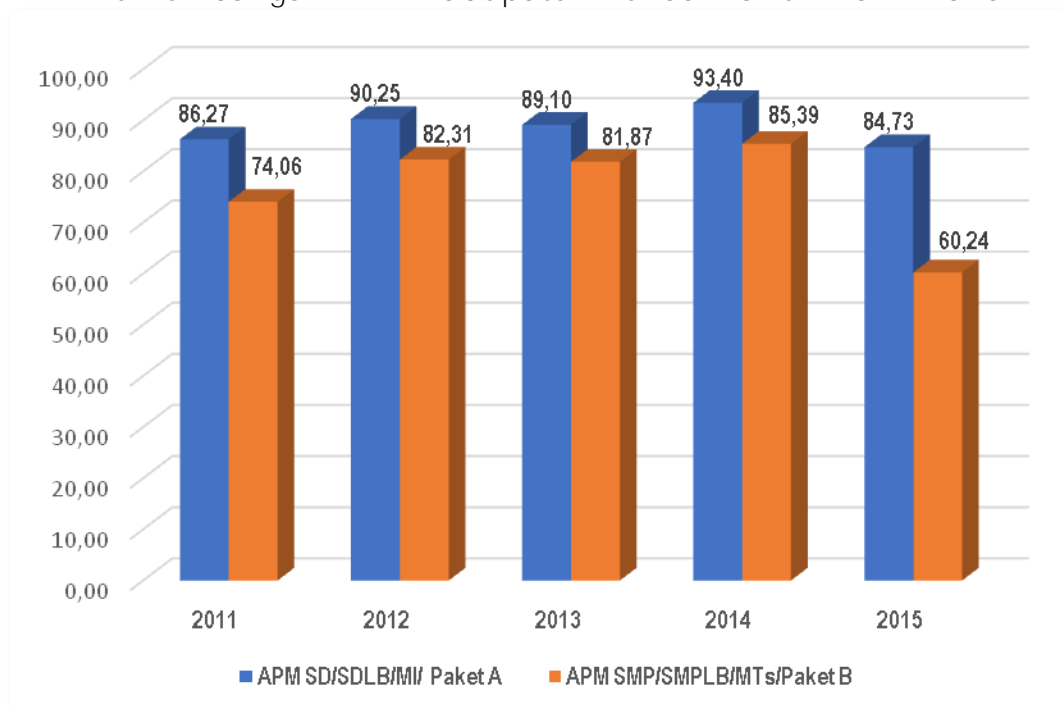
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal 2016

✚ Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut.

Angka partisipasi murni jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Kendal capaiannya mengalami tren yang menurun meskipun angka per tahunnya fluktuatif. Penurunan APM tersebut dipengaruhi antara lain oleh semakin banyaknya anak usia di luar usia 7-12 tahun yang sudah mulai masuk SD/SDLB/MI/Paket A dan juga anak usia di luar 13-15 tahun yang berada di SMP/SMPLB/MTs/Paket B. Lebih lengkap capaian APM di Kabupaten Kendal tersaji dalam gambar 2.19 berikut.

Gambar 2.19.
Perkembangan APM Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal 2016

Jika dilihat dari data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), persentase anak usia SD (7-12 tahun) dan SMP (13-15 tahun) di Kabupaten Kendal yang tidak bersekolah sebesar 3,87% dan 17,35%. Anak usia SD yang tidak sekolah paling tinggi persentasenya ada di Kecamatan Sukorejo (6,16%). Sedangkan untuk usia SMP yang tidak sekolah paling tinggi juga ada di Kecamatan Sukorejo (31,07%). Data lengkap terkait dengan anak usia sekolah yang bersekolah dan tidak sekolah jenjang SD dan SMP tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5.
Sebaran Penduduk Usia Sekolah Tidak Sekolah Kabupaten Kendal
Menurut Kecamatan Berdasarkan PBDT

Nama Kecamatan	Jumlah Anak yang Bersekolah		Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah		Jumlah Anak Sekolah dan Tidak Sekolah		Persentase Anak yang Tidak Bersekolah	
	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun
Plantungan	1.727	740	92	240	1.819	980	5,06	24,49
Sukorejo	1.934	843	127	380	2.061	1.223	6,16	31,07
Pagerruyung	1.474	715	40	146	1.514	861	2,64	16,96
Patean	1.395	655	67	218	1.462	873	4,58	24,97
Singorojo	1.931	845	90	249	2.021	1.094	4,45	22,76
Limbangan	1.110	575	48	104	1.158	679	4,15	15,32
Boja	1.712	913	79	179	1.791	1.092	4,41	16,39
Kaliwungu	1.474	793	53	98	1.527	891	3,47	11,00
Kaliwungu Selatan	1.551	802	34	127	1.585	929	2,15	13,67
Brangsong	1.742	1.017	46	115	1.788	1.132	2,57	10,16
Pegandon	903	534	44	81	947	615	4,65	13,17
Ngampel	698	324	30	72	728	396	4,12	18,18
Gemuh	1.531	748	56	141	1.587	889	3,53	15,86
Ringinarum	1.126	601	33	95	1.159	696	2,85	13,65
Weleri	1.546	850	69	137	1.615	987	4,27	13,88
Rowosari	1.467	751	71	197	1.538	948	4,62	20,78
Kangkung	1.336	641	27	107	1.363	748	1,98	14,30
Cepiring	1.105	637	37	84	1.142	721	3,24	11,65
Patebon	1.465	785	56	124	1.521	909	3,68	13,64
Kota Kendal	1.022	533	37	109	1.059	642	3,49	16,98
TOTAL	28.249	14.302	1.136	3.003	29.385	17.305	3,87	17,35

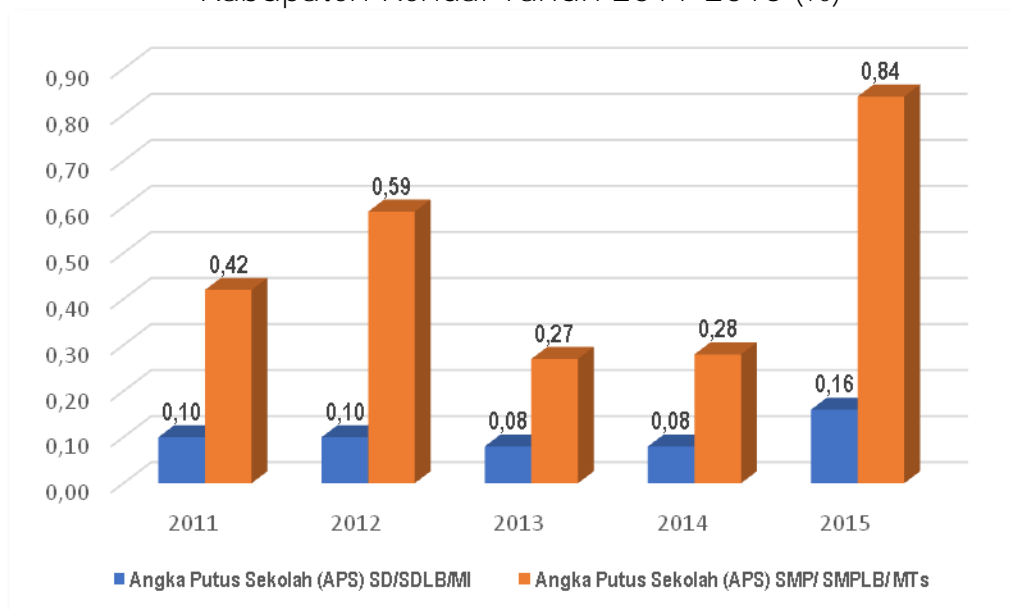
Sumber: PBDT tahun 2015 (diolah)

Angka Putus Sekolah

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 9 tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

Angka Putus Sekolah pendidikan dasar menunjukkan angka yang kurang baik. Perkembangan Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SD sederajat selama kurun waktu 2011 -2015 cenderung meningkat pada angka 0,16% pada tahun 2015. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, perkembangan Angka Putus Sekolah SMP selama kurun waktu 2011 -2015 fluktuatif namun cenderung meningkat. Secara rinci perkembangan Angka Putus Sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Kendal terlihat pada Gambar 2.20 berikut.

Gambar 2.20.
Angka Putus Sekolah SD Sederajat dan SMP Sederajat
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015 (%)

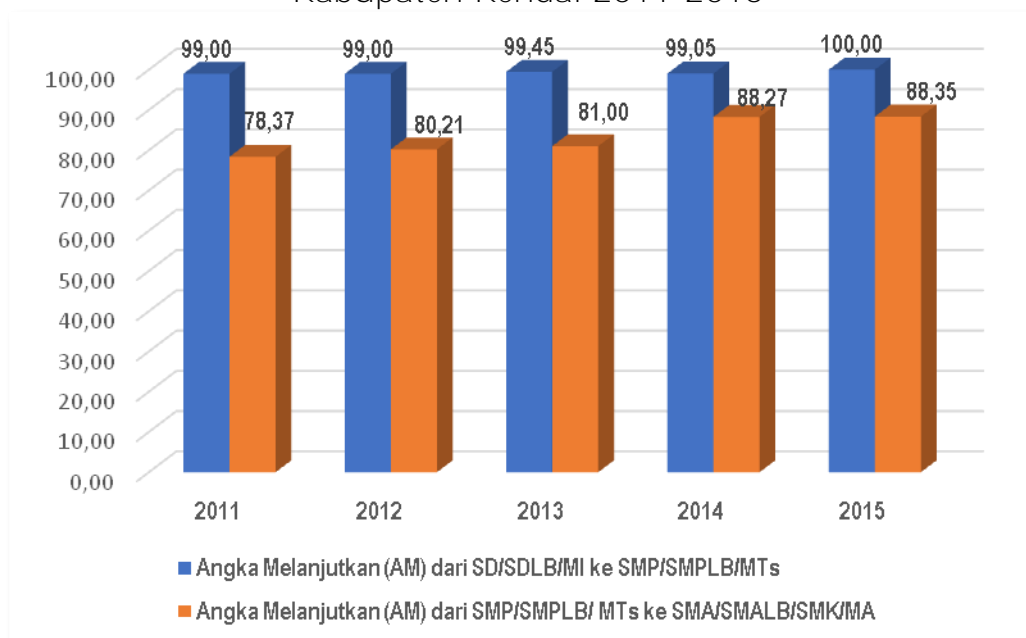


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal 2016

✚ Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan pendidikan dari siswa SD sederajat ke SMP sederajat, dan juga dari SMP sederajat ke SMA sederajat di Kabupaten Kendal sudah cukup baik. Persentase siswa lulusan SD sederajat yang melanjutkan ke jenjang SMP sederajat mencapai 100%. Adapun lulusan SMP sederajat yang melanjutkan ke SMA sederajat angkanya selalu naik dari 78,37% di tahun 2011 menjadi 88,35% di tahun 2015.

Gambar 2.21.
Angka Melanjutkan SD Sederajat dan SMP Sederajat
Kabupaten Kendal 2011-2015



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal 2016

Tenaga Pendidik

Keberhasilan program pendidikan juga ditopang oleh keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase pendidik yang berkualifikasi S1 atau D4 serta persentase pendidik yang sudah bersertifikasi. Untuk jenjang PAUD, pendidik yang berkualifikasi S1/D4 persentasenya semakin naik. Pada tahun 2011 baru sebesar 23%, namun pada tahun 2015 persentasenya meningkat menjadi 46,36%. Demikian juga untuk jenjang pendidikan yang lain, kualifikasi pendidik yang S1 atau D4 semakin meningkat meskipun angkanya belum mampu mencapai 100%. Pada tahun 2015 persentase pendidik TK, SD, dan SMP yang sudah bersertifikasi berturut-turut sebesar 42,74%, 54,89%, dan 56,96%.

Tabel 2.6.
Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi
Kabupaten Kendal tahun 2011-2015

<u>No</u>	<u>Indikator</u>	<u>Satuan</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
1.	Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4	%	23,00	37,66	40,51	38,85	46,36
2.	Persentase Pendidik SD Berkualifikasi S1/D4	%	NA	58,00	60,00	65,30	84,00
3.	Persentase Pendidik SMP Berkualifikasi S1/D4	%	NA	85,70	85,80	87,30	91,40
4.	Persentase pendidik TK memiliki Sertifikasi	%	NA	NA	NA	NA	42,74
5.	Persentase pendidik SD memiliki Sertifikasi	%	NA	NA	NA	NA	54,89
6.	Persentase pendidik SMP memiliki Sertifikasi	%	NA	NA	NA	NA	56,96

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal 2016

Ketersediaan Sekolah dan Guru

Gedung sekolah atau ruang kelas dalam kondisi baik di Kabupaten Kendal cenderung mengalami penurunan. Untuk jenjang SD sederajat, gedung sekolah yang kondisinya baik sebesar 60,61%. Sedangkan untuk jenjang SMP sederajat sebesar 69,32%.

Sedangkan untuk rasio rombongan belajar per ruang kelas SD sederajat sebesar 1,00. Jenjang SMP sederajat sebesar 0,98. Rasio guru / siswa sebesar 0,06 untuk SD sederajat, dan 0,07 untuk SMP Sederajat. Lebih lengkap terkait dengan ketersediaan sekolah dan guru dapat dilihat dalam tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.7.
Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan rasio Guru SD Sederajat dan SMP Sederajat Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sat.	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Ruang Kelas SD / SDLB / MI Kondisi Baik	%	89,00	89,00	87,00	83,48	60,61
2.	Persentase Ruang Kelas SMP / SMPLB / MTs Kondisi Baik	%	NA	81,46	78,21	78,64	69,32
3.	Rasio Rombongan Belajar / Ruang Kelas SD / SDLB / MI	%	NA	0,99	1,02	1,00	1,00
4.	Rasio Rombongan Belajar / Ruang Kelas SMP / SMPLB / MTs	%	NA	NA	NA	NA	0,98
5.	Rasio Guru / Siswa SD / SDLB / MI	%	NA	NA	NA	NA	0,07
6.	Rasio Guru / Siswa SMP / SMPLB / MTs	%	NA	NA	NA	NA	0,06

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal 2016

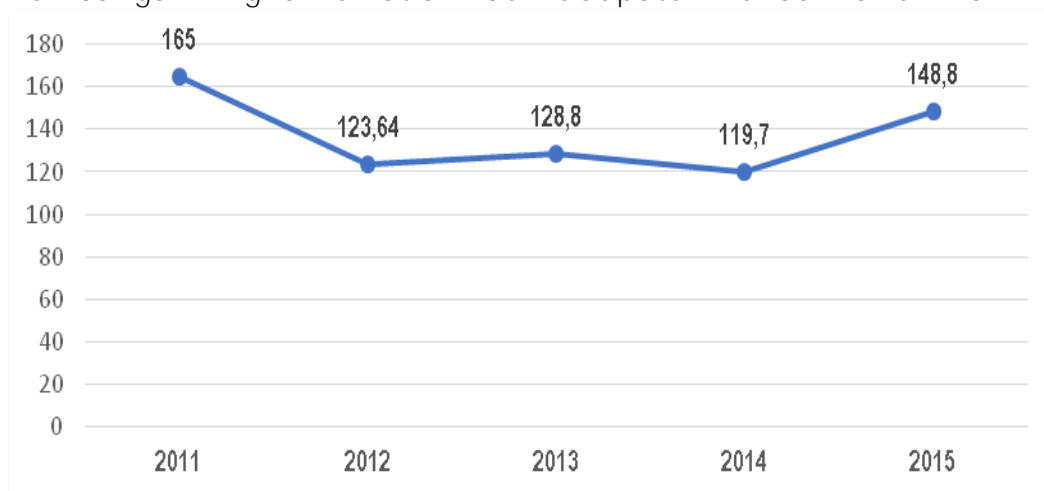
b. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

✚ Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian Ibu di Kabupaten Kendal mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 jika dilihat dari data yang ada kondisinya sangat memprihatinkan karena angkanya masih sangat tinggi. Meskipun demikian Angka kematian ibu dalam kurun waktu tersebut trennya mengalami penurunan. Angka tersebut perlu menjadi perhatian bagi semua stakeholder terkait untuk merumuskan kebijakan dan program dalam rangka penurunan AKI di Kabupaten Kendal. Lebih lengkap capaian AKI di Kabupaten Kendal selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam Gambar 2.22 berikut

Gambar 2.22.
Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



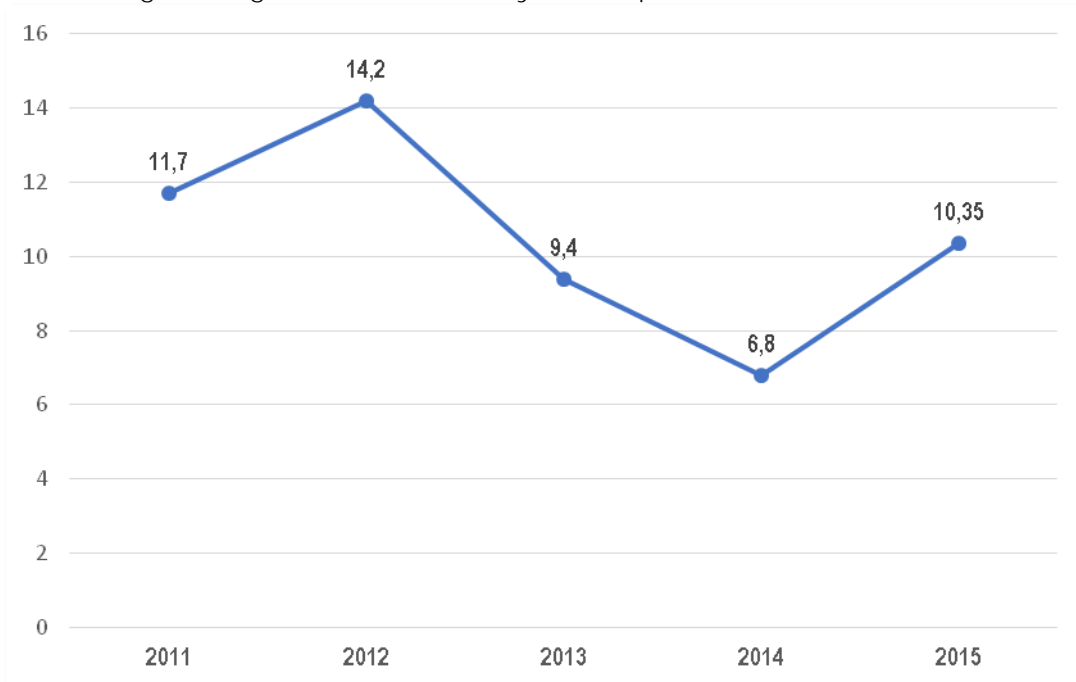
Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2016

✚ Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayilahir sampai bayi belum berusiatepat satu tahun. Kematian bayi tersebut dibagi atas dua kategori yaitu; (1) kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan, (2) kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kendal dari tahun 2011-2015 trendnya turun, meskipun dari sisi capaian tahunannya fluktuatif. Pada tahun 2011 AKB Kabupaten Kendal sebesar 11,7 per 1.000 kelahiran hidup meningkat sangat drastis pada tahun 2012 menjadi 14,2 per 1.000 Kelahiran Hidup, namun kondisinya menurun pada tahun 2015 AKB sebesar 10,35 per 1.000 Kelahiran Hidup. Jika dilihat kondisi tahun terakhir AKB justru mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Kendal.

Gambar 2.23.
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2016

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ditinjau dari sejumlah indikator yang mencerminkan hasil dalam pengembangan kapasitas dan kualitas layanan infrastruktur dan penataan ruang.

 Sumber Daya Air

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2015, terlihat bahwa hal yang mendesak yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah kondisi Daerah Irigasi (D.I) yang menjadi kewenangan Kabupaten Kendal. Dimana kondisi daerah irigasi (D.I) tersebut dalam keadaan rusak berat dan belum permanen. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Di Kabupaten Kendal mempunyai daerah irigasi (D.I) sebanyak 686 D.I dan baru terbangun sekitar 30,8% dari total D.I yang ada. Dan yang 69,2% dalam kondisi rusak berat dan belum permanen.

Pembangunan Daerah Irigasi (D.I) di Kabupaten Kendal capaiannya selalu naik, pada tahun 2008 sampai sekarang, menurut data aset daerah irigasi mulai dari tahun 2008 sampai 2016 yang telah terbangun sebanyak 211 D.I dan 475 D.I masih dalam kondisi rusak berat dan belum permanen. Untuk itu, pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal memprioritaskan pembangunan Daerah Irigasi (D.I) untuk tercukupinya kebutuhan air baku baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk irigasi, untuk menunjang ketahanan pangan di Kabupaten Kendal.

Tabel 2.8.
Capaian Kinerja Sumber Daya Air
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
Prosentase kawasan tangkapan air dalam kondisi baik	%	25,00	27,00	29,00	32,00	34,00
Menurunnya titik-titik lokasi genangan di daerah rawan banjir	%	NA	NA	NA	NA	40,00
Persentase Daerah irigasi berfungsi baik	%	NA	NA	NA	16,33	19,09

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2016

Air Limbah

Air limbah merupakan air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Air limbah perkotaan biasanya dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi, dan diolah di fasilitas pengolahan air limbah atau septic tank. Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan. Tahun 2011 persentase penduduk yang terlayani sebesar 40%, tahun 2015 meningkat menjadi 72,90%.

Air Minum

Terkait dengan penyediaan air minum, ketersediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Kendal baru tercapai 79%. Angka tersebut naik sebesar 27% dari capaian tahun 2012 yang hanya sebesar 52,29% saja. Rumah tangga yang menggunakan air minum di Kabupaten Kendal sudah mencapai 79%, dan dari angka tersebut di antaranya terlayani melalui jaringan perpipaan.

Tabel 2.9.
Gambaran Pelayanan Air Minum
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

<u>Indikator</u>	<u>Satuan</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum	%	NA	52,29	59,92	69,32	75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2016

Jika dilihat dari sumber airnya, masih terdapat 15,84% rumah tangga di Kabupaten Kendal yang memakai sumber air tidak terlindung. Persentase penduduk yang memakai sumber air tidak terlindung paling tinggi di Kecamatan Pagerruyung (43,75%). Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 2.20 berikut ini.

Tabel 2.10.
Pemakaian Air Berdasarkan Sumbernya
Kabupaten Kendal Tahun 2015

<u>Nama Kecamatan</u>	<u>Jumlah Rumah Tangga</u>				<u>% Penduduk Memakai Sumber Air Tidak Terlindung</u>
	<u>Air Kemasan</u>	<u>Air Ledeng</u>	<u>Sumber Terlindung</u>	<u>Sumber Tidak Terlindung</u>	
Plantungan	-	436	3.680	956	18,85
Sukorejo	11	937	4.082	1.453	22,41
Pagerruyung	6	330	2.378	2.111	43,75
Patean	9	233	4.014	976	18,65
Singorojo	4	164	5.023	931	15,21
Limbangan	2	355	2.377	1.029	27,35
Boja	60	779	3.992	1.124	18,87
Kaliwungu	100	2.531	1.879	83	1,81

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				% Penduduk Memakai Sumber Air Tidak Terlindung
	Air Kemasan	Air Ledeng	Sumber Terlindung	Sumber Tidak Terlindung	
Kaliwungu Selatan	345	1.254	3.057	229	4,69
Brangsong	263	1.307	3.894	239	4,19
Pegandon	214	481	2.174	974	25,34
Ngampel	146	792	1.804	216	7,30
Gemuh	435	317	3.619	989	18,45
Ringinarum	97	93	3.504	966	20,73
Weleri	161	389	4.303	781	13,86
Rowosari	278	218	3.876	1.095	20,03
Kangkung	549	306	3.539	480	9,85
Cepiring	203	1.317	2.753	260	5,74
Patebon	229	1.949	2.023	450	9,68
Kota Kendal	84	2.581	178	114	3,86
TOTAL	3.196	16.769	62.149	15.456	15,84

Sumber: PBDT Tahun 2015

Jalan dan Jembatan

Terdapat sepanjang 770,325 km jalan kewenangan Kabupaten Kendal. Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan mantap di Kabupaten Kendal pada tahun 2012 sebesar 32,01%, tahun 2014 turun menjadi 31,79%, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 59,33%. Rata-rata peningkatan jalan mantap dari tahun 2012-2015 hanya mencapai 0,05%.

Tabel 2.11.
Kondisi Jalan dan Jembatan
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015 (%)

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
Prosentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	NA	NA	50,75	55,56	59,33
Tersedianya dokumen inspeksi jalan dan jembatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tersediannya data base jalan dan jembatan yang up to date	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	30,00	35,00	40,00	50,00	40,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2016

Penataan Ruang

Penataan kawasan dan ruang di Kabupaten Kendal telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2013-2031. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal menjadi pedoman untuk : 1) Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah; Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2) Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Kota; 3) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; 4) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 5) penataan ruang kawasan strategiskota.

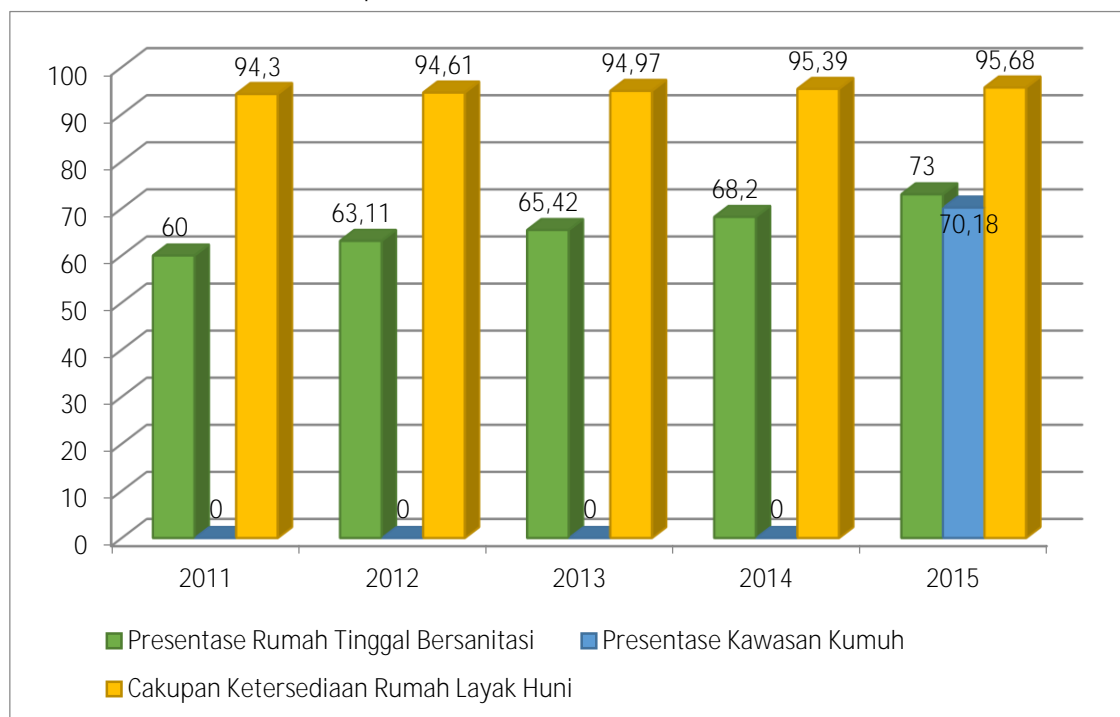
Rencana Tata Ruang Kabupaten Kendal dijabarkan secara rinci dengan rencana tata ruang kawasan strategis yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan, termasuk untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Perencanaan Tata Ruang di Kendal juga tidak terlepas dari penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 26-31 diatur berkaitan dengan Penyediaan RTH. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Luas RTH Publik yang tersedia di Kabupaten Kendal tahun 2014 sebesar 85,5 Ha, sementara itu luas RTH Publik yang seharusnya tersedia di Kabupaten Kendal sebesar 727,4 Ha. Melihat data tersebut capaian tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan baru mencapai 11,75%.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mengurangi luasan kawasan kumuh dan peningkatan rasio rumah yang sehat dan layak huni, Pemerintah Kabupaten Kendal selama 5 tahun terakhir telah membangun 700 rumah sederhana bersubsidi untuk masyarakat. Selain itu juga telah dibangun 2 TB rumah susun untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal masyarakat. Rumah tinggal sehat dalam artian bersanitasi di Kabupaten Kendal pada Tahun 2015 baru mencapai 73%. Sedangkan cakupan rumah yang layak huni baru 95,81% 95,68%

Gambar 2.24.
Capaian Kinerja Perumahan
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

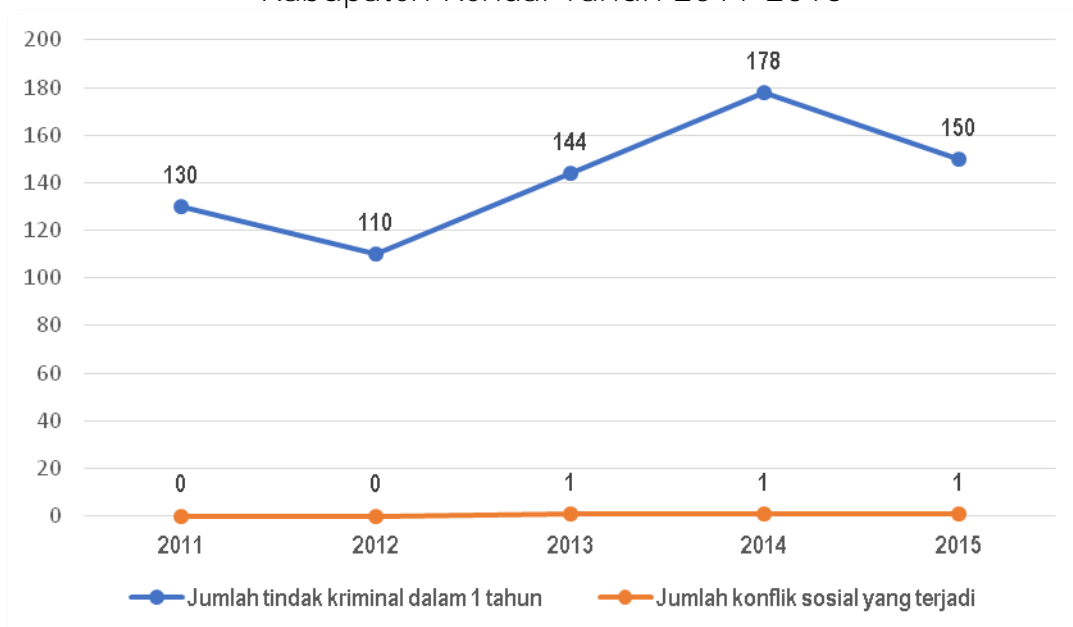


Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2016

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Kendal sebagai salah satu kota yang terletak di jalur utara Pulau Jawa adalah wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Kendal ini dilewati jalur utama perekonomian di Jawa Tengah dan juga Pulau Jawa bagian utara sehingga tingkat mobilitas transportasi manusia dan barang sangat tinggi. Hal tersebut menyebabkan ancaman gangguan ketertiban dan keamanan yang cukup tinggi. Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Kendal selama 5 tahun kondisinya fluktuatif, sempat menurun dari Tahun 2011 sampai Tahun 2012, namun dari 2013 sampai 2014 justru mengalami kenaikan, dan turun lagi pada Tahun 2015. Selain kejadian kriminal, di Kabupaten Kendal pada Tahun 2013 sampai 2015 juga sempat terjadi konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi tersebut dapat ditangani dengan kerjasama yang baik antara aparat keamanan dan juga pihak pemerintah (FORKOMPINDA).

Gambar 2.25.
Kejadian Gangguan Keamanan dan Ketertiban
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



Sumber: Kembangpol Kabupaten Kendal, 2016

Selain gangguan keamanan berupa tindakan kriminal, ketertiban di Kabupaten Kendal juga sering terganggu dengan terjadinya tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada. Kejadian pelanggaran terhadap Perda yang terjadi dan dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Kendal angkanya fluktuatif dengan tren meningkat. Pada Tahun 2011 terjadi 79 pelaporan kasus pelanggaran Perda, dan Tahun 2015 meningkat menjadi 80 kasus. Dari jumlah kasus yang dilaporkan, sebagian besar akan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait (Satpol PP).

Upaya yang dilakukan untuk menekan kejadian pelanggaran ketertiban umum antara lain adalah dengan melakukan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hanya saja capaian indikator ini masih belum bisa 100% seperti yang ditargetkan dalam SPM. Satpol PP Kabupaten Kendal baru mampu mencapai 50% dari target yang ditentukan.

Kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan tingkat kejadian pelanggaran Perda dan Perkada adalah terbatasnya jumlah personil Satpol PP yang dimiliki. Tahun 2015 Kabupaten Kendal hanya memiliki 53 personil, sedangkan jumlah penduduknya mencapai 955.949 jiwa.

Tabel 2.12.
Kinerja Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sub Indikator	Satuan	Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Banyaknya kelompok patroli x3 patroli dalam sehari	kali	10	10	10	20	20
		Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/ kota	kecamatan	20	20	20	20	20
2.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam	kali	125	175	115	215	213
5	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/ kota	Orang	9.315		9.382	9.382	9.382
		Jumlah RT	unit	6.322	6.313	6.351	6.351	6.351
6	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Jumlah Linmas	Orang	9.315		9.382	9.382	9.382
		Jumlah Penduduk	jiwa	976.804	964.568	969.627	950.463	952.966
7	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Jumlah pelanggaran perda dan /atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan	kasus	75	70	75	80	80
		Jumlah pelanggaran perda dan /atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan /atau dipantau di tahun bersangkutan	kasus	79	80	76	81	80
9	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Jumlah polisi pamong praja	Orang	59	59	55	53	53
		Jumlah Penduduk	jiwa	976.804	964.568	969.627	950.463	952.966

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kendal Tahun 2015

f. Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Upaya untuk mengurangi jumlah PMKS di Kabupaten Kendal dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah pemberian pelatihan kepada para PMKS dengan tujuan meningkatkan ketrampilan mereka. Fakir miskin dan PMKS yang menerima kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah jumlahnya. Selain PMKS, para petugas pemberdayaan PMKS juga selalu dilatih untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada para PMKS. Jumlah petugas yang dilatih jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Lebih rinci capaian indikator urusan sosial tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.13.
Capaian Kinerja Bidang Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	NA	26,25	26,05	22,5	22,5
2.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	NA	16,25	3,0	1,2	2,4
3.	Persentase(%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	NA	16,66	82,2	100	100
4.	Persentase(%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	NA	6,03	4,4	7,3	3,9
5.	Persentase(%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan	%	NA	71	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
	kesejahteraan sosial.						
6.	Persentase(%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	NA	10	4	4	4
7.	Jumlah PMKS	Orang	NA	385.685	385.685	385.685	385.685
8.	Jumlah Panti asuhan/Panti Jompo/Panti Sosial	unit	14	14	14	14	14

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2016

Selain upaya tersebut di atas, pemerintah juga mengupayakan agar para eks penyandang penyakit sosial dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Dari tahun 2012 sudah 78 orang eks penyandang penyakit sosial dapat melaksanakan fungsi sosialnya telah kembali ke masyarakat.

Upaya pengurangan jumlah PMKS selain dilaksanakan oleh pemerintah, juga melibatkan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Peran aktif dunia usaha tersebut sudah dimulai sejak tahun 2012. Setiap tahun dari tahun 2012 tersebut 250 orang PMKS menerima bantuan untuk meningkatkan kapasitas dan keberdayaan ekonomi mereka.

Salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian selain penduduk miskin adalah para penyandang disabilitas/kecacatan. Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Kendal pada tahun 2015 mencapai 7.235 orang, dan 64,12% diantaranya adalah berusia produktif.

2.3.2. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan pemerintah non dasar ini secara umum sudah mengalami peningkatan tetapi masih perlu adanya peningkatan terutama yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

a. Tenaga Kerja

Salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi seluruh rakyat Indonesia serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dimana sasaran utamanya adalah memperluas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Selanjutnya salah satu aspek penduduk yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia adalah ketenagakerjaan, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Bagi individu-individu, dimensi ekonomi berkaitan dengan pemenuhan hidup sehari-hari, dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan lapangan kesempatan kerja / berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Kendala yang dihadapi dalam perluasan lapangan kerja saat ini yaitu penyerapan melalui kegiatan proyek pembangunan yang tidak sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Masalah lain adalah jumlah penduduk usia kerja yang sangat besar tetapi dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Kendal sejak tahun 2011 sampai 2015 selalu meningkat, dari 6,54% menjadi 7,07%. Meningkatnya TPT sebagai akibat dari menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pada tahun 2011 TPAK sebesar 70,7% kemudian tahun 2012 naik menjadi 72,81%. Kemudian sejak tahun 2013 sampai 2015 capaiannya selalu turun dengan kondisi terakhir pada angka 65,7%. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kendal juga mengalami penurunan dari 0,48% pada tahun 2011 menjadi 0,46% pada tahun 2015.

Tabel 2.14.
Capaian Kinerja Makro Ketenagakerjaan
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

Indikator Data Ketenagakerjaan	Satuan	Data Ketenagakerjaan				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Angkatan Kerja	orang	478.641	499.395	499.333	501.077	468.158
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	orang	677.022	685.901	694.906	703.513	712.580
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,7	72,81	71,86	71,22	65,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,54	6,31	6,43	6,15	7,07
Rasio Penduduk yang Bekerja/ Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	93,46	93,69	93,57	93,85	92,93
Rasio Ketergantungan	%	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46

Sumber: BPS Kab. Kendal Tahun 2016

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pencari kerja, pemerintah melaksanakan berbagai macam kegiatan pelatihan. Pelatihan ketrampilan tersebut ada yang berbasis pada kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat

dan pelatihan kewirausahaan. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2015 sebanyak 100%. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 58,96%, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 80%.

Peningkatan Keselamatan dan perlindungan perusahaan terhadap pekerja di Kabupaten Kendal masih cukup rendah dimana tahun 2011 persentase keselamatan dan perlindungan perusahaan terhadap pekerja sebanyak 15,44%, tahun 2015 hanya mencapai 24,84%.

Besaran Pemeriksaan Perusahaan mengalami perkembangan yang fluktuatif, tahun 2011 sebesar 67,65%, meningkat tahun 2015 menjadi 69,77%. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan tahun 2011 sebesar 38,89%, tahun 2015 turun menjadi 36,17%.

Tabel 2.15.
Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Keselamatan dan perlindungan	%	15,44	18,44	18,49	24,18	24,84
2	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/PB	%	100,00	100,00	100,00	87,50	92,86
3	Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan	%	0	0	0	0	88,90
4	Prosentase Pemeriksaan Perusahaan	%	67,65	73,05	62,33	60,78	69,77
5	Prosentase Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	38,89	40,51	20,00	34,78	36,17

Sumber: *Disnakertrans Kabupaten Kendal Tahun 2016*

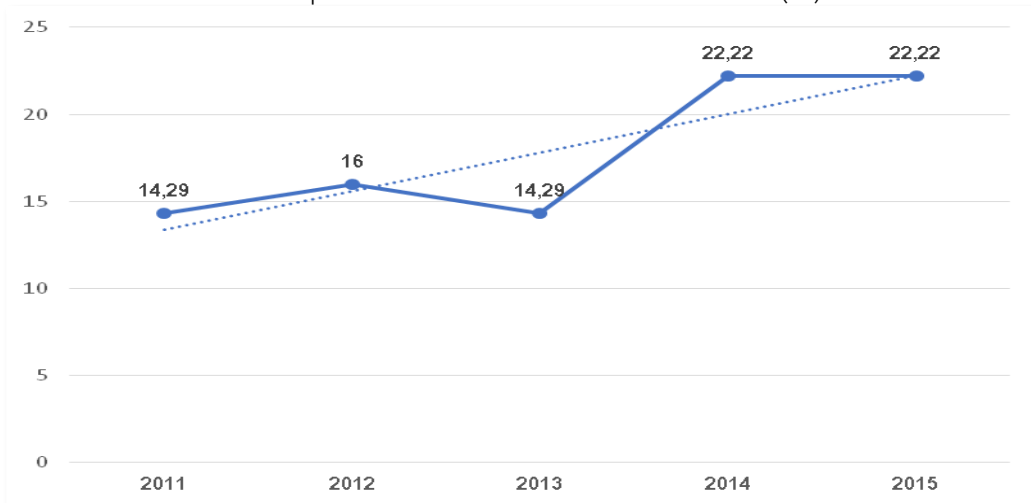
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sementara itu indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Keterlibatan Perempuan Di Parlemen. Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi dan Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja.

Perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen menunjukkan peningkatan hampir di setiap tahun. Bahkan pada pemilihan legislatif periode 2014-2019 terdapat 10 orang perempuan yang terpilih untuk mewakili masyarakat di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Kendal. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sudah mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk berpartisipasi di bidang politik. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.26 di bawah ini.

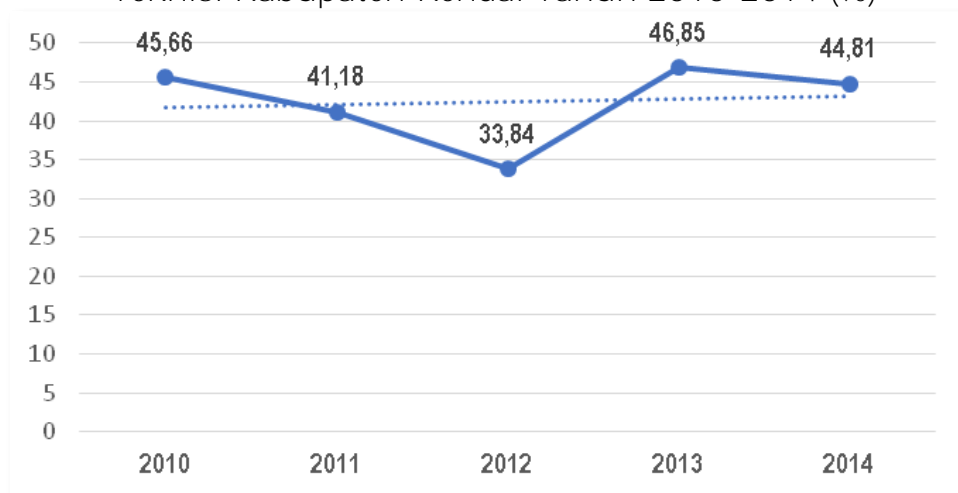
Gambar 2.26.
Perkembangan Keterlibatan Perempuan di Parlemen
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015 (%)



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Tahun 2016 (diolah)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, perempuan yang bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi dan teknisi perkembangannya fluktuatif tiap tahunnya. Namun jika melihat datanya mencapai 44,81%, menunjukkan bahwa perempuan sudah cukup banyak mendapatkan kesempatan dalam bidang perekonomian. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.27 di bawah ini.

Gambar 2.27.
Perkembangan Perempuan Sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi,
Teknisi Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014 (%)

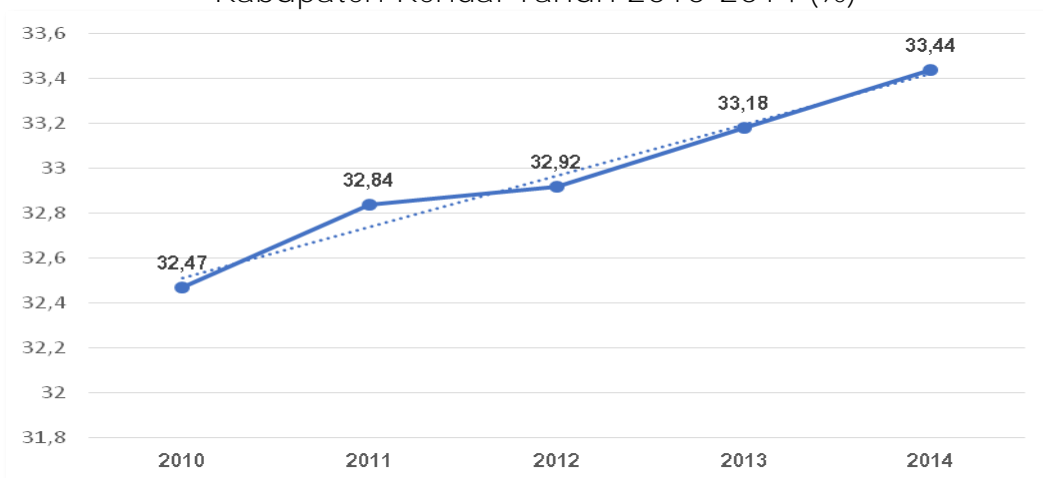


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja kondisinya fluktuatif dengan tren dalam 4 tahun terakhir meningkat. Dari capaian 32,47% pada

tahun 2010 menjadi 33,44% pada tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.28 di bawah ini.

Gambar 2.28.
Perkembangan Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja
Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014 (%)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Rasio KDRT yang terjadi di Kabupaten Kendal cakupannya fluktuatif. Pada tahun 2011 KDRT yang terjadi sebanyak 111 kasus (0,05%) dari total rumah tangga sebanyak 276.878 dan kondisi terakhir tahun 2015 juga terjadi 111 kasus (0,04%) dari total 301.543 rumah tangga.

Dalam rangka upaya penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan Kabupaten Kendal telah memiliki pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A). Setiap tahun kasus yang dilaporkan di sekretariat P2TP2A ini seluruhnya akan langsung ditangani.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan perempuan adalah banyaknya rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan. Di Kabupaten Kendal, tahun 2015 terdapat 24.803 rumah tangga yang dikepalai keluarga perempuan/janda. Dari total tersebut 44,45% diantaranya adalah berusia produktif. Komposisi rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan tertinggi ada di Kecamatan Rowosari, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Weleri, kemudian Kecamatan Boja.

c. Pangan

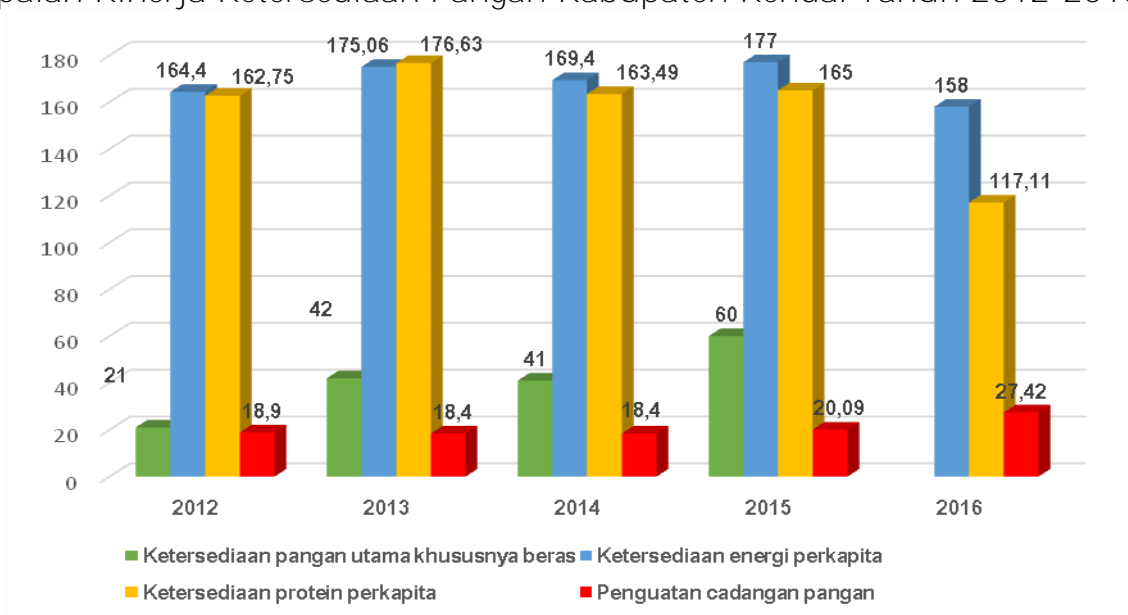
Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah yang cukup, bermutu, aman dikonsumsi, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan mencakup 4 (empat) aspek, yaitu ; ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup ketersediaan, distribusi, dan konsumsi bahan pangan. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Subsistem konsumsi bahan pangan berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya.

Guna menjaga stabilitas produksi bahan pangan, di Kabupaten Kendal telah ditetapkan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Luas LP2B di Kabupaten Kendal seperti yang termuat dalam Perda RTRW seluas kurang lebih 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kendal.

Ketersediaan pangan utama di wilayah Kabupaten Kendal menunjukkan kondisi yang cukup baik. Ketersediaan pangan utama meskipun angka capaiannya fluktuatif pada tahun 2015 ketersediaan pangan utama mencapai 60 persen. Begitu pula dengan ketersediaan energi perkapita pada tahun 2016 mencapai 158 persen dan ketersediaan protein per kapita pada tahun 2016 mencapai 82,1 persen. Indikator yang pencapaiannya masih rendah adalah penguatan cadangan pangan, dimana target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 60% namun Kabupaten Kendal baru mampu mencapai 27,42 persen pada tahun 2016.

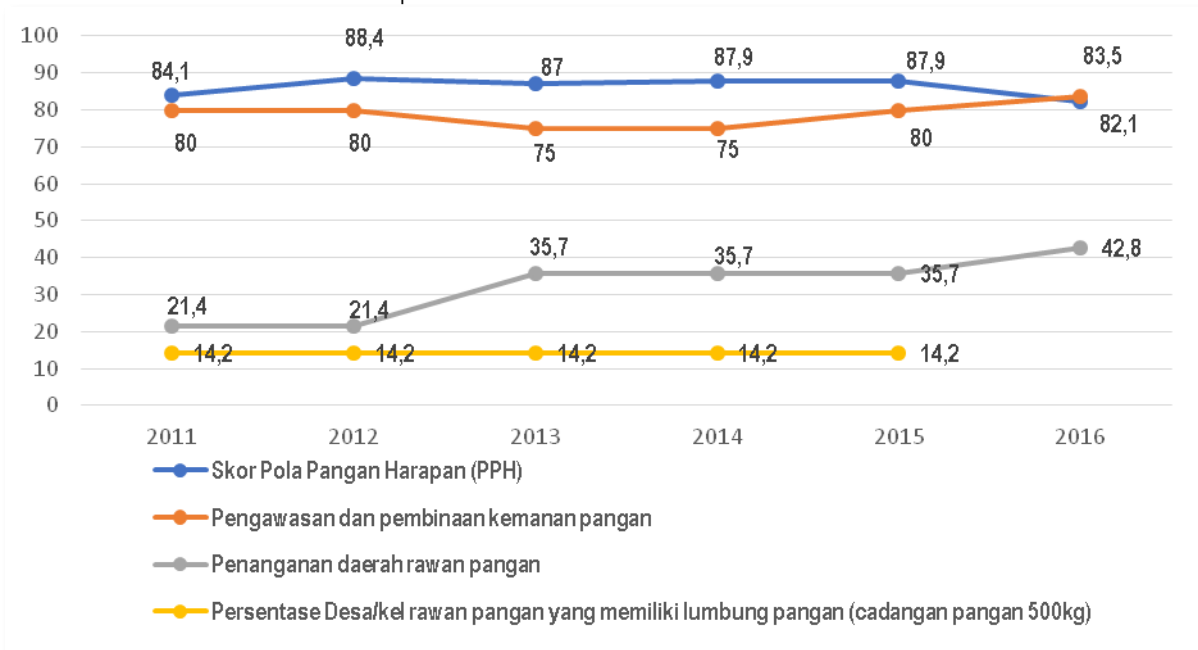
Gambar 2.29.
Capaian Kinerja Ketersediaan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2012-2016 (%)



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, Tahun 2016

Kinerja ketahanan pangan yang perlu mendapatkan perhatian karena capaiannya masih di bawah target yang telah ditentukan adalah capaian skor pola pangan harapan yang ditergetkan 90% baru mampu dicapai 82,1 persen. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sudah mencapai target karena tercapai 80%. Dan juga indikator Persentase Desa/kel rawan pangan yang memiliki lumbung pangan (cadangan pangan 500kg) baru mampu mencapai 14,2%.

Gambar 2.30.
Capaian Kinerja Ketahanan Pangan lainnya
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, Tahun 2016

d. Pertanahan

Bidang pertanahan dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomis dan sosial. Karena adanya fungsi ekonomis dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan melalui sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, status tanah tersebut mempunyai kekuatan hukum, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP). Berdasarkan data BPS Kabupaten Kendal Tahun 2016 jumlah pemohon sertifikat tanah pada Tahun 2015 sebanyak 26.961 pemohon sedangkan jumlah sertifikat yang diselesaikan sebanyak 25.765 sertifikat (95,56%).

Perincian sertifikat yang dikeluarkan tahun 2015 adalah Hak Milik (HM) sebanyak 7.699 sertifikat, Hak Guna Bangunan sebanyak 775 sertifikat, dan Hak Pakai sebanyak 26 sertifikat.

e. Lingkungan Hidup

Produksi sampah di Kabupaten Kendal pada Tahun 2015 sebesar 88.059,9 m³. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang sebesar 81.413,25 m³. Apabila dilihat dari kemampuan pengangkutan, kemampuan pengangkutan sampah justru mengalami penurunan. Apabila pada Tahun 2013 kemampuan pengangkutan sebesar 83,39%, dan Tahun 2014 kemampuan pengangkutan naik menjadi 86,53%, Tahun 2015 turun menjadi 82,07%.

Menurunnya kemampuan pengangkutan sampah tersebut diantaranya dikarenakan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Kendal jumlahnya ada yang berkurang, yaitu tempat pembuangan sementara dan gerobak sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. Sejak Tahun 2011 sampai Tahun 2015 menunjukkan kinerja belum baik karena capaiannya baru sampai pada angka 2,5% padahal target untuk indikator ini adalah 100%.

Tabel 2.16.
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	3%	5%	5%	5%	100%
2	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	kasus	0	14	25	18	20
3	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk	%	0	0	0	12,4	16,8

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
	produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya						
4	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	titik	0	12	12	4	6

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Tahun 2015

Capaian indikator bidang lingkungan hidup lainnya dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17.

Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Pemantauan status mutu air	titik	0	12	12	35	45
2	Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL		0	4	4	5	3
3	Kegiatan Penegakan hukum lingkungan	kasus	0	11	25	18	13
4	Rasio Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	Ha	0	50	35	0	0
5	Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi	%	0	0	100	NA	100

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Tahun 2015

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Admuduk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam upaya tertib administrasi kependudukan, Kabupaten Kendal giat melakukan upaya meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencatatkan dokumen kependudukan. Persentase penduduk ber KTP di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 ratio penduduk ber KTP sebesar 65,56%, meningkat menjadi 74,2% Tahun 2015. Untuk Rasio bayi ber-akte kelahiran Tahun 2011 sebesar 85,37% dan Tahun 2015 sebesar 93,65%. Persentase Kepemilikan akta kelahiran mengalami penurunan dimana Tahun 2011 sebanyak 63,98%, Tahun 2015 menurun menjadi 63,22%. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat anak yang belum memiliki akta kelahiran. Untuk Cakupan Akte Kematian selama 5 tahun terakhir sebesar 100%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.18.
Capaian Kinerja Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sub Indikator	Satuan	Tahun				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio penduduk ber KTP	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	Jiwa	545.099	538.606	399.247	515.427	545.856
		Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	Jiwa	816.187	821.555	694.868	722.688	734.153
2.	Rasio bayi ber-akte kelahiran	Jumlah bayi berakte kelahiran (0 -4 thn)/4	Orang	7.567	13.978	17.104	17.829	11.091
		jumlah keseluruhan bayi yang lahir thn ybs	Orang	14.728	16.372	16.862	16.307	15.937
3.	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah penduduk memiliki akte kelahiran	Jiwa	652.304	692.298	717.962	733.874	510.334
		Jumlah penduduk	Jiwa	1.077.866	1.081.988	1.101.342	947.978	951.465
4.	Rasio pasangan berakte nikah	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	pasangan	107	58	61	50	7017
		jumlah keseluruhan pasangan yang telah	pasangan	316.044	328.123	274.261	293.290	327.240

No	Indikator	Sub Indikator	Satuan	Tahun				
				2011	2012	2013	2014	2015
		menikah						
5.	Ketersediaan database kependudukan	-	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Cakupan Akte Kematian	Jumlah penduduk yang meninggal memiliki akte kematian	Jiwa	15	7	21		138
		jumlah penduduk yang meninggal	Jiwa	15	7	21		138

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Tahun 2016

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya yang strategis dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Melalui pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat mewujudkan kemandirian masyarakat desa dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dalam pemberdayaan masyarakat ada 3 aspek utama kegiatan pemberdayaan yaitu 1) pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM), 2) pemberdayaan sosial ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal dan 3) pelestarian lingkungan. Oleh karena itu keberhasilan pemberdayaan masyarakat tercermin dari tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, terwujudnya peran serta atau partisipasi masyarakat ditentukan oleh tingkat kapasitas masyarakat dan kesadaran serta tanggungjawab untuk memberikan kontribusi pemikiran, tenaga maupun materiial dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Tantangan ke depan lainnya adalah dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan disahkannya undang-undang tersebut maka desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selain itu juga

dengan adanya Undang-Undang ini sebagian wewenang Kabupaten akan dilaksanakan oleh desa.

Menindak lanjuti dari diberlakukannya Undang-Undang Desa tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya untuk meningkatkan kapasitas seluruh komponen pemerintah desa melalui pembinaan dan pendampingan. Kabupaten Kendal memiliki desa dengan jumlah total 286, terdiri dari 6.351 RT dan 1.490 RW.

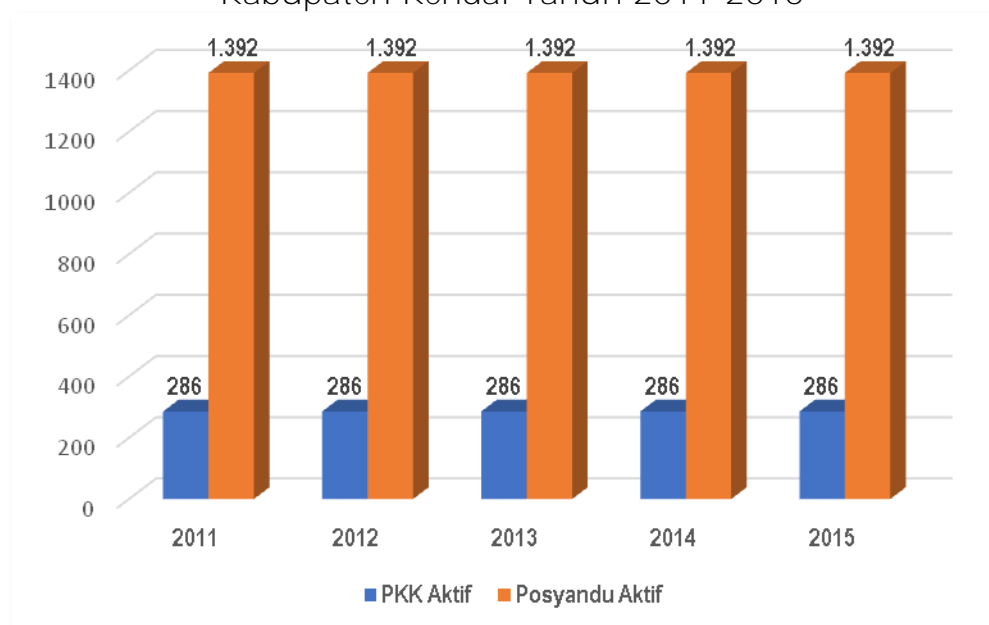
Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan oleh kelompok Posyandu yang ada di tiap Kelurahan sebagai wujud kesadaran masyarakat akan pentingnya pemantauan kesehatan ibu dan Balita. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu antara lain posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Posyandu di Kabupaten Kendal berdasarkan data yang ada dalam Kendal dalam angka berjumlah 1.392 unit tersebar di seluruh wilayah. Dari total tersebut posyandu yang masuk dalam kategori mandiri berjumlah 119 unit, kategori purna 491 unit, kategori madya 556 unit, dan kategori pratama sebanyak 224 unit.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan kepada keberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan. Guna mendukung itu semua pembinaan kepada masyarakat selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Pembinaan tersebut diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dan juga kepada pemerintahan desa.

Beberapa capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dalam tabel berikut.

Gambar 2.31.
Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kendal, Tahun 2016

h. Perhubungan

Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang mempunyai arus lalu lintas yang padat, dilalui jalur jalan Regional antara Jakarta-Surabaya yang merupakan jalur perekonomian yang ramai baik angkutan barang maupun penumpang. Kondisi jalur lalu lintas sering menimbulkan kemacetan khususnya di kawasan-kawasan yang dilewati secara langsung oleh jalan utama pantura.

Kabupaten Kendal memiliki 4 terminal yaitu Terminal Kendal, Sukorejo, Boja dan Weleri. Keempat terminal ini melayani transportasi massal baik dalam kota maupun luar kota. Adapun angkutan darat yang terdata pada Tahun 2015 sebanyak 725 unit. Dilihat dari segi jumlah, angkutan darat di Kabupaten Kendal dari Tahun 2011 sampai 2015 cenderung turun, namun dari 2013 ke 2015 kembali naik. Sedangkan penumpang angkutan darat dari tahun 2011 sampai 2015 trennya naik, namun tahun 2015 menurun. Data terakhir Tahun 2015 adalah sebanyak 4.742.465 penumpang.

Guna menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan pelintas yang melewati wilayah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Perhubungan melengkapi jalan-jalan utama dengan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Kondisi sarana prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Kendal sampai Tahun 2015 dalam kondisi baik sebanyak 88,9% dari total yang ada.

Tabel 2.19.
Kondisi Transportasi Kabupaten Kendal tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Terminal	Unit	4	4	4	4	4
2	Jumlah angkutan darat	Unit	743	680	633	725	725
3	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	3.433.256	3.864.738	4.285.339	5.373.424	4.742.465
4	Jumlah Trayek AKDP, Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan	Unit	61	61	61	61	61
5	Persentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	33,33	33,33	36,67	43,33	50
6	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	40,0	40,0	40,0	40,0	88,9

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2016

Selain angkutan yang melayani jalur utama, telah tersedia juga angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang sebanyak 2 jaringan trayek. Sedangkan jaringan jalan kabupaten yang terlayani angkutan umum adalah 57 dari 223 total jaringan jalan yang ada di Kabupaten Kendal.

Dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas di jalan raya, di tempat-tempat yang membutuhkan petunjuk dan peringatan lalu lintas telah dipasang rambu-rambu. Kebutuhan rambu-rambu untuk seluruh jalan yang ada di Kabupaten Kendal adalah sebanyak 2.500 buah. Namun pada Tahun 2015 yang terpenuhi baru 22,68% saja atau sebanyak 567 buah. Kondisi tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya karena banyak rambu-rambu yang rusak dan belum diganti.

Untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada penumpang angkutan umum, semua kendaraan umum wajib melakukan uji kir angkutan umum. Dinas perhubungan Kabupaten Kendal telah memiliki unit pengujian kendaraan bermotor. Jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR dari tahun ke tahun selalu meningkat. Jika pada Tahun 2011 jumlahnya adalah

11.044 unit kendaraan, pada tahun 2015 meningkat menjadi 12.056 unit kendaraan.

i. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan Urusan Koperasi dan UMKM bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan terstruktur. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 mengklasifikasi kriteria usaha masyarakat menjadi 3 kategori, yaitu mikro, kecil dan menengah. Klasifikasi jenis usaha tersebut didasarkan pada jumlah aset dan omset dari masing-masing kategori usaha. Perkembangan UMKM di Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan, jumlah usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Kendal pada Tahun 2016 mencapai 33.216 UMKM. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan capaian Tahun 2011 yang sebanyak 11.055 UMKM.

Dalam rangka meningkatkan daya saing dilakukan peningkatan produk dan promosi produk UMKM melalui pengembangan sarana dan prasarana pemasaran serta penyelenggara promosi produk UMKM. Penyelenggaraan promosi dilakukan melalui pelaksanaan pameran, dengan presentase UMKM yang mengikuti pameran promosi produk sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) pada tahun 2016.

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Kendal selama tahun 2011-2015 juga mengalami peningkatan dari 50 % (lima puluh persen) tahun 2011 menjadi 71,9 % (tujuh puluh satu koma sembilan persen) pada tahun 2016. Perkembangan capaian pembangunan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.20.
Capaian Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2016

NO.	INDIKATOR	TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	89,5	93,8	96,5	98,9	99,01	na
2.	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	11.055	12.242	17.195	17.682	17.744	33.216
3.	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	10	15	15	20	25	75
4.	Persentase Koperasi aktif	50	48	56	71	71,4	71,9
5.	Jumlah Produk Unggulan Daerah	6	7	9	10	11	5

Sumber: *Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun 2016*

j. Penanaman Modal

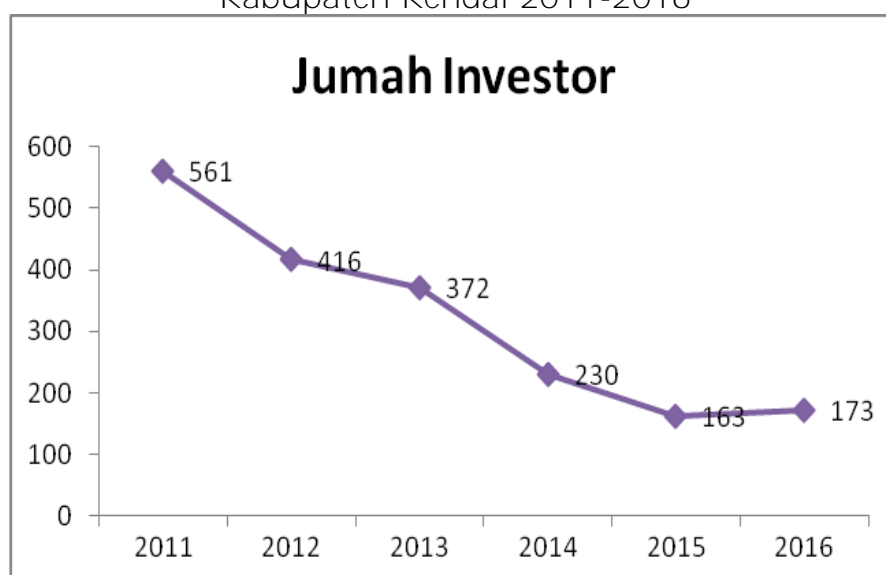
Penanaman Modal adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Jumlah informasi peluang usaha

sektor/bidang usaha unggulan dalam setahun di Kabupaten Kendal selama 5 tahun terakhir sebanyak 5 informasi setiap tahunnya. Sementara fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan dan promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota baru dilaksanakan selama 1 kali dalam 1 tahun.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami penurunan. Tahun 2011 jumlah investor sebanyak 561, Tahun 2015 menurun menjadi 163 namun pada tahun 2016 meningkat menjadi 173. Kondisi tersebut salah satu faktornya adalah dikarenakan pembagian urusan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satunya mengatur terkait UMKM dan Industri. jenis pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal sebanyak 17 jenis. Jenis pelayanan yang dilayani dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sebanyak 2 jenis.

Dalam rangka mendukung daya tarik investasi, BPMPT Kabupaten Kendal juga telah memiliki peta potensi investasi. Dengan peta tersebut diharapkan para calon investor bisa memilih potensi yang ingin dikembangkan di wilayah Kabupaten Kendal. Capaian kinerja urusan penanaman modal lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Gambar 2.32.
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Kendal 2011-2016



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, Tahun 2017

k. Kepemudaan dan Olahraga

Dari sisi pembangunan kepemudaan, di Kabupaten Kendal terdapat banyak wadah organisasi yang bisa dimanfaatkan oleh para pemuda.

Organisasi tersebut sifatnya beragam, mulai dari organisasi kepemudaan yang berbasis keagamaan seperti Gerakan Pemuda Anshor, Pemuda Muhammadiyah, IPNU, IPPNU, Fatayat NU, Nasiyatul Aisyah (NA). Selain itu juga organisasi kepemudaan yang bersifat nasionalis misalnya KNPI, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, PKK remaja dan sebagainya. Semua organisasi tersebut tentunya harus mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan karena potensi pemuda tersebut bisa dimanfaatkan dalam berbagai proses pembangunan. Dari data yang ada, 100% organisasi pemuda yang ada dan terdaftar di Kabupaten Kendal telah dibina.

Tabel 2.21.
Capaian Kinerja Kepemudaan
Kabupaten Kendal tahun 2011-2016

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pemuda yang mendapatkan pelatihan	orang	255	268	275	290	300
2.	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	%	87	92	94	98	100

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2016

Sementara itu di bidang olahraga, organisasi olahraga yang berkembang dan dibina sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 29 klub. Cabang Olahraga Berprestasi tahun 2011 sebanyak 18 cabang olahraga, Tahun 2015 meningkat menjadi 50 cabang olahraga. Gedung dan lapangan olahraga sebagai salah satu fasilitas olahraga, telah banyak jumlahnya di Kabupaten Kendal. Tahun 2011 jumlah gedung olahraga dan lapangan olahraga sebanyak 80 buah, tahun 2015 meningkat menjadi 665 buah.

Tabel 2.22.
Gambaran Kegiatan Pembinaan Keolahragaan
Kabupaten Kendal tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah klub olahraga	Klub	25	26	28	29	29
2.	Jumlah gedung olahraga	Unit	80	125	258	665	665

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2016

I. Perpustakaan

Kabupaten Kendal memiliki perpustakaan umum dan khusus yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan selama 5 tahun. Tahun 2015 jumlah perpustakaan sebanyak 20 perpustakaan. Jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten

Kendal dari tahun ke tahun juga meningkat, kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan minat baca masyarakat. Data terakhir tahun 2015 menunjukkan bahwa pengunjung perpustakaan mencapai 13.200 kunjungan. Selain itu jumlah bahan bacaan koleksi perpustakaan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan sampai tahun 2015 mencapai 28.000 judul buku.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pustakawan, Kabupaten Kendal memfasilitasi peningkatan kapasitas pustakawan. Jumlah Pengelola perpustakaan umum dan khusus yang mengikuti Bimbingan Teknis tahun 2011 sebanyak 30 orang, Tahun 2015 jumlah pustakawan yang mendapat bimtek sebanyak 35 orang. Sementara itu jumlah pustakawan yang mendapatkan sertifikasi sebanyak 3 orang.

Gambar 2.33.
Capaian Kinerja Perpustakaan
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Kendal, Tahun 2016

2.3.3. Pelayanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Kendal. Berikut adalah layanan urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

a. Kelautan dan Perikanan

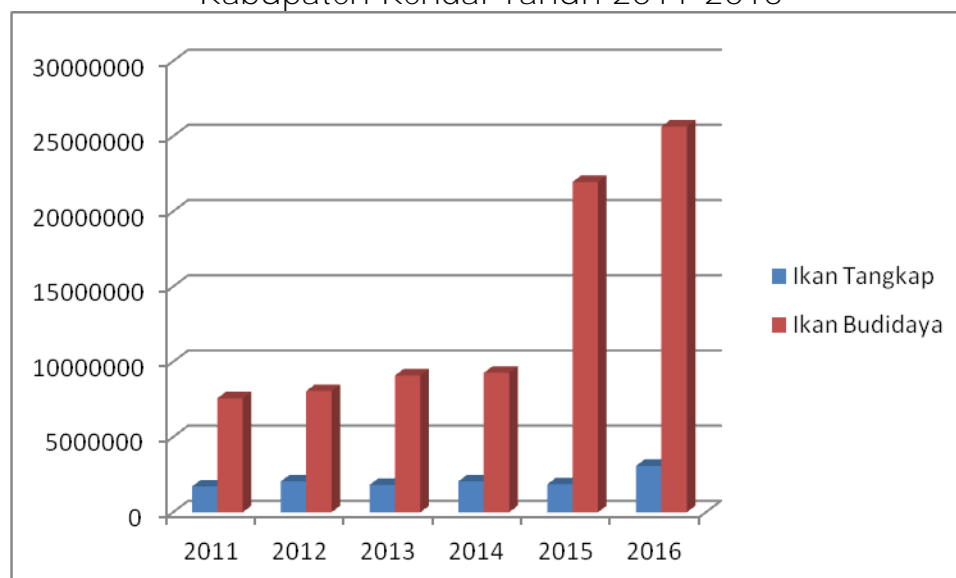
Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kewenangan berkaitan dengan perikanan tangkap meliputi: pemberdayaan

nelayan kecil; dan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu Tahun 2011-2016 fluktuatif, dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 produksi perikanan tangkap sebanyak 1.368.113 Kg, pada tahun 2016 menjadi 3.086.445 Kg. Dalam upaya peningkatan kapasitas nelayan, Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan pembinaan kelompok nelayan. Cakupan bina kelompok nelayan tahun 2011-2016 berkisar antara 6 (enam) kelompok hingga 24 (dua puluh empat) kelompok.

Berkaitan dengan perikanan budidaya, kewenangan yang dimiliki kabupaten yaitu: Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan; pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Produksi perikanan budidaya Tahun 2011-2016 meningkat secara signifikan dari sebesar 7.583.644 kg menjadi sebesar 23.116.793 kg. Peningkatan produksi perikanan budidaya tersebut dipengaruhi oleh upaya pemerintah Kabupaten Kendal dalam melakukan pembinaan dan pemberian bantuan kepada kelompok budidaya perikanan. Tingkat cakupan bina kelompok ikan selama 2011-2016 berkisar antara 6 hingga 38 kelompok. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun cakupan bina kelompok ikan capaiannya relatif kecil, namun mampu meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya.

Kabupaten Kendal memiliki potensi perikanan yang cukup besar, namun tingkat konsumsi ikan penduduk relatif rendah. Tingkat konsumsi ikan penduduk sampai dengan tahun 2016 sebesar 19,37 %, meningkat dari tahun 2010 sebesar 12,56%. Dalam rangka meningkatkan tingkat konsumsi ikan dan nilai tambah perikanan, Pemerintah Kabupaten Kendal mendorong masyarakat untuk memproduksi produk olahan ikan yang memenuhi standar mutu. Jumlah produksi hasil olahan ikan cenderung meningkat dari sebesar 2.095.920 kg pada Tahun 2011 menjadi sejumlah 25.645.957 kg pada tahun 2016. Peningkatan produksi dan kualitas produk hasil olahan ikan dipengaruhi oleh pembinaan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan, dengan cakupan bina kelompok pengolah dan pemasaran berkisar antara 10 kelompok hingga 20 kelompok. Jumlah usaha pengolahan ikan yang menerapkan standar mutu meningkat dari sebanyak 73 unit pada Tahun 2011 menjadi 90 unit pada Tahun 2016.

Gambar 2.34.
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kendal, Tahun 2017

b. Pariwisata

Kunjungan Wisata di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari Tahun 2011-2016. Tahun 2011 sebanyak 140.825 orang, tahun 2016 meningkat menjadi 159.721. Meningkatnya kunjungan wisatawan juga berdampak positif terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kendal. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2011 sebanyak Rp. 438.884.000, Tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 1.421.349.700.

Jumlah obyek wisata unggulan di Kabupaten Kendal juga semakin meningkat. Jika pada tahun 2011 hanya ada 5 obyek, maka pada Tahun 2016 meningkat menjadi 22 obyek. Obyek wisata di Kabupaten Kendal yang paling banyak pengunjungnya adalah pantai sendang sikucing dan air terjun curug sewu.

Seiring dengan perkembangan sektor pariwisata, restoran dan penginapan juga mulai berkembang. Jenis, kelas, dan jumlah restoran sampai dengan Tahun 2016 mencapai 88 restoran, dan 24 hotel kelas melati serta 2 hotel bintang.

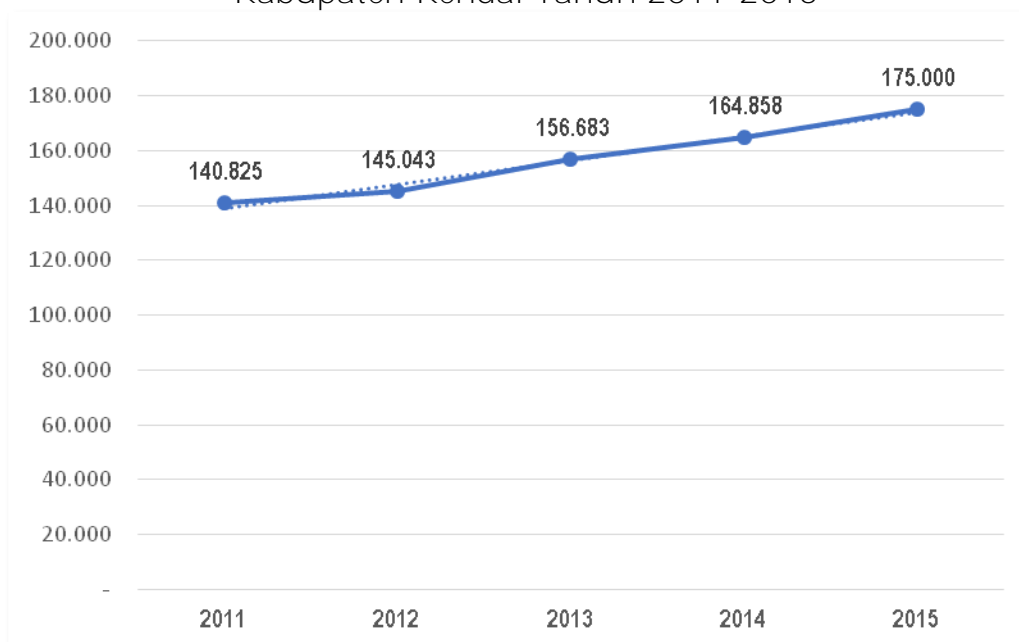
Tabel 2.23.
Jumlah Pengunjung dan Pemasukan Daya Tarik Wisata
Kabupaten Kendal tahun 2011-2016

No	Indikator	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pengunjung	140.825	145.043	121.916	164.585	183.020	159.721
2	Total	438.884.	803.916.	869.254.	858.325.	1.093.243	1.421.349

No	Indikator	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
.	Pendapatan dari Pengunjung dan Kendaraan	000	000	000	000	.000	.700

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2016

Gambar 2.35.
Jumlah Kunjungan Wisata
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2016

c. Pertanian

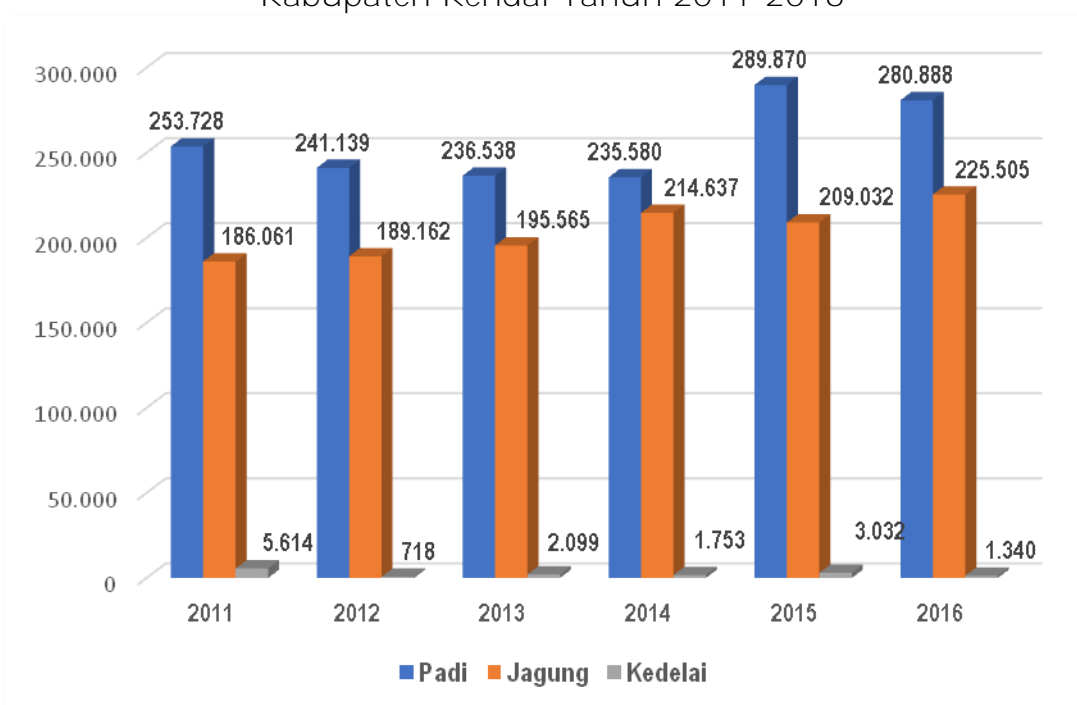
Sektor atau urusan pertanian merupakan salah satu potensi ekonomi utama di Kabupaten Kendal yang dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui sistem agribisnis. Perekonomian daerah ini salah satunya tergantung dari usaha pertanian. Pembangunan bidang pertanian yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, dan peternakan merupakan salah satu program utama pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas, sekaligus untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.

Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan utama Kabupaten Kendal yaitu padi sawah, jagung dan kedelai. Jumlah produksi padi dalam kurun waktu lima tahun (2011-

2016) menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kenaikan dan penurunan jumlah produksi yang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2011 produksi padi mencapai 253.728 ton, sampai tahun 2016 kenaikannya menjadi 280.888 ton. Produksi jagung dalam kurun waktu yang sama juga mengalami tren peningkatan, meskipun tahun 2015 justru turun dibandingkan tahun 2014. Tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 225.505 ton dari produksi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 209.032. Jika pada tahun 2011 produksi jagung sebesar 186.061 ton, pada tahun 2016 naik produksinya mampu mencapai 225.505 ton. Sedangkan untuk produksi kedelai, selama enam tahun terakhir tahun justru kondisinya mengalami penurunan meskipun pada tahun 2015 kondisinya membaik tetapi pada tahun 2016 terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan hanya mampu memproduksi sebesar 1.340 ton.

Gambar 2.36.
Produksi Pertanian Tanaman Pangan Utama
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2016



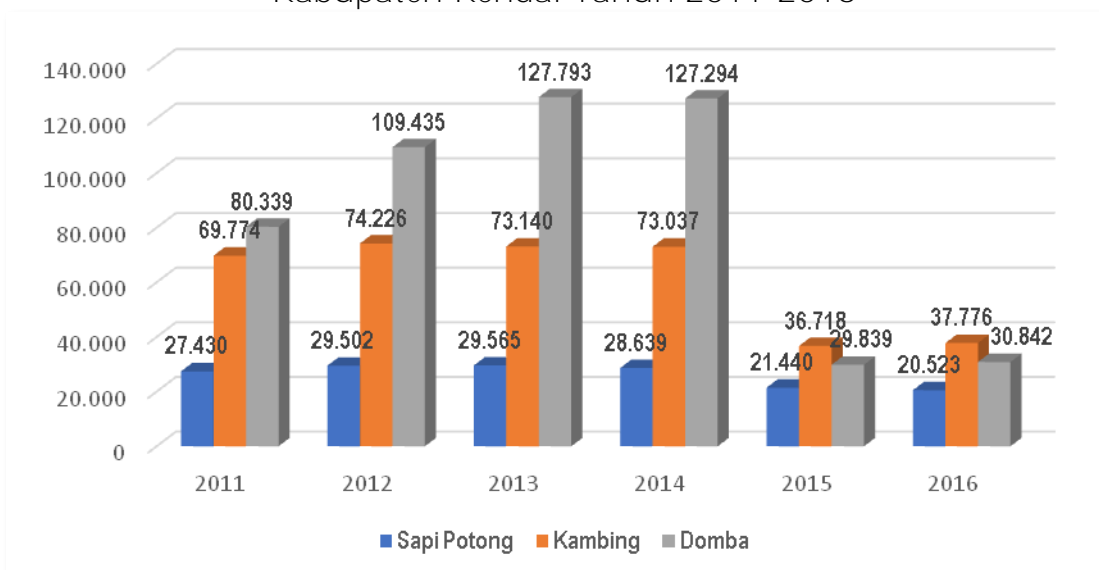
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016 (diolah)

Peternakan

Komoditas peternakan yang populasinya mengalami peningkatan adalah ayam potong, untuk produksi sapi potong, kambing, dan domba justru mengalami penurunan. Sedangkan untuk produksi daging, semua jenis daging mengalami kenaikan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian dan peternakan antara lain adalah dengan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap kelompok tani dan ternak yang ada. Cakupan kelompok bina tani di Kabupaten Kendal mencapai 51%. Sedangkan kelompok ternak yang mampu menerapkan teknologi peternakan

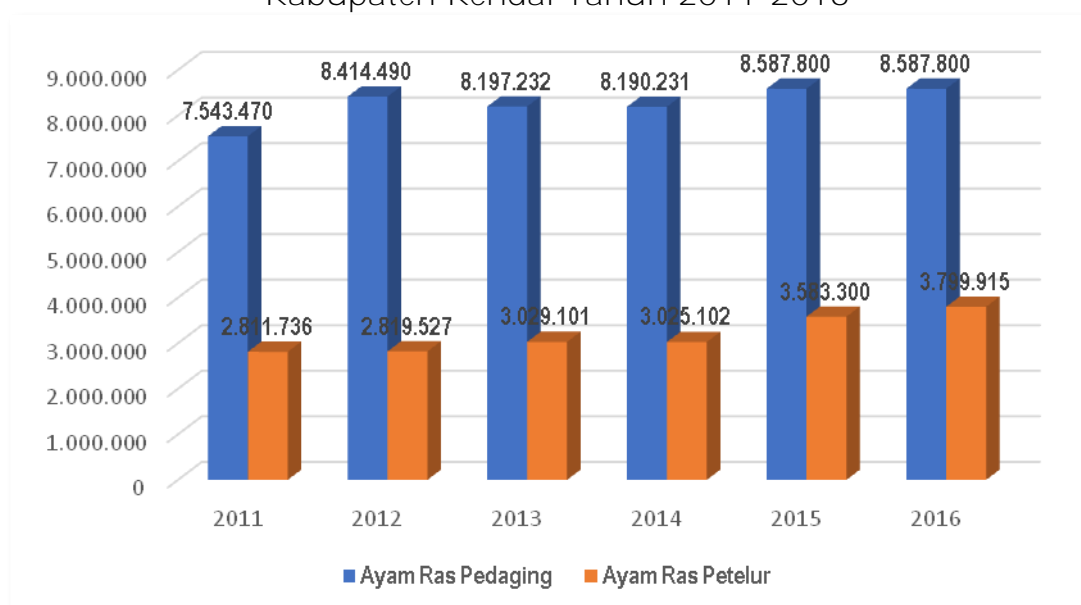
sebanyak 84% yang diharapkan mampu meningkatkan produksi peternakan. Produksi peternakan Kabupaten Kendal selama enam tahun terakhir (2011-2016) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.37.
Produksi Sapi Potong, Kambing dan Domba
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016 (diolah)

Gambar 2.38.
Produksi Ayam Ras Pedaging dan Ras Petelur
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016 (diolah)

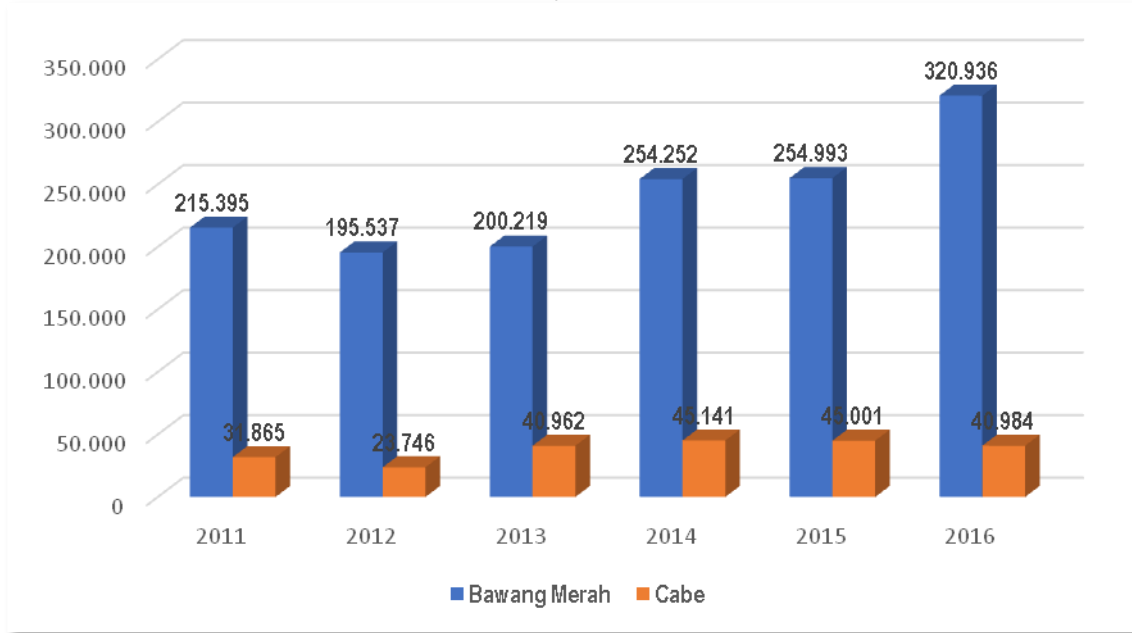
✚ Perkebunan

Terdapat kurang lebih 20 jenis komoditi perkebunan di Kabupaten Kendal. Dari 20 jenis tersebut terdapat beberapa komoditi yang memberikan sumbangsih cukup signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Kendal. Produk-produk perkebunan tersebut antara lain tebu, tembakau, kopi, cengkeh, karet, kelapa, dan kakao. Produksi hasil perkebunan

yang disebutkan tadi meskipun memberikan kontribusi yang cukup baik dalam perekonomian.

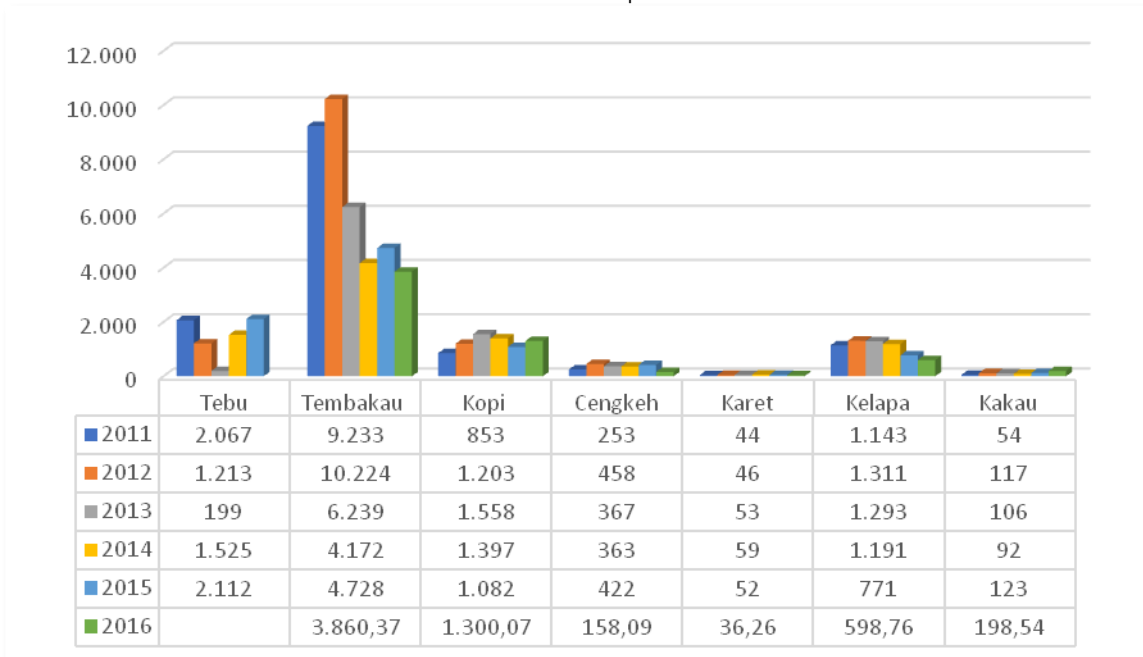
Produksi tanaman hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Produksinya cukup baik. Tanaman hortikulutra berupa bawang merah dan cabe produksinya selama enam tahun trennya mengalami peningkatan. Demikian juga dengan produksi perkebunan kondisinya juga banyak yang meningkat. Komoditas perkebunan yang produksinya mengalami penurunan adalah kelapa dan tembakau. Data produksi perkebunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.39.
Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Kendal Tahun 2011-2016 (kwintal)



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016 (diolah)

Gambar 2.40.
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016 (diolah)

d. Perdagangan

Urusan perdagangan di Kabupaten Kendal dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 untuk nilai perdagangan luar negeri berfluktuatif. Nilai perdagangan luar negeri dari tahun 2011 hingga tahun 2012 menunjukkan adanya peningkatan dimana tahun 2014 mencapai 447.639.743,28 US juta dollar. Kondisi ditahun berikutnya yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan penurunan, dimana tahun 2016 nilai perdagangan luar negeri hanya mencapai 135.487.229,06 US juta dollar. Peningkatan nilai perdagangan luar negeri tahun 2012 didukung oleh ketersediaan dokumen tentang data dan informasi kebijakan dan peluang pasar luar negeri yang lebih banyak dibandingkan tahun yang lain. Upaya lain yang dilakukan selama 5 tahun untuk meningkatkan perdagangan di Kabupaten Kendala adalah dengan mengikuti pameran dan promosi perdagangan baik ditingkat regional, nasional dan internasional yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

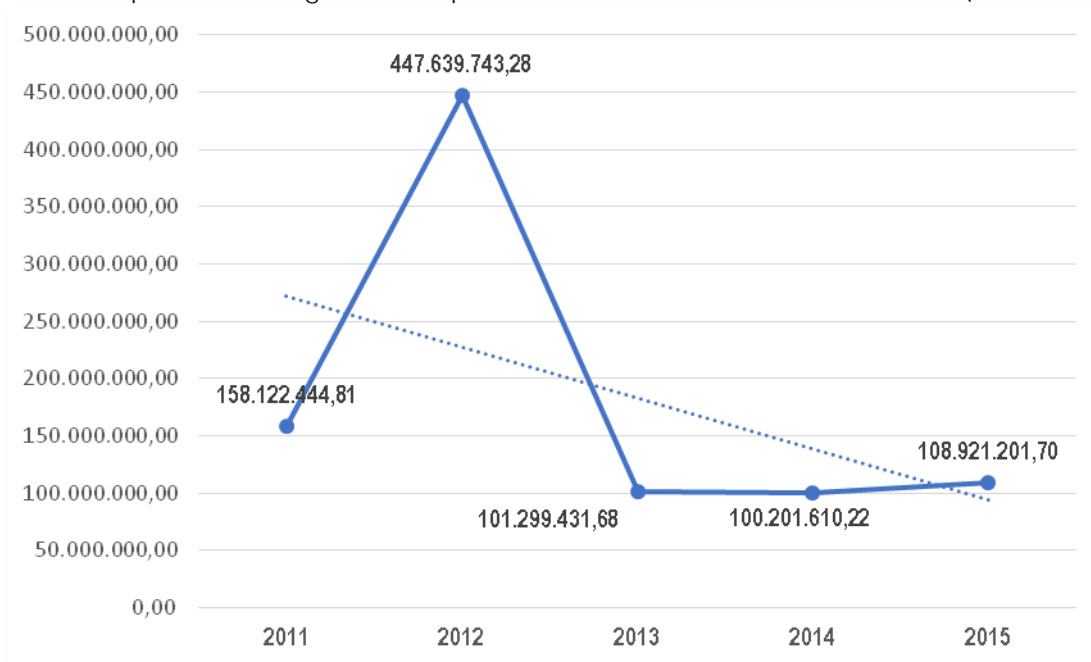
Upaya lain untuk meningkatkan perdagangan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat adalah ketersediaan prasarana perdagangan. Tahun 2015 jumlah pasar tradisional di Kabupaten Kendal sebanyak 12 unit dan jumlah pasar desa sebanyak 24 unit. Untuk jumlah pasar tradisional yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan belum tersedia. Selain itu juga terdapat toko-toko modern dan juga pasar swalayan. Jumlah toko modern di Kabupaten Kendal selalu meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang ada, toko modern yang tersebar di wilayah Kabupaten Kendal sebanyak 56 unit. Jumlah tersebut meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2011 yang hanya berjumlah 5 unit saja. Selain itu juga terdapat 4 unit pasar hewan, dan 2 unit pasar sepeda di wilayah Kabupaten Kendal.

Dalam rangka mendukung kinerja perdagangan dalam negeri khususnya di pasar-pasar tradisional, telah dilaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap kelompok-kelompok pedagang yang ada. Kelompok pedagang informal yang tercatat sampai tahun 2016 jumlahnya mencapai 600 kelompok. Hanya saja kendala yang dihadapi adalah belum semua kelompok yang ada tersebut dapat dibina oleh Pemerintah, hal tersebut tentunya karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah.

Kewenangan lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perdagangan adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Upaya yang telah dilakukan dalam 2 tahun terakhir meliputi uji tera metrologi sebanyak 53 pelaku usaha setiap tahunnya. Hal lain yang dilakukan terkait dengan

perlindungan konsumen adalah kegiatan pengawasan terhadap peredaran barang dan sosialisasi perlindungan konsumen yang bekerjasama dengan LSM terkait dan rutin dilakukan setiap tahunnya.

Gambar 2.41.
Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015 (US Dollar)



Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Kendal 2016 (diolah)

e. Perindustrian

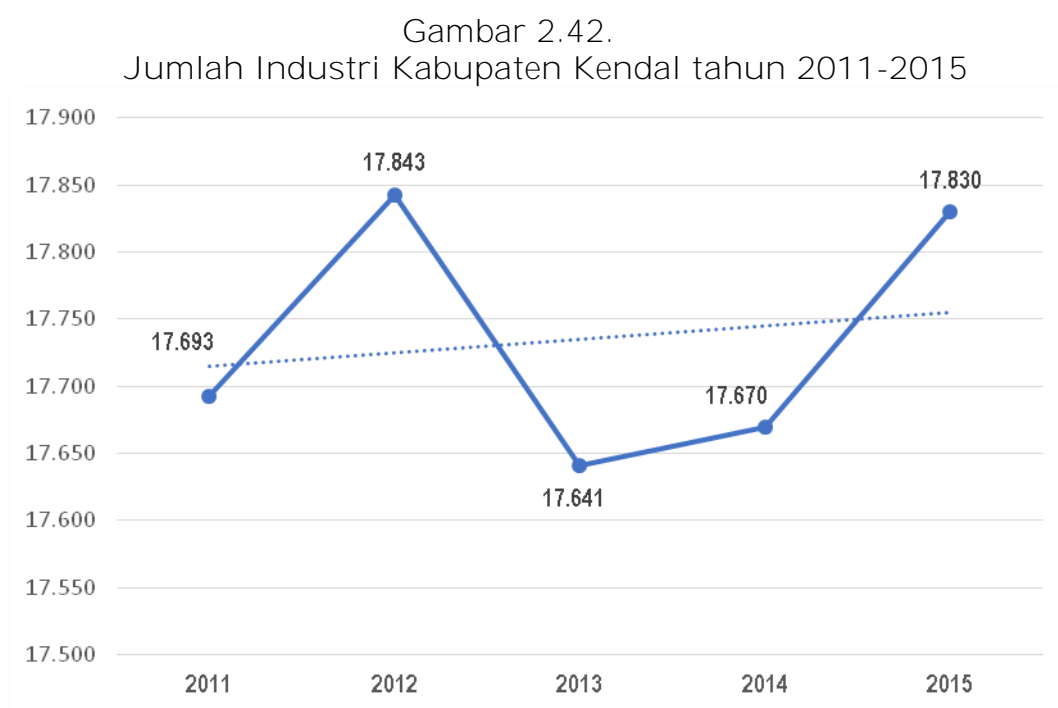
Gambaran perindustrian di Kabupaten Kendal tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan untuk jumlah industri di tahun 2011 sebanyak 17.893 industri menjadi 17.830 industri di tahun 2015. Dari jumlah industri tersebut telah dilakukan paya pengembangan dimana sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai 80%. Bentuk pengembangan dan pembinaan yang dilakukan diantaranya adalah fasilitasi ijin usaha industri kecil melalui P-IRT bagi industri kecil makanan dan minuman. Fasilitasi ini dilaksanakan sejak tahun 2013, dan sampai saat ini sudah 65 industri kecil makanan dan minuman terfasilitasi dan telah memiliki P-IRT. Selain itu juga para pelaku industri kecil dan menengah telah difasilitasi untuk mengikuti pameran promosi produk yang diselenggarakan setiap tahun. Pelaku industri kecil dan menengah yang terfasilitasi untuk mengikuti pameran promosi produk meskipun masih terbatas namun jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hasil yang didapat dari pengembangan industri adalah persentase industri yang telah menerapkan standar industri meningkat 5 % di tahun 2011 sebesar 75% menjadi 80% di tahun 2015.

Hasil lainnya dari upaya pengembangan yang dilakukan menunjukkan IKM yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksinya mencapai

20%. Sedangkan persentase IKM yang menghasilkan jenis produk bersertifikasi sesuai dengan standar produk nasional mencapai 25%. Untuk lebih meningkatkan kapasitas IKM telah dilakukan fasilitasi kerjasama antara IKM dengan industri berskala menengah dan besar dimana di tahun 2014 sudah mencapai 80%. Upaya lainnya adalah dengan meningkatkan ketrampilan SDM yang ada dengan mengikutsertakan dalam pelatihan ketrampilan yang mencapai 80% dan pemberian bantuan peralatan dimana pada tahun 2013 sudah mencapai 90%.

Terkait dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB, Industri pengolahan memiliki kontribusi yang paling besar pada struktur PDRB Kabupaten Kendal, dimana pada tahun 2013 industri pengolahan. Sedangkan jika menurut harga berlaku, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB adalah sebesar 32,84%.

Perkembangan perindustrian di Kabupaten Kendal, khususnya yang termasuk dalam kategori industri mikro, kecil dan menengah oleh Pemerintah Kabupaten Kendal juga disertai dengan beberapa fasilitasi kegiatan pengembangan.



Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016 (diolah)

2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

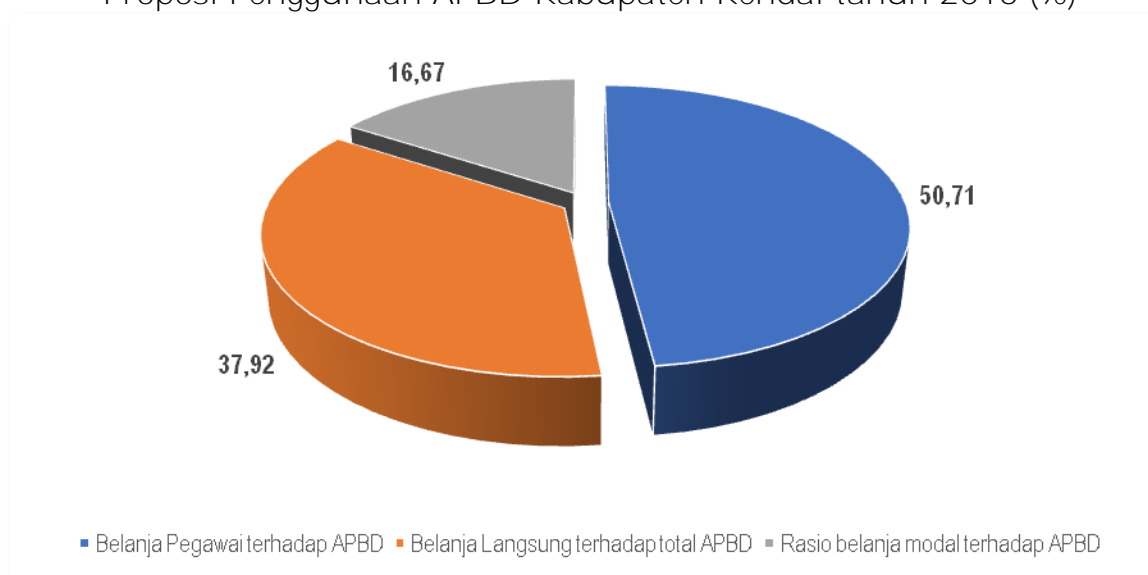
Unsur penunjang dibentuk membantu kepala daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

a. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kendal selama kurun waktu 2011-2015 mengalami perkembangan yang cukup baik. Apabila dilihat dari beberapa indikator yang ada menunjukkan adanya capaian yang terus meningkat. Kondisi keuangan daerah di Kabupaten Kendal relatif cukup baik, total pendapatan di Kabupaten Kendal mampu digunakan untuk membiayai belanja. Rasio realisasi belanja daerah terhadap Total pendapatan menunjukkan bahwa realisasi belanja masih di bawah 100%, yang artinya terjadi penghematan dalam belanja atau terjadi surplus dalam APBD. Dari tahun 2011-2015 rasio realisasi belanja mengalami penurunan dari 94% tahun 2011 menjadi 85% pada tahun 2015. Selain itu rasio belanja Pegawai terhadap APB cukup baik yaitu 53% pada tahun 2015, kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan alokasi anggaran untuk belanja langsung yang lebih ditujukan kepada masyarakat cukup besar. Pengelolaan keuangan Kabupaten Kendal pada tahun 2015 telah mencapai penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Gambar 2.43.
Proporsi Penggunaan APBD Kabupaten Kendal tahun 2015 (%)

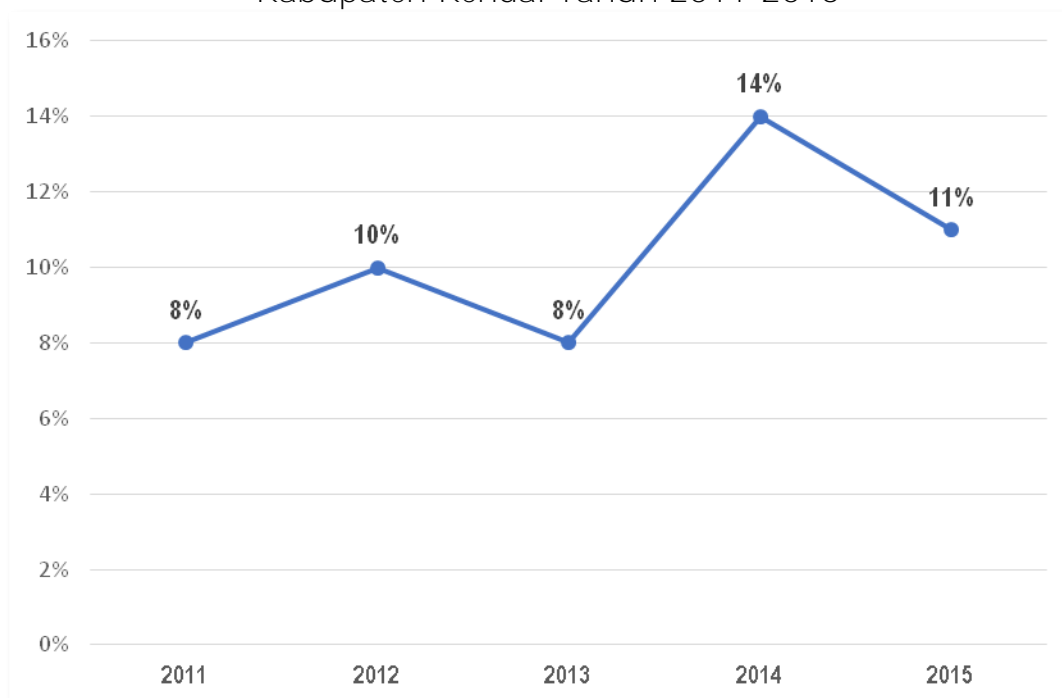


Sumber: Badan Keuangan Daerah

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan yang lain adalah meningkatnya proporsi dan nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD terhadap total pendapatan menunjukkan capaian meningkat dari tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 proporsi hanya sebesar 8% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 11%, bahkan pada tahun 2014 mencapai 14%. Proporsi

PAD terhadap potensi PAD yang ada juga mencerminkan kinerja yang bagus yaitu capainnya mencapai 105% pada tahun 2015, proporsi PAD terhadap potensi yang ada dari tahun 2011-2015 fluktuatif. Proporsi tertinggi dicapai tahun 2014 yaitu sebesar 130%. Artinya kemampuan daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerah cukup besar.

Gambar 2.44.
Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015



Sumber: Badan Keuangan Daerah

2.4. ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

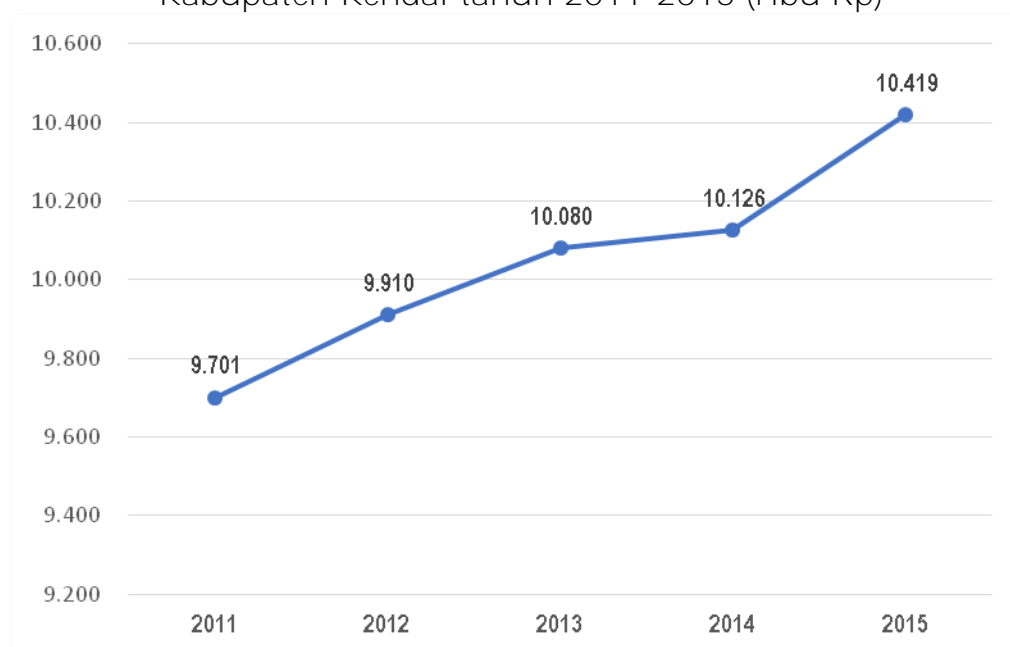
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah bertujuan untuk mengetahui kualitas ekonomi suatu daerah yang dilihat dari pengeluaran perkapita. Semakin tinggi pengeluaran perkapita maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut.

a. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal dari tahun 2011-2015 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2011, capaian pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 9.701.000/kapita/tahun dan meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 10.419.000/kapita/tahun. Capaian tersebut sudah di atas rata-rata Jawa Tengah. Meningkatnya capaian pengeluaran per kapita ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sebagai simbol dari meningkatnya kesejahteraan juga semakin baik. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.20 di bawah ini.

Gambar 2.45.
Perkembangan Pengeluaran Perkapita
Kabupaten Kendal tahun 2011-2015 (ribu Rp)



Sumber: *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2016* diolah

2.4.2. Fasilitas Infrastruktur/Wilayah

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut, kawasan industri, air baku dan bersih, hingga fasilitas perumahan.

a. Panjang Jalan

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah 1.002,23 Km² dan terbagi ke dalam 20 wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 770,993 km (jalan kewenangan Kabupaten Kendal). Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2015 sebesar 37,10% dalam kondisi baik dan sisanya 62,9% dalam kondisi rusak.

b. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang strategis karena berada di poros utama transportasi Pulau Jawa bagian utara. Tersedia 4 terminal di wilayah Kabupaten Kendal yang melayani transportasi baik dalam kota maupun keluar kota. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui terminal-terminal yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 penumpang angkutan umum sebanyak 3.433.256 orang, meningkat menjadi 4.742.465 orang pada tahun 2015.

c. Ketaatan Terhadap RTRW

Saat ini Kabupaten Kendal telah memiliki peraturan mengenai tata ruang dan rencana pengembangannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal. Tingkat ketaatan terhadap Perda RTRW juga cukup baik, tercatat sampai tahun 2015 hanya terdapat 4 kasus pengaduan terkait pelanggaran tata ruang dan semuanya dapat diatasi oleh instansi yang berwenang.

d. Luas Wilayah Industri

Luas kawasan industri di Kabupaten Kendal sesuai dengan apa yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal adalah 1.200 hektar. Adapun pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kendal terletak di Kecamatan Kaliwungu. Sejak tahun 2014 Kabupaten Kendal mulai mengembangkan kawasan industri terpadu yang terletak di Kecamatan Kaliwungu. Lahan yang direncanakan untuk pengembangan awal adalah 2.770 ha.

e. Luas Wilayah Kebanjiran

Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir memang belum tersedia, namun jika dilihat dari kawasan yang rawan terkena bencana banjir dapat diketahui ternyata terdapat 9 wilayah kecamatan yang rawan terkena bencana banjir. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kendal, Patebon, Ngampel, Kaliwungu, Brangsong, Cepiring, Kangkung, Rowosari, dan Weleri. Luas wilayah yang berpotensi terkena banjir di Kabupaten Kendal mencapai 55.600,21 Ha.

f. Luas Wilayah Kekeringan

Selain banjir, Kabupaten Kendal juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah daerah Patebon, Kaliwungu, Kaliwungu selatan, Ngampel, Pegandon, Brangsong, Gemuh, Cepiring. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah

lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Luas daerah yang berpotensi terkena bencana kekeringan adalah 99.972,78 Ha.

g. Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal menetapkan bahwa wilayah perkotaan terbagi atas 3 pusat kegiatan. Pertama adalah Pusat kegiatan nasional yang selanjutnya di sebut sebagai PKN adalah kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala nasional. Kedua Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Dan yang ketiga adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Kabupaten Kendal sebagai Pusat Kegiatan Nasional bersama dengan Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur). Wilayah yang termasuk dalam pusat kegiatan lokal adalah Kendal, Weleri, Boja, Kaliwungu, dan Sukorejo. Sedangkan pusat pelayanan kawasan adalah Kecamatan Pegandon.

h. Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Jumlah restoran yang ada di Kabupaten Kendal dari tahun 2010 sampai tahun 2015 menunjukkan peningkatan. Tahun 2010 restoran di Kabupaten Kendal berjumlah 70 buah, dan di tahun 2015 meningkat menjadi 88 buah.

i. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel yang ada di Kabupaten Kendal total berjumlah 25 buah. Sedangkan dilihat dari kelasnya, 23 buah hotel tersebut merupakan hotel kelas melati dan 2 hotel bintang. Salah satu penyebab kurang berkembangnya perhotelan di Kabupaten Kendal adalah karena letak geografisnya yang berdekatan dengan Kota Semarang. Banyak orang yang berkunjung ke Kabupaten Kendal lebih memilih untuk menginap di Kota Semarang karena fasilitasnya lebih lengkap.

j. Pelayanan Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut karena indikator ini menjadi salah satu indikator kunci pembangunan. Tahun 2010 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Kendal sebesar 60%, kemudian pada tahun 2015 pencapaiannya sudah sampai pada angka 75%

2.4.3. Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan perijinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha.

Suatu investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik, regulasi tersebut diantaranya adalah adanya kemudahan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi. Selain itu situasi yang kondusif bagi investasi juga perlu diperhatikan agar stabil.

a. Angka Kriminalitas

Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Kendal selama 5 tahun kondisinya fluktuatif, sempat menurun dari tahun 2011 sampai tahun 2012, namun dari 2013 sampai 2014 justru mengalami kenaikan. Tahun 2010 kasus kriminal yang terjadi sebanyak 293, dan tahun 2015 sebanyak 150 kasus.

Kasus kriminal yang paling menonjol terjadi di wilayah Kabupaten Kendal adalah pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Data terakhir menunjukkan kasus pencurian yang terjadi sebanyak 80 kasus, sedangkan penyalahgunaan narkoba sebanyak 31 kasus.

b. Kemudahan Perijinan

Pelayanan perijinan di Kabupaten Kendal saat ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu. dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi.

Jenis perijinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal meliputi Izin Prinsip, Izin Lokasi / Keterangan Lokasi, Izin Gangguan, Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan

(IMMB), Izin Trayek, Izin Kartu Pengawasan Angkutan Dengan Kendaraan Umum, Izin Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum, Izin Usaha Angkutan Barang Dengan Kendaraan Umum, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Reklame, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Kepariwisata / Dan Pengelolaan Obyek Wisata, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), dan Izin Usaha Toko Modern.

Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan bervariasi, mulai dari 3 hari sampai 14 hari. Lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.24.
Jenis Ijin dan Lama Proses Pengurusannya

No	Jenis Ijin	Lama Proses Ijin
1.	Izin Usaha Kepariwisata	12 hari
2.	Izin Gangguan HO	14 hari
3.	Izin Kartu Pengawasan Angkutan dengan Kendaraan Umum	3 hari
4.	Izin Lokasi/Keterangan Lokasi	14 hari
5.	Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB)	14 hari
6.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	14 hari
7.	Izin Reklame	14 hari
8.	Izin trayek	14 hari
9.	Izin Usaha Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum	5 hari
10.	Izin Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum	5 hari
11.	Persetujuan / Izin Prinsip	14 hari
12.	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	12 hari
13.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 hari
14.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	12 hari
15.	Tanda Daftar Industri (TDI)	7 hari
16.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	7 hari

Sumber: *BPMPT Kabupaten Kendal, 2015*

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas

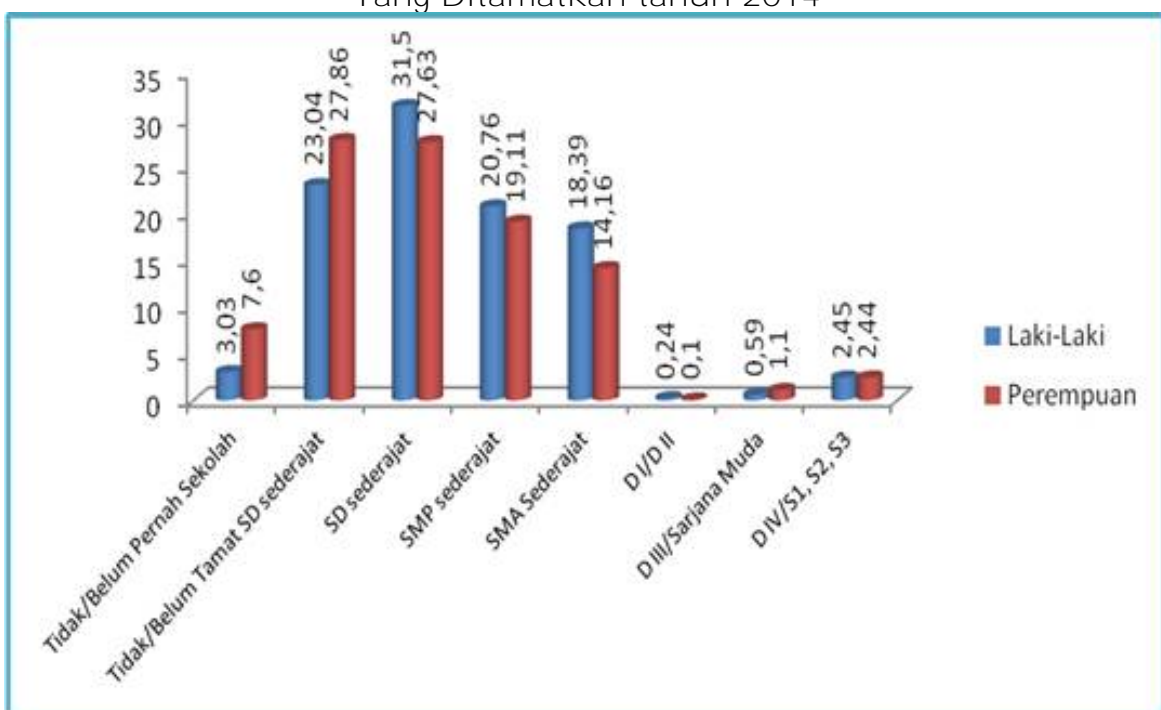
penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

a. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

Gambar 2.46.
Persentase Penduduk kabupaten Kendal Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan tahun 2014

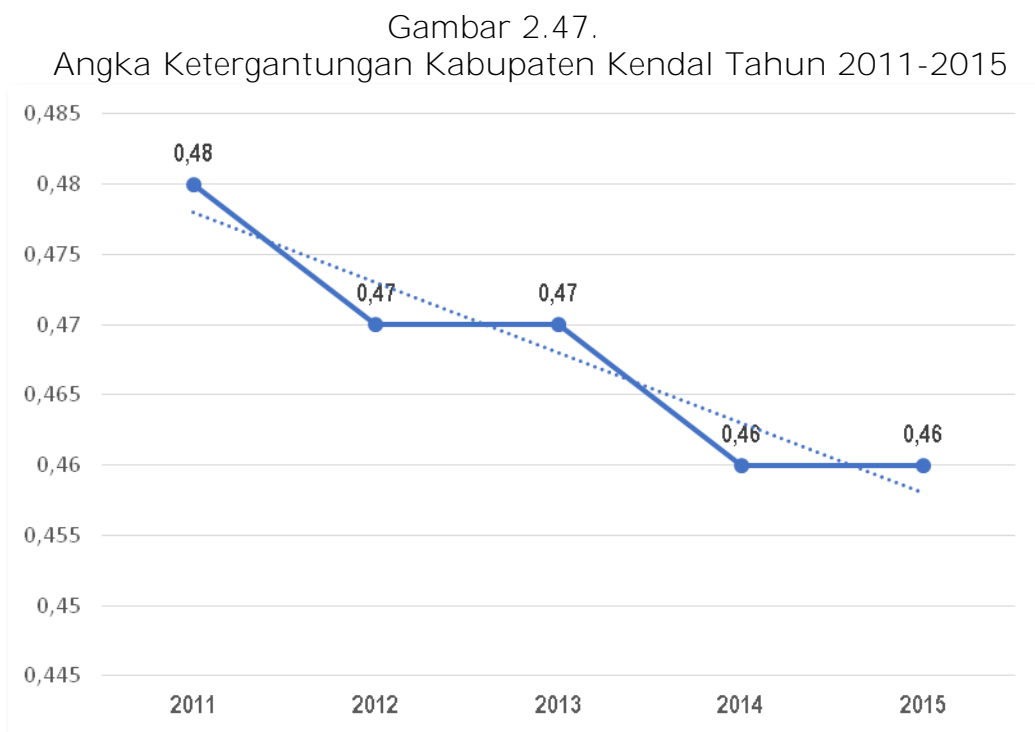


Sumber: Kendal dalam Angka Tahun 2015

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Kendal berpendidikan SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah penduduk yang tidak/belum tamat SD, berikutnya adalah kelompok lulusan SMP sederajat dan kelompok lulusan SMA sederajat.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk Kendal dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami penurunan. Dari 0,48 pada tahun 2011 menjadi 0,46 di tahun 2015. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Kendal menanggung 46 orang usia non produktif, dan termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi (tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41).



Sumber: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2016

2.5. HASIL CAPAIAN KINERJA GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan Kabupaten Kendal memiliki berbagai kebijakan strategis untuk mencapai tujuan akhir pembangunan yakni menyejahterakan masyarakat secara adil, merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap perencanaan pembangunan berikutnya harus mengevaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya melalui data dan informasi yang valid dan relevan. Berikut ini adalah tabel realisasi capaian kinerja Kabupaten Kendal yang dapat digunakan sebagai bahan kajian perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Kendal periode mendatang.

Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kabupaten Kendal 2011-2016

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</u>								
<u>I</u>	<u>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</u>							
1.1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6,57	5,21	6,22	5,17	5,17	
1.2	PDRB ADHB	Milyar Rp	21.121,51	23.012,02	25.274,54	28.210,95	30.939,31	
1.3	PDRB ADHK	Milyar Rp	20.032,43	21.075,71	22.386,12	23.543,96	24.760,52	
1.4	Tingkat inflasi	%	5,89	2,85	3,62	7,99	6,65	
1.5	Jumlah penduduk Kabupaten Kendal	Jiwa					952.966	
1.6	Pertumbuhan penduduk	%		-1,25	0,52	-1,98	0,26	
<u>II</u>	<u>Fokus Kesejahteraan Sosial</u>							
2.1	Tingkat kemiskinan	%	14,26	13,17	12,68	11,80		
2.2	Tingkat pengangguran Terbuka	%	6,54	6,31	6,43	6,15	7,07	
2.3	IPM	Angka	66,96	67,55	67,98	68,46	69,57	
2.4	Angka melek huruf	%						
2.5	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	11,32	11,47	11,6	11,83	12,41	
2.6	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,24	6,36	6,42	6,53	6,64	
2.7	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,98	74,05	74,11	74,14	74,15	
2.8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,49	92,71	92,87	93,34	93,22	
2.9	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	64,65	60,96	66,56	74,54		
<u>III</u>	<u>Fokus Budaya dan Olahraga</u>							
3.1	Jumlah kelompok seni	Kelompok					602	
3.2	Jumlah gedung kesenian	Unit					1	
3.3	Jumlah organisasi olahraga	Kelompok					29	
3.4	Jumlah gedung/lapangan olahraga	Unit					665	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Aspek Pelayanan Umum</u>								
1	<u>Fokus Layanan urusan Wajib</u>							
1.	<u>Pendidikan</u>							
1.1	Pendidikan Dasar							
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%						
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	%	102,34	103,27	104,01	106,86	106,29	
1.1.3	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	%	86,27	90,25	89,10	93,40	84,73	
1.2	Pendidikan menengah							
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	%	98,12	100,10	100,37	101,84	98,57	
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA/SMK	%						
1.2.3	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	%	74,06	82,31	81,87	85,39	60,24	
1.2.4	Angka Partisipasi Murni SLTA/MA/SMK	%						
2	<u>Kesehatan</u>							
2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	1000 KH	11,7	14,2	9,4	6,8	10,35	
2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	1/100.000 KH	165	123,64	128,8	119,7	148,8	
2.3	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	78	75	89	79	87	
2.4	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	
2.5	Prevalensi balita gizi kurang	%	8,5	2,3	3,52	3,98	3,93	
2.6	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	
2.7	Cakupan pelayanan anak balita	%	90,15	100	84	101,5	98,03	
2.8	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	53,87	50,96	49,46	55,78	71,07	
2.9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 59 bulan	%	0	95,59	98,3	98,98	99,7	
2.10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	96,3	98,94	92,63	95,84	93,71	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.11	Cakupan kunjungan bayi	%	98,8	96,3	69,5	96,8	97	
2.12	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	95,55	95,64	92,42	94,26	93,27	
2.13	Cakupan pelayanan nifas	%	91,7	98,07	89,97	94,11	90,42	
2.14	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	30,3	39,9	37,7	65,3	113	
2.15	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	67,13	77,42	71,04	92	108,73	
2.16	Pelayanan terhadap gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	Orang	26.506	26.138	38.574	26.680	28.706	
2.17	BOR (Bed Occupancy Ratio	%	72,03	71,57	73,39	63,73	76,48	
2.18	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	%	3,92	3,53	4,01	3,04	3,24	
2.19	TOI (Turn Over Interval)	%	1,54	1,4	1	1,73	1	
2.20	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	%	66,94	74,26	76,14	76,52	86,08	
2.21	NDR (Net Death Rate)	%	23,85	22,73	21,65	18,62	19,64	
2.22	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	Skor	76,12	73,66	74,99	74,17	90,18	
<u>3</u>	<u>Pekerjaan Umum</u>							
3.1	Prosentase panjang jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	%	NA	Na	50,75	55,56	59,33	60,30
3.2	Tersedianya dokumen inspeksi jalan dan jembatan	%	100	100	100	100	100	100
3.3	Tersediannya data base jalan dan jembatan yang up to date	%	100	100	100	100	100	100
3.4	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	30	35	40	50	40	
3.5	Prosentase kawasan tangkapan air dalam kondisi baik	%	25	27	29	32	34	
3.6	berkurangnya luasan kawasan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun)	%	NA	NA	NA	39	50	
3.7	Persentase Daerah Irigasi berfungsi baik	%	30	32	37	39	40,5	41,15

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.8	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	41	44	50	54	65	
3.9	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	%	20	23	26	28	30	
3.10	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum	%	Na	59,29	59,92	69,32	75	79
3.11	Persentase penduduk memakai sumber air tidak terlindungi	%	-	-	-	-	15,84	
3.12	Persentase kawasan memiliki RTBL	%	0	5	10	20	20	
3.13	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	10	5	5	5	5	
3.14	Ruang Publik yang berubah peruntukannya	Kasus	2	1	1	2	3	
3.15	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang	Kasus	0	0	0	4	0	
<u>4</u>	<u>Perumahan</u>							
4.1	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	%	60	60,40	65,00	68,70	72,90	
4.2	Prosentase Kawasan Kumuh	%	NA	NA	NA	NA	70,18	
4.3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	%	94,3	94,61	94,97	95,39	95,68	
4.4	Jumlah rumah tangga memiliki tempat tinggal							
	- milik sendiri	RT	-	-	-	-	234.183	
	- kontrak/sewa	RT	-	-	-	-	3.106	
	- bebas sewa	RT	-	-	-	-	23.697	
	- lainnya	RT	-	-	-	-	0	
4.5	Kondisi Rumah tempat tinggal berdasarkan lantai							
	- marmer/keramik/ubin	RT	-	-	-	-	153.642	
	- kayu/papan kualitas tinggi	RT	-	-	-	-	0	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- semen/bata/tanah	RT	-	-	-	-	104.708	
	- bambu/kayu/papan kualitas rendah	RT	-	-	-	-	2.271	
	- lainnya	RT	-	-	-	-	365	
4.6	Kondisi rumah tempat tinggal berdasarkan jenis dinding							
	- tembok	RT	-	-	-	-	152.155	
	- plesteran anyaman	RT	-	-	-	-	0	
	- kayu/bamboo	RT	-	-	-	-	107.996	
	- lainnya	RT	-	-	-	-	835	
4.7	Kondisi rumah tempat tinggal berdasarkan jenis atap							
	- beton/genteng beton	RT	-	-	-	-	2.427	
	- genteng	RT	-	-	-	-	244.439	
	- asbes/seng	RT	-	-	-	-	14.120	
	- sirap/bambu/jerami	RT	-	-	-	-	0	
	- lainnya	RT	-	-	-	-	0	
<u>5</u>	<u>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</u>							
5.1	Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun	Kasus	130	110	144	178	150	
5.2	Jumlah konflik sosial yang terjadi	Kasus	0	0	1	1	1	
5.3	Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan kepada masyarakat	Orang	190	225	1450	240	280	
5.4	Ormas, LSM dan OKP yang melaksanakan peningkatan wawasan kebangsaan	Organisasi	1	1	13	1	0	
5.5	LSM dan Ormas aktif	Organisasi	200	200	200	200	200	
5.6	Banyaknya kelompok patroli x3 patroli dalam sehari	Kali	10	10	10	20	20	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
5.7	Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/ kota	Kecamatan	20	20	20	20	20	
5.8	Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam	Kali	125	175	115	215	213	
5.9	Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/ kota	Orang	9.315		9.382	9.382	9.382	
5.10	Jumlah Linmas	Orang	9.315		9.382	9.382	9.382	
5.11	Jumlah pelanggaran perda dan /atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan	Kasus	75	70	75	80	80	
5.12	Jumlah pelanggaran perda dan /atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan /atau dipantau di tahun bersangkutan	Kasus	79	80	76	81	80	
5.13	Jumlah polisi pamong praja	Orang	59	59	55	53	53	
<u>6</u>	<u>Sosial</u>							
6.1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	NA	26,25	26,05	22,5	22,5	
6.2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	NA	16,25	3	1,2	2,4	
6.3	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	NA	16,66	82,2	100	100	
6.4	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	NA	6,03	4,4	7,3	3,9	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
6.5	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	NA	71	100	100	100	
6.6	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	NA	10	4	4	4	
6.7	Jumlah PMKS	Orang	NA	385.685	385.685	385.685	385.685	
6.8	Jumlah Panti asuhan/Panti Jompo/ Panti Sosial	Unit	14	14	14	14	14	
<u>7</u>	<u>Tenaga Kerja</u>							
7.1	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	478.641	499.395	499.333	501.077	468.158	
7.2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Orang	677.022	685.901	694.906	703.513	712.580	
7.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,7	72,81	71,86	71,22	65,7	
7.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (7)	%	6,54	6,31	6,43	6,15	7,07	7,0
7.5	Rasio Penduduk yang Bekerja/ Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	93,46	93,69	93,57	93,85	92,93	
7.6	Rasio Ketergantungan	%	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	
7.7	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	NA	NA	NA	96,04	100	
7.8	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	94,95	96,24	91,26	96,04	58,96	
7.9	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	NA	NA	NA	66,67	80	
7.10	Keselamatan dan perlindungan	%	15,44	18,44	18,49	24,18	24,84	
7.11	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/PB	%	100	100	100	87,5	92,86	
7.12	Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan	%	0	0	0	0	88,9	
7.13	Prosentase Pemeriksaan Perusahaan	%	67,65	73,05	62,33	60,78	69,77	
7.14	Prosentase Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	38,89	40,51	20	34,78	36,17	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>8</u>	<u>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</u>							
8.1	Jumlah Kelembagaan aktif	Unit	0	2	3	4	4	
8.2	Jumlah kelembagaan PUG	Unit	62	62	62	62	62	
8.3	Jumlah Anggota Perempuan dalam lembaga pemerintah	Orang	5.305	5.259	5.209	4.977	5.237	
8.4	Jumlah Anggota di Lembaga Pemerintah	Orang	11.135	10.842	10.200	9.972	10.354	
8.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	58,99	57,2	NA	NA	NA	
8.6	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	%	14,29	16	14,29	22,22	22,22	
8.7	Rasio KDRT	%	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04	
8.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100	
8.9	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	
8.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	100	100	100	100	100	100
8.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	%	100	100	100	100	100	100
8.12	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	100	100	100	100	100
8.13	Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	0	0	100	100	100
8.14	Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>9</u>	<u>Pangan</u>							
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	84,1	88,4	87	87,9	87,9	82,1
9.2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80	80	75	75	80	83,5
9.3	Penanganan daerah rawan pangan	%	21,4	21,4	35,7	35,7	35,7	42,8
9.4	Persentase Desa/kel rawan pangan yang memiliki lumbung pangan (cadangan pangan 500kg)	%	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	
9.5	Ketersediaan Energi per kapita	%	-	164,4	175,06	169,4	177	158
9.6	Ketersediaan Protein per kapita	%		162,75	176,63	163,49	165	117,11
9.7	Penguatan cadangan pangan	%	-	18,9	18,4	18,4	20,9	27,42
9.8	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	%	-	25	25	50	67,8	70
9.9	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	-	100	100	100	100	100
9.10	Ketersediaan bahan pangan khususnya beras	%	1,15	0,21	0,42	0,41	0,6	
9.11	Ketersediaan bahan pangan khusus konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras (jagung)	%	0,3	1,12	-0,8	1,14	-0,9	
9.12	Jumlah Lumbung Pangan Desa	Desa	6	2	9	-	-	
9.13	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	(kw/ha)	57,02	56,82	52,31	54,01	65,91	55,34
9.14	Produksi pertanian tanaman pangan utama							
	- Padi (Ton)	Ton	253.728	241.139	236.536	235.580	289.870	260.888
	- Jagung (Ton)	Ton	186.061	189.162	195.565	214.637	209.032	225.505
	- Kedelai (Ton)	Ton	5.614	718	2.099	1.753	3.032	1.340
<u>10</u>	<u>Pertanahan</u>							
10.1	Persentase pemohon sertifikat tanah yang di selesaikan		91,6	101,09	96,9	97,71	95,56	
10.2	Jumlah Sertifikat berdasarkan jenisnya							
	- Hak milik	Sertifikat	8.040	9.286	8.262	9.496	7.699	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- Hak pakai	Sertifikat	3	111	11	50	26	
	- Hak guna usaha	Sertifikat	-	4	1	2	-	
	- hak guna bangunan	Sertifikat	104	386	604	268	775	
<u>11</u>	<u>Lingkungan Hidup</u>							
11.1	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	3	5	5	5	100	
11.2	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	kasus	-	14,00	25,00	18,00	20,00	
11.3	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	-	-	-	12,40	16,80	
11.4	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	titik	-	12,00	12,00	4,00	6,00	
11.5	Pemantauan status mutu air	titik	-	12,00	12,00	35,00	45,00	
11.6	Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL		-	4,00	4,00	5,00	3,00	
11.7	Kegiatan Penegakan hukum lingkungan	kasus	-	11,00	25,00	18,00	13,00	
11.8	Rasio Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	Ha	-	50,00	35,00	-	-	
11.9	Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi	%	-	-	100,00	NA	100,00	100,00
<u>12</u>	<u>Kependudukan dan Pencatatan Sipil</u>							
12.1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	Jiwa	545.099,0 0	538.606,0 0	399.247,00	515.427,00	545.856,00	
12.2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	Jiwa	816.187,0 0	821.555,0 0	694.868,00	722.688,00	734.153,00	
12.3	Jumlah bayi berakte kelahiran (0 -4 thn)/4	Orang	7.567,00	13.978,00	17.104,00	17.829,00	11.091,00	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
12.4	jumlah keseluruhan bayi yang lahir thn ybs	Orang	14.728,00	16.372,00	16.862,00	16.307,00	15.937,00	
12.5	Jumlah penduduk memiliki akte kelahiran	Jiwa	652.304,00	692.298,00	717.962,00	733.874,00	510.334,00	
12.6	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	pasangan	107,00	58,00	61,00	50,00	7.017,00	
12.7	jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah	pasangan	316.044,00	328.123,00	274.261,00	293.290,00	327.240,00	
12.8	Ketersediaan database kependudukan	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
12.9	Jumlah penduduk yang meninggal memiliki akte kematian	Jiwa	15,00	7,00	21,00		138,00	
12.10	jumlah penduduk yang meninggal	Jiwa	15,00	7,00	21,00		138,00	
<u>13</u>	<u>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u>							
13.1	PKK aktif	Unit	286	286	286	286	286	
13.1	Posyandu aktif	unit	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	
<u>14</u>	<u>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</u>							
14.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	anak	2,29	2,28	2,13	2,07	2,07	
14.2	Rasio akseptor KB	%	97,16	95,91	105,86	97,74	90,89	
14.3	Cakupan peserta KB aktif	%	78,74	78,55	79,07	79,75	80,60	
14.4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1,45	1,42	1,35	1,50	1,50	
14.5	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	11,67	11,65	10,93	10,48	9,90	
14.6	Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria	%	1,21	1,11	1,09	1,07	1,02	
14.7	Cakupan penyedia alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	30,06	29,20	28,09	27,74	27,74	
14.8	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.9	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	%	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
14.10	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang	%				59,66	62,07	
14.11	Persenta se kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.12	Persentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	5,00	3,00	6,00	13,30	17,70	
14.13	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	80,47	78,03	78,36	77,59	76,13	
14.14	Cakupan Tri Bina pada Desa/Kelurahan untuk meningkatkan ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL)	%	0,00	0,00	0,00	16,08	20,90	
14.15	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	79,56	76,58	48,86	80,27	79,21	
<u>15</u>	<u>Perhubungan</u>							
15.1	Jumlah Terminal	Unit	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
15.2	Jumlah angkutan darat	Unit	743,00	680,00	633,00	725,00	725,00	
15.3	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	3.433.256,00	3.864.738,00	4.285.339,00	5.373.424,00	4.742.465,00	
15.4	Jumlah Trayek AKDP, Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan	Unit	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	
15.5	Persentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	33,33	33,33	36,67	43,33	50,00	
15.6	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	40,00	40,00	40,00	40,00	88,90	
<u>16</u>	<u>Komunikasi dan Informatika</u>							
16.1	Jumlah lembaga penyiaran radio/TV	unit	NA	5 (radio); 14 (tv)	5 (radio); 14 (tv)	6 (radio); 16 (tv)	6 (radio); 16 (tv)	
16.2	Persentase SKPD Pelayanan Publik yang memiliki portal website (%)	Unit	NA	5 SKPD	6 SKPD	6 SKPD	8 SKPD	
16.3		%	NA	0,8%	10%	10%	13%	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
16.4	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Unit	NA	4,00	0,00	10,00	10,00	
16.5		%	NA	40%	40%	100%	100%	100%
16.6		Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:						
16.7	- Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;		NA	NA	60,00	60,00	60,00	
16.8	- Media baru seperti website (media online);		NA	12,00	12,00	12,00	12,00	
16.9	- Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;		NA	6,00	6,00	6,00	6,00	
16.10	- Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau		NA	3,00	3,00	3,00	3,00	
16.11	- Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho		NA	200,00	200,00	200,00	200,00	
16.12	Rasio pengaduan informasi publik yang tertangani	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%
16.13	Web site milik pemerintah daerah	Unit	NA	NA	1,00	1,00	1,00	
<u>17</u>	<u>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</u>							
17.1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	89,5	93,8	96,5	98,9	99,01	
17.2	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Unit	11.055	12.242	17.195	17.682	17.744	
17.3	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	10	15	15	20	25	
17.4	Persentase Koperasi aktif	%	50	48	56	71	71,4	
17.5	Jumlah Produk Unggulan Daerah	produk	6	7	9	10	11	
<u>18</u>	<u>Penanaman Modal Daerah</u>							
18.1	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan		5	5	5	5	5	
18.2	Jumlah fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan		1	1	1	1	1	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
18.3	Jumlah promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota		1	1	1	1	1	
18.4	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		561	416	372	230	163	
18.5	Jumlah bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha		1	1	1	1	1	
18.6	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)		3	2	2	2	2	
18.7	Jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal		17	17	17	17	17	
18.8	Peta potensi investasi kabupaten Kendal		1	1	1	1	1	
<u>19</u>	<u>Kepemudaan dan Olahraga</u>							
19.1	Pemuda yang mendapatkan pelatihan	orang	255	268	275	290	300	
19.2	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	%	87	92	94	98	100	100
19.3	Jumlah klub olahraga	Klub	25	26	28	29	29	
19.4	Jumlah gedung olahraga	Unit	80	125	258	665	665	
<u>20</u>	<u>Statistik</u>							
20.1	Kabupaten Kendal Dalam Angka	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20.2	PDRB Kabupaten Kendal	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
<u>21</u>	<u>Persandian</u>							
21.2	Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi	%	100	100	100	100	100	100
<u>22</u>	<u>Kebudayaan</u>							
22.1	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		60%	60%	60%	70%	70%	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
22.2	Jumlah grup kesenian		565	570	580	601	602	
22.3	Misi Kesenian (%)		100	100	100	100	100	
22.4	Cakupan Kajian Seni (%)		6,67	6,67	6,67	13,3	6,67	
22.5	Cakupan Fasilitas Seni (%)		0	0	0	14,28	0	
22.6	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (%)		0	0	0	0	0	
22.7	Cakupan Organisasi seni (%)		34	34	34	34	34	
22.8	Cakupan Tempat umum (%)		100	100	100	100	100	100
22.9	Cakupan Gelar Seni (%)		75	75	75	75	75	
<u>23</u>	<u>Perpustakaan</u>							
23.1	Jumlah perpustakaan	Unit	8	10	12	15	20	
23.2	Jumlah pustakawan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	30	30	30	25	35	
23.3	Jumlah pustakawan yang mendapatkan sertifikasi	Orang	1	1	2	3	3	
23.4	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	6.784	9.022	9.549	6.769	13.200	
23.5	Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	17.500	19.000	21.000	23.000	28.000	
<u>24</u>	<u>Kearsipan</u>							
24.1	Jumlah arsip dalam kategori musnah, dinilai kembali dan atau permanen	berkas	-	-	-	-	3.000	
24.2	Jumlah SDM pengelola kearsipan yang ikut diklat/bintek	Orang	-	53	29	40	45	
24.3	Jumlah SDM pengelola kearsipan secara keseluruhan	Orang	2	4	4	5	5	
24.4	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah dialih mediakan dalam bentuk informatika	Berkas	-	-	-	-	-	
24.5	jumlah keseluruhan dokumen yang ada di Kantor Arsip Daerah	Berkas	-	-	-	-	-	
24.6	Jumlah SKPD yang dikelola arsipnya	Unit	1	1	1	1	5	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
24.7	jumlah SKPD terlikuidasi	Unit	22	22	22	22	22	
24.8	Jumlah arsip yang dipelihara	Berkas	3.000	3.000	3.000	3.500	5.280	
24.9	jumlah arsip di depo arsip	Berkas	96.318	99.318	102.318	105.318	105.618	
24.10	Jumlah SKPD dan Desa/ Kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Unit	347	347	347	347	347	
24.11	Jumlah SKPD dan Desa/ Kelurahan	Unit	347	347	347	347	347	
24.12	Jumlah arsiparis/pengelola arsip yang ada	orang	2	4	4	5	5	
<u>II</u>	<u>Fokus Layanan Urusan Pilihan</u>							
<u>1</u>	<u>Kelautan dan Perikanan</u>							
1.1	Produksi Perikanan Tangkap (Kg)		1.711.768	2.056.175	1.822.807	2.055.180	1.858.904	
1.2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)		19	17	6	10	24	
1.3	Produksi Perikanan Budidaya (Kg)		7.583.644	8.060.480	9.096.600	9.271.985	21.967.096	
1.4	Tingkat Cakupan Bina Kelompok Ikan (%)		5	5	5	5	0	
1.5	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (kelompok)		6	18	38	10	14	
1.6	Jumlah Surat tanda pencatatan usaha/perijinan usaha pembudidayaan ikan		NA	NA	NA	NA	1	
1.7	Tingkat konsumsi ikan penduduk		13	14	14	14	15	
1.8	Jumlah usaha pengolahan ikan yang menerapkan standar mutu (unit)		73	73	74	74	81	
1.9	Jumlah Produksi hasil olahan ikan (Kg)		2.095.920	22.441.202	26.279.545	20.598.649	20.598.649	
1.10	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasaran (kelompok)		10	10	10	10	18	
1.11	Jumlah surat tanda daftar kapal perikanan yang dikeluarkan		NA	NA	32	86	378	
<u>2</u>	<u>Pariwisata</u>							
2.1	Kunjungan wisata	Orang	140.825	145.043	156.683	164.858	175.000	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.2	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	100	100	100	100	100
2.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	438.884.000	803.916.000	888.140.000	859.140.000	1.080.000.000	
2.4	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	5	5	7	7	9	
2.5	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Unit	73	75	80	85	88	
2.6	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Unit	Hotel melati 22	Hotel melati 21	Hotel melati 22	Hotel melati 23	Hotel melati 23; Bintang 2	
<u>3</u>	<u>Pertanian</u>							
3.1	Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan	%	89	84	80	80	79	
3.2	Produksi pertanian tanaman pangan utama							
	- Padi	Ton	253.728	241.139	236.536	235.580	289.870	260.888
	- Jagung	Ton	186.061	189.162	195.565	214.637	209.032	225.505
	- Kedelai	Ton	5.614	718	2.099	1.753	3.032	1.340
3.3	Nilai Tukar Petani		N.a	N.a	N.a	N.a	N.a	N.a
3.4	Populasi Komoditas Peternakan Utama							
	- Sapi Potong	Ekor	27.430	29.502	29.565	28.639	21.440	20.523
	- Kambing	Ekor	69.774	74.226	73.140	73.037	36.718	37.776
	- Domba	Ekor	80.339	109.435	127.793	127.294	29.839	30.842
	- Ayam Ras Pedaging	Ekor	7.543.470	8.414.490	8.197.232	8.190.231	8.587.800	8.587.800
	- Ayam Ras Petelur	Ekor	2.811.736	2.819.527	3.029.101	3.025.102	3.583.300	3.799.915
3.5	Produksi Daging dan telur						418.140	640.543
	-Sapi Potong	Kg	344.040	217.400	234.135	414.000	14.513	108.801
	- Kambing	Kg	52.064	7.088	14.259	14.492	5.374	16.393
	- Domba	Kg	4.989	4.430	5.041	5.348	3.649.815	5.916.994
	- Unggas	Kg	2.704.586	3.651.933	3.664.723	3.666.147	28.827.900	36.204.920

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- Telur	Kg	20.554.720	25.754.332	33.128.578	31.991.728		
3.6	Angka Kematian/Moratilitas						3,00	2,74
	- Sapi	%	3,32	3,25	3,21	3,41	2,61	2,52
	- Kambing	%	2,96	2,85	2,80	2,71	2,61	2,30
	- Domba	%	2,73	2,15	2,85	2,52	4,80	4,78
	- Ayam Ras	%	5,55	5,40	5,25	5,00	84	
3.7	Kelompok tani ternak yang mampu menerapkan teknologi peternakan	Kelompok	82	83	84	84		
3.8	Produksi Tanaman Hortikultura						254.993	320.936
	- Bawang Merah	Kwintal	215.395	195.537	200.219	254.252	45.001	40.984
	- Cabe	Kwintal	31.865	23.746	40.962	45.141		
3.9	Produksi Tanaman Perkebunan							
	- Tebu	Kwintal	20.665	12.131	1.933	15.248	21.124	
	- Tembakau	Ton	9.233	10.224	6.239	4.172	4.728	3.860,37
	- Kopi	Ton	853	1.203	1.558	1.397	1.082	1.300,07
	- Cengkeh	Ton	253	458	367	363	422	158,09
	- Karet	Ton	44	46	53	59	52	36,26
	- Kelapa	Ton	1.143	1.311	1.293	1.191	771	598,76
	- Kakao	Ton	54	117	106	92	123	198,54
<u>4</u>	<u>Perdagangan</u>							
4.1	Nilai ekspor non migas (US dollar)	US \$	158.122.444,81	447.639.743,28	101.299.431,68	100.201.610,22	108.921.201,70	
4.2	Jumlah promosi dan pameran skala regional, nasional, internasional	kali	15	18	18	15	15	
4.3	Jumlah dokumen tentang data dan informasi kebijakan dan peluang pasar luar negeri	dok	3	5	2	-	-	
4.4	Jumlah pasar tradisional	unit	11	11	11	12	12	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
4.5	Persentase ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat;	%	100	100	100	100	100	100
4.6	Persentase perusahaan yang memiliki SIUP (1% per tahun)	%	100	100	100	100	100	100
4.7	Jumlah pengujian tera metrologi	kali	20	20	20	20	20	
4.8	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa	kali	22	22	10	10	10	
4.9	Jumlah Sosialisasi perlindungan konsumen	kali	1	1	1	1	1	
4.10	Jumlah pembinaan pelaku usaha bidang perdagangan	Kali	3	4	7	4	4	
4.11	Persentase peningkatan pembinaan pedagang kaki lima	%	80	80	85	90	90	
<u>5</u>	<u>Perindustrian</u>							
5.1	Persentase pembentukan kelembagaan kluster IKM melalui pendekatan OVOP (%)		10	11	12	8	8	
5.2	Persentase sentra industri yang telah dikembangkan (8% per tahun)		80	85	85	75	80	
5.3	Jumlah industri (0,2% per tahun)		17.693	17.843	17.641	17.670	17.830	
5.4	Persentase IKM yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi (%)		18	20	18,5	20	20	
5.5	Persentase IKM yang menghasilkan jenis produk bersertifikasi sesuai dengan standar produk nasional		15	17	20	25	25	
5.6	Persentase industri yang telah menerapkan standar industri (%)		75	75	80	80	80	
5.7	Persentase jejaring kerjasama antara IKM dengan industri berskala menengah dan besar		75	75	80	80	-	
5.8	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan ketrampilan		85	85	95	90	85	
5.9	Persentase usaha IKM yang memperoleh bantuan peralatan		85	85	90	-	-	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
5.10	Persentase produk IKM yang dipasarkan		100	100	90	75	80	
<u>6</u>	<u>Transmigrasi</u>							
6.1	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	Orang	0	0	15	0	0	
6.2	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	Orang	10	15	7	4	0	
6.3	Jumlah calon transmigran yang mendaftar	Orang	58	52	49	28	0	
<u>III</u>	<u>Penunjang Urusan</u>							
<u>1</u>	<u>Perencanaan Pembangunan</u>							
1.1	Ketersediaan data perencanaan Pembangunan daerah (dokumen)	dokumen	2	5	5	6	8	
1.2	Jumlah hasil kajian/studi yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	dokumen	5	15	16	5	5	
1.3	Tingkat kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi (%)	%	100	100	100	100	100	100
1.4	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian internal	dokumen	3	3	5	5	5	
1.5	Jumlah koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan daerah	kegiatan	40	57	46	58	53	
<u>2</u>	<u>Keuangan</u>							
2.1	Belanja Pegawai terhadap APBD	%	54,89	60,45	61,31	57,44	50,71	
2.2	Belanja Langsung terhadap total APBD	%	43,39	38,02	38,6	41,57	37,92	
2.3	Rasio belanja modal terhadap APBD	%	18,02	16,54	12,23	18,5	16,67	
2.4	Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	7	11	16	20	20	
2.5	Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan	%	5	12	18	23	20	
2.6	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	94	92	85	81	85	
2.7	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	8	10	8	14	11	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.8	Rasio realisasi PAD terhadap <u>potensi PAD</u>	%	106	125	120	130	105	
2.9	Peningkatan PAD	%	104	109	119	58	11	
2.10	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	
<u>3</u>	<u>Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</u>							
3.1	Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan pada tahun berjalan	%	100	100	100	100	100	100
3.2	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Teknis / Fungsional yang difasilitasi BKD Kab. Kendal pada tahun berjalan	%	100	100	100	100	100	100
3.3	Persentase struktur jabatan pimpinan tinggi yang terisi	%		100	91,42	100	100	100
3.4	Persentase struktur jabatan administrator yang terisi	%		100	100	100	100	100
3.5	Persentase struktur jabatan pengawas yang terisi	%		89,85	88,29	91,02	88,86	
3.6	Persentase struktur jabatan pelaksana yang terisi	%		68,25	61,9	60,31	57,14	
3.7	Jumlah jenis pelayanan berbasis teknologi informasi	Jenis	2	3	4	4	6	
3.8	Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	100	100	100	100	100	100
<u>4</u>	<u>Fungsi Lain</u>							
4.1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	45	50	64	64	61	
4.2	Jumlah LHP yang diterbitkan dari pelaksanaan penilaian dan pengawasan	LHP	92	75	90	91	146	
4.3	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun	buah	-	1	4	2	1	
4.4	Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan peraturan perundangan tentang penataan kelembagaan	unit	1	70	0	0	1	
4.5	% SKPD yang bernilai IKM baik	Unit	20	6	1	1	1	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Unit	26	26	26	26	26	
4.6	% Pelaksanaan Urusan Sesuai SPM yang telah diterbitkan	%	0	0	14	1	0	
4.7	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Kendal komponen pelaporan kinerja	skor	6,5	6,74	8,69	8,1	8,15	
<u>Aspek Daya Saing Daerah</u>								
I	<u>Kemampuan Ekonomi Daerah</u>							
1.1	PDRB per kapita ADHB	juta	23,42	25,51	27,86	30,66	32,44	
1.2	PDRB per kapita ADHK	juta	22,21	23,37	24,75	26,01	25,98	
1.3	Pengeluaran Perkapita	ribu rp	9.701	9.497	9.618	9.640	9.639	
II	<u>Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</u>							
2.1	Panjang jalan	km	-	-	-	-	770.993	
2.2	Panjang jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	37,10	
2.3	Panjang jalan dalam kondisi rusak	%	-	-	-	-	62,9	
2.4	Jumlah terminal		4	4	4	4	4	
2.5	Jumlah penumpang angkutan umum	orang	3.433.256	-	-	-	4.742.465	
2.6	Jumlah kasus pelanggaran tata ruang	Kausu	-	-	-	-	5	
2.7	Luas kawasan industri	ha	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.8	Luas Kawasan industri terpadu	ha	-	-	-	2.770	2.770	
2.9	Jumlah kawasan potensi banjir	wilayah	9	9	9	9	9	9
2.10	Luas kawasan potensi banjir	ha	55.600,21	55.600,21	55.600,21	55.600,21	55.600,21	55.600,21
2.11	Luas wilayah optensi kekeringan	ha	99.972,78	99.972,78	99.972,78	99.972,78	99.972,78	99.972,78
2.12	Jumlah restoran	buah	-	-	-	-	88,00	
2.13	Jumlah hotel	buah	22,00	21,00	22,00	23,00	25,00	25,00
2.14	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	%	-	-	-	-	75,00	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>III</u>	<u>Fokus Iklim Berinvestasi</u>							
3.1	Jumlah kasus kriminal	kausus	-	-	-	-	-	150
3.2	Izin Usaha Kepariwisataaan	hari	-	-	-	-	-	12
3.3	Izin Gangguan HO	hari	-	-	-	-	-	14
3.4	Izin Kartu Pengawasan Angkutan dengan Kendaraan Umum	hari	-	-	-	-	-	3
3.5	Izin Lokasi/Keterangan Lokasi	hari	-	-	-	-	-	14
3.6	Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB)	hari	-	-	-	-	-	14
3.7	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	hari	-	-	-	-	-	14
3.8	Izin Reklame	hari	-	-	-	-	-	14
3.9	Izin trayek	hari	-	-	-	-	-	14
3.10	Izin Usaha Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum	hari	-	-	-	-	-	5
3.11	Izin Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum	hari	-	-	-	-	-	5
3.12	Persetujuan / Izin Prinsip	hari	-	-	-	-	-	14
3.13	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	hari	-	-	-	-	-	13
3.14	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	hari	-	-	-	-	-	3
3.15	Tanda Daftar Gudang (TDG)	hari	-	-	-	-	-	12
3.16	Tanda Daftar Industri (TDI)	hari	-	-	-	-	-	7
3.17	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	hari	-	-	-	-	-	7
<u>IV</u>	<u>Sumber Daya Manusia</u>							
4.1	Persentase penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan							
	- tidak/belum pernah sekolah	%	-	-	-	10,63		
	- tidak/beum tamat SD sederajat	%	-	-	-	50,9		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					
			<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	- SD sederajat	%	-	-	-	59,13		
	- SMP Sederajat	%	-	-	-	39,87		
	- SMA Sederajat	%	-	-	-	32,55		
	- D-I/D-II	%	-	-	-	0,25		
	- D-III/Sarjana muda	%	-	-	-	1,69		
	- D-IV/S1, S2, S3	%	-	-	-	4,89		
4.2	Rasio Ketergantungan		0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi, maka daerah otonom Kabupaten Kendal menerima pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam usaha penggalian dan penggunaan anggaran, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan aspek penerimaan pendapatan daerah dimana hal tersebut berperan cukup besar dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan masih berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan lebih baik. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Kendal periode tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2013-2017

(dalam jutaan)

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2013	136.029,70	1.388.635,85	9,80%
2014	215.294,09	1.546.101,82	13,92%
2015	239.340,24	1.720.250,41	13,91%
2016	203.810,17	1.892.380,74	10,77%
2017	291.001,69	1.965.478,64	14,81%
Rata-rata	16,43 %	7,20 %	8,61%

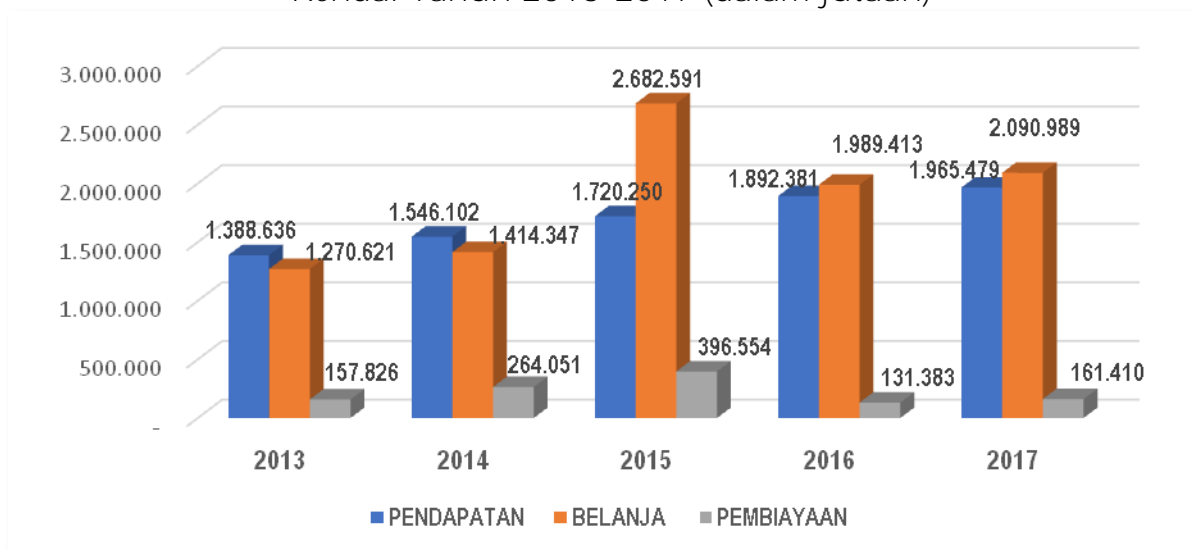
Sumber: data yang diolah

Dari tabel di atas tampak bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Kendal masih sangat kecil yaitu rata-rata 8,61 persen. Diharapkan di tahun-tahun mendatang, pemerintahan Kabupaten Kendal dapat meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Gambar 3.1.
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Kendal Tahun 2013-2017 (dalam jutaan)



Sumber: data yang diolah

Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada Gambar 3.1

a. Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan kenaikan sebesar 7,20 persen, dimana pendapatan pada Tahun 2013 sebesar Rp 1.388.636 juta menjadi 1.965.479 juta pada Tahun 2017. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan paling tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017) sebesar 16,43 persen, dana perimbangan meningkat rata-rata sebesar 9 persen tetapi pada lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan penurunan sebesar 2 persen. Gambaran tentang Pendapatan Daerah yang disajikan selama lima tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2013-2017

(dalam jutaan)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan 2013-2017
1	PENDAPATAN	1.388.636	1.546.102	1.720.250	1.892.381	1.965.479	7,20%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	136.030	215.294	239.340	203.810	291.002	16,43%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.400	60.871	70.286	56.527	83.269	16,74%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.592	25.025	19.335	17.386	24.503	5,68%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.974	7.766	7.425	10.902	12.500	6,85%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.063	121.632	142.295	118.995	170.731	19,50%
1.2	DANA PERIMBANGAN	910.087	964.405	996.572	1.392.628	1.368.677	9%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	80.021	64.348	53.310	49.886	61.380	-5%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	788.134	852.171	884.902	972.953	1.025.803	5%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	41.931	47.887	58.360	369.790	281.495	46%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	342.519	366.403	484.338	295.942	305.800	-2%
1.3.1	Pendapatan Hibah	243	3.853	5.901	6.260	5.183	84%

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan 2013-2017
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0		-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	71.357	93.925	116.113	87.849	87.849	4%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	179.305	216.448	257.424	35.238	-	-33%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	91.614	52.176	30.661	-	-	-31%
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Pemerintah (ADD)	-	-	74.239	166.596	212.768	42%
	Jumlah	1.388.636	1.546.102	1.720.250	1.892.381	1.965.479	7,20%

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Dengan memperhatikan Tabel 3.2 diatas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan Daerah mengalami peningkatan dari Rp.1.388 Miliar (2013) menjadi Rp. 1.965 Miliar (2017) dengan rata-rata tingkat kenaikan pendapatan 7,20 persen. Hal tersebut diikuti oleh naiknya dua dari tiga komponen pendapatan, yaitu Pendapatan asli Daerah naik sebesar 16,43 persen dan Dana Perimbangan naik sebesar 9 persen.

Dari beberapa komponen pendapatan asli daerah, secara persentase pertumbuhan masing-masing komponen pembentuk PAD berbeda-beda. Rata-rata pertumbuhan tertinggi berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang meningkat cukup banyak yaitu sebesar 19,50 persen sedangkan yang terendah berasal dari retribusi daerah hanya sebesar 5,68 persen.

Selain itu, jumlah pendapatan terbesar disumbang oleh naiknya dana alokasi umum yang diterima, dimana pada Tahun 2013 dana alukasi umum adalah Rp.788,134 Miliar dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp.1.025,803 Miliar atau naik sebesar 5 persen. Kenikan rata-rata pertumbuhan pendapatan disumbang oleh pendapatan hibah yang naik cukup signifikan selama lima tahun terakhir rata-rata terjadi kenaikan sebesar 84 persen.

Adapun permasalahan pendapatan dari Dana Perimbangan adalah relatif tanpa masalah berarti kecuali DAK yang memerlukan dana pendamping daerah minimal 10% dari jumlah DAK sehingga mengurangi porsi pemanfaatan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun lain-lain pendapatan daerah

yang sah tidak diketahui secara pasti potensi penerimaannya karena bersifat penerimaan insidental.

b. Belanja Daerah

Proporsi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Kendal Tahun 2013-2017

(dalam jutaan)

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata 2013- 2017
2	BELANJA	1.270.621	1.414.347	2.682.591	1.989.413	2.090.989	10,48%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	780.114	826.472	2.040.866	1.286.990	1.268.646	10,21%
2.1.1	Belanja Pegawai	719.808	772.383	1.012.293	988.966	896.487	4,49%
2.1.2	Belanja Bunga	68	47	30	30		-18,44%
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-				
2.1.4	Belanja Hibah	5.940	3.391	851.131	13.956	22.654	30,70%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.018	1.664	-		970	-30,58%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	6.132	7.391	10.787	20,72%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	46.583	47.670	168.945	273.146	334.248	48,31%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.697	1.317	2.334	3.500	3.500	15,57%
2.2	BELANJA LANGSUNG	490.507	587.875	641.725	702.424	822.343	10,89%
2.2.1	Belanja Pegawai	59.199	39.975		33.585	33.294	-10,87%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.909	286.314		362.303	466.775	11,09%
2.2.3	Belanja Modal	155.399	261.586		306.535	322.274	15,71%
	Jumlah	1.270.621	1.414.347	2.682.591	1.989.413	2.090.989	10,48%

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Kendal selama kurun waktu lima tahun menunjukkan kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 10,48 persen. Realisasi belanja langsung Kabupaten Kendal mengalami kenaikan, tahun 2013 sebesar Rp. 409,51 milyar menjadi Rp. 822,34 Milyar pada tahun 2017. Belanja tidak langsung juga menunjukkan kenaikan dari sebesar Rp. 780,11 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.268,64 milyar pada tahun 2017. Penggunaan terbesar belanja daerah Kabupaten Kendal adalah pada belanja tidak langsung. Proporsinya belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung, pada tahun 2017 belanja langsung sebesar Rp. 822,34 miliar dari total belanja sebesar Rp. 2.090,99 miliar, sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.268,64 miliar dari total belanja sebesar Rp. 2.090,99 miliar.

c. Pembiayaan Daerah

Gambaran tentang realisasi Pembiayaan Daerah yang disajikan menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4.
Proporsi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2013-2017

(dalam jutaan)

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
3	PEMBIAYAAN	157.826	264.051	396.554	131.383	161.410	0,45%
3.1	PENERIMAAN DAERAH	141.033	242.306	373.379	114.208	143.410	0,33%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	140.977	242.256	352.316	114.060	130.410	-1,55%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	21.000			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	56	50	63	148		27,45%
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-				
3.1.7	Penerimaan Kembali Dana Cadangan					13.000	
3.2	PENGELUARAN DAERAH	16.793	21.745	23.175	17.175	18.000	1,40%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	7.000	7.000	7.000			0,00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.618	14.570	16.000	17.000	18.000	13,36%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	175	175	175	175		0,00%

Sumber: Badan Keuangan Daerah

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai esset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Kabupaten Kendal pada periode tahun 2011-2015 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat pada aset lancar yang merupakan unsur dominan dalam pembentukan total asset. Rincian Neraca Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.
Neraca Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015
(dalam jutaan)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
1	ASET	3.111.800	2.874.171	2.922.870	3.121.376	3.559.883	2,73%
1.1	ASET LANCAR	102.943	161.855	274.481	455.883	499.420	37,14%
1.1.1	Kas	83.648	142.893	243.753	354.316	379.688	35,33%
1.1.2	Piutang	5.168	6.793	12.999	68.670	99.473	80,67%
1.1.3	Persediaan	14.127	12.169	17.729	32.897	20.259	7,48%
1.2	ASET TETAP	2.999.232	2.710.564	2.645.872	2.662.535	3.056.383	0,38%
1.2.1	Tanah	949.544	467.082	601.988	603.988	622.728	-8,09%
1.2.2	Peralatan dan mesin	217.772	256.511	307.577	304.508	404.179	13,17%
1.2.3	Gedung dan Bangunan	1.101.476	1.153.829	921.433	930.863	1.028.668	-1,36%
1.2.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	686.600	768.474	693.795	790.268	955.142	6,82%
1.2.5	Aset tetap lainnya	36.554	36.723	37.232	4.092	6.215	-29,84%
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	7.286	27.944	83.847	28.817	39.451	40,19%
1.3	ASET LAINNYA	9.626	1.753	2.517	2.957	4.080	-15,78%
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran	0	0	0	0	57	0,00%
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	899	0	37	9	0	-68,37%
1.3.3	Kemitraan dengan pihak kedua	0	0	0	0	0	
1.3.4	Aset tak berwujud	8.727	1.753	2.480	2.948	4.022	-14,35%
2	KEWAJIBAN	905	938	999	994	1	-73,92%
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	905	938	999	994	1	-73,92%
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	905	938	999	994	1	-73,92%
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	0	0	0	0	0	
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	0	0	0	0	0	
3	EKUITAS DANA	3.113.779	2.879.052	2.944.140	3.100.303	378.230	-34,40%
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	101.968	159.064	272.145	412.107	378.230	29,97%
3.1.1	SILPA	82.673	140.977	242.256	352.316	378.230	35,54%
3.1.2	Cadangan piutang	5.168	5.918	12.160	26.894	0	51,04%
3.1.3	Cadangan persediaan	14.127	12.169	17.729	32.897	0	23,53%
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	3.011.811	2.719.988	2.671.995	2.688.196	0	-2,80%
3.2.1	Diinvestasikan dalam aset tetap	2.999.232	2.710.564	2.645.872	2.662.535	0	-2,93%
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset lainnya	12.579	9.424	26.122	25.661	0	19,51%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.114.684	2.879.990	2.945.138	3.101.298	378.231	-34,41%

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dihitung dengan rasio likuiditas (rasio lancar dan rasio quick), dan rasio solvabilitas (rasio total hutang terhadap total aset), dan rasio hutang terhadap modal. Rasio lancar dalam kurun waktu tahun 2011-2015 menunjukkan angka diatas 1 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 113,75 pada tahun 2011 menjadi 457,02 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki Kabupaten Kendal mampu digunakan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Begitu pula dengan rasio quick, dengan angka capaian juga meningkat dari sebesar 98,14 pada tahun 2011 menjadi 438,49 pada tahun

2015, menunjukkan bahwa aset lancar diluar persediaan yang dimiliki Kabupaten Kendal mencukupi digunakan untuk membayar hutang jangka pendeknya.

Dilihat dari Rasio total hutang terhadap total aset dalam kurun waktu tahun 2013-2015 menunjukkan angka dibawah 1 dari sebesar 0,01 pada tahun 2013 dan 2015. Capaian ini menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki pemerintah daerah dapat ditutup dengan aset yang dimiliki. Dilihat dari rasio hutang terhadap modal, capaiannya dibawah angka 1 yaitu dari sebesar 0,01 pada tahun 2013 dan 2015. Hal ini menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki Kabupaten Kendal dapat ditutup dengan investasi yang ditanamkan. Hasil perhitungan data analisis neraca daerah secara rinci sebagai berikut.

Tabel 3.6.
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio lancar (current ratio)	113,75	172,59	274,81	458,52	457,02
2.	Rasio quick (quick ratio)	98,14	159,61	257,06	425,44	438,49
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004

Sumber: data diolah

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Belanja Daerah digunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja yang dilakukan mencakup:

- (1) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- (2) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; serta
- (3) Analisis proyeksi belanja daerah

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; Belanja Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal.

Tabel 3.7.
Proporsi Penggunaan Anggaran
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

(dalam jutaan)

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
2	BELANJA	1.270.621	1.414.347	2.682.591	1.989.413	2.090.989	10,48%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	780.114	826.472	2.040.866	1.286.990	1.268.646	10,21%
2.1.1	Belanja Pegawai	719.808	772.383	1.012.293	988.966	896.487	4,49%
2.1.2	Belanja Bunga	68	47	30	30		18,44%
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-				
2.1.4	Belanja Hibah	5.940	3.391	851.131	13.956	22.654	30,70%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.018	1.664	-		970	-30,58%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	6.132	7.391	10.787	20,72%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	46.583	47.670	168.945	273.146	334.248	48,31%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.697	1.317	2.334	3.500	3.500	15,57%
2.2	BELANJA LANGSUNG	490.507	587.875	641.725	702.424	822.343	10,89%
2.2.1	Belanja Pegawai	59.199	39.975		33.585	33.294	-10,87%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.909	286.314		362.303	466.775	11,09%
2.2.3	Belanja Modal	155.399	261.586		306.535	322.274	15,71%
	Proporsi Belanja Tidak Langsung	61%	58%	76%	65%	61%	
	Proporsi Belanja Langsung	39%	42%	24%	35%	39%	

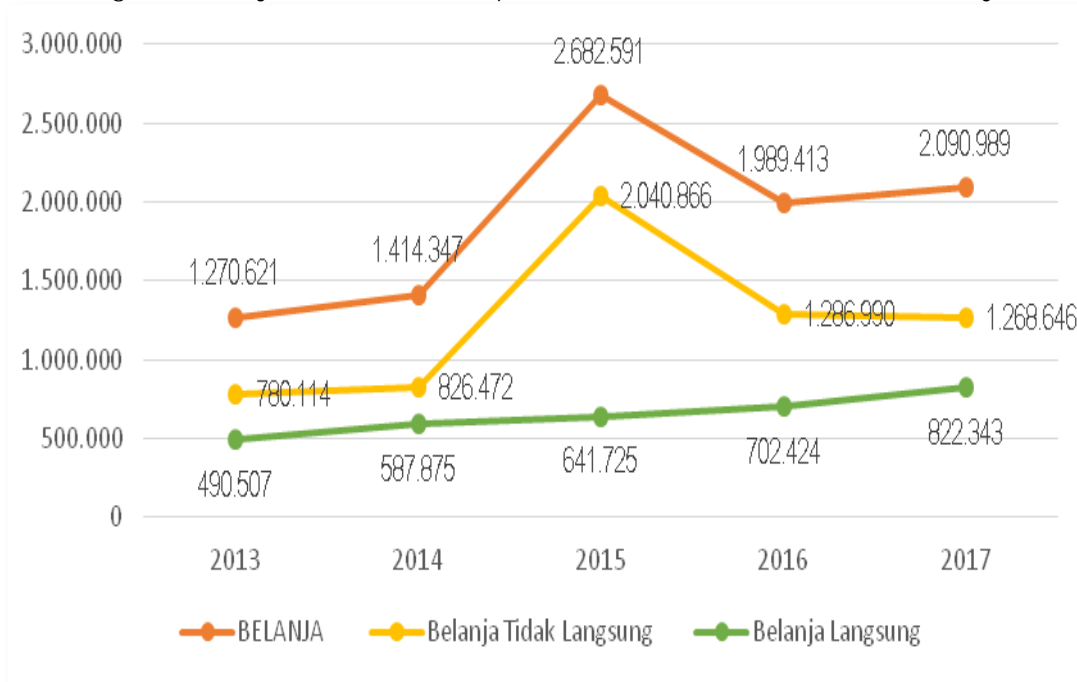
Sumber: Badan Keuangan Daerah

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Kendal selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan kenaikan sebesar 10,48 persen dari Rp.1.270,62 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp. 2.090,99 milyar pada tahun 2017. Realisasi belanja langsung Kabupaten Kendal menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 10,89 persen, dari Rp. 490,50 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp. 822,34

Milyar pada tahun 2017. Belanja tidak langsung juga menunjukkan kenaikan sebesar 10,21 persen, dari sebesar Rp. 780,80 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.268,64 milyar pada Tahun 2017.

Dilihat dari proporsinya, belanja daerah Kabupaten Kendal penggunaan terbesar pada belanja tidak langsung namun dilihat dari proporsinya cenderung fluktuatif dari sebesar 61 persen pada tahun 2013 sempat mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2015 sebesar 76 persen tetapi pada tahun 2017 proporsinya kembali menjadi 61 persen, seperti terlihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2.
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kendal tahun 2012-2017 (juta rupiah)

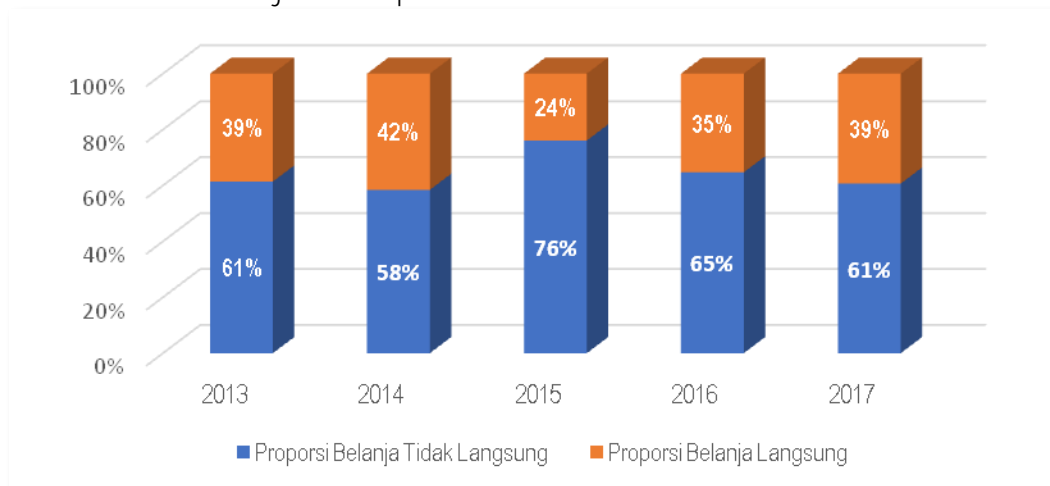


Sumber: Badan Keuangan Daerah (diolah)

Realisasi belanja langsung Kabupaten Kendal menunjukkan kenaikan sebesar 10,89 persen. Pada Tahun 2013 sebesar Rp 490,50 milyar menjadi Rp 822,34 Milyar pada Tahun 2017. Belanja tidak langsung juga menunjukkan kenaikan sebesar 10,21 persen dari sebesar Rp 780,11 milyar pada Tahun 2013 menjadi Rp 1.268,64 milyar pada Tahun 2017.

Dilihat dari proporsinya, belanja daerah Kabupaten Kendal penggunaan terbesar pada belanja tidak langsung namun dilihat dari proporsinya cenderung fluktuatif. Sempat mengalami kenaikan tertinggi pada Tahun 2015 dari 58 persen pada Tahun 2014 menjadi 76 persen pada Tahun 2015 dan cenderung menurun pada Tahun 2017 sebesar 61 persen, seperti terlihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3.
Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Kabupaten Kendal Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Keuangan Daerah (diolah)

Dilihat persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan presentase yaitu sebesar 36,53 persen di Tahun 2011 sampai 49,81 di Tahun 2015. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah daerah yang meningkat tajam.

Tabel 3.8.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kendal Tahun 2013-2017

(dalam jutaan)

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	2013	779.007,27	1.287.413,43	60,51%
2	2014	812.358,28	1.436.091,93	56,57%
3	2015	1.012.293,49	2.705.765,58	37,41%
4	2016	1.022.550,96	2.006.588,40	50,96%
5	2017	929.780,92	2.108.988,84	44,09%

Sumber: Badan Keuangan Daerah (diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari: Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya (pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan dana, penerimaan kembali sisa Belanja atau akibat lainnya, pelampaun peenerimaan PAD serta BLUD dan FKTP), Penerimaan dana cadangan serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah daerah serta pembayaran pokok utang. Dalam kurun waktu tahun 2013-2017, pembiayaan netto di Kabupaten Kendal menunjukkan kecenderungan meningkat sebesar 0,19 persen dari sebesar Rp. 124,24 milyar pada tahun 2013, menjadi sebesar Rp. 125,41 milyar pada tahun 2017. SiLPA mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1,55

persen, dari sebesar Rp. 140.98,58 milyar pada tahun 2013, menjadi sebesar Rp. 130,41 miliar pada tahun 2017, seperti terlihat pada Gambar 3.19.

Tabel 3.9.
Tabel Pembiayaan Kabupaten Kendal Tahun 2013-2017
(dalam jutaan)

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
3	PEMBIAYAAN NETTO	124.241	220.561	350.204	97.033	125.410	0,19%
3.1	PENERIMAAN DAERAH	141.033	242.306	373.379	114.208	143.410	0,33%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	140.977	242.256	352.316	114.060	130.410	-1,55%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	21.000			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	56	50	63	148		27,45%
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-				
3.1.7	Penerimaan Kembali Dana Cadangan					13.000	
3.2	PENGELUARAN DAERAH	16.793	21.745	23.175	17.175	18.000	1,40%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	7.000	7.000	7.000			0,00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.618	14.570	16.000	17.000	18.000	13,36%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	175	175	175	175		0,00%

Sumber: Badan Keuangan Daerah

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi belanja wajib dan mengikat, proyeksi data masa lalu dan penghitungan kerangka pendanaan.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan meningat serta prioritas utama pendanaan di masa lalu dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.10.
Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Kendal Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	768.156	821.417	1.189.735	1.273.033	1.245.022	10,14%
1.1	Belanja Pegawai	719.808	772.383	1.012.293	988.966	896.487	4,49%
1.2	Belanja Bunga	68	47	30	30		-18,44%
1.3	Belanja Subsidi	-	-				

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	6.132	7.391	10.787	20,72%
1.5	Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	46.583	47.670	168.945	273.146	334.248	48,31%
1.6	Belanja Tidak Terduga	1.697	1.317	2.334	3.500	3.500	15,57%
2.	BELANJA LANGSUNG	75.992	61.720	641.725	50.760	51.294	-7,56%
2.1	Belanja Pegawai	59.199	39.975		33.585	33.294	-10,87%
3.	PENGELUARAN DAERAH	16.793	21.745	23.175	17.175	18.000	1,40%
3.1	Pembentukan Dana Cadangan	7.000	7.000	7.000			0,00%
3.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.618	14.570	16.000	17.000	18.000	13,36%
3.3	Pembayaran Pokok Utang	175	175	175	175		0,00%
	TOTAL	860.940	904.882	1.854.635	1.340.968	1.314.316	8,83%

Sumber: Badan Keuangan Daerah

3.3.2. Proyeksi Penerimaan

Perhitungan proyeksi penerimaan empat tahun ke depan (2018-2021) dapat dihitung dengan melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2013-2017, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Sebagai upaya tindak lanjut perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kendal, antara lain sebagai berikut:

1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Pajak Daerah secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum;
2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data Wajib Pajak khususnya terhadap pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat
3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan Retribusi Daerah serta dalam rangka menggali potensi retribusi baru

Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan mendasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi pajak daerah Tahun 2013 - 2017.
2. Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus diproyeksikan meningkat dengan persentase kenaikan berdasarkan perkiraan yang paling riil karena perkembangan tahun 2013-2017 sangat fluktuatif.

Lain-lain Pendapatan yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah dan Otonomi Khusus (tambahan penghasilan guru PNSD dan Tunjangan Profesi guru PNSD, Dana Desa), diproyeksikan meningkat dengan persentase kenaikan berdasarkan perkiraan yang paling riil karena perkembangan tahun 2018-2021 sangat fluktuatif.

Tabel 3.11.
Target Penerimaan Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2018-2021

(dalam jutaan)

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
1.	PENDAPATAN	2.078.142	2.174.194	2.278.659	2.387.695	4%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	376.669	397.609	427.143	451.081	5%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	91.705	97.515	111.656	119.913	7%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	25.734	28.308	31.138	34.252	7%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.500	13.770	14.045	14.326	1%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	245.730	258.017	270.303	282.590	4%
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.358.205	1.412.040	1.468.567	1.527.920	3%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55.500	58.275	61.189	64.248	4%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.021.205	1.072.265	1.125.878	1.182.172	4%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	281.500	281.500	281.500	281.500	0%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	343.268	364.545	382.950	408.694	4%
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.000	5.000	-	-	0%
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat					
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	95.500	95.500	95.500	95.500	0%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.000	30.000	30.000	30.000	0%

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Pemerintah (DD)	212.768	234.045	257.450	283.194	7%
3.	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH	62.344	65.226	113.360	71.631	4%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	62.344	65.226	68.360	71.631	4%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	45.000	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
	TOTAL PENERIMAAN (1 + 3)	2.140.486	2.239.420	2.392.019	2.459.326	4%

Sumber: Badan Keuangan Daerah

3.3.3. Proyeksi Belanja

Pengeluaran periodik wajib dan meningat serta prioritas utama menggambarkan belanja yang wajib dialokasikan terlebih dahulu karena menyangkut dengan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi prioritas I, proyeksi empat tahun ke depan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Kendal dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.12.
Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Kendal Tahun 2018-2021

(dalam jutaan)

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.298.467	1.422.470	1.573.605	1.708.069	7%
1.1	Belanja Pegawai	961.500	1.057.650	1.163.415	1.279.757	7%
1.2	Belanja Bunga					
1.3	Belanja Subsidi					
1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	11.928	13.121	14.433	15.877	7%
1.5	Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	321.538	348.199	392.256	408.936	6%

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
1.6	Belanja Tidak Terduga	3.500	3.500	3.500	3.500	0%
2	PENGELUARAN DAERAH	30.000	30.000	30.000	15.000	-16%
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000	15.000	15.000		0%
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000	15.000	15.000	15.000	0%
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT	1.328.467	1.452.470	1.603.605	1.723.069	7%

Sumber: Badan Keuangan Daerah (diolah)

Berdasarkan tabel diatas total belanja dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Kabupaten Kendal mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7 persen. Proyeksi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Kendal dalam empat tahun kedepan (2018-2021) masih di dominasi oleh Belanja Tidak Langsung sebesar 98 persen. Belanja tidak langsung yang berkontribusi 98 persen tersebut masih di dominasi oleh gaji dan tunjangan yaitu sebesar 73 persen.

3.3.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Kebijakan pengalokasian belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.

5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2018-2021

(dalam jutaan)

<u>Uraian</u>	<u>Target</u>			
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Total Penerimaan	2.140.486	2.239.420	2.392.019	2.459.326
<i>Dikurangi:</i>				
Belanja Tidak Langsung yang wajib dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.328.467	1.452.470	1.603.605	1.723.069
<u>Kapasitas riil kemampuan keuangan</u>	812.019	786.950	788.414	736.257

Sumber: Badan Keuangan Daerah (diolah)

Dari dana yang tersedia tersebut, Dapat diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunaan dana, dimana ada 3 (tiga) prioritas penggunaan dana yaitu:

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Prioritas II, dialokasikan untuk mendanai belanja langsung pendanaan:

- a. program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen). monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang

dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja bantuan hibah dan belanja bantuan sosial.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka alikasi kapasitas keuangan daerah berdasarkan prioritas disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2018-2021

(dalam jutaan)

<u>Prioritas/ Belanja</u>	<u>Target</u>							
	<u>2018</u>		<u>2019</u>		<u>2020</u>		<u>2021</u>	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Prioritas I	1.328.467	62,06%	1.452.470	64,86%	1.603.605	67,04%	1.723.069	70,06%
Prioritas II	785.519	36,70%	760.450	33,96%	716.914	29,97%	709.757	28,86%
Prioritas III	26.500	1,24%	26.500	1,18%	71.500	2,99%	26.500	1,08%
Total	2.140.486	100%	2.239.420	100%	2.392.019	100%	2.459.326	100%

Sumber: Badan Keuangan Daerah (diolah)

Secara ringkas kerangka pendanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2018 sampai dengan 2021 disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kendal Tahun 2018-2021

<u>Uraian</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</u>	<u>2.140.486</u>	<u>2.239.420</u>	<u>2.392.019</u>	<u>2.459.326</u>
Pendapatan	2.078.142	2.174.194	2.278.659	2.387.695
Penerimaan Pembiayaan	62.344	65.226	113.360	71.631
<u>BELANJA</u>	<u>2.140.486</u>	<u>2.239.420</u>	<u>2.392.019</u>	<u>2.459.326</u>
<u>Belanja Tidak Langsung</u>	<u>1.354.967</u>	<u>1.478.970</u>	<u>1.675.105</u>	<u>1.749.569</u>
Prioritas I	1.328.467	1.452.470	1.603.605	1.723.069
Prioritas III	26.500	26.500	71.500	26.500
Belanja Hibah	25.000	25.000	70.000	25.000
Belanja Bantuan Sosial	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Belanja Langsung</u>	<u>785.519</u>	<u>760.450</u>	<u>716.914</u>	<u>709.757</u>
Prioritas II	785.519	760.450	716.914	709.757
<u>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>
Pembentukan Dana Cadangan	15.000	15.000	15.000	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000	15.000	15.000	15.000

Sumber: Badan Keuangan Daerah (diolah)

Pada tabel 3.15 tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2018-2021 secara tren menunjukkan peningkatan pada belanja tidak langsung sedangkan belanja langsungnya menunjukkan penurunan, hal tersebut disebabkan diantaranya dikarenakan :

- a. Dana hibah baik dari Pusat maupun Daerah menunjukkan kenaikan;
- b. Bantuan keuangan kepada desa semakin bertambah; dan
- c. Silpa yang ada di tunjangan profesi guru yang masih tinggi.

BAB IV

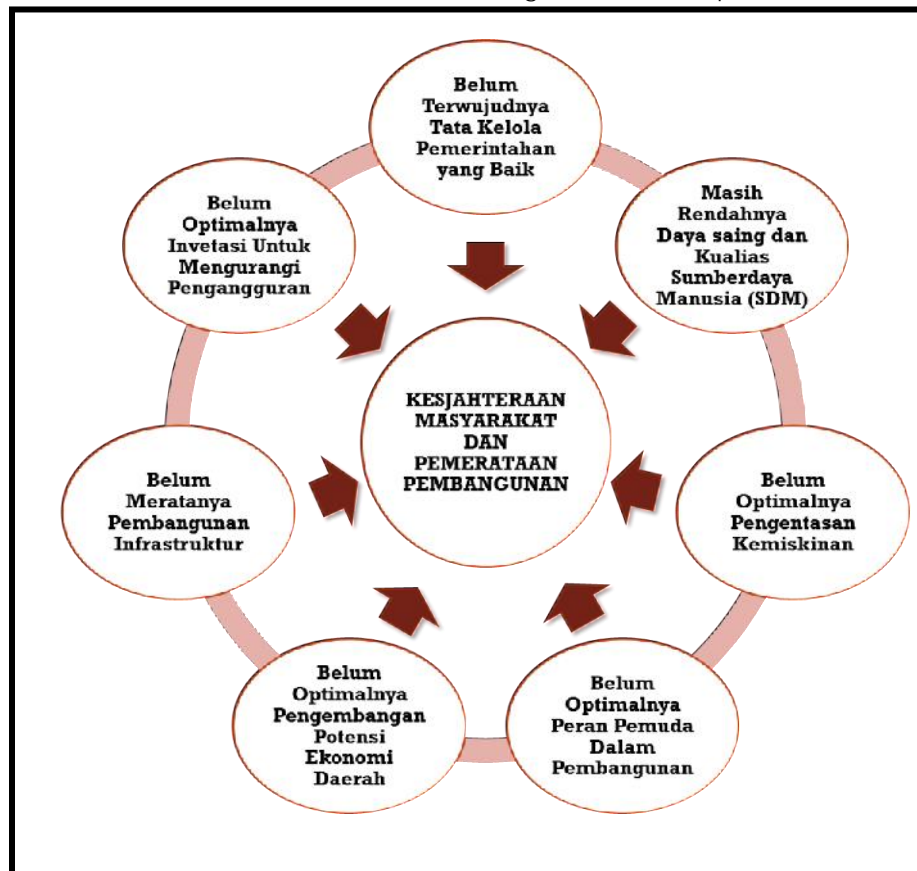
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal lima tahun mendatang

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan dimaknai sebagai prioritas pembangunan untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan harus dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam RKPD selama lima tahun. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan berbagai urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka diidentifikasi tujuh permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kendal yaitu: Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Masih Rendahnya Daya Saing dan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM); Belum Optimalnya Pengentasan Kemiskinan; Belum Optimalnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan; Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah; Belum Meratanya pembangunan infrastruktur; serta Belum Optimalnya Investasi Untuk mengurangi pengangguran. Permasalahan utama tersebut menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Kabupaten Kendal yang ditandai dengan belum meratanya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Gambar 4.1.
Permasalahan Utama Pembangunan Kabupaten Kendal



Dari tujuh masalah utama daerah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam permasalahan dan akar masalah yang lebih spesifik. Keterkaitan masalah utama dengan masalah dan akah masalah adalah bahwa suatu permasalahan utama adalah masalah daerah yang penyelesaiannya harus membutuhkan peran lintas bidang urusan, kemudian dari permasalahan utama tersebut dicari penyebabnya berdasarkan tugas fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah. Berikut ini penjelasan permasalahan utama serta permasalahan dan akar masalah.

1. Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparancy*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja "tata kelola pemerintahan yang baik" di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Masing-masing permasalahan ditunjukkan oleh opini BPK yang masih mendapatkan Wajar Dengan Pengacualian (WDP); rendahnya indeks kepuasan masyarakat, dan predikat akuntabilitas kinerja yang masih rendah yaitu saat ini baru mendapatkan nilai "C". Permasalahan utama belum terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik muncul dari beberapa penyebab permasalahan utama tersebut, antara lain:

a. Belum Optimalnya Integritas Aparatur Dalam Melayani

Pelayanan yang berkualitas merupakan kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan dengan standar yang telah ditentukan. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan reformasi di Kabupaten Kendal ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut.

Pelayanan publik yang masih belum optimal sering di jumpai dalam hal pelayanan kependudukan, penerbitan E-KTP hingga saat ini masih terdapat beberapa masyarakat yang belum dilakukan perekaman data E-KTP, bahkan masyarakat yang sudah melakukan perekaman data juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan E-KTP karena ketidakadanya blangko E-KTP. Hal ini secara tidak langsung mengganggu masyarakat dalam setiap ppengurusan yang membutuhkan E-KTP, tidak jarang beberapa institusi swasta maupun BUMN tidak meneripa E-KTP sementara/surat keterangan yang di terbitkan instansi terkait.

Pengurusan E-KTP dalam beberapa waktu belakangan ini juga mengalami kendala jaringan pada mesin perekaman di seluruh kecamatan yang menyebabkan masyarakat harus mengurus pembuatan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bagi masyarakat yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan secara langsung akan terkena imbasnya karena harus mengeluarkan *cost* dan waktu yang lebih tinggi.

b. Masih rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai

tujuannya. Akuntabilitas kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Kendal. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kabupaten Kendal saat ini bisa di bilang bahwa akuntabilitas kinerjanya masih rendah, hal ini dapat dilihat dari predikat akuntabilitas yang di dapat hanya pada level 'C". Evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa kelemahan utama yang menjadi penyebab Kabupaten Kendal skor predikatnya masih "C" terletak pada kelemahan menyusun dokumen perencanaan. Kelemahan ini tentu saja akan membawa dampak yang sangat besar terhadap siklus selanjutnya. Selain itu dokumen daerah tidak terintegrasi dengan dokumen perangkat daerah dan/atau dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun pada umumnya tidak memuat sasaran dan indikator kinerja yang dapat diukur dengan jelas. Dengan demikian pengukuran kinerja tidak bisa dilakukan.

Ketiadaan indikator kinerja dan target yang ditetapkan adalah hal yang paling krusial dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Proses akuntabilitas tidak mungkin bisa dilaksanakan jika instansi pemerintah tidak menerapkan apa yang ingin dicapai dengan indikator kinerja yang obyektif dan terukur. Hasilnya, dokumen perencanaan hanya memuat program dan kegiatan sebagai pelaksanaan janji-janji kepala daerah yang sulit diukur keberhasilannya.

Jika di bandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar bahwa Kabupaten Kendal masih berada di bawah kabupaten/kota sekitarnya. Rata-rata Kabupaten/Kota sekitar Kendal sudah mendapatkan nilai CC dan hanya Kabupaten Semarang yang sama predikat akuntabilitasnya dengan Kabupaten Kendal yaitu mendapat nilai C. Perbandingan angka Kabupaten/Kota sekitar Kendal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.
Perbandingan Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kendal
Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya

No	Kabupaten/Kota	Predikat Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Kendal	C	CC	CC	CC	C
2.	Kab. Semarang	CC	CC	CC	CC	C
3.	Kab. Batang	D	CC	CC	CC	CC
4.	Kota Semarang	-	-	-	-	CC
5.	Kab. Temanggung	C	C	C	CC	CC

c. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan dan audit merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi/lembaga. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi/lembaga terhadap setiap pegawai yang berada dalam organisasi adalah wujud dari pelaksanaan fungsi administrasi dari pimpinan organisasi terhadap para bawahan, serta mewujudkan peningkatan efektifitas, efisiensi, rasionalitas, dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan.

Peranan pengawasan dan audit internal lembaga/organisasi pada rencana kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga keuangan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan APBD. Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD merupakan salah satu pengawasan pada bidang keuangan daerah. Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sehingga hasil pengawasan dan audit dapat dipertanggungjawabkan secara relevan. Pengawasan terhadap audit internal terhadap APBD Kabupaten Kendal belum dilakukan sebagai mana mestinya sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kendal belum optimal hal itu dilihat dari opini terhadap laporan keuangan Kabupaten Kendal yang masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama lima tahun terakhir (2011-2015). Kabupaten Kendal perlu mengejar opini BPK menjadi WTP seperti Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Seperti diketahui WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik, sehingga *good* dan *clean government* dapat terwujud.

Tabel 4.2.
Opini Terhadap Laporan Keuangan
Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Semarang	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP
2	Kabupaten Semarang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	<u>Kabupaten Kendal</u>	<u>WDP</u>	<u>WDP</u>	<u>WDP</u>	<u>WDP</u>	<u>WDP</u>
4	Kabupaten Demak	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
<u>Provinsi Jawa Tengah</u>		<u>WTP</u>	<u>WTP</u>	<u>WTP</u>	<u>WTP</u>	<u>WTP</u>

Sistem pengelolaan keuangan yang belum dilakukan sesuai aturan terbukti memperlambat jalannya pembangunan Kabupaten Kendal beberapa tahun ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan yang paling dominan adalah pengelolaan asset yang masih belum optimal dan sistem penetausahaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan sistem-sistem pengelolaan keuangan daerah lainnya.

Sebagaimana telah di uraikan di atas, terkait data-data dan informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka dirincikanlah akar permasalahan dari permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Rumusan Permasalahan Utama
"Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"

<u>Masalah</u>	<u>Akar Masalah</u>
1. Belum optimalnya integritas aparatur dalam melayani	1. Belum optimalnya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 2. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat 3. Masih rendahnya disiplin PNS/ASN dalam melayani masyarakat 4. Belum adanya SOP terkait pelayanan publik 5. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Masih redahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian kebijakan 2. Belum terintegrasinya perencanaan daerah dengan perangkat daerah 3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan sektoral
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	1. Manajemen pengelolaan keuangan daerah belum terkelola dengan maksimal 2. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran daerah

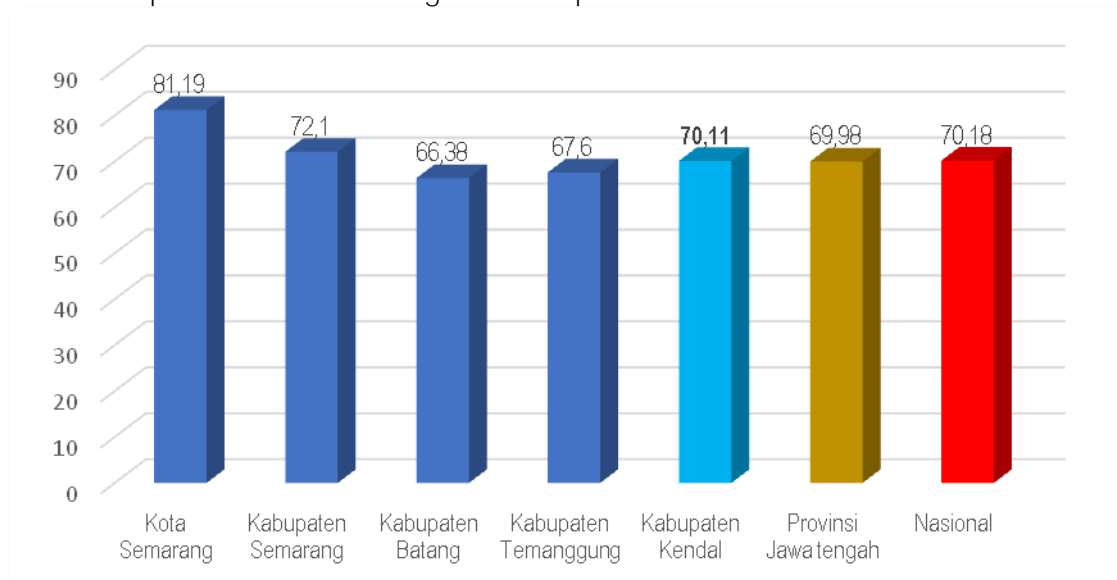
2. Masih Rendahnya Daya Saing Sumberdaya Manusia (SDM)

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) berhubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Kendal berperan di berbagai sektor penting dalam pembangunan daerah. Rendahnya daya saing SDM Kabupaten Kendal berkorelasi dengan kualitas SDM. Indikasi atas kualitas SDM antara lain diukur dengan sejauh mana SDM Kabupaten Kendal dapat bersaing dengan

SDM wilayah lain, sekurang-kurangnya di “negeri” sendiri. Tumbuhnya industri besar di Kabupaten Kendal menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing dengan daerah-daerah di sekitarnya agar industri-industri tidak menyerap tenaga kerja dari daerah sekitar seperti Kota Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung tetapi menyerap tenaga kerja lokal.

Rendahnya kualitas SDM Kabupaten Kendal berkaitan dengan pembangunan manusia di Kabupaten kendal. Pembangunan manusia di Kabupaten Kendal dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kendal yang baru mencapai 70,11 termasuk kategori tinggi.

Gambar 4.2.
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016



Sumber: <https://jateng.bps.go.id> (diolah)

Jika dilihat perbandingan Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota sekitar, capaian daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Kendal beradap pada posisi menengah dengan nilai 70,11. Kabupaten Kendal hanya kalah bersaing dengan Kota Semarang (81,19) dan Kabupaten Semarang (72,1). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal masih berada di bawah nasional (70,18), tetapi sudah di atas Provinsi Jawa Tengah (69,98). Meskipun begitu, hal ini tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kendal mengingat sumberdaya manusia merupakan subyek pembangunan utama sehingga kualitasnya harus diperhatikan dengan mendayagunakan setiap potensi yang ada.

Rumusan Permasalahan utama tersebut agar penyelesaian permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya, maka perlu dipahami penyebab dari permasalahan utama tersebut. Rumusan penyebab

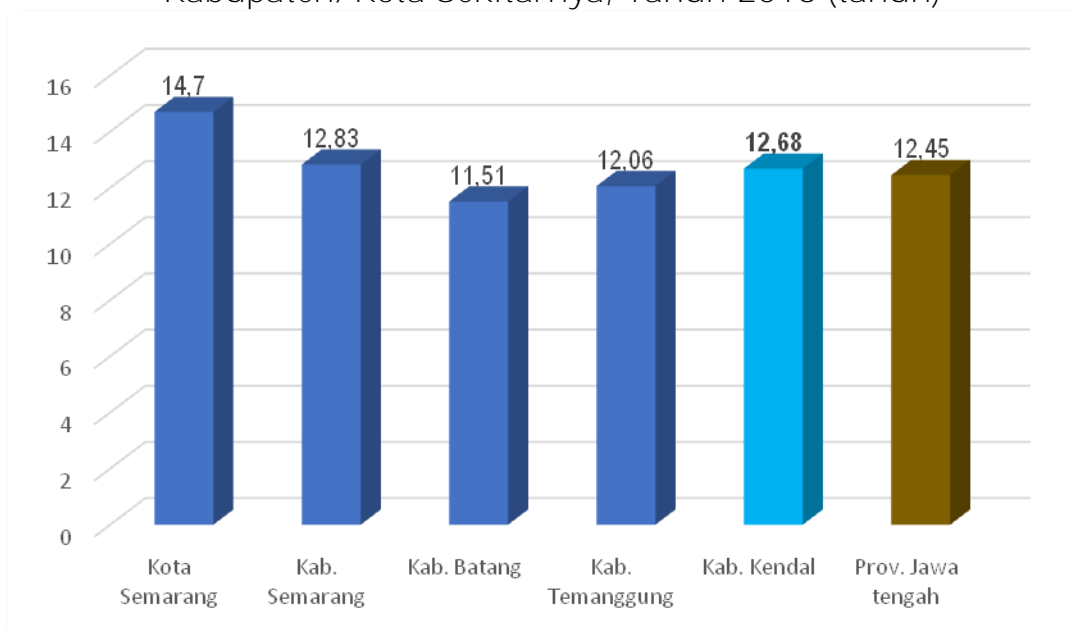
permasalahan utama yang berhubungan dengan rendahnya daya saing SDM Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Pemerataan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Pengehatuan (pendidikan) diakui secara luas adalah unsur mendasar dari pembangunan manusia. Sektor pendidikan diukur dengan dua indikator utama yaitu angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari bidang pendidikan, salah satunya indikatornya yaitu meningkatnya angka harapan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Semakin tinggi suatu daerah harapan lama sekolahnya mempresenatsikan bahwa kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah tersebut sudah baik. Data dari BPS kabupaten Kendal bahwa angka HLS Kabupaten Kendal berada pada angka 12,68 tahun.

Jika dilihat perbandingan dengan kabupaten/kota sekitarnya, Kabupaten Kendal (12,68) masih beradaa di bawah Kota Semarang (14,7) dan Kabupaten Semarang (12,83), tetapi masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah. Penyediaan sarana prasarana pendidikan, kualitas pendidikan serta pemerataan pendidikan menjadi tentangan yang harus di selesaikan oleh Kabupaten Kendal, jika tidak mau tertinggal semakin jauh oleh Kota Semarang dan Kabupaten Semarang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal.

Gambar 4.3.
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya, Tahun 2016 (tahun)

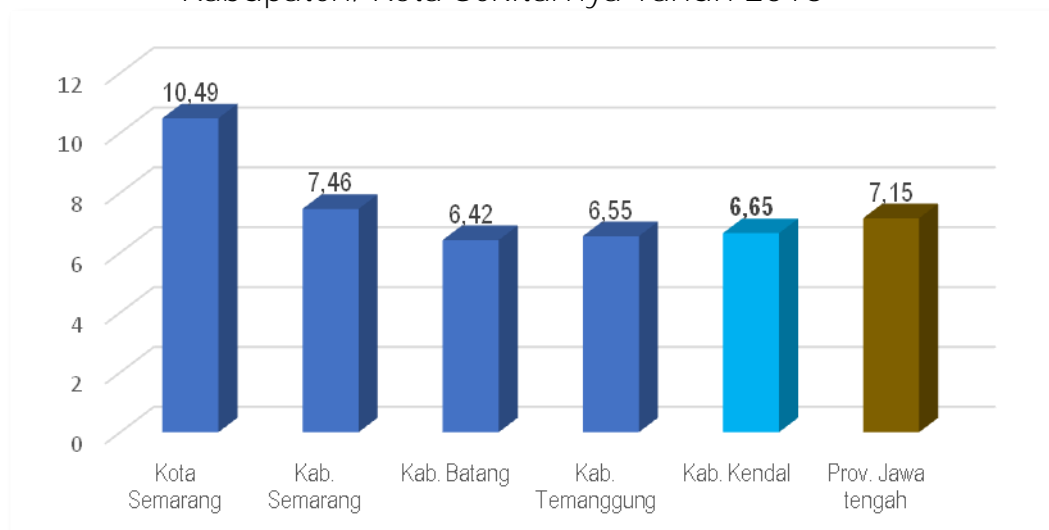


Sumber: <https://jateng.bps.go.id> (diolah)

Selain HLS, indikator pendidikan lainnya adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan

oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan seberapa tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di Kabupaten Kendal. Pembangunan pendidikan yang belum merata sampai ke desa-desa serta kualitas pendidikan yang masih banyak terpusat di Kota, menjadi salah satu penyebab masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal yang hanya mencapai 6,65 tahun dari target mencapai wajib belajar 9 tahun.

Gambar 4.4.
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2016



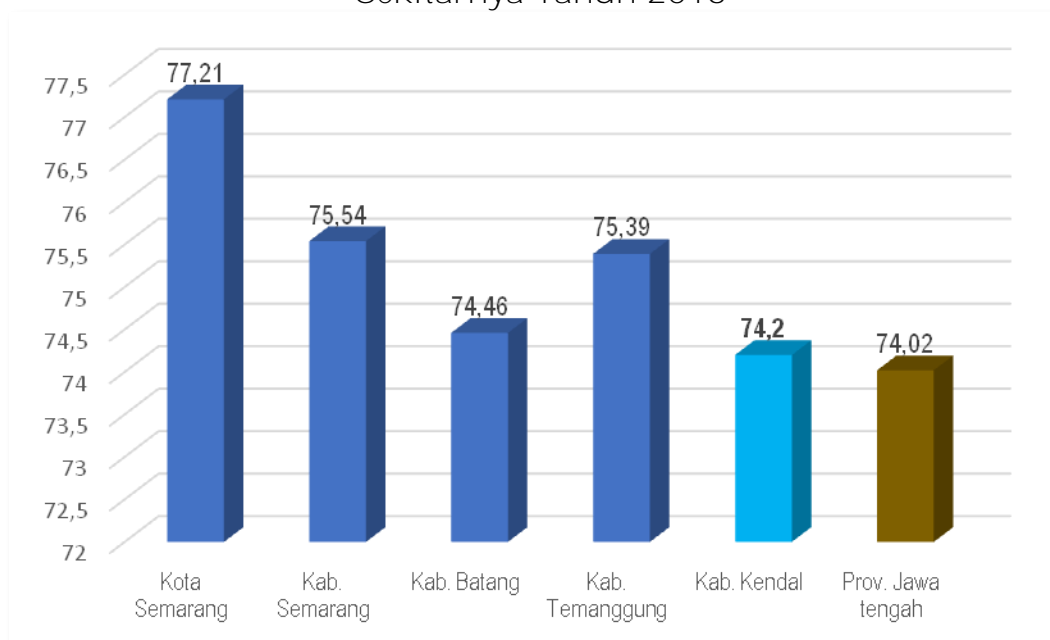
Sumber: <https://jateng.bps.go.id> (diolah)

Jika dilihat perbandingan dengan kabupaten/kota sekitarnya, rata-rata lama sekolah Kabupaten Kendal (6,65) masih berada di bawah Kota Semarang (10,49) dan Kabupaten Semarang (7,46), bahkan masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah (7,15). Perbaikan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan perlu di tingkatkan agar Kabupaten Kendal mampu bersaing dengan daerah sekitarnya.

b. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Belum Optimal

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kendal adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum optimal. Belum optimalnya pelayanan kesehatan disebabkan berbagai hal, salah satunya diukur dari angka harapan hidup, tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan akibat masih minimnya fasilitas kesehatan di desa-desa. Selama ini, sebaran fasilitas medis belum merata, sehingga warga di pedesaan kurang terlayani dengan baik. Berdasar data-data yang ada, secara umum status kesehatan dan gizi masyarakat Kabupaten Kendal telah mengalami peningkatan, walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan status kesehatan di Kabupaten/kota lain di sekitarnya.

Gambar 4.5.
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal dan Kabupaten/Kota
Sekitarnya Tahun 2016



Sumber: <https://jateng.bps.go.id> (diolah)

Ketimpangan pelayanan kesehatan masyarakat terlihat antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan dan antar perkotaan-pedesaan. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi pada tingkat pendidikan rendah, di pedesaan dan kawasan pedalaman. Akses pelayanan kesehatan yang rendah ini disebabkan karena kendala geografis, psikologis, dasar indikator angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup dan prevalensi gizi kurang.

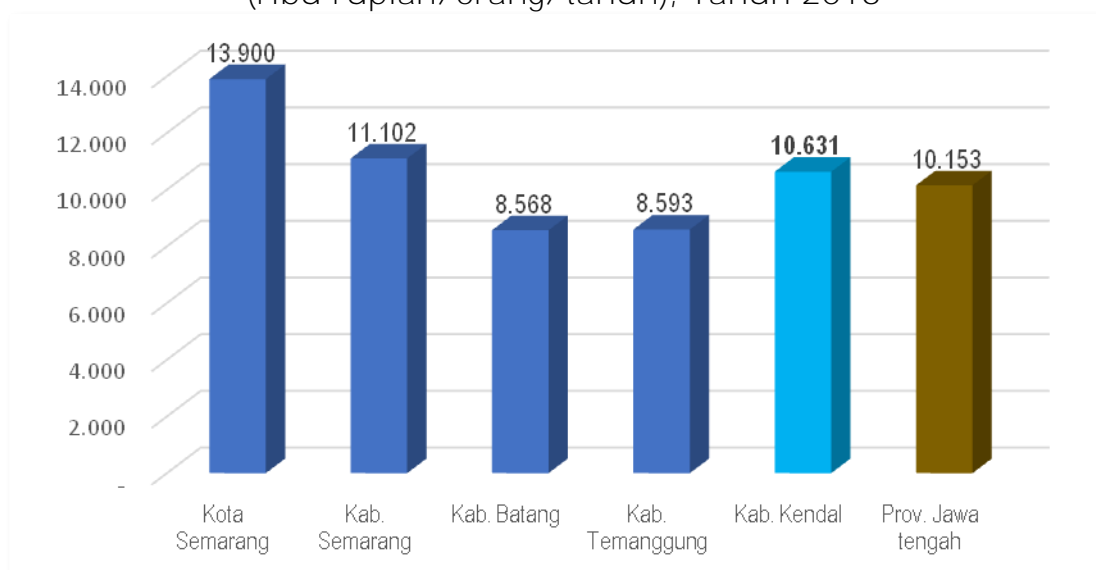
c. Masih Rendahnya Daya Beli Masyarakat

Pengeluaran konsumsi masyarakat menunjukkan daya beli masyarakat di suatu wilayah yang mengindikasikan tinggi rendahnya perekonomian mikro dalam pembangunan daerah. Dalam kajian analisisnya, pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal secara menyeluruh.

Pengeluaran rata-rata per kapita di Kabupaten Kendal secara umum mengalami peningkatan di setiap periodenya dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat. Pada tahun 2016, pengeluaran rata-rata per kapita Kabupaten Kendal mencapai Rp. 10.631. Pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal masih di bawah pengeluaran per kapita Kota Semarang (13.900) dan Kabupaten Semarang (11.102). Terlihat bahwa sebagian besar pengeluaran rata-rata per kapita sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi

kebutuhan makanan yang mengindikasikan bahwa masyarakat masih tinggi dalam mempertahankan kehidupan pokoknya utamanya masalah "perut".

Gambar 4.6.
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya
(ribu rupiah/orang/tahun), Tahun 2016



Sumber: <https://jateng.bps.go.id> (diolah)

Agar rumusan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya maka perlu dipahami sumber/akar masalah pada masing-masing masalah. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan rendahnya daya saing SDM Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4.
Rumusan Permasalahan Utama
"Rendahnya Daya Saing SDM Kabupaten Kendal"

Masalah	Akar Masalah
1. Belum Optimalnya Pemerataan Kualitas Pelayanan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Masih Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sejak dini (PAUD) Belum optimalnya pencapaian wajib belajar 9 tahun Masih tingginya angka putus sekolah Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
2. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan dalam memberikan pelayanan Masih rendahnya mutu dan akses pelayanan kesehatan masyarakat Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
3. Masih rendahnya daya beli masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan masyarakat

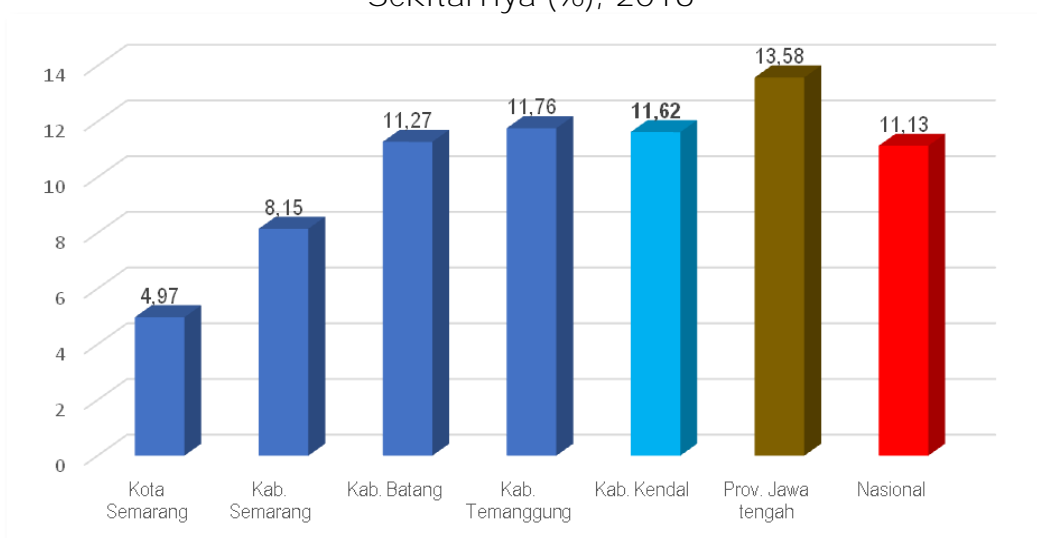
	2. Rendahnya pendapatan masyarakat 3. Masih banyaknya masyarakat bekerja pada sektor informal
--	--

3. Belum Optimalnya pengentasan kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan masih menjadi agenda nasional yang bersifat multidimensional dan mendesak untuk dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan menjadi upaya sangat relevan dan menjadi prioritas untuk dilakukan. Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kendal masih menghadapi sejumlah masalah, salah satunya masih kurang koordinasinya perangkat daerah dan tim penanggulangan kemiskinan daerah. Kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Salah satu permasalahan pokok di Kabupaten Kendal yaitu penurunan tingkat kemiskinan yang bergerak fluktuatif dan cenderung menurun. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal memiliki kecenderungan menurun pada setiap periode pembangunan hingga mencapai angka 11,62 persen tingkat kemiskinan pada tahun 2015. Meskipun memiliki kecenderungan menurun, tingkat kemiskinan mulai mengalami kerentanan dalam penurunannya dan masih tergolong cukup tinggi.

Gambar 4.7.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kendal Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya (%), 2016



Sumber: <https://jateng.bps.go.id> (diolah)

Jika dilihat perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal (11,62%) cukup tinggi di atas tingkat kemiskinan Kota Semarang (4,97%), Kabupaten

Semarang (8,15%) dan Kabupaten Batang (11,27%) serta masih diatas tingkat kemiskinan nasional (11,13%). Tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Kabupaten sebagai pengayom masyarakat, agar memprioritaskan kembali pengentasan kemiskinan dan berjalan seiring dengan program dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tantangan Pemerintah Kabupaten Kendal saat ini harus dapat menghadapi dan menyasiasi tingginya tingkat kemiskinan terutama di pedesaan. Hal ini dikarenakan meski terjadi penurunan tingkat kemiskinan namun berjalan relatif lambat, sehingga menegaskan adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di daerah pedesaan.

Rumusan Permasalahan utama tersebut agar penyelesaian permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya, maka perlu dipahami penyebab dari permasalahan utama tersebut. Rumusan penyebab permasalahan utama yang berhubungan dengan belum optimalnya pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Kabupaten Kendal memiliki kecamatan sebanyak 20 kecamatan yang terbagi menjadi 266 desa dan 20 kelurahan. Wilayah desa adalah tempat di mana sebagian besar penduduk miskin tinggal, hampir sebgaiian kemiskinan di Kabupaten Kendal banyak tersebar di pedesaan. Intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sangat di perlukan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan. Pencapaian pemerataan keadilan merupakan isu penting dalam pembangunan di Kabupaten Kendal dan juga tentu dalam pembangunan desa. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dimana pengelolaan potensi ekonomi desa dan kawasan pedesaan tidak hanya mampu menyertakan sebanyak-banyakny angkatan kerja lulusan SD/SMP, tetapi juga pemberdayaan keluarga miskin, mampu memperbaiki pemerataan dan mengurangi kesenjangan. Perhatian khusus terhadap usaha mikro di desa haruslah dikedepankan yang memang nyata perlu dukungan dalam hal penguatan teknologi yang ramah lingkungan, permodalan dan akses pasar.

Pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan daerah. Masih rendahnya kualitas pembangunan desa disebabkan oleh belum terintegrasinya program pemerintah pusat *one village one product* sebagai salah satu indikasi

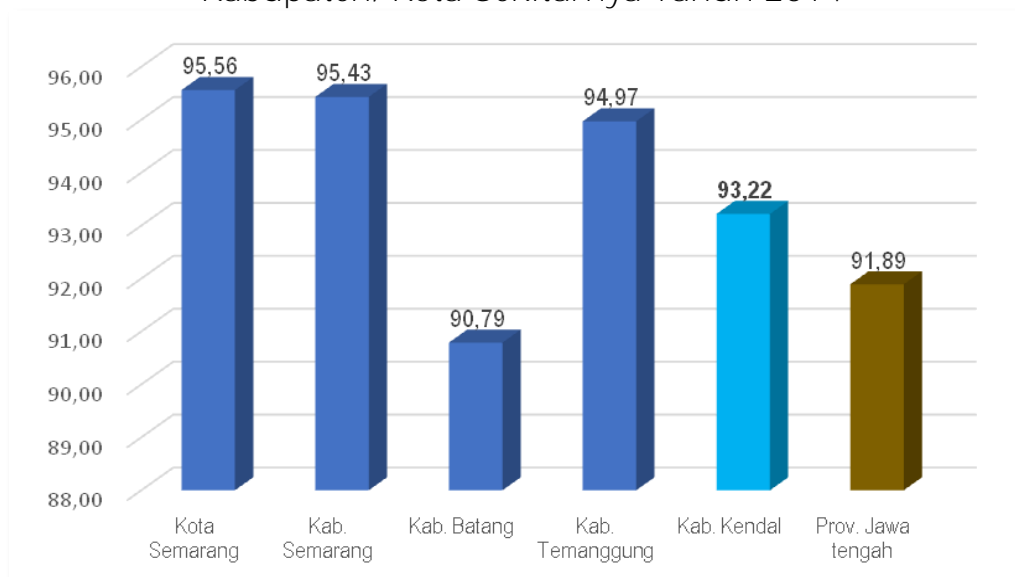
produktivitas dan penguatan perekonomian desa. Selain itu, kapasitas Aparat desa yang masih rendah juga menjadi penyebab rendahnya pembangunan tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Kendal perlu memberikan arahan mengenai pemberian tugas pembantuan ke desa melalui aparatur di tingkat kecamatan pembangunan desa sangat strategis dan penting dalam rangka mendukung program pembangunan pemerintah pusat membangun Indonesia dari pinggiran

b. Masih Rendahnya Kualitas dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan

Dengan semakin besarnya peran perempuan dalam pembangunan maka pemberdayaan perempuan secara otomatis akan meningkat. Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dala ekonomi, sosial dan budaya serta politik.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kendal pada tahun 2014 adalah 93,22. Capaian ini, jika dibandingkan dengan capaian Kab/Kota sekitar seperti Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, dan Kota Semarang, hanya lebih tinggi dari capaian Kabupaten Batang yang sebesar 90,79. Capaian Kabupaten Kendal juga diatas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.8 di bawah ini.

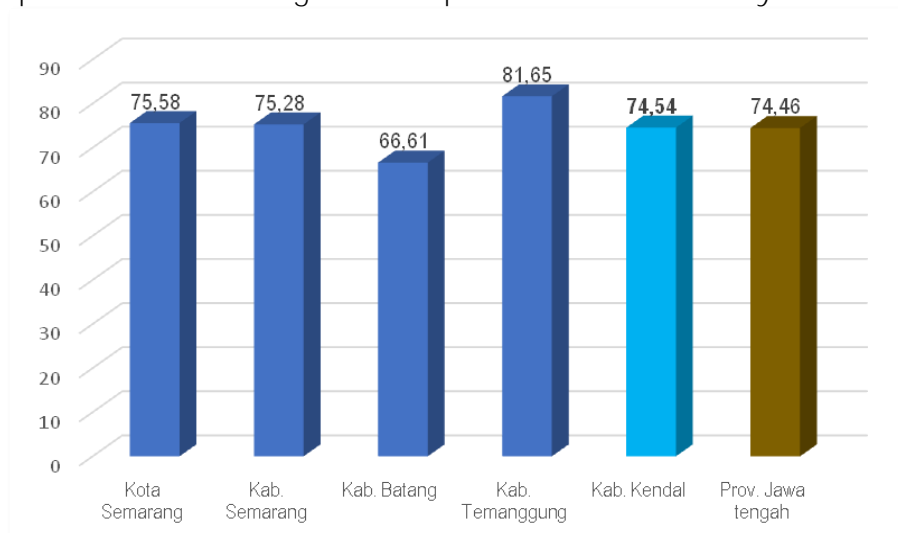
Gambar 4.8.
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2014



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Selain IPG untuk mengukur ketimpangan gender juga menggunakan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender merupakan angka pembentuk IPG yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Pada kurun waktu 2010-2014 Kabupaten Kendal mengalami peningkatan capaian IDG yang cukup signifikan yaitu sebesar 64,42 menjadi 74,54 pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan capaian Kab/Kota sekitar, capaian IDG Kabupaten Kendal lebih rendah dari capaian Kabupaten Temanggung dan lebih tinggi dari capaian Kabupaten Batang dan Kota Semarang. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian Kabupaten Kendal lebih rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.9 di bawah ini.

Gambar 4.9.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Kota Sekitarnya Tahun 2014



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Sebagaimana telah di uraikan di atas, terkait data-data dan informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka dirincikanlah akar permasalahan dari permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5.
Rumusan Permasalahan Utama
"Belum Optimalnya Pengentasan Kemiskinan"

Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin	1. Belum berkembangnya ekonomi di perdesaan 2. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi perdesaan 3. Belum optimalnya pelayanan panti sosial dan penyediaan jaminan perlindungan bagi penyandang masalah dan kesejahteraan sosial (PMKS)

<u>Masalah</u>	<u>Akar Masalah</u>
	4. Adanya kultur yang menyebabkan masyarakat terperangkap dalam kemiskinan 5. Belum optimalnya pemberdayaan dan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas
2. Masih rendahnya kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Masih adanya ketimpangan gender di masyarakat 2. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan di perdesaan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga 3. Masih sedikitnya lembaga PUG yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender

4. Belum Optimalnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi penerus sebuah bangsa, gerakan pemuda sebagai gerakan *civil society* akan terus menempatkan pemuda pada posisi pelatuk sekaligus pengawal perubahan. Semangat inilah yang semestinya terus terjaga dalam setiap gerakan kepemudaan. Saat ini pemuda kurang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, saat ini pemuda terkesa acuh terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya. Pemuda-pemuda saat ini telah terpengaruh dalam hal pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, bahkan kemajuan teknologi yang seharusnya membuat lebih terfasilitasi untuk melakukan hal-hal yang produktif justru malah disalahgunakan.

Rumusan Permasalahan utama tersebut agar penyelesaian permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya, maka perlu dipahami penyebab dari permasalahan utama tersebut. Rumusan penyebab permasalahan utama yang berhubungan dengan belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Rumusan Permasalahan Utama
"Belum Optimalnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan"

<u>Masalah</u>	<u>Akar Masalah</u>
1. Belum adanya kesadaran pemuda berperan aktif dalam pembangunan	1. Masih terbatasnya pemuda yang mendapatkan akses pembinaan 2. Belum optimalnya kegiatan kepemudaan yang berorientasi pada peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda 3. Masih rendahnya semangat enterprenur pemuda 4. Masih banyaknya <i>midset</i> pemuda yang ingin menjadi pegawai negeri

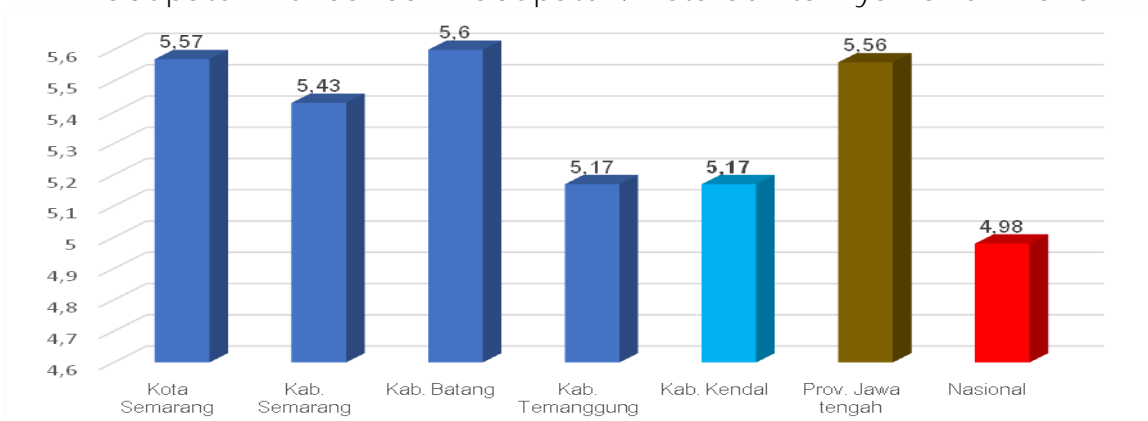
5. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Kabupaten Kendal yang memiliki luas wilayah 1.002,23 km² yang terbagi menjadi 20 kecamatan memiliki topografi dataran tinggi, dataran rendah berikut pantainya yang memiliki garis pantai pada pantai Utara Jawa tengah sepanjang lebih kurang 41 km membujur arah timur ke barat membuat potensinya sungguh sangat luar biasa, apalagi dengan iklim keamanan yang kondusif, penduduknya yang ramah serta saat ini juga sedang tahap perkembangan untuk menuju kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membuat Kabupaten kendal memiliki potensi yang sangat potensial untuk meningkatkan ekonomi daerahnya.

Pemanfaatan sumber daya alam yang demikian potensial, perlu didukung dengan pengembangan industri kecil menengah sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, pemanfaatan SDA ini berdampak pada meningkatnya nilai tambah produk hasil olahan SDA yang nantinya mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kendal secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Kabupaten/kota di sekitarnya tergolong rendah. Kabupaten Kendal pada tahun 2015 pertumbuhan ekonominya sebesar 5,17 persen sama dengan Kabupaten Temanggung (5,17%) tetapi masih di bawah kabupaten/kota di sekitarnya seperti Kota Semarang (5,57%), Kabupaten Semarang (5,43%) dan Kabupaten batang (5,6%). Pertumbuhan ekonomi kendal juga masih di bawah Provinsi Jawa Tengah (5,56%) tetapi masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional (4,98%). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tergolong stabil, namun nilai produk domestik bruto Kabupaten Kendal, utamanya non migas, masih cukup rendah sehingga memerlukan akselerasi dalam peningkatan kualitas perekonomian makro daerah.

Gambar 4.10.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kendal dan kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2015



Sumber: <https://jateng.bps.go.id> (diolah)

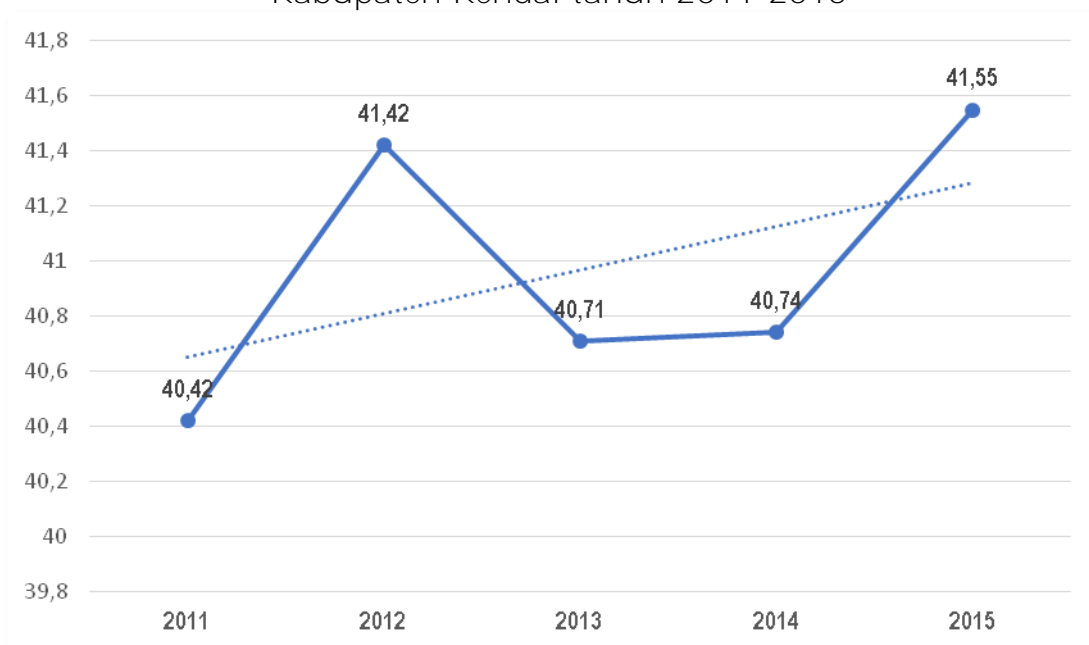
Rumusan Permasalahan utama tersebut agar penyelesaian permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya, maka perlu dipahami penyebab dari permasalahan utama tersebut. Rumusan penyebab permasalahan utama yang berhubungan dengan Belum optimalnya pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

a. Belum Maksimalnya pemanfaatan SDA untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Kabupaten Kendal memiliki potensi bisnis yang strategis, sumberdaya manusia yang berkualitas serta kekayaan alam yang berlimpah merupakan keunggulan sebagai tempat berinvestasi yang pas. Kabupaten Kendal yang memiliki jumlah penduduk 952.966 jiwa memiliki potensi bisnis yang luar biasa. Kendal yang memiliki lokasi strategis yang berjarak 21 km dari ibu kota Jawa Tengah Semarang, 25 km dari pelabuhan tanjung emas internasional, dan 20 km dari Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang merupakan lokasi yang strategis untuk lokasi bisnis.

Kabupaten Kendal yang memiliki 20 kecamatan yang terbagi oleh 266 desa dan 20 kelurahan serta 1/440 dukuh, 1.490 RW dan 6.351 RT memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) untuk di kembangkan. Tetapi dari potensi tersebut belum mendongkrak pertumbuhan ekonomi khususnya pertumbuhan industri. Industri pengolahan di Kabupaten Kendal memberikan kontribusi cukup signifikan sebesar 41,55 persen pada tahun 2015 dari total pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal sebesar 5,17 persen. Melihat begitu besarnya potensi Sumberdaya Alam di Kabupaten Kendal seharusnya industri di Kendal bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,17 persen mengingkat adanya kawasan industri dan akan di berlakukannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kendal. Pertumbuhan ekonomi sektor industri di Kabupaten Kendal selama lima tahun (2011-2015) mengalami fluktuatif, tetapi secara rata-rata masih mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen. Kenaikan sektor industri ini masih sangat rendah bila di lihat dari potensi yang ada di Kabupaten Kendal.

Gambar 4.11.
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Kendal tahun 2011-2015



Sumber: Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016 (diolah)

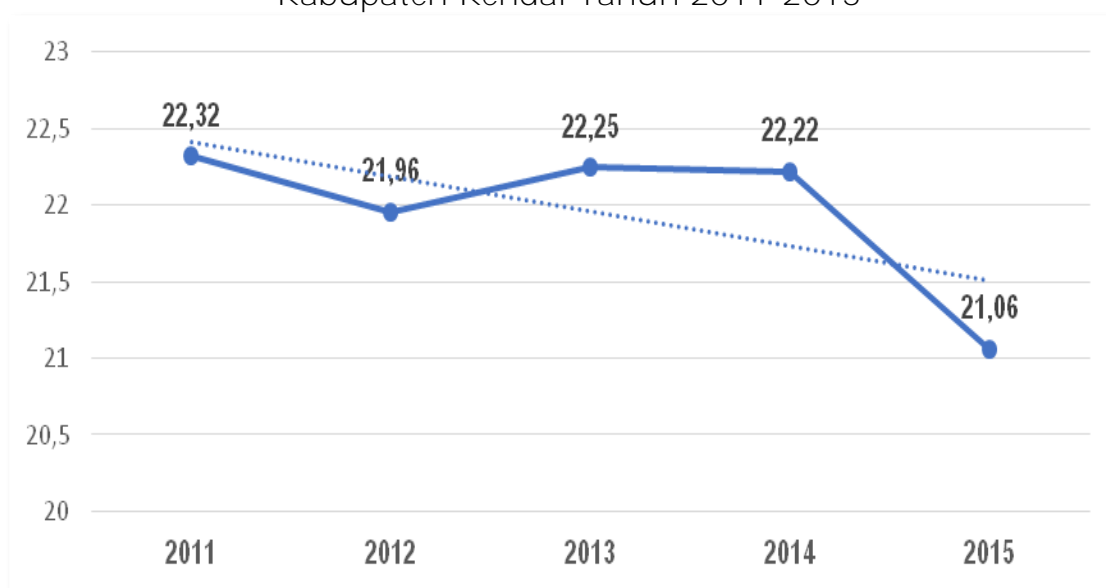
- b. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Pembangunan Ketahanan Pangan

Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan untuk peruntukan lainnya masih terus terjadi. Hal tersebut dipastikan akan terus mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, pemerintah harus secara terencana menyusun strategi mencapai target ketahanan pangan untuk menghindari bahaya kelaparan. Langkah yang dapat ditempuh antara lain: langkah ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi. Ekstensifikasi adalah perluasan lahan pertanian. Tahap ini menghadapi tantangan yang sangat berat mengingat ketersediaan lahan pertanian justru semakin berkurang dari hari ke hari karena Lahan-lahan pertanian kebanyakan telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman.

Selain mengancam ketahanan pangan juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sektor pertanian secara umumnya dan kesejahteraan petani khususnya. Pembangunan bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, merupakan salah satu upaya pemerintah kabupaten Kendal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan yang sebagian besar berada di daerah pedesaan, melalui peningkatan produksi dan produktivitas, sekaligus untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi sektor pertanian digunakan indikator pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan

Nilai Tukar Petani (NTP), yaitu angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian merupakan salah satu indikator relatif untuk mengukur pembangunan sektor pertanian. Semakin tinggi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, diharapkan semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Kabupaten Kendal mengalami penurunan dalam lima tahun (2011-2015) terakhir ini sebesar -1,16 persen. Faktor-faktor penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi pertanian ini di karenakan alih fungsi lahan pertanian dan tidak menariknya lapangan usaha pertanian bagi golongan pemuda. Pemuda kurang tertarik untuk menjadi petani dan lebih tertarik untuk menjadi buruh pabrik. Tantangan ini lah yang perlu di hadapi Kabupaten Kendal dalam pembangunan bidang pertanian.

Gambar 4.12.
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

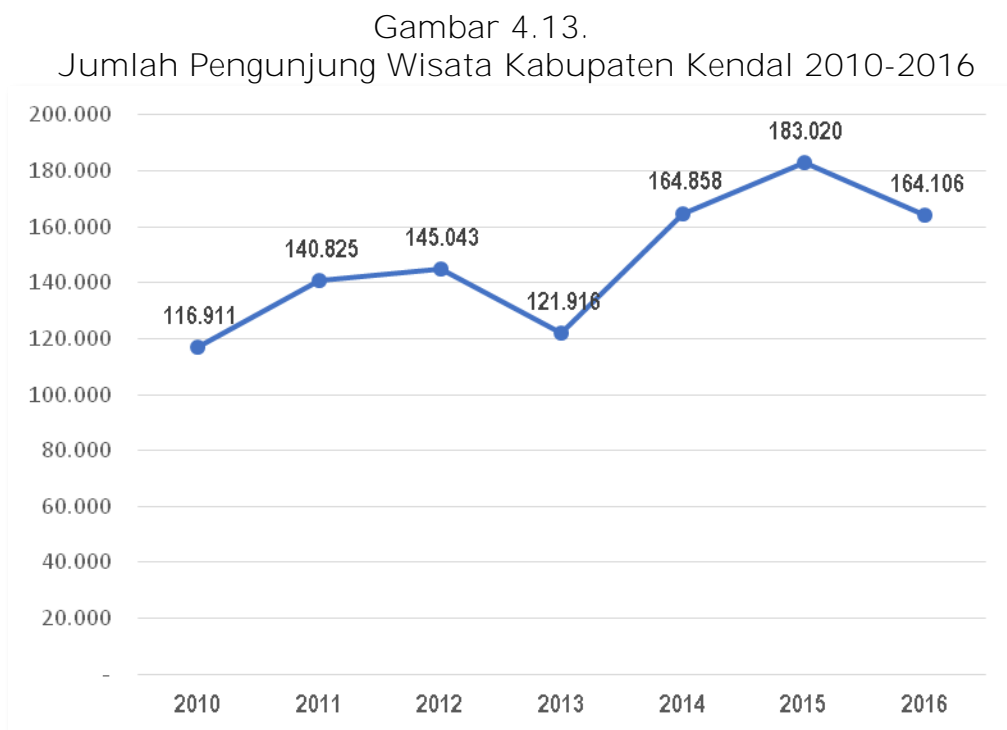


Sumber: Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016 (diolah)

c. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Pariwisata

Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa potensial, Kabupaten Kendal memiliki beberapa tempat menarik yang menjanjikan untuk menjadi tujuan pariwisata. Bidang kepariwisataan Kabupaten Kendal mempunyai obyek wisata yang memiliki daya tarik tetapi masih belum dikelola secara optimal padahal memiliki prospek pasar skala nasional dan internasional. Perlu adanya terobosan-terobosan yang baru dan efektif terkait pemasaran, pengelolaan kawasan wisata, hingga peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Kendal terbentuk secara alamiah dari kondisi geografis, sejarah dan budaya yang dimiliki Kabupaten Kendal. Potensi wisata yang berasal dari kondisi geografis meliputi obyek alam pantai maupun goa. Potensi wisata yang berasal dari sejarah meliputi obyek wisata religius maupun budaya.



Potensi-potensi tersebut belum bisa dijadikan salah satu pendongkrak ekonomi masyarakat untuk sektor pariwisata. Sektor pariwisata masih kalah dengan sektor industri maupun sektor pertanian, pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Kendal hanya mencapai 164.106 orang dan hanya berkontribusi terhadap PAD tidak terlalu signifikan, bahkan terjadi penurunan total pengunjung yang datang di Kabupaten Kendal jika dibandingkan pada tahun sebelumnya (2015) sebesar 183,020. Jika pariwisata dikelola secara optimal maka potensi wisatawan lokal maupun mancanegara bisa meningkat mencapai angka 100 % sehingga secara langsung akan meningkatkan daya saing pariwisata hingga level internasional. Oleh karena itu, agar potensi pariwisata bisa meningkatkan perekonomian wilayah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan pariwisata yang berkesinambungan dan terarah.

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan daerah "Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah" di Kabupaten Kendal dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 4.7.
Rumusan Permasalahan Utama
"Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Daerah"

Masalah	Akar Masalah
1. Belum maksimalnya pemanfaatan SDA untuk peningkatan perekonomian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya potensi sumberdaya lokal 2. Masih renahnya ekspor produk unggulan daerah 3. Belum berkembangnya industri berbasis produk unggulan daerah
2. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi pertanian dan pembangunan ketahanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih renahnya nilai produksi pertanian dan perkebunan 2. Masih rendahnya nilai produksi perikanan 3. Belum optimalnya pencapaian ketahanan pangan 4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian 5. Ketersediaan infrastruktur pertanian masih rendah
3. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata 2. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata 3. Pola pengembangan pariwisata belum terintegrasi dengan stakeholder terkait 4. Pemasaran pariwisata belum optimal

6. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, air minum, dan pemukiman) secara merata

menjadi "PR" bagi pemerintah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pembangunan sisa pemerintahan empat tahun ke depan.

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah 1.002,23 Km² dan terbagi ke dalam 20 wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 770,993 km (jalan kewenangan Kabupaten Kendal). Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2016 sebesar 63,3% dalam kondisi mantap dan sisanya 36,7% dalam tidak mantap.

Rumusan Permasalahan utama tersebut agar penyelesaian permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya, maka perlu dipahami penyebab dari permasalahan utama tersebut. Rumusan penyebab permasalahan utama yang berhubungan dengan belum meratanya pembangunan infrastruktur Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

a. Belum maksimalnya pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas

Ada beberapa hambatan yang menyebabkan pemerataan pembangunan sulit diwujudkan. Minimnya dana pembangunan ekonomi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penyebab utama. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana pembangunan terserap pada belanja pegawai sehingga porsi untuk peningkatan infrastruktur dasar menjadi berkurang.

Adanya paradigma buruk terkait pembangunan ekonomi, paradigma pembangunan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, bukan fundamental ekonomi yang menyebabkan sentralisasi pembangunan tetap dipertahankan. Paradigma pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek menyebabkan realisasi pemerataan pembangunan yang lambat, bahkan cenderung diam di tempat. Pemerataan pembangunan ekonomi memang harus dimulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur. Jika infrastruktur memadai maka kegiatan ekonomi dapat meningkatkan akses masyarakat untuk berusaha dan berupaya sehingga pemerataan pembangunan akan terealisasi.

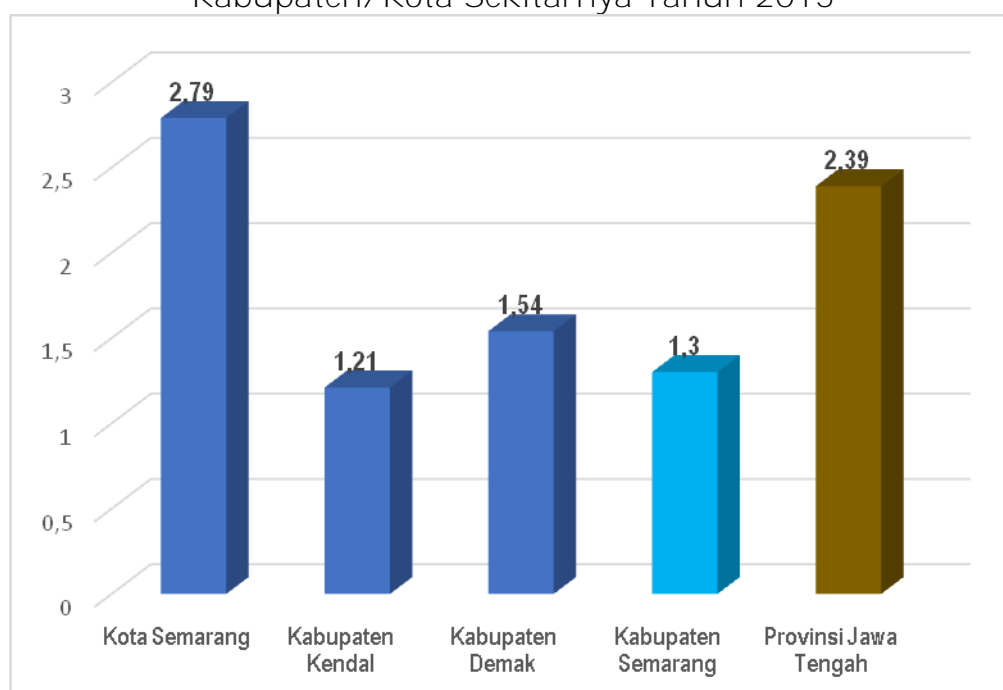
b. Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman dan perumahan

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan Kabupaten Kendal. Ketersediaan utilitas perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang mencakup perumahan, air minum, air limbah, persampahan dan drainase ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan sektor riil. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan permukiman Kabupaten Kendal adalah masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak, masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi permukiman yang layak, serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dalam mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata dan perdagangan.

Pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kendal adalah lingkungan pemukiman. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah pusat mencanangkan program 100-0-100 yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, yang harus dicapai oleh Kabupaten/kota pada tahun 2019. Kabupaten Kendal, memiliki persentase rumah tangga kumuh yang nilainya sebesar 1,21 persen. Walaupun Kabupaten Kendal persentase rumah tangg kumuh lebih kecil tetapi hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kendal untuk memerhatikan rumah tangga kumuh sehingga target nasional tercapai 0% kawasan kumuh di Kabupaten Kendal.

Gambar 4.14.
Persentase Rumah Tangga Kumuh Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2015



c. Pembangunan yang Belum Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kendal adalah belum optimalnya upaya pengelolaan SDA yang ramah lingkungan. Kabupaten Kendal harus bertekad untuk memproyeksikan daerahnya menjadi daerah yang mampu mengelola SDA dan Lingkungan secara efisien, mandiri dan ramah lingkungan. Terwujudnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat mewujudkan tumbuhnya kenyamanan, kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Kendal, generasi sekarang dan selanjutnya.

Degradasi lingkungan dapat diartikan sebagai penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya komponen-komponen lingkungan secara baik dan sebagaimana mestinya. Degradasi lingkungan pada dasarnya disebabkan oleh adanya intervensi atau campur tangan manusia yang berlebihan terhadap keberadaan lingkungan secara alamiah. Degradasi lingkungan dapat terjadi akibat pemanfaatan lahan dan masuknya bahan-bahan pencemar berbentuk padat dan cair ke lingkungan yang mana bahan-bahan ini bukan merupakan bagian dari komponen lingkungan asli. Degradasi lingkungan dapat pula terjadi akibat proses pembuangan limbah pabrik langsung ke sungai/laut serta pencemaran udara dari aktivitas pabrik.

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan daerah "Belum meratanya pembangunan infrastruktur" di Kabupaten Kendal dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Rumusan Permasalahan Utama
"Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur"

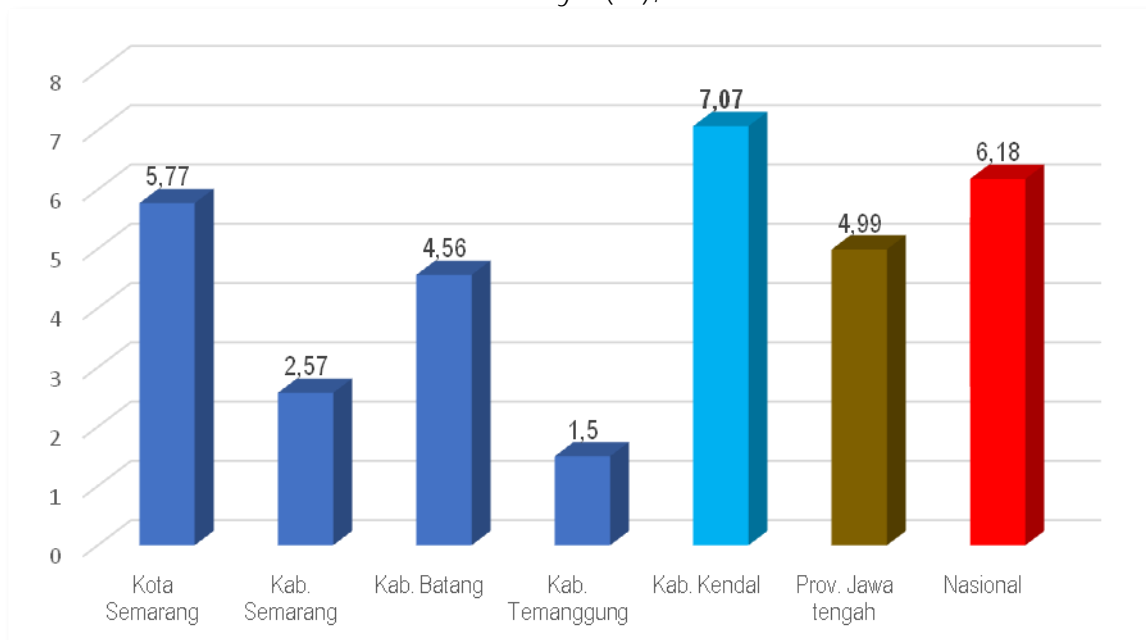
Masalah	Akar Masalah
1. Belum maksimalnya pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas	1. Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perdesaan 2. Pemerataan aksesibilitas yang belum sepenuhnya terjangkau dengan baik 3. Belum optimalnya penyediaan jalan dan jembatan dalam melayani masyarakat dan dunia usaha
2. Belum optimalnya penanganan kawasan pemukiman dan perumahan	1. Masih terdapat kawasan kumuh dan kawasan rawan kumuh yang belum tertangani 2. Belum sepenuhnya penyediaan

Masalah	Akar Masalah
	air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 3. Rendahnya kesadaran masyarakat akan perumahan beranitasi baik
3. Pembangunan yang belum memperhatikan keberlanjutan lingkungan	1. Belum optimalnya pengelolaan limbah 2. Masih banyaknya lahan di kawasan perkotaan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk ruang terbuka hijau 3. Pemahaman masyarakat terhadap isu lingkungan masih rendah

7. Belum Optimalnya Investasi Untuk Mengurangi Pengangguran

Iklm investasi di Kabupaten Kendal sudah cukup kondusif tetapi masih perlu di tingkatkan mengingat infrastruktur belum optimal dalam pembangunannya, khususnya ke daerah-daerah yang memiliki potensi unggulan. Meskipun Kabupaten Kendal memiliki kawasan industri tetapi investasi yang masuk belum mampu menyerap tenaga lokal yang cukup banyak hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Kendal sebesar 7,07 persen pada tahun 2015. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal pada tahun 2014 sebesar 6,15 persen menjadi 7,07 persen pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa penanaman modal di Kabupaten Kendal belum optimal dalam mengurangi angka pengangguran.

Gambar 4.15.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kendal dan Kabupaten/Kota Sekitarnya (%), 2015



Sumber: <https://jateng.bps.go.id> (diolah)

Tingkat pengangguran Kabupaten kendal merupakan tingkat pengangguran tertinggi di bandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitarnya bahkan dengan tingkat pengangguran Provinsi Jawa Tengah (4,99%) dan nasional (6,18%) pada kondisi agustus 2015. Sedangkan keempat Kabupaten/Kota sekitarnya memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah.

Rumusan Permasalahan utama tersebut agar penyelesaian permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya, maka perlu dipahami penyebab dari permasalahan utama tersebut. Rumusan penyebab permasalahan utama yang berhubungan dengan Belum optimalnya investasi dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

a. Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia (utamanya angkatan kerja) menentukan kemampuan tenaga kerja dalam memenuhi tuntutan spesifikasi tenaga kerja dari sektor ekonomi. Dengan basis ekonomi wilayah yang padat modal dan membutuhkan kemampuan yang cukup tinggi, kondisi pasar tenaga kerja lokal terbilang rentan dalam memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor-sektor utama perekonomian Kabupaten Kendal.

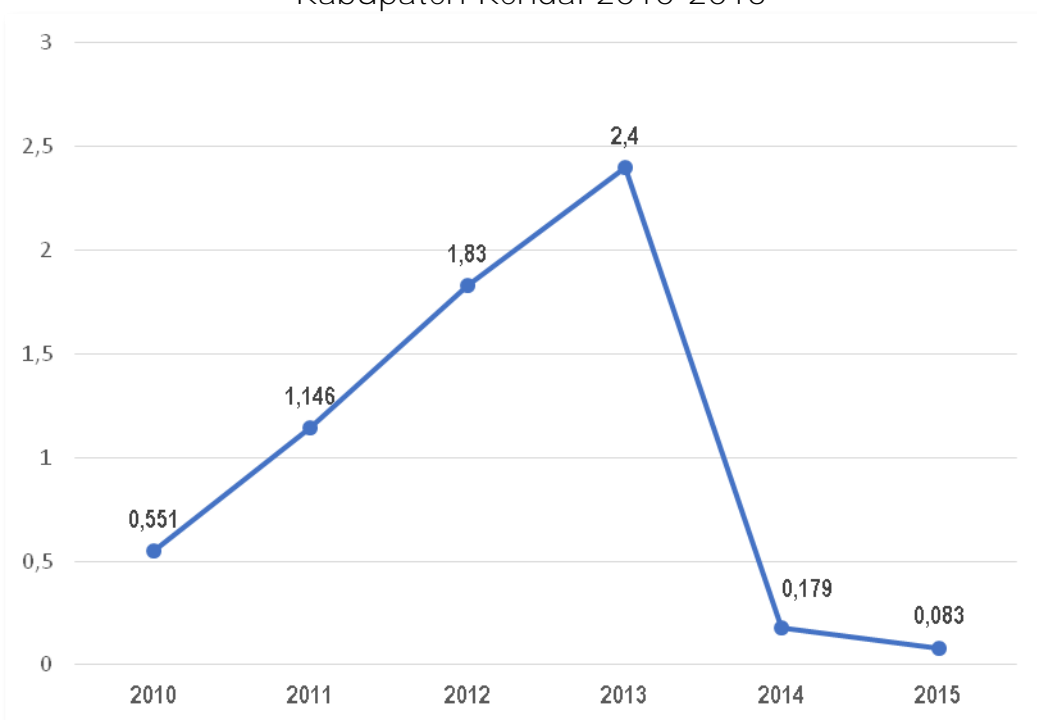
Kualitas tenaga kerja yang tinggi merupakan kebutuhan dasar pembangunan pemerintah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang mempunyai *skill*, handal, dan dapat dipercaya dalam mengelola sumber daya dengan maksimal akan menjadikan daya saing tenaga kerja lebih *powerfull*. Efek dari kondisi tersebut meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal dan secara otomatis akan meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Kendal.

b. Belum Optimalnya Investasi Daerah

Investasi yang berkembang di Kabupaten Kendal masih belum menyentuh beberapa desa/keluaraan menjadikan terjadi ketimpangan dalam perekonomian wilayah. Meskipun pemerataan mulai terjadi, investor masih belum melirik desa-desa sebagai tujuan penanaman modalnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar dalam pengembangan perekonomiannya berfokus pada desa-desa yang belum berkembang terutama pada daerah yang kurang memiliki aksesibilitas wilayah. Hal ini menyebabkan menurunnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kendal. Realisasi investasi di Kabupaten kendal mengalami penurunan dari Rp 0,551 Triliyun pada tahun 2010 menurun menjadi Rp 0,083 Triliyun. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar Rp 2,4 Triliyun tetapi setelah itu

mengalami penurunan setiap tahun. Data nilai realisasi investasi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.16.
Nilai Realisasi Investasi (Swasta) Baru, Perluasan dan/atau Pengembangan Kabupaten Kendal 2010-2015



Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan daerah "Belum optimalnya investasi dalam mengurangi penangguran" di Kabupaten Kendal dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 4.9.
Rumusan Permasalahan Utama
"Belum Optimalnya Investasi Untuk Mengurangi Pengangguran"

<u>Masalah</u>	<u>Akar Masalah</u>
1. Rendahnya kualitas tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah daerah dalam penggunaan tenaga kerja lokal daerah 2. Belum sesuai latar belakang pendidikan dengan kesempatan kerja 3. Rendahnya keterampilan lulusan pendidikan pencari kerja
2. Belum optimalnya investasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya regulasi yang mendukung investasi 2. Belum adanya insentif bagi investor besar 3. Belum adanya pedoman dalam pengembangan investasi

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan

4.2.1. Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarui yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Isu strategis pada tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Kendal antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

a. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals (MDGs)*. Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals (MDGs)* memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian

MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;

7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Kendal, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan awal tahun 2017, tidak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena "Brexit" atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, propoganda Korea Utara, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Kendal yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

c. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Semakin Pesat

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan

perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

4.2.2. Isu atau Kebijakan Nasional (RPJMN 2015-2019)

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi

bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, maka dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagai satu kesatuan Negara yang berkeadilan.

Pencapaian keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pencapaian pembangunan-pembangunan di daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi modal dasar dan kekuatan utama bangsa dalam membangun kemajuan dan kemandirian. Terkait hal tersebut, pengembangan wilayah menjadi cukup penting dan fundamental dalam mengoptimalkan setiap potensi daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang berkualitas dan merata.

Pengembangan setiap wilayah di Negara Republik Indonesia ini tergambar jelas pada misi pembangunan jangka menengah nasional dan dipertegas melalui agenda prioritas NAWA CITA yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah. Isu utama dalam pembangunan kewilayahan adalah kesenjangan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, arah kebijakan terkait pengembangan wilayah akan difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di wilayah kawasan barat Indonesia, dimana salah satunya adalah wilayah Jawa-Bali.

Sebagai bagian dari wilayah Pulau Jawa, Kabupaten Kendal memiliki berbagai potensi sumber daya yang strategis dan berkualitas untuk penunjang pengembangan wilayah Jawa-Bali. Oleh karena itu, penjabaran tema pengembangan wilayah Jawa-Bali menjadi penting untuk dikaji agar mengetahui seberapa besar porsi pembangunan Kabupaten Kendal dalam

kancah pembangunan nasional. Selain itu, pengembangan wilayah Jawa-Bali ini akan menjadi salah satu isu strategis untuk penyempurnaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah agar terintegrasi dan saling mendukung antara pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Jawa-Bali semakin meningkat, dan juga semakin meratanya pembangunan antarwilayah. Hal ini dicerminkan dengan makin menurunnya kontribusi PDRB Wilayah Jawa-Bali terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 58,0 persen (2013) menjadi 55,1 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa-Bali. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Jawa-Bali khususnya Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut.

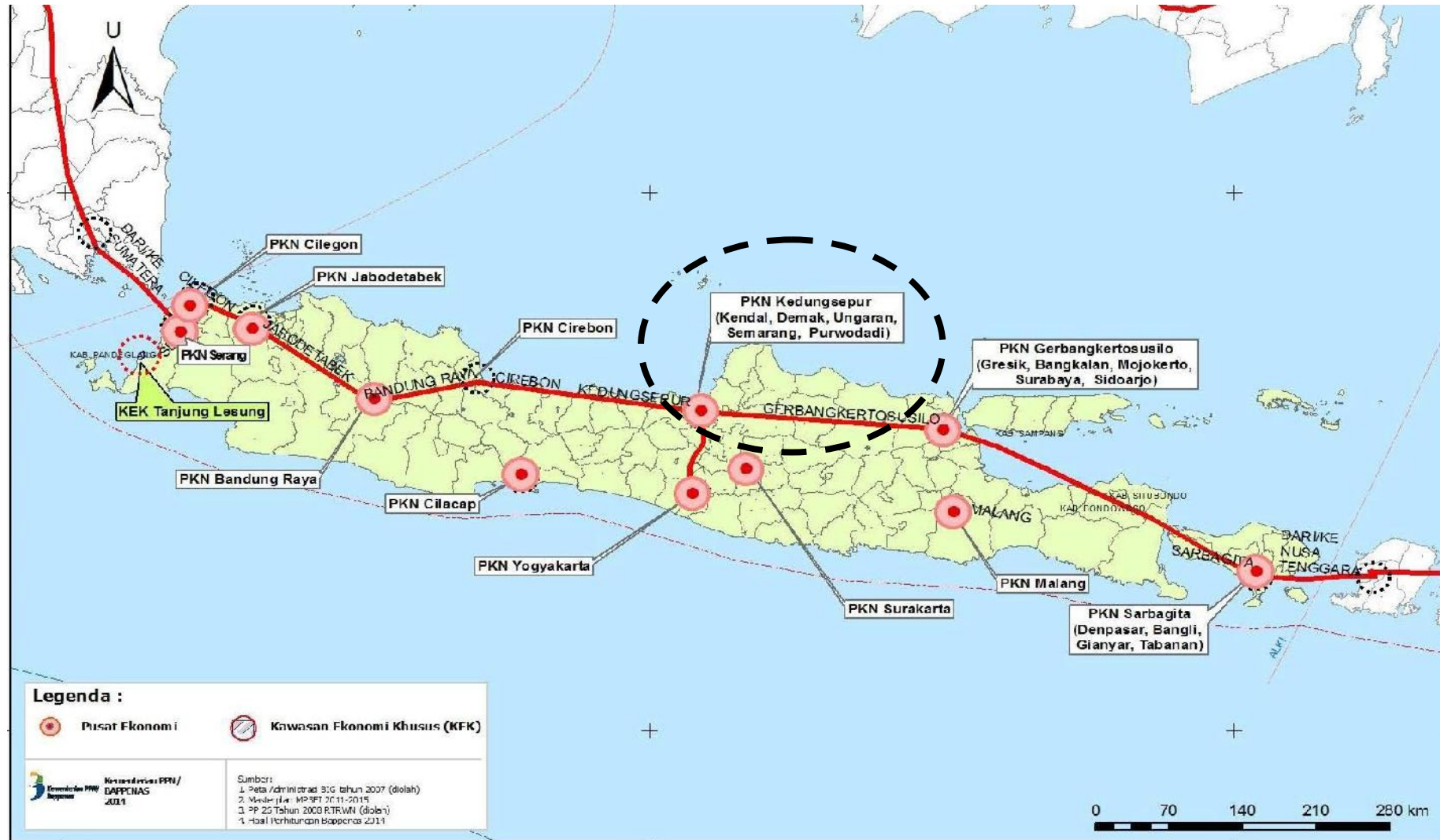
Tabel 4.10.

Target Sasaran Makro Jawa Tengah Dalam RPJMN 2015-2019 Buku III

No.	Indikator Makro	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,7	6,7	7,1	7,5	7,7
2.	Tingkat Kemiskinan	13,1	12,2	11,3	10,4	9,5
3.	Tingkat Pengangguran	5,4	5,2	5,1	4,9	4,7

Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III

Gambar 4.17.
Peta Lokasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali RPJMN 2015-2019



Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III

a. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Bali diprioritaskan pada percepatan keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa dengan kota, melalui Penguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) melalui peningkatan efisiensi pengelolaan 5 Kawasan perkotaan metropolitan yaitu: kawasan perkotaan Jabodetabek, Bandung Raya, Kedungsepur, Gerbangkertasusila, dan Sarbagita sebagai pusat kegiatan skala global dan pusat kegiatan nasional (PKN) dan pembangunan 1 Kota Baru publik yang terpadu dan mandiri Kebijakan pembangunan kawasan perkotaan di Wilayah Jawa-Bali dilakukan melalui berbagai strategi, sebagai berikut:

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

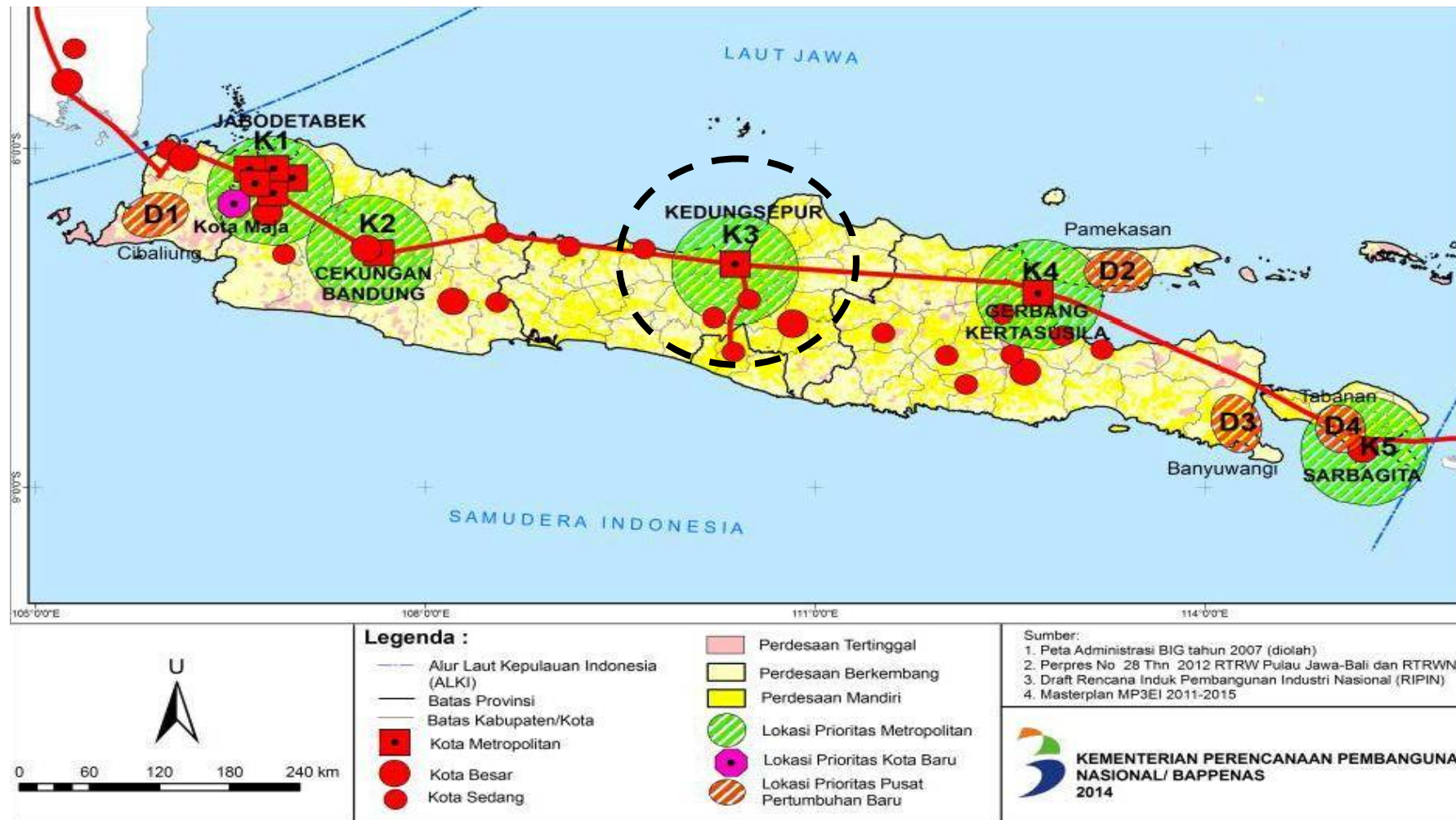
Meningkatkan efisiensi pengelolaan kawasan perkotaan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang), Kedungsepur (Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Kota Ungaran (Ibukota Kab. Semarang), Kab. Demak, Purwodadi), Gerbangkertasusila (Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto), dan Sarbagita (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan) dalam rangka mempercepat perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan keberlangsungan lingkungan.

Tabel 4.11.
Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan
Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali

<u>Kode</u>	<u>Lokasi Prioritas</u>	<u>Fokus Pengembangan</u>
K3	Kawasan Perkotaan Metropolitan Kedungsepur: Kota Semarang, <u>Kab. Kendal</u> , Kota Salatiga, Ungaran (Ibu Kota Kab. Semarang), Kab. Demak, Purwodadi (Ibu Kota Kab. Grobogan)	Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang berfungsi mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan industri di wilayah Jawa Tengah.

Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III

Gambar 4.18.
Peta Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan
Perkotaan dan Perdesaann Wilayah Jawa-Bali



Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III

Tabel 4.12.
Profil Kerawanan dan Resiko PKN, PKW dan PKSN
Di Wilayah Jawa-Bali

<u>Wilayah</u>	<u>Indeks Kerawanan (IRBI 2011)</u>	<u>Kelas Multi resiko tingkat Kabupaten/Kota</u>
Kawasan Perkotaan Kedungsepur (Kendal, Demak, Semarang, Ungaran, Purwodadi)	Kota Semarang: tinggi untuk banjir dan tanah longsor; <u>Kab. Kendal: tinggi untuk banjir dan cuaca ekstrim;</u> Kab. Demak: tinggi untuk banjir, cuaca ekstrim, abrasi; Kab. Ungaran: data belum tersedia Kab. Purwodadi: data belum tersedia	Kota Semarang: Tinggi Kab. Kendal: Tinggi Kab. Demak: Tinggi Kab. Ungaran: data n.a Kab. Purwodadi: data n.a

Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III

Tabel 4.13.
Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan
Pulau Jawa-Bali Periode 2015-2019

<u>Provinsi</u>	<u>Pusat Kegiatan Dalam RTRWN</u>		
	<u>PKN</u>	<u>PKW</u>	<u>PKSN</u>
Jawa Tengah	Surakarta (I/C/1)	Boyolali (II/C/1)	
	Kawasan Perkotaan Semarang-Kendal-Demak-Ungaran-Purwodadi (Kedungsepur) (I/C?1)	Klaten (II/C/1)	

Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III

Tabel 4.14.
Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional
Pulau Jawa-Bali

<u>No</u>	<u>KSN</u>	<u>Tipe</u>	<u>Strategi</u>	<u>K/L</u>
1.	Kawasan Perkotaan Kedungsepur	Kepentingan Ekonomi	Pemantapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi dalam bentuk perkotaan inti dan perkotaan disekitarnya sesuai dengan fungsinya dan peranannya di Kawasan Perkotaan Kedungsepur	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agraria dan Tata Runag - Bappenas - Kementerian LH dan Kehutanan - Kemenko Perekonomian

Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III

Tabel 4.15.
Kegiatan Prioritas Jangka Menengah Nasional
Provinsi Jawa Tengah

<u>Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional</u>
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Kendal
JALAN

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
1. Pembangunan Jalan akses pelabuhan penyeberangan Kendal
2. Pembangunan Jalan Tol Batang - Semarang
3. Pembangunan Jalan Lingkar (Sumpiah, Brebes, Luar Semarang, Pekalongan)
ENERGI
1. Pipa Cirebon - Semarang 230 KM
2. FSRU Jawa Tengah 550 mmcf/d
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTU Jawa -4 1000 MW
2. PLTU Jawa -8 1000 MW
3. PLTU Jawa Tengah 2x950 MW
4. PLTU Jawa -10 660 MW
5. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pengembangan Serat Optik Seluruh Kabupaten/Kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
PENDIDIKAN
1. Penerapan SPM harap diperhatikan dalam setiap urusan pembangunan pendidikan
2. Pembangunan SMP-SMA SATAP sesuai dengan amanat UU 23 tahun 2014
3. Peningkatan pengetahuan HIV & AIDS dan masalah sosial lainnya melalui sekolah
4. Pengembangan PKBM untuk pemberantasan buta aksara dengan sasaran 867.978 orang
KESEHATAN
1. Peningkatan advokasi kepada Pemda Kab/Kota tentang program KKB
2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan OPD KB di Kab/Kota
3. Sosialisasi UU No.23/2014 tentang Pemda, Khususnya terkait status, tugas dan fungsi PLKB
4. Peningkatan jumlah kuota peserta PBI JKN Pusat
5. Pemerataan tenaga dokter spesialis dasar di pelayanan kesehatan rujukan
6. Peningkatan sarana-prasarana di Puskesmas
PERUMAHAN
1. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 15 Ha

Sumber: RPJMN 2015-2019 Buku III

4.2.3. Isu Atau Kebijakan Daerah

Isu strategis daerah (Provinsi dan Kabupaten) merupakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah pembangunan Kabupaten Kendal dimana isu tersebut merupakan prioritas utama. Isu strategis. Isu strategis daerah yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Kendal antara lain telaahan terhadap Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, RPJPN Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, serta RPJMD Kabupaten/Kota Sekitarnya.

a. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJMD Kabupaten Kendal sehingga dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi dan misi

pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 memiliki visi pembangunan "Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi", dengan upaya pencapaian berupa misi sebagai berikut:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi";
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat; dan
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Perencanaan wilayah (*Regional Planning*) adalah upaya intervensi terhadap kekuatan-kekuatan pasar yang dalam konteks pengembangan wilayah yang memiliki tiga tujuan pokok yakni meminimalkan konflik kepentingan antar sektor, meningkatkan kemajuan sektoral dan membawa kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan. pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Terkait dengan pengembangan wilayah Kabupaten Kendal, dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa Kabupaten Kendal termasuk dalam kawasan Kedungsapur. Kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah Kedungsapur selain Kabupaten Kendal yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Kawasan ini ke depan diarahkan sebagai kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi dan pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah, sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur jawa dan pulau lainnya.

Potensi unggulan Kabupaten Kendal dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang dimiliki dan terus dapat dikembangkan adalah industri unggulan garmen, tas, alas kaki; klaster jambu biji getas merah dan pisang raja bulu; serta destinasi wisata Curug Sewu dan Pantai Sendang Sikucing.

Fungsi wilayah Kedungsapur ke depan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sebagai PKN, arah pengembangan wilayah adalah pada: (1) perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; (2) pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; (3) perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; (4) dan perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai wilayah Kedungsapur meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan TPT. Adapun untuk Kabupaten Kendal, target-target yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.16.
Sasaran Pengembangan Wilayah Kedungsapur
Untuk Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018

No	Indikator	Kendal (%)	
		2017	2018
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,70 - 6,10	6,10 - 6,50
2	Angka Kemiskinan	8,52	7,49
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,50	6,50

Sumber: *RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018*

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Kedungsapur yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan konsep pengembangan wilayah Kedungsapur adalah Pengembangan Wilayah Kedungsapur Berbasis Perdagangan Jasa, Industri, Pariwisata, dan Agrominapolitan yang Berkelanjutan. Guna mendukung konsep tersebut maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kedungsapur sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17.
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kedungsapur

<u>Konsep Pengembangan</u>	<u>Aspek</u>	<u>Kebijakan</u>	<u>Strategi</u>	
Pengembangan Wilayah Kedungsapur berbasis Perdagangan Jasa, Industri, Pariwisata, dan Agrowanapolitan yang Berkelanjutan	Ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah Kedungsapur melalui pengotimalan sektor potensial dan dukungan pengembangan Ekonomi	Meningkatkan dukungan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi	
		Meningkatkan dukungan dan kinerja infrastruktur pada wilayah-wilayah pertanian Kedungsapur	Perbaikan jalan dan peningkatan kualitas jalan yang merata di wilayah pertanian Kedungsapur	
	Fisik (Infrastruktur, Konektivitas, Alam)	Pengembangan infrastruktur yang merata guna mendukung aktivitas di wilayah pertanian Kedungsapur yang masih tertinggal	Meningkatkan dukungan dan kinerja infrastruktur pada wilayah-wilayah pertanian Kedungsapur	
		Pengembangan pelayanan infrastruktur regional di wilayah Kedungsapur	Mengembangkan infastruktur regional yang meningkatkan interaksi wilayah di Kedungsapur	
		Pengembangan sektor ekonomi potensial yang terpadu di wilayah Kedungsapur	Meningkatkan konektivitas internal wilayah Kedungsapur melalui keterhubungan pengembangan sektor ekonomi	
		Peningkatan interaksi internal wilayah Kedungsapur	Peningkatan dukungan prasarana jalan penghubung interwilayah di Kedungsapur	Peningkatan dukungan transportasi massal regional

<u>Konsep Pengembangan</u>	<u>Aspek</u>	<u>Kebijakan</u>	<u>Strategi</u>
			Kedungsapur via BRT dan angkutan penumpang
			Pengembangan konektivitas wilayah Kedungsapur melalui jalur kereta api
		Peningkatan interaksi eksternal wilayah Kedungsapur dengan region lain yang berbatasan	Peningkatan dukungan transportasi dalam memperkuat interaksi eksternal wilayah Kedungsapur
	Sosial	Pengembangan sumber daya manusia di wilayah Kedungsapur melalui pengoptimalan pendidikan masyarakat	Peningkatan pelayanan pendidikan formal dan non formal wilayah Kedungsapur
		Pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat dengan target "penyelesaian masalah langsung dari pihak yang bermasalah"	Penanganan permasalahan pengangguran di wilayah Kedungsapur
	Tata Kelola	Pengembangan Kelembagaan Kedungsapur efektif	Penguatan kerjasama regional Kedungsapur dalam penyediaan infrastruktur dan sistem pelayanan regional
			Pembentukan baru badan pengelola kerjasama interwilayah Kedungsapur
	Lingkungan	Pengintegrasian	Pelestarian

<u>Konsep Pengembangan</u>	<u>Aspek</u>	<u>Kebijakan</u>	<u>Strategi</u>
	Hidup	kegiatan ekonomi wilayah dengan pelestarian lingkungan	sumber daya air, tanah, dan hutan

Kondisi pembangunan di Kabupaten Kendal saat ini masih menyisakan permasalahan terkait dengan pemerataan antar wilayah. Masih ditemukan kesenjangan pembangunan antara wilayah di bagian utara, tengah, dan selatan. Permasalahan yang ada yaitu pembangunan ekonomi yang belum merata pertumbuhannya, yang berdampak pada masih tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah-wilayah tertentu dan kesenjangan ekonomi antar wilayah serta antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kedungsapur maka kebijakan dan strategi yang ditempuh oleh kabupaten Kendal adalah pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki kabupaten Kabupaten Kendal melalui pengembangan potensi unggulan daerah, peningkatan infrastruktur yang mendukung perekonomian, perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di wilayah pertanian, peningkatan kerjasama antar wilayah kedungsapur, peningkatan konektivitas daerah antar wilayah kedungsapur serta pengembangan destinasi wisata.

b. Telaahan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal dengan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJPD Kabupaten Kendal ke dalam perencanaan lima tahunan sehingga pembangunan tahap ke-tiga ini masih selaras dengan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kendal dan dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kendal. Perencanaan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Kendal memiliki visi pembangunan "KABUPATEN KENDAL YANG MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA".

Visi pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2005-2025 harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang ingin dicapai. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik

konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian suatu masyarakat tercermin, antara lain pada:

- a. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
- b. kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
- c. Ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar negeri menjadi kecil; dan
- d. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap

seseorang atau sekelompok orang mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan. Tingkat kemajuan suatu masyarakat dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu masyarakat diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu masyarakat dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai oleh makin menurunnya tingkat Pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Kemajuan suatu masyarakat juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu masyarakat dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Masyarakat yang sudah maju ditandai dengan:

- a. Laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan jumlah penduduk;

- b. Angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan
- c. Kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu penduduk diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu penduduk menjadikan penduduk tersebut lebih makmur dan lebih maju. Masyarakat yang maju pada umumnya adalah masyarakat yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan daerah maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Kabupaten Kendal mempunyai pantai dan pesisir yang cukup luas. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar daerah dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk pelaksanaan hokum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar. Daerah yang maju juga ditandai oleh adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan suatu daerah dan sistem politik yang berlaku. Daerah yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Daerah yang maju adalah daerah yang hak-hak masyarakatnya, keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, daerah yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

Kemandirian dan kemajuan suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas.

Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Pembangunan Kabupaten Kendal bukan hanya sebagai masyarakat yang mandiri dan maju, melainkan juga masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, masyarakat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan daerah.

Sejahtera yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, kemampuan pendayagunaan segenap sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, yang dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana. Kebutuhan rohani ditunjukkan dengan kondisi masyarakat yang memahami, menyadari dan melaksanakan ajaran agama masing-masing. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
- b. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing adalah:
 - a. mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi;
 - b. meningkatkan pemanfaatan iptek melalui penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan;
 - c. membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan
 - d. memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa.
- c. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah:

- a. memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;
 - b. menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan
 - c. melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
- d. Mewujudkan Kabupaten Kendal aman dan damai adalah:
- a. mengoptimalkan peran Perangkat Daerah dan turut serta mendukung pengembangan bela negara melalui Satuan Perlindungan Masyarakat serta terwujudnya keamanan dan stabilitas daerah;
 - b. mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; dan
 - c. meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah:
- a. meningkatkan pembangunan daerah;
 - b. mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah;
 - c. menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara bertahap;
 - d. menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan
 - e. menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- f. Mewujudkan Kabupaten Kendal asri dan lestari adalah:
- a. memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi;
 - b. meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan;
 - c. memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan;
 - d. memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan
 - e. meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
- g. Mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju adalah:

- a. menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Kabupaten Kendal juga berorientasi kelautan;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;
- c. mengelola kemakmuran wilayah laut; dan
- d. membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Selama ini sektor perikanan dan kelautan masih belum didayagunakan secara optimal. Wilayah pegunungan dikembangkan sesuai dengan fungsi konservasi, budidaya dan pariwisata.

- h. Mewujudkan Kabupaten Kendal berperan aktif dalam pergaulan antardaerah dan nasional adalah:
 - a. memantapkan kerjasama, dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat; dan
 - b. mendorong kerja sama internasional, regional dan antardaerah, antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Arah Kebijakan RPJMD ke-3 (2015-2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJPD Tahap Kedua, RPJPD Tahap Ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada hal - hal sebagai berikut:

- A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
 1. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional, nasional, dan internasional;
 2. Penguatan akses dan mutu pendidikan, tenaga pendidik yang bersertifikasi serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang sesuai dengan pangsa pasar kerja;
 3. Penguatan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang profesional;
 4. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis pada modal sosial yang makin berkembang;

5. Penguatan sikap yang baik dalam hubungan (toleransi) antarumat beragama di Kabupaten Kendal; dan
6. Penguatan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter masyarakat kabupaten kendal.

B. Terwujudnya masyarakat yang berdaya-saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Penguatan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;
2. Penguatan penanganan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
3. Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur penunjang kegiatan tersebut;
4. Penguatan pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan rekonstruksi kelembagaan;
5. Penguatan dalam pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun daerah yang berkarakter cerdas, kompetitif, adil, beradab dan berorientasi IPTEK; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan Pendidikan dan kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;
6. Penguatan kinerja aparat terkait dalam upaya meminimalkan jumlah penduduk miskin, dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan jumlah angka pengangguran;
7. Penguatan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses pengelolaan sumber daya ekonomi dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin;
8. Penguatan dalam peningkatan profesionalisme kerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal melalui pelatihan (DIKLAT) sehingga dapat meningkatkan sistem dan pelayanan terpadu, serta mempersempit kemungkinan penyalahgunaan/penyimpangan yang merugikan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
9. Penguatan dalam penerapan hasil penelitian dan IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya diberbagai bidang.

C. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Penguatan dalam penempatan supremasi hukum dan hak asasi manusia, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dan Pemerintah Daerah memperbaiki kinerja maupun sistem kelembagaannya;
2. Penguatan dalam penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan clean government melalui peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahab daerah;
3. Penguatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik dan akuntabilitas aparat dan penegak hukum;
4. Penguatan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis;
5. Penguatan peran kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber dari jati diri budaya masyarakat Kabupaten Kendal dalam pembangunan daerah;
6. Penguatan dalam mendukung pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan; dan
7. Penguatan nilai-nilai kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.

D. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang aman dan damai ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Penguatan budaya masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berakar dari budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan, baik ditingkat lokal, daerah, maupun nasional;
2. Penguatan sistem keamanan dalam upaya mencegah, menangkal dan menindak kejahatan yang ada dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan elemen lain yang berkepentingan;
3. Penguatan sistem keamanan lingkungan baik yang dilaksanakan aparat maupun oleh masyarakat;
4. Penguatan model penanggulangan yang komprehensif dalam mengupayakan pengurangan pemasokan/permintaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
5. Peningkatan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban;

6. Penguatan sistem pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan/pemberantasan tindak kriminal;
7. Penguatan dalam penciptaan kondisi aman dan damai di berbagai wilayah perdesaan terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan sipil; dan
8. Penguatan kemampuan lembaga keamanan dari tingkat daerah hingga nasional secara terpadu, serasi dan seimbang.

E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Penguatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diharapkan semakin membaik, dan mulai merata di semua lapisan masyarakat;
2. Penguatan bidang infrastruktur perdesaan terus dikembangkan, terutama yang mendukung pengembangan sektor pertanian;
3. Peningkatan pembangunan perumahan (rumah murah dan sehat) yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh lapisan masyarakat terus ditingkatkan dan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga kondisi tersebut diharapkan semakin mendorong terwujudnya permukiman yang sehat, merata dan berkeadilan;
4. Penguatan pelayanan bidang kesehatan dengan mempermudah setiap unsur pelayanan kesehatan dan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan yang didukung dengan sarana/prasarana yang semakin lengkap;
5. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan; dan
6. Peningkatan program partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui perbaikan sistem PNPM PPK dan P2KP menjadi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang mandiri.

F. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Penguatan proses pembangunan berwawasan lingkungan yang sedang berjalan, dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Penguatan pengelolaan dalam pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang

didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat yang memanfaatkannya;

3. Pengembangan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan;
4. Penguatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan dan perluasan kawasan lindung, pengelolaan kawasan andalan dan strategis secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. Peningkatan dalam pengelolaan sumber daya air (konservasi) yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
6. Penguatan sistem pemeliharaan keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terpeliharanya lingkungan.

G. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan pembangunan fisik dan fungsi pelabuhan Kabupaten Kendal dalam upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Pengembangan reklamasi pantai dengan melanjutkan penanaman secara masal tanaman mangrove (hutan bakau) sehingga dapat mencegah abrasi (pengikisan pantai oleh air laut) karena terlindung oleh akar-akar pohon bakau, serta dapat meningkatkan kekayaan biota laut;
3. Pengembangan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan;
4. Peningkatan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan;
5. Peningkatan pengembangan kawasan pegunungan sebagai tempat wisata alam dan hutan lindung; dan
6. Peningkatan pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.

H. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antarregional, nasional ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Penguatan kepemimpinan dan kontribusi Kabupaten Kendal dalam berbagai kerja sama antardaerah dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis antarpelaku pembangunan daerah secara regional maupun nasional yang semakin nyata bermanfaat bagi masyarakat;
3. Peningkatan kerja sama regional antardaerah kabupaten/kota, baik yang langsung maupun melalui kerja sama Kedungsepur; dan
4. Peningkatan kerja sama di tingkat nasional (rencana membuka akses hubungan antarprovinsi melalui jalur laut).

c. Telaahan RTRW Kabupaten Kendal

Pengembangan wilayah Kabupaten Kendal mengacu pada penataan pola ruang seperti yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Di dalam perda tersebut telah ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kendal. Dengan demikian maka antara rencana pengembangan wilayah dan rencana pemanfaatan ruang dapat sinergis dan sesuai dengan peruntukannya.

Kebijakan pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan dan pemantapan kawasan industri pesisir timur;
- b. pengembangan sarana prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri;
- c. pengembangan kegiatan pertanian produktif dan prospektif di bagian utara;
- d. pengembangan agropolitan di bagian selatan;
- e. pengembangan minapolitan di bagian utara;
- f. pengembangan kawasan budidaya tanaman tahunan hasil nonkayu;
- g. pengembangan kegiatan peternakan di bagian selatan;
- h. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki;
- i. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah;
- j. pengembangan kelengkapan sarana prasarana permukiman di bagian tengah;
- k. pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung di bagian selatan; dan

- I. peningkatan fungsi kawasan pertahanan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pengembangan wilayah berdasarkan pusat kegiatan di Kabupaten Kendal terdiri atas:

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala nasional.

Kabupaten Kendal sebagai bagian dari kawasan Kedungsapur menjadi salah satu kabupaten yang menjadi PKN di Provinsi Jawa Tengah. PKN perkotaan Kedungsapur memiliki fungsi pelayanan pusat kawasan ekonomi strategis dan industri.

- 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

PKL di Kabupaten Kendal meliputi Kecamatan Kendal, Kecamatan Weleri, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Boja, dan Kecamatan Sukorejo.

- a. Perkotaan Kendal dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan tingkat Daerah, pusat perdagangan regional, dan pendidikan. Pengembangan kawasan ini difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa serta pendidikan
- b. Perkotaan Weleri dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Fokus utama pengembangan PKL Weleri adalah fasilitas perdagangan dan jasa
- c. Perkotaan Kaliwungu dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat industri, kawasan ekonomi strategis, perdagangan, dan jasa. Arah pengembangan PKL Kaliwungu adalah pengembangan fasilitas dasar kawasan industri, pusat perdagangan, jasa skala regional, dan fasilitas pelayanan transportasi laut skala nasional
- d. Perkotaan Boja dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat kegiatan pertanian penyangga agropolitan, perdagangan, dan jasa serta konservasi. Pengembangan untuk kawasan ini adalah pemantapan fasilitas perdagangan Boja sebagai outlet kawasan agropolitan Boja
- e. Perkotaan Sukorejo dengan fungsi pusat agropolitan, pertanian, peternakan, dan konservasi. Arah pengembangan perkotaan Sukorejo adalah pemantapan fasilitas perdagangan Sukorejo sebagai outlet kawasan agropolitan Sukorejo.

- 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

PPK berada di Kecamatan Pegandon dan memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Arah pengembangan PPK adalah pengembangan fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, perumahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, dan peribadatan.

- 4) Pusat Pelayanan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

PPL di Kabupaten Kendal berada di seluruh ibukota kecamatan dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan tingkat kecamatan. Sedangkan arah pengembangan PPL yaitu pengembangan fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olah raga, dan peribadatan.

Tabel 4.18.
Matriks Indikasi Program Utama Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kendal Periode 2016-2021

No	Usulan Program	Lokasi	Besaran Dana (x 000 Rp)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
A	Perwujudan Struktur Ruang	-			
I	Perwujudan Pusat Kegiatan	-			
a.	Penetapan Peraturan Daerah Rencana Rinci Tata Ruang	Kendal, Kaliwungu, Weleri, Boja dan Sukorejo	600.000	APBD	Bapertlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal
b.	Penetapan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang	20 kecamatan	2.000.000	APBD	Bapertlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal
c.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (Bagian Tengah Kabupaten Kendal)	Pageruyung, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Ngampel, Kaliwungu Selatan	1.200.000	APBD	Bapertlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal
d.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	20 kecamatan	4.000.000	APBD/APBD Prov	Bapertlitbang/ DPU & Penataan Ruang kab.Kendal
e.	Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa/KTP2D (Bagian Utara/ Pesisir Kabupaten Kendal)	Kangkung, Patebon, Cepiring, Kota Kendal, Brangsong	500.000	APBD	Bapertlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal
II	Perwujudan Sistem Prasarana				
	2.1. Transportasi Darat				
a.	Pengembangan rel ganda, meliputi jalur Semarang - Pekalongan - Tegal - Cirebon	Kec. Weleri, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Brangsong, Kaliwungu	125.000.000	APBN	PT. KAI Provinsi Jawa Tengah
b.	Pengembangan jaringan rel komuter, meliputi Jalur Brumbung - Semarang - Kendal	Kab. Demak, Kota Semarang, Kab. Kendal	5.000.000	APBN	PT. KAI Provinsi Jawa Tengah
c.	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Kabupaten Kendal	1.000.000	APBD	DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal
	2.2. Transportasi Laut				
a.	Peningkatan pelabuhan menjadi pelabuhan penyeberangan (ASDP)	Kec. Kaliwungu	20.000.000	APBD Prov.	Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah

<u>No</u>	<u>Usulan Program</u>	<u>Lokasi</u>	<u>Besaran Dana</u> (x 000 Rp)	<u>Sumber Dana</u>	<u>Instansi Pelaksana</u>
b.	Renovasi, pemeliharaan bangunan dan pengembangan TPI/PPI (Tawang, Bandengan, Tanggul Malang, Sendang dan Sikucing)	Kec.Kendal, Rowosari, Patebon	900.000	APBD	DKP Kab. Kendal
	2.3. Sistem Jaringan Energi/ Kelistrikan				
a.	Pembangunan pipa gas alam Semarang - Cirebon	Kec. Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Patebon, Cepiring, Kangkung, dan Rowosari	80.000.000	APBN/ APBD prov.	Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah
b.	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 KVA Peralang - Semarang	Kabupaten Kendal	-	Swasta	PLN Prov. Jawa Tengah
c.	Pembangunan PLTA	Kabupaten Kendal	-	Swasta	PLN Prov. Jawa Tengah
	2.6. Sistem Pengelolaan Air Limbah				
a.	Pembangunan IPAL dan IPAL komunal	Kabupaten Kendal	1.800.000	APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Kab. Kendal
	2.7. Sistem Pengelolaan Sistem Drainase				
a.	Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sistem Drainase Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal	250.000	APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Kab. Kendal
	2.8. Sistem Persampahan				
a.	Penyusunan Master Plan Sistem Persampahan Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal	250.000	APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal
	2.9. Sumber Daya Air				
a.	Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah	Kabupaten Kendal	1.500.000	APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal
b.	Perbaikan saluran irigasi	Kabupaten Kendal	10.700.000	APBD	DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal
c.	Pembangunan Waduk	DAS Bodri	150.000.000	APBN	kementrian pekerjaan Umum
d.	Pembangunan pengendali banjir di wilayah pesisir	Kabupaten Kendal	150.000.000	APBD	DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal

<u>No</u>	<u>Usulan Program</u>	<u>Lokasi</u>	<u>Besaran Dana</u> (x 000 Rp)	<u>Sumber Dana</u>	<u>Instansi Pelaksana</u>
e.	Pembangunan bangunan penahan abrasi pantai	Kabupaten Kendal	150.000.000	APBD	DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal
III	<u>Perwujudan Sarana</u>				
a.	Penyusunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lisiba (Lingkungan Siap Bangun)	Kabupaten Kendal	250.000	APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal
b.	Pemeliharaan dan penataan pasar	Kabupaten Kendal	10.000.000	APBD	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kendal
c.	Pemeliharaan dan peningkatan Sekolah	Kabupaten Kendal	50.000.000	APBD	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Kendal
d.	Pembangunan dan peningkatan pendidikan non formal	Kabupaten Kendal	10.000.000	APBD, Masyarakat	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Kendal
e.	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Sarana Peribadatan	Kabupaten Kendal	3.700.000	APBD, Masyarakat	Bag. Kesra Setda Kab. Kendal
	- Peningkatan sarana prasarana permukiman perdesaan (program pengembangan perumahan & infrastruktur)	Permukiman di luar IKK se Kab. Kendal	5.000.000	APBD Prov. / APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal/ Swasta
f.	Pemindahan Rumah Dinas Bupati	Kecamatan Kendal	2.000.000	APBD	Sekda Kab. Kendal
g.	Pembangunan rumah	Kabupaten Kendal	40.800.000 Semula 5.000.000	APBD	Baperlitbang/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal/ Swasta
h.	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung negara	Kabupaten Kendal	5.000.000	APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal/ Swasta
B	<u>Perwujudan Pola Ruang</u>	-			
I	<u>Perwujudan Kawasan Lindung</u>	-			
a.	Reboisasi di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang berfungsi lindung (kelereng lebih dari 40% dan atau kawasan rawan longsor)	Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Patean, Sukorejo, Singorojo, Limbangan dan Boja	25.000.000	APBN / APBD Prov. / APBD	Perum Perhutani/ Lingkungan Hidup/DPU & Penataan Ruang/Baperlitbang Kab. Kendal

<u>No</u>	<u>Usulan Program</u>	<u>Lokasi</u>	<u>Besaran Dana</u> (x 000 Rp)	<u>Sumber Dana</u>	<u>Instansi Pelaksana</u>
b.	Pengembalian fungsi hutan lindung dan perlindungan satwa	Kecamatan Plantungan, Sukorejo, dan Limbangan	25.000.000	APBN / APBD Prov. /APBD	Perum Perhutani/ Lingkungan Hidup/DPU & Penataan Ruang/Baperlitbang Kab. Kendal
c.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Patean, Sukorejo, Singorojo, Limbangan dan Boja	15.000.000	APBN / APBD Prov. /APBD	Perum Perhutani/ Lingkungan Hidup/DPU & Penataan Ruang/Baperlitbang Kab. Kendal
d.	Peningkatan fungsi konservasi (reboisasi) di sempadan sungai dan sekitar mata air	Seluruh sub DAS di Kabupaten Kendal	13.000.000	APBN / APBD Prov. /APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Kab. Kendal
e.	Program Pengendalian Banjir	Sungai Aji/Slembang, Waridin, Blorong, Kendal, Buntu, Bodri, Blukar, Glodog, Bulanan/Pening, dan Kuto	600.000	APBN / APBD Prov. /APBD	PSDA Prov. Jateng/Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal
f.	Studi penanganan abrasi	Kawasan pesisir Kab. Kendal	300.000	APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Kab. Kendal
g.	Penanganan Teknis kawasan sabuk pantai	Kabupaten Kendal	5.000.000	APBD	DKP, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal
h.	Penyusunan Rencana Peruntukan lahan pertanian berkelanjutan	Kabupaten Kendal	900.000	APBD	Dinas Pertanian & Pangan/Baperlitbang Kab. Kendal
i.	Pembuatan Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten Kendal	9.000.000	APBD/ APBN	Baperlitbang/DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal/ Kementerian Pekerjaan Umum
II	<u>Perwujudan Kawasan Budi Daya</u>				
	2.2 Tanaman Pangan Lahan Kering				
a.	Pengembangan teknologi dan informasi pertanian	Kabupaten Kendal	200.000	APBD	Dinas Pertanian & Pangan Kab. Kendal
b.	Pengembangan pasca panen <i>agroforestry</i> dan holtikultura	Kabupaten Kendal	900.000	APBD	Dinas Pertanian & Pangan/Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang kab. Kendal
c.	Penyusunan Master Plan Kawasan	Kabupaten Kendal	250.000	APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan

<u>No</u>	<u>Usulan Program</u>	<u>Lokasi</u>	<u>Besaran Dana</u> (x 000 Rp)	<u>Sumber Dana</u>	<u>Instansi Pelaksana</u>
	Agropolitan				Ruang/ Dinas Pertanian & Pangan Kab. Kendal
d.	Penyusunan RPJM Kawasan Agropolitan	Kabupaten Kendal	250.000	APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang / Dinas Pertanian & Pangan Kab. Kendal
	2.5 Pariwisata				
	- Peningkatan kualitas dan peran obyek unggulan	Kabupaten Kendal	800.000	APBD Prov. / APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang / Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kendal
	- Peningkatan peran serta masyarakat kawasan wisata	Kabupaten Kendal	300.000	APBD Prov. / APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang / Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kendal
	- Pengembangan SDM pariwisata	Kabupaten Kendal	800.000	APBD Prov. / APBD	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang / Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kendal
<u>C</u>	<u>Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten</u>	-			
a.	Pembangunan Kawasan Industri	Kecamatan Kaliwungu	100 triliyun	APBN / APBD Prov. / APBD	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang / Dishubkominfo Kab. Kendal
b.	Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi	Kecamatan Kaliwungu	50 triliyun	APBN / APBD Prov. / APBD	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang / Dishubkominfo Kab. Kendal
c.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Lindung dan Rawan Bencana Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal	400.000	APBD II	Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal

<u>No</u>	<u>Usulan Program</u>	<u>Lokasi</u>	<u>Besaran Dana</u> (x 000 Rp)	<u>Sumber Dana</u>	<u>Instansi Pelaksana</u>
d.	Pengelolaan kawasan CAT Ungaran - Kendal	Kecamatan Limbangan dan Boja	500.000	APBD II	Dinas Lingkungan Hidup, Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal
e.	Penyusunan rencana rinci kawasan panas bumi Gunung Ungaran	Kecamatan Limbangan dan Boja	200.000	APBD II	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal
f.	Pemanfaatan panas bumi Gunung Ungaran	Kecamatan Limbangan dan Boja	1.000.000	APBD II	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Baperlitbang/ DPU & Penataan Ruang Kab. Kendal

Sumber: RTRW Kabupaten Kendal 2011-2031 (diolah)

d. Telaahan KLHS Kabupaten Kendal

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 32 Tahun 2009). Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya pada pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS dalam UU PPLH Pasal 1 (angka 10) dan dalam Permendagri No 67 tahun 2012 pasal 1 (angka 1) disebutkan bahwa KLHS adalah sebagai "rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program". KLHS ini sangat penting karena pada saat ini kita dihadapkan pada permasalahan degradasi lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan.

Sebagai Daerah yang pada saat ini sedang menyusun perubahan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, maka Pemerintah Kabupaten Kendal wajib melaksanakan KLHS RPJMD yang sedang disusun tersebut. KLHS ini dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, sehingga dapat diprakirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) apabila dilaksanakan. Asdak (2012) menyatakan bahwa KLHS tidak mengkaji dampak sebuah proyek, melainkan mengkaji dampak sebuah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Karenanya hasil dari kajian ini tentunya bersifat strategik, untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021. Dengan kata lain, dengan adanya Pengendalian Lingkungan, implementasi KLHS diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat

diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Kendal.

Persiapan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diawali dengan melakukan long list terkait isu strategis yang berdampak pada lingkungan. Berikut ini isu yang terkait dengan KLHS Kabupaten Kendal.

Tabel 4.19.
Hasil Pemilihan Isu-Isu Strategis KLHS

TEMA ISU	ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Daya saing daerah	1. Meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang berbadan hukum melalui pengembangan kebijakan yang berpihak pada tumbuh kembangnya koperasi dan UMKM
	2. Meningkatkan wirausahaan baru melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan ketrampilan dasar (live skill) dan fasilitasi permodalan
	3. Meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan UMKM melalui pengembangan keahlian dn ketrampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk) dan penerapan manajemen modern
	4. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi melalui penataan kelembagaan koperasi baik dalam arti legal formal maupun peningkatan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan koperasi
	5. Masih minimnya penerapan dan penguasaan teknologi tepat guna untuk usaha ekonomi masyarakat desa/ kelurahan
	6. Belum terintegrasinya secara penuh antar PD teknis dalam hal pengelolaan perijinan
	7. Masih Kurangnya kesadaran investor terhadap perijinan
	8. Belum Optimalnya sistem informasi pelayanan penanaman modal dan perijinan secara elektronik
	9. Menurunnya jumlah produksi hasil olahan ikan
	10. Menurunnya produktivitas tanaman utama non beras (jagung dan kedelai)
	11. Rendahnya kapasitas SDM, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
	12. perlu pengembangan agar curug sewu dapat menarik pengunjung dari luar daerah dan mancanegara
	13. curug sewu dapat menjadi temat pemasaran hasil pertanian lokal (jambubiji merah)
	14. Belum optimalnya destinasi wisata baru
Infrastruktur	15. Terbatasnya sarana prasarana di objek wisata daerah
	16. timbunya rumah-rumah kumuh dan kawasan kumuh
	17. Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak
Kesenjangan Sosial	18. Tingginya jumlah pengangguran
	19. Rendahnya Perlindungan dan kesejahteraan pekerja
	20. Pesinden di Kab Kendal yang ada masih pesinden tua, tidak ada penerus dari kaum muda yang menjadi pesinden
	21. Dengan tidak mempunyai gedung kesenian para seniman kurang nyaman dalam melakukan kegiatan seni untuk menumbuh kembangkan kesenian di Kendal
	22. Tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial meningkatnya jumlah penduduk miskin
	23. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi
Kesehatan	24. Meningkatnya angka kesakitan dan kematian penyakit demam berdarah
	25. Masih rendahnya penemuan penyakit TBC

TEMA ISU	ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
	26. Meningkatnya kasus HIV /AIDS
	27. Meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, Hipertensi, Diabetes militus, kanker, jantung, hemofilia, talasemia, gagal ginjal.
	28. Pengelolaan hygiene sanitasi makanan dan minuman yang masih rendah
	29. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	30. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap masalah kesehatan
	31. masih meningkatnya Gizi buruk
	32. Meningkatnya jumlah lansia
	33. Tingginya angka kematian ibu
	34. Tingginya angka kematian bayi,
	35. Kurangnya penyediaan air bersih
	36. Kurangnya akses dan kepemilikan Sanitasi
Pencemaran Lingkungan	37. Pencemaran lingkungan pesisir, juga mengganggu kesehatan masyarakat pesisir Banyak yg memiliki MCK, pembuangan sampah di sungai),
	38. Pencemaran Air dari kegiatan RT dan industri
	39. Limbah padat dan cair mengganggu lingkungan pasar
	40. Pencemaran udara oleh kegiatan industri dan tambang
Alih Fungsi Lahan	41. Peningkatan luas lahan kritis. Banyaknya lahan di pegunungan yang ditanami dengan tanaman semusim, sedimentasi sungai, muara dan saluran irigasi
	42. Banyaknya lahan di pegunungan yang ditanami dengan tanaman semusim
	43. terjadinya pengurangan/ penurunan luasan lahan pertanian yang berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani: kering pada tahun 2012 : 21.702 hektar, pada tahun 2014 menjadi 20.313 hektar, luas lahan basah tahun 2012 : 26.086 hektar pada tahun 2014 menjadi 25.964 hektar. Konversi lahan pertanian menjadi (BPP kec/14 unit , lumbung pangan masyarakat/30 unit, gudang cadangan pangan pemerintah/1 unit)
	44. Belum tersusunnya dokumen tata ruang laut/Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Pengelolaan Lingkungan Hidup	45. Kerusakan lahan akibat kegiatan Pertambangan
	46. Menurunnya keindahan dan kebersihan kota
	47. Penurunan kualitas air sungai
	48. Menurunnya daya tampung TPA
	49. Masih banyaknya alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan
Degradasi Lingkungan	50. Banyaknya lahan di pegunungan yang ditanami dengan tanaman semusim(longsor)
	51. Peningkatan luas lahan kritis. Banyaknya lahan di pegunungan yang ditanami dengan tanaman semusim, sedimentasi sungai, muara dan saluran irigasi
	52. Kerusakan lahan akibat kegiatan Pertambangan
	53. Abrasi
	54. Kerusakan ekosistem mangrove
Bencana Alam	55. Kebakaran hutan industri
	56. Banjir
	57. Akresi
	58. Intrusi dan rob

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Kendal

Pengendalian Lingkungan memulai pengkajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi

dan arah kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 terkait dengan : (1) Pengkajian Prinsip Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah; (2) Prinsip Keterkaitan Antar Waktu, Antar Sektor dan Antar Kepentingan; (3) Prinsip Keseimbangan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup; dan (4) Prinsip Keadilan Antar Kelompok Masyarakat dan Antar Generasi.

Hasil analisis kajian pengaruh Indikasi Program Utama dengan Kondisi Lingkungan Kabupaten Kendal

Program yang teridentifikasi memiliki pengaruh negative kemudian dikaji pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan yang meliputi: (1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkunganhidup; (3) Kinerja layanan/jasaekosistem; (4) Tingkat efisiensi pemanfaatan sumber dayaalam; (5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan/atau; dan (6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragamanhayati. Hasil kajian pengaruh program dalam muatan KLHS adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 4.20.
 Deskripsi Kajian Indikasi Program Prioritas
 RPJMD Kabupaten Kendal 2016- 2021 Terhadap Muatan KLHS

No	Nama Program	Muatan KLHS					
		<u>Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan</u>	<u>Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan</u>	<u>Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem</u>	<u>Efisiensi Pemanfaatan SD Alam</u>	<u>Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim</u>	<u>Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati</u>
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.	Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan Semakin lebar jalan kemungkinan beralih fungsi lahan di sekitar area jalan utamanya sawah ke permukiman	Berpotensi mengakibatkan kebisingan, penurunan kualitas udara (pencemaran udara)	Pengurangan jasa pemeliharaan kualitas udara	Memanfaatkan SD Alam sebagai bahan baku pada tahap pembangunan	Program pembangunan jalan dan jembatan akan menebang tanaman turus jalan sehingga berkontribusi menaikkan emisi GRK	Penurunan jumlah dan jenis flora fauna Perubahan lingkungan ekosistem hayati
2.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan Dapat mengurangi banjir Berpotensi	Dengan hilangnya turus jalan dapat berpengaruh pada kualitas udara	Pengurangan jasa pemeliharaan kualitas udara	Memanfaatkan SD Alam sebagai bahan baku pada tahap pembangunan	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorongakan dapat menebang tanaman	Dapat mempengaruhi penurunan keanekaragaman hayati

No	Nama Program	Muatan KLHS					
		<u>Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan</u>	<u>Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan</u>	<u>Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem</u>	<u>Efisiensi Pemanfaatan SD Alam</u>	<u>Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim</u>	<u>Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati</u>
		konversi lahan				turus jalan sehingga berkontribusi menaikan emisi GRK	
3.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan Semakin lebar jalan kemungkinan beralih fungsi lahan di sekitar area jalan utamanya sawah ke permukiman	Berpotensi mengakibatkan kebisingan, penurunan kualitas udara (pencemaran udara)	Pengurangan jasa pemeliharaan kualitas udara	Memanfaatkan SD Alam sebagai bahan baku pada tahap pembangunan	Program pembangunan jalan dan jembatan akan menebang tanaman turus jalan sehingga berkontribusi menaikan emisi GRK	Penurunan jumlah dan jenis flora fauna Perubahan lingkungan ekosistem hayati
4	Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan	Program ini berpotensi menimbulkan konversi lahan untuk Pembangunan	Peningkatan akses masyarakat menuju antar kawasan Bisa meningkatkan pencemaran udara	Mengurangi jasa pemeliharaan kualitas udara Mengurangi jasa	Efisiensi pemaanaan energy dengan mendorong kemauan masyarakat	Akan berkontribusi menaikan emisi GRK	Dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati

No	Nama Program	Muatan KLHS					
		<u>Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan</u>	<u>Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan</u>	<u>Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem</u>	<u>Efisiensi Pemanfaatan SD Alam</u>	<u>Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim</u>	<u>Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati</u>
		halte bus, taxi gedung terminal		penyedia pangan	menggunakan angkutan umum		
5.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.	Program ini akan dapat meningkatkan pendapatan peternak	Bisa meningkatkan pencemaran udara (bau)	Mengurangi jasa pemeliharaan kualitas udara	Memfaatkan SD Alam sebagai bahan baku pada kegiatan peternakan	Kotoran hewan merupakan salah satu sumber emisi GRK dan meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim	Kurang berpengaruh pada keanekaragaman hayati
6	Program pengembangan destinasi pariwisata	Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi wisata Dapat mengurangi daya dukung lingkungan karena munculnya aktiitas baru Berpotensi	Meningkatkan timbulan sampah Meningkatkan pencemaran	Pengurangan jasa pengurai limbah	Efisiensi penggunaan sumber daya lokal	Dapat meningkatkan emisi GRK dan akan meningkatkan kerentanan terhadap perubahan	Dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati

No	Nama Program	Muatan KLHS					
		<u>Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan</u>	<u>Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan</u>	<u>Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem</u>	<u>Efisiensi Pemanfaatan SD Alam</u>	<u>Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim</u>	<u>Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati</u>
		munculnya konersi lahan pertanian ke non pertanian					
7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program ini dapat menurunkan kualitas lingkungan apabila tidak disertai dengan pengolahan limbah yang tepat	dapat memberikan meningkatkan pencemaran (udara, air dan tanah)	Penurunan jasa Pemurnian air Pengurangan jasa pengolahan dan pengurai limbah	Memfaatkan SD Alam local untuk mendukung system industry rakyat	Dapat meningkatkan emisi GRK dan akan meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim	Pencemaran yang terjadi dapat berpengaruh terhadap penurunan keanekaragaman hayati
8	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Berpotensi hilangnya tanaman mangrove	Berpotensi menimbulkan pencemaran udara (bau) dari bau limbah air kolam	Mengurangi jasa pengendalian dari bencana stunami	Efisiensi penggunaan sumber daya lokal	Hilangnya mangrove akan berpengaruh pada penurunan produksi karbon kerentanan terhadap perubahan iklim	berpengaruh terhadap penurunan keanekaragaman hayati Hilangnya berbagai flora dan fauna
9	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Berpotensi menimbulkan kerusakan	Meningkatkan pencemaran lingkungan : kebisingan, polusi udara	Mengurangi jasa pemeliharaan kualitas udara	Efisiensi penggunaan sumber daya lokal	Akan meningkatkan produksi emisi GRK dan	berpengaruh terhadap penurunan keanekaragaman

No	Nama Program	Muatan KLHS					
		<u>Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan</u>	<u>Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan</u>	<u>Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem</u>	<u>Efisiensi Pemanfaatan SD Alam</u>	<u>Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim</u>	<u>Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati</u>
		lingkungan akibat penggunaan material				meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim	hayati
10	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	a Berpotensi menimbulkan pencemaran air sungai	Dalam pengelolaannya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan Meningkatkan pencemaran udara (bau)	Pengurangan jasa pengolahan dan pengurai limbah	Efisiensi pemanfaatan ruang untuk perikanan	Kurang Kenaikan timbulan sampah akan cenderung meningkatkan emisi Gas CO ₂ dari sampah dan dapat berpengaruh terhadap pemanasan global	dapat berpengaruh keanekaragaman hayati

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Kendal

Tahapan ini menggunakan hasil penilaian untuk kemudian dideskripsikan dan dirangkum dalam tabel analisis pengaruh kumulatif. Perkiraan pengaruh kumulatif dapat disimpulkan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.21.
Program Prioritas dan Indikator
RPJMD Kabupaten Kendal

No	Nama Program	Kesimpulan Analisis Pengaruh Kumulatif
	PEKERJAAN UMUM	
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p><u>Isu Pembangunan Berkelanjutan: degradasi dan Pencemaran Lingkungan :</u></p> <p>Pembangunan jalan dan jembatan akan menimbulkan dampak pencemaran udara dalam jangka panjang jika upaya minimasi polutan tidak segera dilakukan. Kegiatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas transportasi di masyarakat. Ketika akses jalan semakin banyak, aktivitas transportasi pun diperkirakan akan meningkat. Transportasi merupakan saah satu penyumbang polutan pencemaran udara terbesar, oleh sebab itu, upaya mitigasi terhadap kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perlu dilakukan.</p> <p>Dengan adanya kegiatan pembangunan jalan dan jembatan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Masyarakat pengguna jalan akan dimudahkan untuk menuju ke lokasi tujuan dengan akses jalan yang semakin banyak. Tetapi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan juga memberikan dampak negatif bagi mayarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek. Kegiatan tersebut akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat meningkatnya paparan terhadap polutan pencemara udara serta gangguan kenyamanan berupa kebisingan dari kegiatan transportasi yang ada dan mengurangi jasa pemeliharaan kualitas udara.</p> <p>Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berperan dalam kegiatan pengaturan RTH yang ada di sekitar lokasi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada tahap pra konstruksi dan tahap operasi. Sementara itu, Dinas Perhubungan dan Bina Marga berperan dalam kegiatan operasi dari kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berperan dalam monitoring ekosistem yang rusak serta pemantauan kualitas udara di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan secara berkala pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan tahap operasi.</p>
2.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	<p><u>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pencemaran Lingkungan</u></p> <p>Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong dapat Menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan pada tahap konstruksi, berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan, perubahan keanekaragaman hayati dan mengurangi jasa pemeliharaan kualitas udara.</p>
3.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	<p><u>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pencemaran Lingkungan</u></p> <p>Pengembangan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan yang tidak diiringi dengan pengendalian emisi kendaraan akan berdampak besar terhadap terjadinya pencemaran udara dan menyumbang gas rumah kaca ke atmosfer, penurunan jasa ekosistem pengatur iklim dan penurunan jasa ekosistem Pemeliharaan kualitas udara.</p> <p>Kenyamanan dan kemudahan dalam bertransportasi akan meningkat. Sementara itu, jika Pengembangan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan terus</p>

No	Nama Program	Kesimpulan Analisis Pengaruh Kumulatif
		dilakukan akan berpotensi menimbulkan kemacetan, meningkatkan polusi udara, serta berdampak negatif terhadap masyarakat yang terpapar emisi kendaraan secara terus menerus.
4.	Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan	<p><u>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pencemaran lingkungan dan alih fungsi lahan</u></p> <p>Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan dalam pelaksanaannya berpotensi akan meningkatkan pencemaran udara dikarenakan adanya bangkitan lalu lintas, konversi lahan pertanian, mengurangi jasa pemeliharaan kualitas udara dan mengurangi jasa penyedia pangan. Dinas Perhubungan perlu bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam monitoring ekosistem yang rusak serta pemantauan kualitas udara di sekitar lokasi pembangunan sarana dan prasaranan perhubungan secara berkala pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan tahap operasi.</p>
5.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	<p><u>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pencemaran lingkungan</u></p> <p>Program peningkatan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dalam pelaksanaan kegiatannya berpotensi mengakibatkan pencemaran udara yang berasal dari kotoran hewan. Program ini sebaiknya disertai dengan pengoperasian IPAL terhadap buangan kegiatan peningkatan produksi hasil ternak sebelum dibuang ke badan air (lingkungan) dan peningkatan teknologi hasil peternakan</p>
6.	Program pengembangan destinasi pariwisata	<p><u>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pencemaran lingkungan</u></p> <p>Program pengembangan destinasi pariwisata akan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat terutama yang berada di sekitar daerah wisata, peningkatan pendapatan keluarga akan meningkat dengan adanya program ini, namun dampak negative dari program ini adalah timbulan sampah yang semakin meningkat dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, pencemaran udara dengan banyaknya kendaraan bermotor dan pengurangan jasa pengurai limbah. Oleh sebab itu Dinas Pariwisata dan Perhubungan harus bekerja sama untuk meminimalis dampak pencemaran.</p>
7.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program pengembangan industri kecil dan menengah berpotensi meningkatkan kerusakan lingkungan karena berpotensi menimbulkan pencemaran terutama sampah dan limbah cair dan menimbulkan bangkitan lalulintas juga pencemaran udara. Selain itu juga berpotensi menurunkan jasa pemurnian air dan jasa pengolahan dan pengurai limbah. Penegakan peraturan dan perijinan harus di lakukan, yang harus di ikuti dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna
8	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
9	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
10	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Kendal

Tabel 4.22.
 Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi
 Dampak Indikasi Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

No	Indikasi Program	Dampak	Rumusan	
			Mitigasi	Alternatif
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	(-) Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material (-) Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan (-) Perubahan keanekaragaman hayati (-) Perubahan bentang alam (-) Meningkatkan pencemaran lingkungan : kebisingan, polusi udara (-) Berpotensi menimbulkan konflik sosial (-) Pengurangan jasa pemeliharaan kualitas udara	1. Pembuatan drainase (saluran air) untuk mengalirkan air agar tidak menggenangi lingkungan dan badan jalan. 2. Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dengan mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan. 3. Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon , memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang	1. Pembuatan jalan dan jembatan layang guna memudahkan akses masyarakat yang terputus. 2. Pengalihan trase jalan
2.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	(-)Menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan pada tahap konstruksi (-) Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan (-) Perubahan keanekaragaman hayati (-) Berpotensi menimbulkan konflik sosial (-)Pengurangan jasa pemeliharaan kualitas udara	1. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif dengan mempertimbangkan prioritas azas manfaat dan pengembangan dinamika wilayah. 2. Penggunaan material diutamakan dari lokasi penambangan yang berizin	
3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	(-) Menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan pada tahap konstruksi dan operasi jalan dan jembatan (-) Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material (-)Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan	1. Penggunaan material diutamakan dari lokasi penambangan yang berizin 2. Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta	Pemanfaatan kembali material jalan dengan menggunakan alat <i>cold milling</i> .

No	Indikasi Program	Dampak	Rumusan	
			Mitigasi	Alternatif
		(-)Meningkatkan pencemaran udara dan kebisingan (-)Pengurangan jasa pemeliharaan kualitas udara	area tersebut merupakan ruang milik jalan. 3. Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon , memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang	
4.	Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan	(-) Peningkatan pencemaran udara dikarenakan adanya bangkitan lalu lintas (-) Berpotensi konversi lahan pertanian (-)Berpotensi menimbulkan pencemaran udara (-) meningkatkan beban lalu lintas dan daerah rawan kecelakaan (-) Mengurangi jasa pemeliharaan kualitas udara (-) Mengurangi jasa penyedia pangan	1. Meremajakan angkutan 2. Uji emisi yang dilakukan secara berkala untuk monitoring emisi kendaraan 3. Perbaiki sistem transportasi 4. area hijau disekitar lokasi pembangunan pengembangan perhubungan darat 5. Penguatan regulasi kepemilikan kendaraan 6. Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan	1. Penyediaan transportasi masal yang aman dan nyaman 2. Keterpaduan sistem jaringan jalan dan manajemen lalu lintas
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	(-)Bau dan limbah kotoran ternak (-)Peningkatan kerusakan lingkungan karena kegiatan alih fungsi lahan. (-) Pencemaran lingkungan akibat buangan yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan hasil peternakan (-) Mengurangi jasa pemeliharaan kualitas udara	1. Pengoperasian IPAL terhadap buangan kegiatan peningkatan produksi hasil ternak sebelum dibuang ke badan air (lingkungan) 2. Peningkatan teknologi hasil peternakan	
6	Program pengembangan destinasi pariwisata	(-) meningkatkan timbulan Sampah, (-) meningkatkan pencemaran udara (-) meningkatkan bangkitan lalu lintas (-)Pengurangan jasa pengurai limbah	1. Penataan sarana dan prasarana pencegahan dampak lingkungan 2. Penggunaan teknologi pengolahan sampah yang tepat gunan dan ramah lingkungan 3. Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan daerah wisata sebagai ruang	

No	Indikasi Program	Dampak	Rumusan	
			Mitigasi	Alternatif
			terbuka hijau (RTH)	
7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	(-) potensi pencemaran lingkungan dengan limbah industry (-) Penurunan jasa pemurnian air (-) Pengurangan jasa pengolahan dan pengurai limbah	1. Menggunakan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna	
8	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	(-) Hilangnya tanaman mangrove, limbah air mencemari perairan (-) Menimbulkan pencemaran udara dikarenakan bau limbah air kolam	1. Mematuhi Perijinan dan non perijinan sesuai yang telah diatur oleh peraturan daerah maupun perundang-undangan 2. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan	
9	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	(-) Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material (-) Meningkatkan pencemaran lingkungan : kebisingan, polusi udara (-) Berpotensi menimbulkan konflik sosial	1. Pembuatan drainase (saluran air) untuk mengalirkan air agar tidak mengenai lingkungan dan badan jalan. 2. Pembuatan SPO pembangunan jalan dan dermaga untuk panduan kerja 3. Perencanaan yang matang 4. Koordinasi dengan pihak - pihak yang	
10	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	(-) Menimbulkan pencemaran air dan udara (-) Berpotensi menimbulkan pencemaran air sungai	1. Pengolahan sesuai dengan SPO (standar prosedur operasional) 2. Pembuatan saluran pembuangan limbah cair Pemilihan bahan baku	

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Kendal

Pada tahap ini rekomendasi disusun berdasarkan hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif dan juga hasil keseluruhan proses KLHS. Rekomendasi disampaikan kepada tim RPJMD untuk diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil keseluruhan proses KLHS, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi KLHS, seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.23.
Tabel Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi
Dampak Indikasi Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

No	Indikasi Program	Dampak	KLHS Renstra SKPD	Rekomendasi
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	(-) Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material (-) Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan (-) Perubahan keanekaragaman hayati (-) Perubahan bentang alam (-) Meningkatkan pencemaran lingkungan : kebisingan, polusi udara (-) Berpotensi menimbulkan konflik sosial (-) Pengurangan jasa pemeliharaan kualitas udara	Dinas PU dan Penataan Ruang	Pembangunan jalan dan jembatan harus dilakukan dengan: 1. Upaya peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan drainase di koridor jalan. 2. Memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang (pengendalian).
2.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	(-) Menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan pada tahap konstruksi (-) Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan (-) Perubahan keanekaragaman hayati (-) Berpotensi menimbulkan konflik sosial (-) Pengurangan jasa pemeliharaan kualitas udara	Dinas PU dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong, harus memperhatikan : 1. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif dengan mempertimbangkan prioritas azas manfaat dan pengembangan dinamika wilayah. 2. Penggunaan material diutamakan dari lokasi penambangan yang berizin
3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	(-) Menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan pada tahap konstruksi dan operasi jalan dan jembatan (-) Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan	Dinas PU dan Penataan Ruang	Program rehabilitasi /pemeliharaan Jalan Dan jembatan harus dilakukan dengan upaya peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan drainase di koridor jalan.

No	Indikasi Program	Dampak	KLHS Renstra SKPD	Rekomendasi
		material (-) Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan (-) Meningkatkan pencemaran udara dan kebisingan (-) Pengurangan jasa pemeliharaan kualitas udara		Upaya pemanfaatan kembali/daur ulang material jalan yang ada, seperti: aspal
4.	Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan	(-) Peningkatan pencemaran udara dikarenakan adanya bangkitan lalu lintas (-) Berpotensi konversi lahan pertanian (-) Berpotensi menimbulkan pencemaran udara (-) meningkatkan beban lalu lintas dan daerah rawan kecelakaan (-) Mengurangi jasa pemeliharaan kualitas udara (-) Mengurangi jasa penyedia pangan	Dinas Perhubungan	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan.
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	(-) Bau dan limbah kotoran ternak (-) Peningkatan kerusakan lingkungan karena kegiatan alih fungsi lahan. (-) Pencemaran lingkungan akibat buangan yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan hasil peternakan (-) Mengurangi jasa pemeliharaan kualitas udara	Dinas Pertanian dan Pangan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan: 1. Pengoperasian IPAL terhadap buangan kegiatan peningkatan produksi hasil ternak sebelum dibuang ke badan air (lingkungan) 2. Peningkatan teknologi produksi hasil peternakan
6	Program pengembangan destinasi pariwisata	(-) meningkatkan timbulan Sampah, (-) meningkatkan pencemaran udara (-) meningkatkan bangkitan lalulintas (-) Pengurangan jasa pengurai limbah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata harus memperhatikan: 1. pengelolaan sampah terpadu 2. penataan sarana prasarana yang ramah lingkungan 3. peningkatan RTH
7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	(-) potensi pencemaran lingkungan dengan limbah industry (-) Penurunan jasa pemurnian air (-) Pengurangan jasa pengolahan dan pengurai limbah	Dinas Perdagangan	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah harus memperhatikan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna

No	Indikasi Program	Dampak	KLHS Renstra SKPD	Rekomendasi
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilakukan dengan memperhatikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan potensi daerah secara tepat dan menyeluruh 2. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung masing-masing wilayah 3. Pemberian penyuluhan tentang kegiatan budidaya perikanan
8	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		DKP	Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilakukan dengan memperhatikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan potensi daerah secara tepat dan menyeluruh 2. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung masing-masing wilayah 3. Pemberian penyuluhan tentang kegiatan budidaya perikanan
9	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		DKP	Program Pengembangan Perikanan Tangkap dilakukan dengan memperhatikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan masyarakat (nelayan) yang benar-banar diperlukan sesuai dengan kondisi lapangan 2. Aspirasi masyarakat sekitar 3. Pelaksanaan dengan prosedur yang baik dan perencanaan yang matang
10	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		DKP	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dilakukan dengan memperhatikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan potensi daerah secara tepat dan menyeluruh 2. Memperhatikan daya dukung atau potensi sekitar 3. Pemberian penyuluhan dan pelatihan tentang kegiatan Pengolahan hasil perikanan

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Kendal

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Kendal

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, serta isu dan kebijakan daerah maka isu strategis Kabupaten Kendal sebagai berikut:

a. Penerapan Sistem E-Gov. Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kendal

Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang untuk dimanfaatkan secara luas termasuk dalam pemerintahan Kabupaten kendal dalam hal peningkatan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dapat didukung oleh penerapan pelayanan kepada publik secara efektif dan efisien. Pelayanan publik yang didukung oleh teknologi informasi dalam lingkup pemerintahan dikenal dengan istilah *Electronic-Government*. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan bertujuan agar terbentuk pemerintahan Kabupaten Kendal yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, serta perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja ke pemerintahan.

b. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pasar bebas ASEAN atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) akan terealisasi pada akhir 2015. Kini berbagai pihak, baik itu pemerintah, pelaku usaha maupun kalangan profesional mulai bersiap menyambutnya. MEA memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau *free trade* antara negara-negara anggota ASEAN. Menjelang diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintahan Kabupaten Kendal bersiap menghadapi era perdagangan bebas ini dengan cara memperkuat ekonomi kerakyatan dan penguatan kualitas manusia. Era perdagangan bebas membuat persaingan ekonomi semakin berat karena terbukanya persaingan dalam memasarkan produk dan komoditi yang dijual bebas.

Kabupaten Kendal perlu memperkuat sektor ekonomi yang dimiliki, terutama produk unggulan daerah, sehingga mampu bersaing dengan produk luar daerah maupun luar negeri di ASEAN. Ketergantungan daerah Kabupaten Kendal terhadap komoditi luar daerah apalagi luar negeri harus dikurangi sehingga ekonomi daerah lebih kuat menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global. Kebijakan lain yang bisa dilakukan adalah melalui peningkatan mutu industri rumah tangga dan membangun sektor ekonomi, baik pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan, menggunakan teknologi yang lebih maju. Pengusaha, perajin dan pelaku usaha lainnya,

diharapkan mampu membangun persaingan usaha yang sehat, menciptakan lapangan kerja baru dan turut andil meningkatkan perekonomian.

c. Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Sumberdaya Unggulan Daerah

Potensi sumber daya unggulan daerah menjadi kekayaan daerah yang dapat dimaksilmalkan dalam proses pembangunan. Peningkatan daya saing daerah harus didukung segenap potensi sumberdaya ekonomi daerahnya, dalam mendukung pembiayaan pembangunannya dan kemandirian ekonomi diperlukan kebijakan daerah yang mampu memberikan stimulan dan mendorong penggalian potensi ekonomi daerah menjadi bentuk yang riil. Hanya dengan potensi ekonomi daerah yang riil, daerah akan mampu membangun kompetensi inti (*core competence*), dan mengoptimalkan limpahan sumberdaya (*resources endowment*) yang dimiliki sebagai basis untuk menggerakkan roda pembangunan daerahnya.

Kabupaten Kendal memiliki potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumberdaya Manusia (SDM) juga komoditas-komoditas unggulan di berbagai sektor antara lain:

Sektor Pertanian dan Perkebunan

Antara lain: padi, tembakau, bawang merah, durian, jagung, singkong, kacang tanah, jambu klutuk merah, pisang, teh, tebu, karet, kelapa dalam, kopi, mlinjo, aren, jambu mete, kakao, lada, palawija, jamur, tiram, sayur mayur dan lain-lain

Sektor Peternakan dan Perikanan

Antara Lain: ayam pedaging, ayam ras petelur (broiler), ayam buras, itik, sapi perah dan sapi pedaging, kambing, lele, belut, bandeng, teri, rajungan, ikan panggang, ikan olahan lain hasil tangkapan laut dan lain-lain.

Sektor Pariwisata

Antara lain: Curug Sewu, patean, Pantai Sendang Sekucing weleri, Pantai Ngebum kaliwungu, Panta Muara Kencan Patebon, Pantai Kompleks LDS, Gua Kiskenda Boja, Pemandian Air Hangat Limut dan Wisata religius kaliwungu.

Sektor UKM

Antara Lain: kerajinan tas di Truko Kangkung, konveksi jeans di Cepiring dan Bulak Kecamatan Rowosari, Konveksi jas wanita di Pendes Cepiring, batu bata merah di Botomulyo Cepiring di Krajan Kulon Kaliwungu, Pengolahan Kapuk/pembuatan kasur/kasur lantai di Sidomukti Weleri, Kompur minyak

tanah di Patebon, mainan mobil-mobilan di Purwosari patebon, Cornella di Kaliwungu, Maket dan modal mainan kapal laut pinisi dari Desa Blorok Brangsong, produk krupuk menyebar di Kaliwungu, Kendal, Weleri dll, produksi tahu tempe di Weleri, Sukorejo, Kaliwungu dan lain-lain, pembuatan emping mlinjo di Plantungan dan Pageruyung, jahe instan di Penyangkiran Weleri, jamur tiram di Gemuhblanten, Sojomerto Kec. Gemuh.

Dalam upaya peningkatan daya saing dan penguatan potensi daerah tersebut, perlu adanya penerapan inovasi teknologi dalam produksinya maupun dalam pengemasan yang lebih menarik, Dengan adanya Sistem Informasi Potensi Daerah Kendal, diharapkan terjadi sinergi antara Akademisi atau lembaga litbang, dunia usaha dan Pemerintah, dalam upaya meningkatkan Ekonomi masyarakat berbasis unggulan daerah, untuk meningkatkan daya saing dengan kompetitor yang ada.

d. Integrasi Pengembangan Obyek Wisata Daerah

Khusus untuk bidang kepariwisataan, Kabupaten Kendal mempunyai banyak obyek wisata yang berpotensi besar dalam pengembangannya karena memiliki nilai jual skala nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, fokus pengembangan pembangunan daerah berbasis kepariwisataan akan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan perekonomian wilayah baik kepariwisataan itu sendiri maupun sektor lain yang berkaitan.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi baik pariwisata yang berfokus pada sumber daya alam yang telah ada maupun pariwisata buatan. Meskipun bukan *leading sector* dalam pembentukan perekonomian baik di tingkat nasional maupun regional, sektor pariwisata juga merupakan stimulus bagi berkembangnya sektor-sektor lain seperti jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, pemasaran, sosial budaya, lingkungan dan sebagainya.

Sebagai sektor yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor lain, kegiatan kepariwisataan merupakan aktivitas yang memiliki hubungan pula dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, bisnis, hingga pemerintahan. Kegiatan yang memiliki nilai lebih di Kabupaten Kendal tersebut belum tergali sepenuhnya karena pengolahan dan pengembangan potensi sumber daya kepariwisataan yang belum optimal. Dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan, pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kendal akan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kapasitas peningkatan perekonomian daerah.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Kendal harus menguntungkan dari segi ekonomi dalam hal meningkatkan pendapatan dan menyejahterakan masyarakat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan pariwisata seyogyanya dapat dirasakan terutama oleh masyarakat Kabupaten Kendal. Pemerintah berfungsi sebagai penyedia (*enabler*) bagi masyarakat dan fasilitator bagi pengusaha, yang mengarahkan pembangunan pariwisata agar kegiatan ekonomi dan bisnis dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, perencanaan kepariwisataan harus mendukung dan saling menunjang bagi kemajuan wilayah Kabupaten Kendal secara keseluruhan baik sebagai alat dalam pengembangan wilayah, penggerak kegiatan perekonomian wilayah, maupun contributor terhadap pemecahan permasalahan kewilayahan, termasuk ketimpangan perkembangan wilayah

Pembangunan pariwisata kedepan dilakukan melalui konsep intergrasi antar obyek wisata, sehingga pemerintah daerah bisa menawarkan paket-paket perjalanan wisata dalam satu hari (*one day tour*). saat ini, pariwisata di Kabupaten Kendal di pisahkan menjadi 2 (dua) yaitu wisata alam dan wisata religi. Potensi wisata alam Kabupaten Kendal antara lain: pemandian air panas Gonoharjo Ngelimut di lereng Gunung Ungaran; Pantai Muara Kencan di Kecamatan Patebon; Pantai Ngebum di Kecamatan Kaliwungu; Pantai Sendang Sekucing di Kecamatan Rowosari; Agrowisata Kebun Teh Medini di Kecamatan Limbangan, dimana tampak pemandangan Kota Semarang dari atas di Gunung Ungaran yang berketinggian 2.100 meter; Goa Kiskendo di Kecamatan Singorojo, goa ini mempunyai legenda tentang Mahesa Sura dan Lembu Sura serta Sugriwa dan Subali; Kolam renang Boja di Kecamatan Boja, di tempat ini ada tersedia dua kolam yaitu kolam olympic dan kolam untuk anak-anak. Wisata ini berada di pusat Kecamatan Boja; Agrowisata Sekatul, terletak di Kecamatan Limbangan, sekitar 30 km ke arah selatan dari Kendal, terdapat perkebunan buah stroberi dan buah-buahan lainnya, pemancingan, serta bermain untuk anak-anak; Srendeng Agrowisata, terletak di Desa Curugsewu, Kecamatan Patean, Merupakan wisata agro berbasis pendidikan terdiri dari wisata kebun, peternakan, pertanian, outbond, mebel dan *village tour*; Curug Semawur di Desa Bumah Kecamatan Plantungan; Curug Pengebur Gongso di Desa Gondong Limbangan; Agro wisata Ngebruk Patean Surga Buah unggulan sidomukti Patean; Pantai Cahaya/*The Sea*, penangkaran satwa langka sejenis mamalia air, juga ada *Dolpin Therapy* pengobatan dengan media lumba-lumba; Dewa Wisata cacaban, terletak di Desa Cacaban Singorojo Kendal; Sekartama Water Land di Weleri wisata air yang mengusung konsep keluarga dilengkapi dengan *foodcourt*/pusat makanan dan jajanan.

Potensi wisata religi Kabupaten Kendal, antara lain: Makam Sunan Bromo di Bebengan Kecamatan Boja; Makam Kyai mandurejo (Bupati Pekalongan I) Protomulo Kaliwungu Selatan; Makam Gembyang di Patukangan Kota Kendal; Makam Wali Joko di Komplek Masjid Agung Kendal; Makam Wali Hadi di Komplek Masjid Agung Kendal; Makam Pangeran Djoeminah di Kaliwungu; Makam Tumengung Mertowijoyo (Bupati Kendal VII/Kyai Kendil Wesi) di Sukolilan Patebon; Makam Sunan Abinowo di Pekuncen Pengandon; Makam Kyai Asy'ari di kaliwungu; Makam Petilasan Krapyak di Jatirejo Ngampel; Makam Pangeran Benowo di pekuncen Pengandon; serta peziarahan Gua Maria Ratu Besokor di Kecamatan Weleri.

e. Pembangunan Jalan Tol Batang - Semarang

Pembangunan jalan tol Batang-Semarang sepanjang 75 km yang menghubungkan daerah Batang dengan Semarang, Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol trans Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Pembangunan jalan tol Batang-Semarang yang akan melewati Kabupaten Kendal akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan jalan tol tersebut. Apalagi akan terdapat tiga titik pintu keluar (*exit*) tol yang terletak di Kabupaten Kendal, tiga titik *exit* tersebut terletak Desa Sambongsari (Kecamatan Weleri), Desa Margomulyo (Kecamatan Pegandon) dan Desa Sumberejo (Kecamatan Kaliwungu). Tiga *exit* tol yang disiapkan sudah berdasarkan kajian dan merupakan yang terbaik, karena berada di titik Barat, Tengah dan Timur. Penggunaan jalan dari arah Barat dengan tujuan selatan seperti Yogya atau Solo dapat keluar melalui pintu Sambongsari dan melanjutkan perjalanan melalui jalur Weleri-Sukerejo. Sementara yang akan menuju Kota Kendal bisa melewati pintu tengah di Desa Margomulyo dan tujuan Kaliwungu bisa keluar di Desa Sumberejo. Dengan adanya pemnangunan tol ini nantinya bisa mengurangi jumlah kendaraan yang melintas di dalam kota terutama truk-truk besar sehingga dapat memperpanjang umur ekonomi jalan dalam kota.

Pemerintah Kabupaten Kendal harus bersiap mengantisipasi dampak positif dan negatif dengan beroprasinya jalan tol tersebut. Dampak positifnya akan memerpanjang umur ekonomis jalan dalam kota, kecamatan kendaraan di dalam kota juga mulai berkurang. Selain dampak positif tersebut juga harus diantisipasi dampak-dampak negatif seperti pintu-pintu keluar tol akan mengalami kecamatan yang parah apabila tidak ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Kendal, sektor industri rumah makan akan mengalami kelesuan karena semakin sedikit orang yang melintasi jalan dalam Kota Kendal.

f. Pembangunan Kawasan Industri Kendal

Pembangunan kawasan industri Kendal di atas lahan seluas 1.000 hektar oleh PT Kawasan Industri Kendal (KIK), akan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan perekonomian nasional khususnya Kabupaten Kendal. Kawasan industri Kendal dirancang sebagai kawasan industri berstandar internasional dengan konsep pengembangan "*mixed use*" yang meliputi penyediaan lahan industri, bangunan siap pakai (SFB), hunian, dan bangunan komersial (ruko).

Pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) tersebut akan meningkatkan kontribusi Jawa Tengah khususnya Kendal terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian nasional saat ini masih sekitar 9,7 persen atau di bawah Jawa Barat sebesar 27 persen dan Jawa Timur yang mencapai 18 persen KIK dapat membantu perekonomian lokal dan regional Jawa Tengah dengan menciptakan lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung, mencetak pasar baru dan mempersiapkan kota baru sebagai kutub aktivitas pendukung lainnya. Saat ini sudah ada 29 perusahaan berkomitmen berinvestasi di KIK, yang terdiri dari investor Jepang, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Ke-29 perusahaan tersebut akan menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 5.000 orang dengan okupansi lahan 700 hektare dan nilai investasi sebesar Rp. 5,3 triliun.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (*impact*) berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Penyusunan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kendal mengacu dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal. Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kendal tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan berikut ini:

5.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kendal baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kendal, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada

saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT (Aparatur Amanah Masyarakat Maju Sejahtera)"

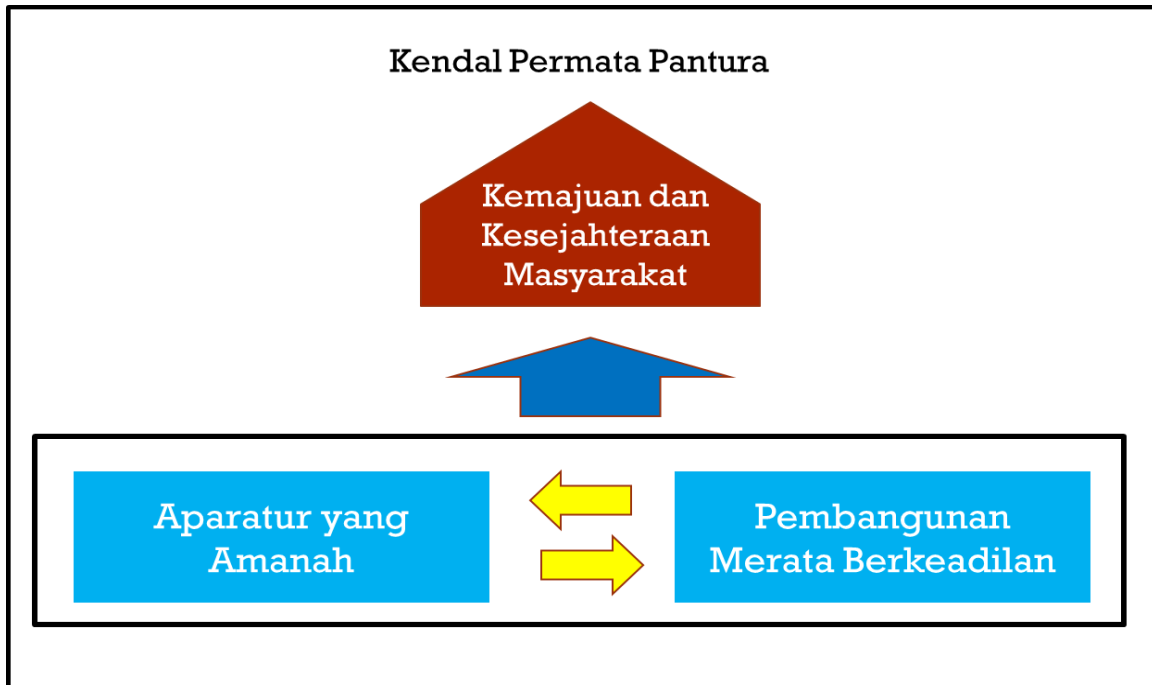
Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat, Merata Berkeadilan, dan Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat, merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat Kabupaten Kendal mampu memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Selain itu diharapkan juga masyarakat Kabupaten Kendal akan dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

Merata Berkeadilan, adalah kondisi dimana semua hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat Kabupaten Kendal. Pembangunan dilaksanakan di semua wilayah Kabupaten Kendal sehingga tidak ada kesenjangan antar wilayah.

Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia berlandaskan Iman dan Taqwa kepada ALLAH SWT, merupakan landasan dari pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan menjadi semangat bagi seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Kendal dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Pelayanan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dan melaksanakan tugas dengan dilandasi iman dan taqwa kepada Allah diharapkan akan terinternalisasi ke dalam semangat pengabdian seluruh aparatur.

Gambar 5.1.
Hubungan Antar Elemen Visi



Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diartikan bahwa dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Kendal akan dapat tercapai. Hal tersebut sesuai dengan intisari dari visi yang ditetapkan yaitu Aparatur Amanah Masyarakat Maju Sejahtera.

Dengan tercapainya visi tersebut, diharapkan 5 tahun ke depan Kabupaten Kendal mampu bertransformasi menjadi Permata Pantura. Kendal Permata Pantura, merupakan cita-cita atau *ultimate goals* yang menggambarkan kondisi dimana Kendal sebagai kabupaten yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi di antara wilayah-wilayah yang ada di sekitar Pantai Utara Jawa.

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut.

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN

2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan
4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme
5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal
6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya
7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama
8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kendal.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Kendal dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima)

tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka tujuan pembangunan Kabupaten Kendal selama periode pelaksanaan pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Masyarakat
3. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatkan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan
5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
6. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Pangan
7. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata
8. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas
9. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Meningkatkan Investasi Daerah Dalam Ranga Mengurangi Pengangguran

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah di atas dan keberlanjutan kinerja pembangunan jangka panjang, maka ditetapkan indikator tujuan yang kemudian menjadi Indikator makro Daerah pembangunan Kabupaten Kendal sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Indikator Tujuan Pembangunan
Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Data Awal	Target 2021
Misi I: Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN			
Tujuan 1: Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	64	82,5
Misi II: Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia			
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,57	75,5
Misi III: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan			
Tujuan 3: Pengurangan tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	11,62	9,8
Misi IV: Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme			

Tujuan	Indikator Tujuan	Data Awal	Target 2021
Tujuan 4: Meningkatkan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan	Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan	52	125
Misi V: Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya local			
Tujuan 5: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	6,2
Misi VI: Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya			
Tujuan 6: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam rangka memperkuat ketahanan pangan	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	NA	5,27
Misi VII: Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama			
Tujuan 7: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Tingkat pertumbuhan PAD Sektor Wisata	24,56	61,50
Misi VIII: Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			
Tujuan 8: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Cakupan infrastruktur yang berkualitas	77,23	100
Tujuan 9: Meningkatkan Kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	49,82	60
Misi IX: Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja			
Tujuan 10: Meningkatkan Investasi Daerah Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,90	5,70

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan oleh setiap institusi pemerintah namun sebelumnya para pelaksana reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, maka pemerintahan Kabupaten Kendal berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, untuk mewujudkan *good governance* harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, guna mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi 80 pada tahun 2021;
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85 pada tahun 2021; dan
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dengan dengan opini BPK menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2021.

2. Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Masyarakat

Pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam pencapaian pendidikan, Kabupaten Kendal telah mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka memberikan beasiswa dan bosda kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meskipun demikian, kita harus tetap meningkatkan pendidikan secara bersama-sama agar masyarakat Kabupaten Kendal mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Keberhasilan upaya meningkatkan derajat dan mutu pendidikan dapat diukur antara lain dengan melihat rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal cenderung mengalami peningkatan yang berarti terjadi peningkatan lulusan jenjang pendidikan masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keseriusan pemerintah untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah telah mencanangkan program Wajib belajar 9 tahun. Program ini harus terus

dilanjutkan dan dituntaskan agar anak-anak usia sekolah memperoleh haknya dalam pendidikan dan lebih berdaya saing. Untuk itu, infrastruktur dan suprastruktur pendidikan yang berkualitas perlu dilengkapi di semua daerah terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Di samping terus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah telah mengembangkan Puskesmas 24 jam di berbagai daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus melanjutkan program pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang agar usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Kendal dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Selain pendidikan dan kesehatan, pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia juga memerhatikan standar hidup layak masyarakat Kabupaten Kendal dengan meningkatkan pendapatan masyarakatnya

Guna mewujudkan kualitas dan daya saing SDM Kabupaten Kendal, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah tercapai sebesar 7,73 tahun pada tahun 2021;
- b. Meningkatnya harapan lama sekolah mencapai sebesar 14,5 tahun pada tahun 2021;
- c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan angka harapan hidup sebesar 74,45 tahun pada tahun 2021; dan
- d. Meningkatnya daya beli masyarakat dengan pengeluaran per kapita (PPP) per tahun mencapai sebesar Rp. 11.611.447,22 pada tahun 2021.

3. Tujuan 3: Pengurangan tingkat kemiskinan

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Mutu kesehatan masyarakat yang baik/tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga akan mempengaruhi capaian-capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

Kabupaten Kendal juga harus meningkatkan akses kesehatan agar masyarakat di daerah pedalaman dapat menjangkau pelayanan kesehatan sehingga dapat mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten

Kendal. Selain aspek kesehatan, kurikulum pendidikan berbasis penyerapan pasar tenaga kerja merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Peningkatan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya.

Peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Kabupaten Kendal dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri (termasuk industri kecil dan menengah), jasa, dan pertanian. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, pemerintah harus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan jumlah desa tertinggal menurun menjadi 0 desa pada tahun 2021;
 - b. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) naik mencapai 77,5 pada tahun 2021; dan
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana dengan nilai *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,2 pada tahun 2021.
4. Tujuan 4: Meningkatkan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan

Baik buruknya suatu bangsa dilihat dari kualitas pemudanya. Tergantung pada karakter dan moral pemudanya. Sampai-sampai untuk menggambarkan betapa berharganya pemuda sebagai aset suatu bangsa, pemuda adalah simbol kekuatan, masa depan dan harapan suatu bangsa. Pemuda memiliki tipe pemikiran yang kritis dan kreatif. Pemuda adalah identitas suatu bangsa, merupakan penerus generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Pemuda adalah yang menjadi harapan dalam setiap kemajuan bangsa. Kaum muda memiliki daya berfikir yang khas. Mereka menggunakan idealisme untuk berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Kendal. Kritis dalam melihat masalah-masalah dalam masyarakat dan mampu memberikan solusi yang tak jarang tidak terpikirkan oleh generasi-generasi yang lebih tua. Banyak

terobosan baru yang dapat pemuda lakukan dalam berperan aktif dalam pembangunan karena pemuda memiliki cara pikir yang berbeda. Peran aktif pemuda diantaranya melalui prestasi olahraga, dimana kegiatan olahraga dapat memberikan pengaruh yang positif pada perkembangan jiwa serta menjauhkan dari pergaulan negatif yang rawan akan pergaulan bebas dan peredaran narkoba.

Guna meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan dengan jumlah atlet berprestasi skala provinsi dan nasional meningkat mencapai 125 pemuda pada tahun 2021.

5. Tujuan 5: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan simultan yang membawa lebih dekat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya mampu meningkatnya pendapatan masyarakat, peningkatan PDB dan standar hidup yang berkelanjutan dan didistribusikan secara merata serta menghargai modal alam yang sering tidak terlihat secara ekonomi meskipun telah mendukung keberhasilan ekonomi. Peningkatan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kendal dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan seluas-luasnya melalui pemberdayaan peningkatan sektor industri pengolahan di Kabupaten Kendal. Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan dimaknai dengan perekonomian meningkat secara terus menerus dengan memperhatikan unggulan daerah. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya.

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan mencapai 0,26 persen pada tahun 2021.

6. Tujuan 6: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Pangan

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan daerah dengan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. Untuk meningkatkan kualitas daya saing perekonomian masyarakat yang berkelanjutan maka perlu untuk dilakukan penggalangan partisipasi masyarakat secara aktif dan membuka pintu kemitraan yang berbasis "*win-win solution*".

Peningkatan ekonomi yang berkelanjutan di Kendal dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan seluas-luasnya melalui pemberdayaan pertanian di Kabupaten Kendal. Pemberdayaan ekonomi pertanian ini juga akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan daerah.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Pemerintah daerah selalu berupaya untuk mencapai kemakmuran masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Ketahanan pangan mengandung dua unsur pokok yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Jika salah satu dari unsur diatas tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun bahan pangan tersedia ditingkat nasional maupun regional, namun jika akses individu untuk memenuhi kebutuhannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Arifin,2004:31). Ada tiga pilar yang mendukung bangunan ketahanan pangan. Pertama, yaitu ketersediaan pangan sebanyak yang diperlukan oleh masyarakat yang mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari produksi, cadangan maupun impor dan ekspor; kedua, distribusi yang mencakup aksesabilitas pangan antarwilayah dan antarwaktu serta stabilitas harga pangan strategis;

ketiga, konsumsi yang mencakup jumlah mutu gizi/nutrisi, keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan (Suparmo dan Usman, 2004:3-4).

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) bahan pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan: petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Di sinilah perlu sekali peranan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan petani.

Lebih lanjut, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah.

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas dengan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan mencapai sebesar 0,27 pada tahun 2021 dan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan mencapai sebesar 5 persen pada tahun 2021; dan
- b. Meningkatnya ketersediaan bahan pangan daerah dengan rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) pada tahun 2021 peningkatannya sebesar 177 persen.

7. Tujuan 7: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata

Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam merupakan bagian dari misi kedua yaitu "Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal".

Sektor Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan dan melibatkan beberapa sektor ekonomi lainnya, misalnya sektor kehutanan, sektor kelautan, pertanian dan perkebunan, sektor industri dan perdagangan, telekomunikasi serta sektor perhubungan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan dan pengembangan pariwisata memiliki paradigma dalam

rencana pembangunan dan pengembangannya. Tujuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan kabupaten Kendal dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang senantiasa menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya dan kearifan lokal secara berkelanjutan, serta dengan orientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian alam dan lingkungan hidup, serta memperkaya dan mempercantik sumber daya alam. Adapun sasaran dari tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata adalah Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kendal mencapai sebesar 5 persen tiap tahun sampai tahun 2021 dan PAD sektor pariwisata meningkat mencapai Rp. 2.166.641,- pada tahun 2021.

8. Tujuan 8: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh wilayah di Kabupaten Kendal dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Keberhasilan bidang infrastruktur juga dikaitkan dengan penurunan inflasi dan kesenjangan pembangunan kewilayahan. Infrastruktur lainnya, seperti perumahan, pemukiman, kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan dengan persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap mencapai 100 persen pada tahun 2021; Persentase permukiman kumuh menurun sampai 0 persen pada tahun 2019; persentase rumah tangga yang menggunakan air minum meningkat mencapai 100 persen pada tahun 2019; dan persentase rumah tinggal bersanitasi meningkat mencapai 100 persen pada tahun 2019.

9. Tujuan 9: Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup merupakan salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus di Kabupaten Kendal. Hal ini disebabkan

karena semakin banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi dan berdampak terhadap kehidupan makhluk hidup lainnya.

Dampak risiko lingkungan di atas dapat dikategorikan sebagai bencana ekologis. Kebanyakan dari kita mungkin masih menganggap bahwa kerusakan tersebut dikategorikan sebagai bencana alam, akan tetapi jika melihat penyebab dari bencana tersebut pada dasarnya disebabkan oleh ulah manusia yang tidak menghargai lingkungan. Hal ini memberikan dampak diantaranya, kekeringan berkepanjangan, banjir, bertambahnya frekuensi peristiwa iklim yang memengaruhi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat serta biodiversitas dan kestabilan ekonomi.

Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat suatu proyek pembangunan. Pengelolaan yang baik menjaga ekosistem dengan mencegah berlangsungnya pembangunan, sebab pembangunan itu perlu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Teknologi yang akan digunakan, ditetapkan berdasarkan prinsip efektif dan efisien. Tujuan dari pengelolaan lingkungan di sini terutama mencegah kemunduran populasi sumber daya alam yang dikelola dan mencegah pencemaran limbah/polutan yang membahayakan

Tidak dapat dipungkiri, lingkungan yang sehat dan asri merupakan dambaan bagi semua orang. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Lingkungan yang nyaman ditandai dengan semakin tertatanya taman-taman kota yang bisa menjadi tempat bersosialisasi masyarakat. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran Meningkatkan perbaikan kualitas lingkungan dengan skor indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 60 pada tahun 2021.

10. Tujuan 10: Meningkatkan Investasi daerah Dalam Rangka Mengurangi Penanggungan

Investasi adalah suatu istilah yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapat keuntungan di masa depan. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung dari investasi, sebagai motor penggerak. Dewasa ini banyak daerah yang melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing, termasuk Kabupaten Kendal. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal sebab

kegiatan investasi akan mendorong kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah Kabupaten Kendal mempunyai tujuan kuat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengundang investor untuk datang. Salah satu sektor yang cukup potensial digarap investor adalah tanaman kopi. Diversifikasi perkebunan kopi disebut sangat menguntungkan lantaran saat ini hasil perkebunan terbaik di Kendal banyak di ekspor hanya dalam bentuk mentah tanpa diolah terlebih dahulu. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran Meningkatnya investasi daerah dengan nilai investasi (triliyun rupiah) meningkat mencapai Rp. 1.610.000 pada tahun 2021.

Tabel 5.2.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Kendal 2016-2021

VISI: Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT (Aparatur Amanah Masyarakat Maju Sejahtera)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD (OPD Utama)	Data Awal	Target					
				2017	2018	2019	2020	2021	
<u>Misi I: Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN</u>									
Tujuan 1: Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	48	55	60	65	75	80
	Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	82	83	84	85
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<u>Misi II: Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia</u>									
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM masyarakat	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	4	Rata-Rata Lama Sekolah	6,73	6,93	7,13	7,33	7,53	7,73
	Meningkatnya harapan lama sekolah	5	Harapan Lama Sekolah	12,65	13,07	13,44	13,81	14,18	14,5
	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	74,2	74,25	74,3	74,35	74,4	74,45
	Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Pengeluaran per kapita (PPP)/thn	10.631.000,04	10.820.231,84	11.012.831,97	11.208.860,38	11.408.378,09	11.611.447,22

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD (OPD Utama)	Data Awal	Target					
				2017	2018	2019	2020	2021	
Misi III: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan									
Tujuan 3: Pengurangan tingkat kemiskinan	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	8	Jumlah desa tertinggal	NA	85	65	45	23	0
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,00	75,5	76	76,5	77	77,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana	10	Total Fertility Rate (TFR)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Misi IV: Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme									
Tujuan 4: Meningkatkan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan	11	Atlet berprestasi skala Provinsi dan Nasional	52	195	105	110	120	125
Misi V: Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal									
Tujuan 5: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor industri pengolahan (%)	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD (OPD Utama)	Data Awal	Target					
				2017	2018	2019	2020	2021	
<u>Misi VI: Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya</u>									
Tujuan 6: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam rangka memperkuat ketahanan pangan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	13	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan (%)	NA	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
		14	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan (%)	4,10	5	5	5	5	5
	Meningkatnya ketersediaan bahan Pangan Daerah	15	Ketersediaan bahan pokok utama/beras (%)	171,68	157,57	173	175	177	177
<u>Misi VII: Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama</u>									
Tujuan 7: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kendal	16	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	164.106	5	5	5	5	5
		17	PAD sektor pariwisata (Ribu)	1.345.315	1.479.846	1.627.830	1.790.613	1.969.674	2.166.641
<u>Misi VIII: Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup</u>									
Tujuan 8: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	18	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	63,3	70	80	88	94	100
		19	Persentase permukiman	69,9	56,75	20,95	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD (OPD Utama)		Data Awal	Target				
					2017	2018	2019	2020	2021
			kumuh (%)						
		20	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95,96	96,37	96,78	97,19	97,61	98,01
		21	Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum (%)	79	83	89	100	100	100
		22	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	78	80	85	100	100	100
Tujuan 9: Meningkatkan Kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan hidup	23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	49,82	50	52	55	57	60
<u>Misi IX: Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja</u>									
Tujuan 10: Meningkatkan Investasi Daerah Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran	Meningkatnya investasi daerah	24	Nilai Investasi (juta rupiah)	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.000	1.610.000

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi bupati tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja '*impact*' yang saling terhubung dimana indikator tujuan merupakan *lagging indikator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Bupati (2021). Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kabupaten Kendal.

Tabel 5.3.
Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal 2016-2021

<u>Tujuan</u>	<u>Indikator Tujuan</u>	<u>Sasaran</u>	<u>Indikator Sasaran RPJMD (IKU Daerah)</u>	<u>Indikator Sasaran Renstra (IKU OPD)</u>	<u>Nama OPD</u>
<u>Misi I: Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN</u>					
Tujuan 1: Mewujudkan Reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat Daerah
				Rata-Rata pencapaian IKU daerah	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
				Persentase konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
				Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat
				Nilai rata-rata predikat akuntabilitas OPD yang dinilai (LAKJIP)	Inspektorat
		Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sekretariat Daerah
				Persentase OPD yang sudah mencapai indikator SPM	Sekretariat Daerah
				Jumlah propemperda yang diselesaikan	Sekretariat Dewan
				Lama pengurusan dokumen kependudukan (KTP)	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

<u>Tujuan</u>	<u>Indikator Tujuan</u>	<u>Sasaran</u>	<u>Indikator Sasaran RPJMD (IKU Daerah)</u>	<u>Indikator Sasaran Renstra (IKU OPD)</u>	<u>Nama OPD</u>
				dan Akte)	
				IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	RSUD Dr.H. Soewondo
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan	Kecamatan
				Jumlah jenis layanan kepegawaian yang menggunakan <i>E-Gov</i>	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Presentase struktur jabatan yang sesuai dengan kompetensi jabatan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase kinerja pegawai	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase jenis layanan yang menggunakan <i>E-gov</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah desa <i>online</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Cakupan penegakan Perda	Satpol PP dan Damkar
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Opini BPK	Inspektorat/ Badan Keuangan Daerah
				Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Inspektorat

<u>Tujuan</u>	<u>Indikator Tujuan</u>	<u>Sasaran</u>	<u>Indikator Sasaran RPJMD (IKU Daerah)</u>	<u>Indikator Sasaran Renstra (IKU OPD)</u>	<u>Nama OPD</u>
				sesuai rekomendasi	
				Persentase PAD terhadap total pendapatan	Badan Keuangan Daerah
<u>Misi II: Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia</u>					
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya harapan lama sekolah	Harapan Lama Sekolah	Prosentase Pendidik SD dan SMP yang bersertifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rasio Guru SD Persiswa SD dan Guru SMP per siswa SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Prosentase Ruang Kelas SD dan SMP Kondisi baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Prosentase SD dan SMP Berakreditasi A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan

<u>Tujuan</u>	<u>Indikator Tujuan</u>	<u>Sasaran</u>	<u>Indikator Sasaran RPJMD (IKU Daerah)</u>	<u>Indikator Sasaran Renstra (IKU OPD)</u>	<u>Nama OPD</u>
				Angka Kematian Bayi (AKB)	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Balita	Dinas Kesehatan
				Prevalensi balita gizi buruk	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Ibu	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (PPP)	Jumlah wirausaha baru mikro dan kecil	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
				Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil/menengah	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
				Persentase koperasi sehat	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
<u>Misi III: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan</u>					
Tujuan 3: Pengurangan tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	Meningkatnya pembangunan desa	Jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase BUMDes yang terbentuk	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah desa yang memiliki produk unggulan lokal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

<u>Tujuan</u>	<u>Indikator Tujuan</u>	<u>Sasaran</u>	<u>Indikator Sasaran RPJMD (IKU Daerah)</u>	<u>Indikator Sasaran Renstra (IKU OPD)</u>	<u>Nama OPD</u>
				Prosentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang tertangani	Dinas Sosial
				Persentase fakir miskin yang dapat jaminan sosial	Dinas Sosial
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Total Fertillity Rate (TFR)	Total Fertillity Rate (TFR)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<u>Tujuan</u>	<u>Indikator Tujuan</u>	<u>Sasaran</u>	<u>Indikator Sasaran RPJMD (IKU Daerah)</u>	<u>Indikator Sasaran Renstra (IKU OPD)</u>	<u>Nama OPD</u>
<u>Misi IV: Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme</u>					
Tujuan 4: Meningkatkan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan	Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan	Atlet berprestasi skala Provinsi dan Nasional	Jumlah prestasi pemuda kendal di lingkup provinsi maupun nasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
<u>Misi V: Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal</u>					
Tujuan 5: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Sektor industri pengolahan (%)	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Sektor industri pengolahan (%)	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
				Nilai ekspor	Dinas perdagangan
				Jumlah lokasi PKL yang tertata	Dinas perdagangan
				Peningkatan Retribusi Pendapatan pasar Daerah	Dinas perdagangan
<u>Misi VI: Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya</u>					
Tujuan 6: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam rangka memperkuat ketahanan pangan	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan (%)	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
				Nilai Tukar Pertani (NTP)	Dinas Pertanian dan Pangan

<u>Tujuan</u>	<u>Indikator Tujuan</u>	<u>Sasaran</u>	<u>Indikator Sasaran RPJMD (IKU Daerah)</u>	<u>Indikator Sasaran Renstra (IKU OPD)</u>	<u>Nama OPD</u>
		Meningkatnya ketersediaan bahan Pangan Daerah	Rata-rata ketersediaan pangan utama beras	Rata-rata ketersediaan pangan utama beras	Dinas Pertanian dan Pangan
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Pertanian dan Pangan
			Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan (%)	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan (%)	Dinas Kelautan dan Perikanan
<u>Misi VII: Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama</u>					
Tujuan 7: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Tingkat pertumbuhan PAD Sektor Wisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kendal	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				PAD sektor pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
<u>Misi VIII: Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup</u>					
Tujuan 8: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Cakupan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	DPU dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	DPU dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tangga	Persentase rumah tangga yang	DPU dan Penataan Ruang

<u>Tujuan</u>	<u>Indikator Tujuan</u>	<u>Sasaran</u>	<u>Indikator Sasaran RPJMD (IKU Daerah)</u>	<u>Indikator Sasaran Renstra (IKU OPD)</u>	<u>Nama OPD</u>
			yang menggunakan air minum (%)	menggunakan air minum (%)	
			Persentase permukiman kumuh (%)	Persentase permukiman kumuh (%)	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
				Cakupan Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
				Persentase PSU perumahan dalam kondisi baik	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
				Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten	Satpol PP dan Damkar
				Cakupan penanganan kebakaran sesuai dengan Tingkat waktu Tanggap (Response Time Rate)	Satpol PP dan Damkar
				Persentase musibah kebakaran yang tertangani	Satpol PP dan Damkar
Tujuan 9: Meningkatkan Kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Meningkatnya penataan lingkungan kota yang nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah lokasi taman dan RTH perkotaan yang tertata	Dinas Lingkungan Hidup

<u>Tujuan</u>	<u>Indikator Tujuan</u>	<u>Sasaran</u>	<u>Indikator Sasaran RPJMD (IKU Daerah)</u>	<u>Indikator Sasaran Renstra (IKU OPD)</u>	<u>Nama OPD</u>
<u>Misi IX: Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja</u>					
Tujuan 10: Meningkatkan Investasi Daerah Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Meningkatnya Investasi daerah	Nilai Investasi (triliyun rupiah)	Nilai Investasi (triliyun rupiah)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Rata-Rata Lama pelayanan perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan	Dinas Tenaga Kerja
				Prosentase lembaga pelatihan kerja swasta yang terbina	Dinas Tenaga Kerja
				Pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja
				Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/ PB	Dinas Tenaga Kerja
				Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga kerjaan	Dinas Tenaga Kerja

<u>Tujuan</u>	<u>Indikator Tujuan</u>	<u>Sasaran</u>	<u>Indikator Sasaran RPJMD (IKU Daerah)</u>	<u>Indikator Sasaran Renstra (IKU OPD)</u>	<u>Nama OPD</u>
				Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	Dinas Tenaga Kerja
				Prosentase jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase angka kriminalitas yang tertangani	Kesbangpol

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan rumusan kebijakan pembangunan sebagai langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien, sehingga dapat dikatakan bahwa strategi menjadi prioritas pembangunan daerah. Kemudian arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan menyelaraskan antara antara apa yang akan dicapai dengan berbagai identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dengan mengagendakan berbagai kebijakan pembangunan yang mendukung dan menciptakan perbaikan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah peningkatan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Melalui arah kebijakan diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Melalui rumusan arah kebijakan, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan arah kebijakan agar dapat merangkai program-program pembangunan daerah yang *inherent*. Agar arah kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program pembangunan daerah yang tepat.

6.1. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD untuk menjabarkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) berbagai kebijakan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah

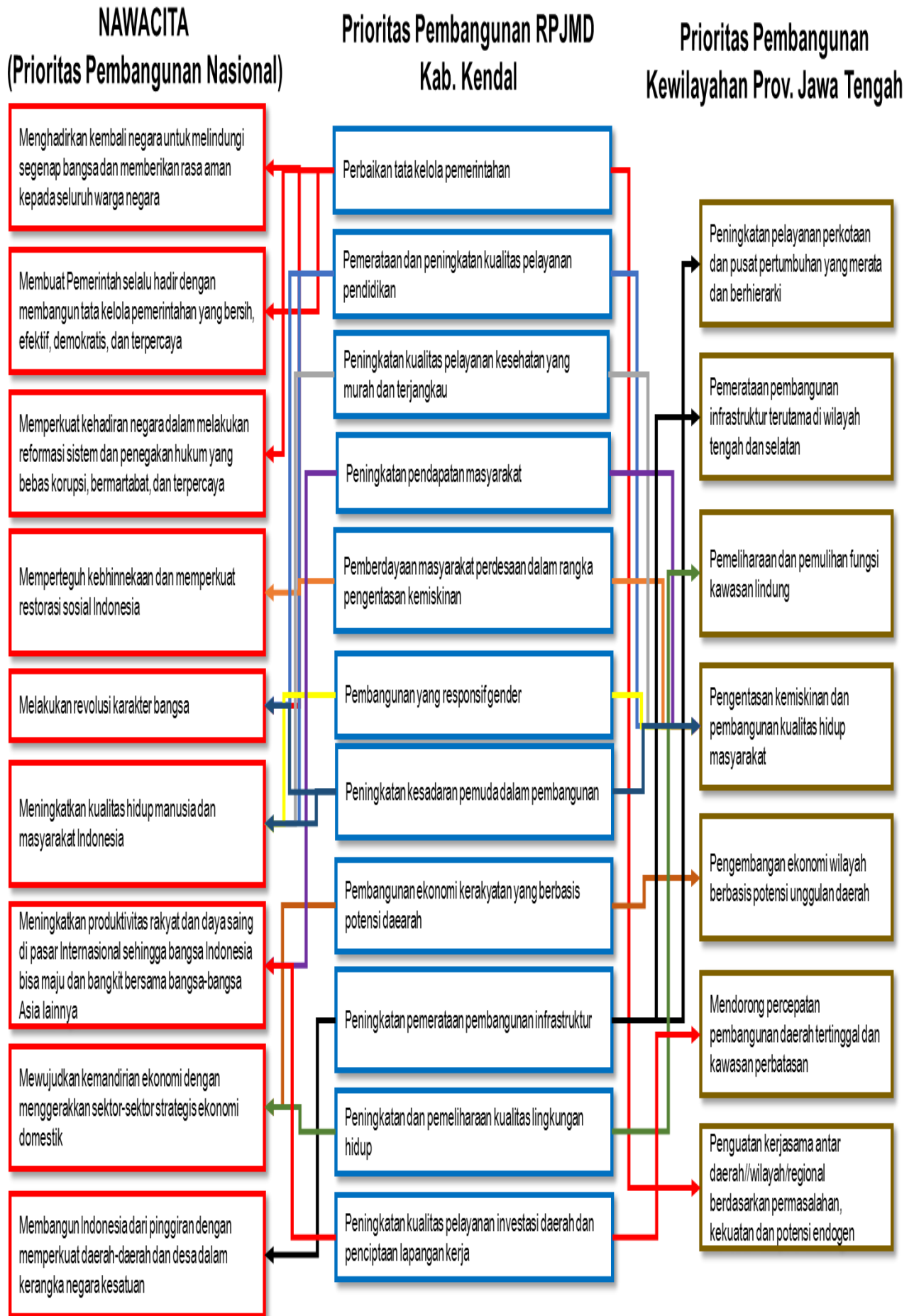
satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Guna menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 maka strategi atau prioritas pembangunan Kabupaten Kendal telah diintegrasikan dengan agenda pembangunan nasional. Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan tersebut akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan pembangunan nasional (Nawacita) harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Kendal. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya penyandingan antara prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah agar dapat terlihat kesinambungan dan kesinergisan antara prioritas pembangunan pusat dan daerah seperti yang tersaji pada Gambar 6.1 berikut:

Gambar 6.1.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal



Berdasarkan hasil FGD dengan para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam kertas kerja yang telah dirumuskan pada gambar di atas,

strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada Tabel 6.1:

Tabel 6.1.
Strategi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kendal 2016-2021

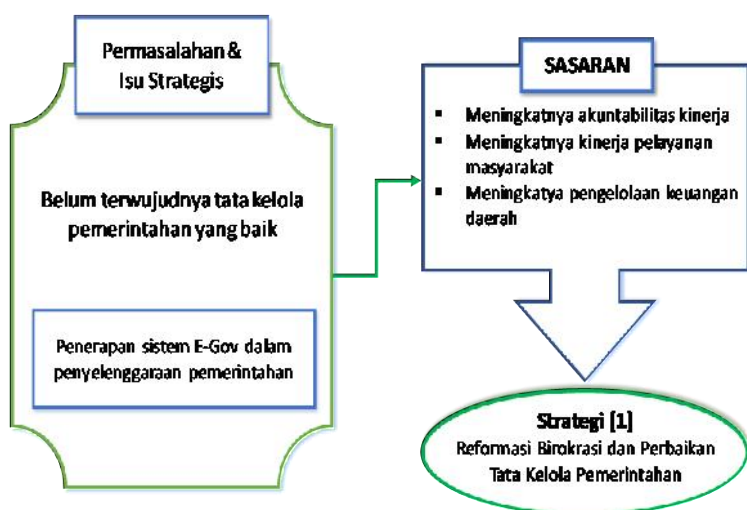
Sasaran		Strategi/Prioritas Pembangunan	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	S.1	Perbaikan tata kelola pemerintahan
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat		
3.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		
4.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	S.2	Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
5.	Meningkatnya harapan lama sekolah		
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S.3	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau
7.	Meningkatnya daya beli masyarakat	S.4	Peningkatan pendapatan masyarakat
8.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	S.5	Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam rangka pengentasan kemiskinan
9.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	S.6	Pembangunan yang responsif gender
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana		
11.	Meningkatnya Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan	S.7	Peningkatan Kesadaran pemuda dalam pembangunan
12.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	S.8	Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi daerah
13.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas		
14.	Meningkatnya ketersediaan bahan pangan daerah		
15.	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kendal		
16.	Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pemukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	S.9	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur
17.	Meningkatnya pemeliharaan kualitas lingkungan hidup	S.10	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup
18.	Meningkatnya investasi daerah	S.11	Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah dan penciptaan lapangan kerja

Berdasarkan tabel 6.1 di atas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun

mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik untuk mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Penjelasan masing-masing prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Strategi 1: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan *good governance*. Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan



menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pengendalian dan pengelolaan aset daerah Kabupaten Kendal secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi

infrastruktur dan layanan masyarakat.

Penambahan kapasitas aparatur yang berkualitas juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan yang sesuai agar pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kinerja aparatur yang baik memerlukan koordinasi dan manajemen yang kooperatif sehingga pelayanan dapat berjalan dengan optimal

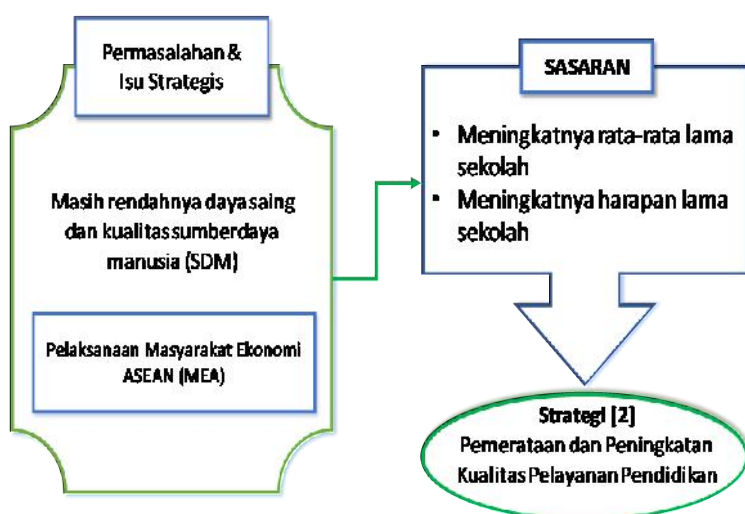
Reformasi birokrasi, pada prinsipnya meliputi lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja dan perbaikan kualitas pelayanan. Hingga saat ini, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berhasil memperbaiki tata kelola pemerintah sehingga perlu upaya nyata penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih agar terbentuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Selanjutnya diperlukan upaya percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik agar reformasi birokrasi

dapat segera terwujud. Tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi penyampaian layanan dan menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola layanan dasar secara efektif. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

2. Strategi 2: Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing



dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang harapan lama sekolah dan kesadaran akan pentingnya

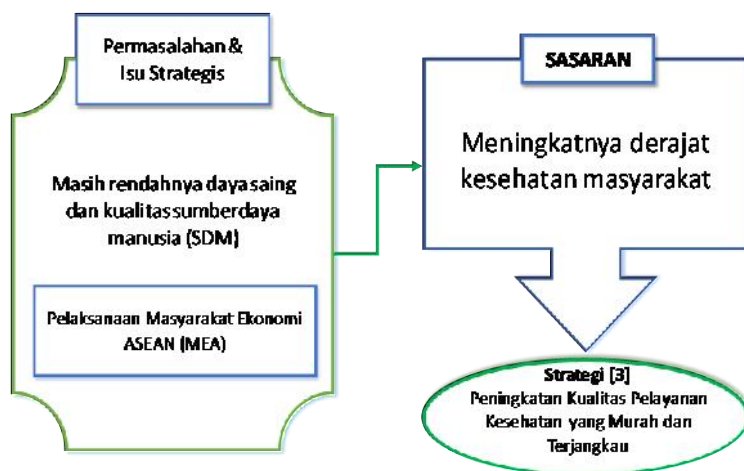
informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat sehingga kualitas SDM secara otomatis akan membaik. Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang pendidikan yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah akan mendorong peningkatan IPM Kabupaten Kendal.

Penyelenggaraan sistem pendidikan yang berkualitas membutuhkan perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya akses dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Dalam pembuktian kualitasnya, output pendidikan belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian dari lembaga yang independen sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan konsisten.

Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kendal perlu mengupayakan peningkatan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih mendalam dan merata dan diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan itu sendiri.

3. Strategi 3: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Murah dan Terjangkau

Kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti dalam beberapa dekade terakhir. Pembangunan di bidang kesehatan juga

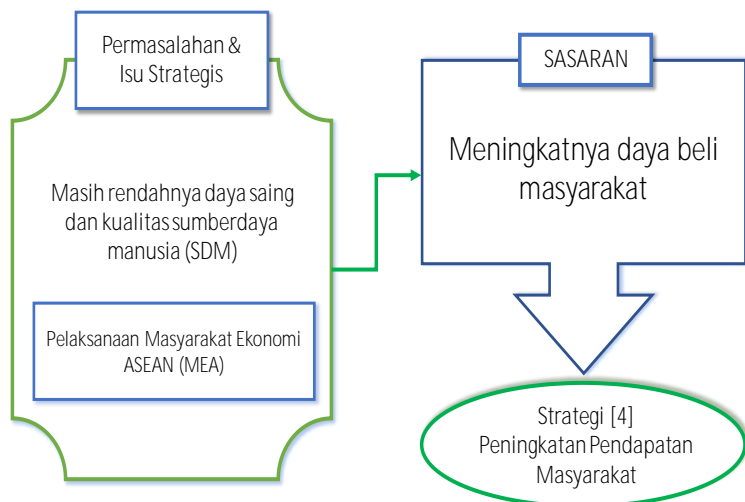


harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Kendal. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya serta akan menentukan pembangunan dibidang kesehatan secara mendasar.

4. Strategi 4: Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan riil per kapita. Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas



prestasi kerja yang dilakukan selama satu periode.

Masalah pendapatan masyarakat Kabupaten Kendal dilihat dari jumlah dan distribusi pendapatan yang diterima. Pendapatan per kapita diartikan pula sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga

yang dapat mereka belanjakan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita disuatu daerah mencerminkan rendahnya pertumbuhan GNP (*Gross national Product*). Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, menggalakkan program kerja berencana dan transfer pemerintah kepada golongan-golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.

5. Strategi 5: Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

Kabupaten Kendal memiliki 265 desa, hal itu merupakan potensi untuk



diberdayakan dalam rangka mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat desa akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses pengentasan kemiskinan melalui proses

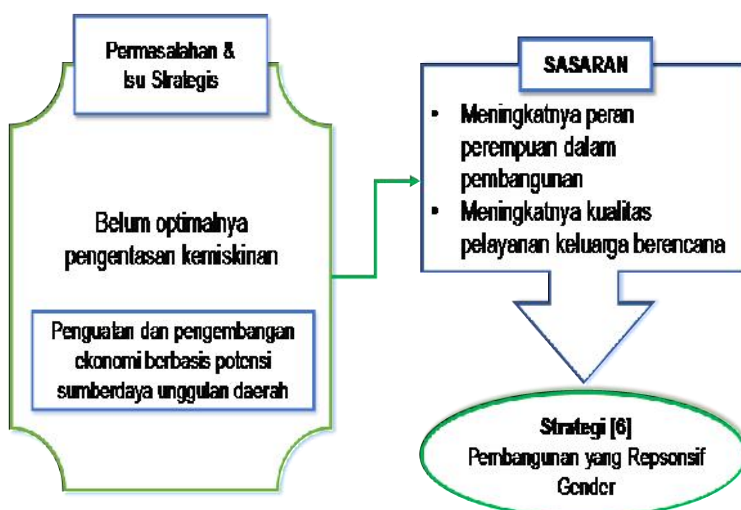
peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan dan

peningkatan keterampilan atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa itu sendiri. Berkaitan dengan pembangunan ekonomi di pedesaan, pemerintah Kabupaten Kendal mengangkat desa untuk mencapai taraf kemandirian melalui upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan peningkatan segala bentuk pelayanan yang berefek langsung pada terangkatnya ekonomi masyarakat di pedesaan.

Dengan terpenuhinya pelayanan dasar pada masyarakat desa, terutama akses standar hidup layak dan akses untuk memperoleh kegiatan ekonomi, akan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan dapat mendukung terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan pendidikan vokasi pada masyarakat desa dalam upaya pembangunan SDM di pedesaan. Hal ini karena upaya pemerintah wajib memberikan pelayanan yang besar demi terbukanya peluang ekonomi di desa harus diiringi dengan kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM yang ada di desa.

6. Strategi 6: Pembangunan yang Responsif Gender

Pencapaian penuh kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana merupakan esensi yang selalu di perjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Kendal khususnya dalam hal kesetaraan gender, di tengah kondisi masih adanya ketimpangan gender di berbagai bidang



pembangunan sekaligus untuk mewujudkan komitmen internasional melalui kesetaraan gender 50:50 pada tahun 2030. Berbagai bentuk hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses pembangunan bagi perempuan harus dihapus,

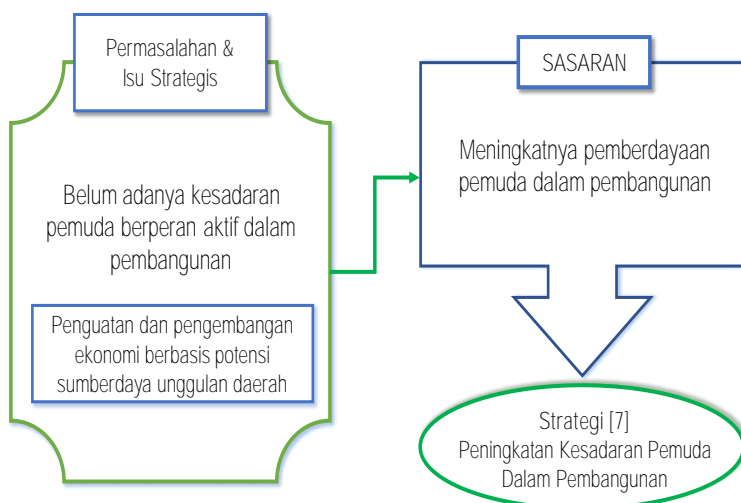
sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif dengan meningkatkan kualitas hidup.

Pembangunan Gender menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya

ekonomi. Tidak hanya memiliki peran domestik untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, perempuan juga sebagai penggerak roda pembangunan. Secara internal, kaum perempuan merupakan tiang keluarga yang juga sebagai penentu kualitas generasi penerus bangsa. Pada level rumah tangga, perempuan berkontribusi dalam manajemen rumah tangga, perawatan kesehatan anggota keluarga dan pendidikan anak. Perempuan juga dianggap sebagai alokator pendapatan dan pengambil kebijakan dalam distribusi pengeluaran. Namun demikian upaya integrasi perpektif gender dalam segala aspek pembangunan tidaklah mudah. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian, penguatan dan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

7. Strategi 7: Peningkatan Kesadaran Pemuda Dalam Pembangunan

Jumlah pemuda Kabupaten Kendal usia 20-34 tahun pada tahun 2014 cukup banyak sekitar 24.015 (24%) jiwa dari total penduduk Kabupaten Kendal yang berjumlah 950.463 jiwa. Angka ini merupakan potensi besar jika dapat dimanfaatkan seoptimal dalam pembangunan. Namun, sebaliknya, apabila potensi tersebut tidak di kelola dengan baik justru akan berdampak



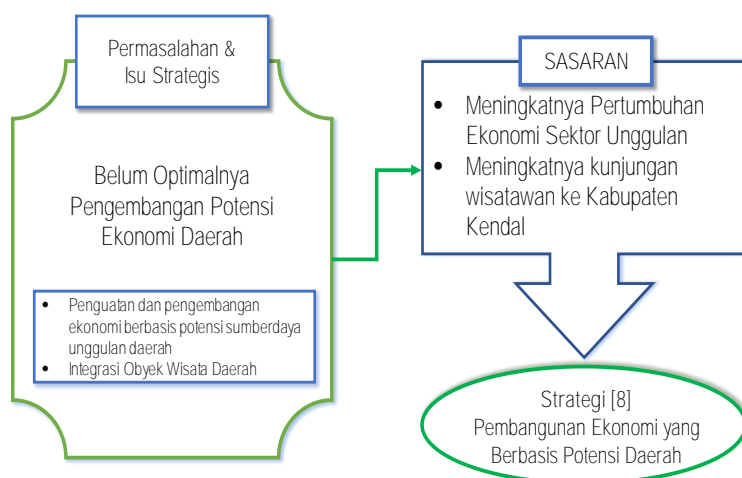
negatif terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan untuk menghasilkan manfaat semaksimal mungkin, pemuda perlu di libatkan dalam proses-proses pembangunan. Keterlibatan

ini menjadi penting karena apabila pemuda berada di luar lingkaran proses pembangunan, potensinya cenderung akan menjadi faktor penghambat pembangunan. Apalagi mengingat pemuda merupakan segmen yang memiliki energi besar serta daya inovasi yang tinggi, sehingga apabila mereka terpinggirkan biasanya mendorong lahirnya masalah-masalah sosial yang dapat menghasilkan efek yang tidak diinginkan.

Pada tingkat kebijakan di Kabupaten Kendal, strategi yang di usung adalah peningkatan kesadaran pemuda dalam pembangunan. Bahkan pengarusutamaan pemuda menjadi salah satu *grand strategy* dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Kendal bahkan Indonesia. Strategi ini seyogyanya dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan. Lebih jauh strategi peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan mensyaratkan adanya komitmen setiap pihak untuk memprioritaskan pembangunan kepemudaan dalam setiap proses pembangunan yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara koordinatif, sinergi dan harmonis.

8. Strategi 8: Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Daerah

Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk menggali berbagai potensi ekonomi masyarakat sektor-sektor strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Pengembangan SDA harus dalam kendali pemerintah berdasarkan asas



kerakyatan. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal harus memperhatikan akar budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, dalam menumbuhkembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis masyarakat perlu adanya dasar keswadayaan dan kemandirian dengan

diperkuat institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional yang dimulai dari perekonomian daerah. Salah satu upaya dalam menyiasati strategi ini yakni dengan

mengupayakan pengembangan ekonomi lokal daerah. Dengan pengembangan ekonomi lokal daerah maka secara langsung potensi-potensi daerah dapat terangkat dan berkembang sehingga akan membantu mempertanggungjawabkan perekonomian daerah

Perekonomian daerah Kabupaten Kendal dapat terkendali dan konsisten dengan mengupayakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang berdampak langsung pada kestabilan harga bahan baku sehingga menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah di Kabupaten Kendal. Dengan adanya kestabilan harga, diharapkan akan menambah investasi pada sektor UMKM serta memperbaiki sektor tata niaga dan pemasaran produk UMKM sehingga berdampak pada terkendalinya tingkat inflasi pada perekonomian daerah.

Pada hakekatnya pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menumbuhkan/meningkatkan kegiatan perekonomian pada masyarakat, terutama pada masyarakat miskin. Melalui peran pemerintah daerah, diharapkan ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sehingga perekonomian rakyat kecil dapat terangkat dan otomatis meningkatkan taraf hidupnya. Pembangunan pada sektor ekonomi ini diharapkan tidak hanya terjadi pada wilayah tertentu saja, tetapi juga pada wilayah pelosok sampai ke perdesaan sehingga pemerataan pembangunan antar daerah dapat terwujud. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan perekonomian Kabupaten Kendal dapat dengan mantap mampu menyejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Kendal secara adil dan merata

Sejalan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan destinasi pariwisata juga harus dilakukan untuk mendukung pemasarannya. Pengembangan kepariwisataan dilakukan sesuai potensi, karakteristik dan keunggulan yang dimiliki dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

9. Strategi 9: Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur dasar dan penunjang seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat Kabupaten Kendal.

Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah mengingat infrastruktur dasar dan penunjang merupakan aset penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Upaya pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang diharapkan menjadi penghubung pusat-pusat ekonomi serta pendukung pengembangan

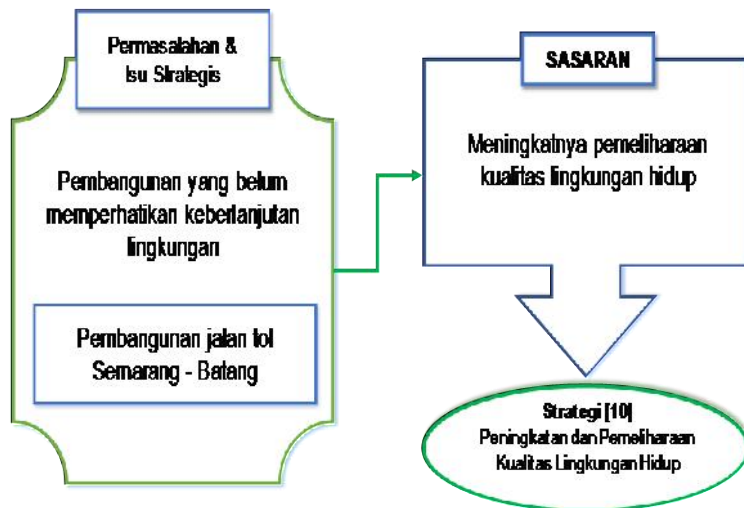


wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan. Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur dasar dasar dan penunjang menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan

publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah perdesaan. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar mempunyai tujuan berupa pemerataan dan pengembangan wilayah dengan *prototype* kawasan berkembang sekitarnya. Seperti kita ketahui, infrastruktur dasar digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga sudah seyogianya Pemerintah Kabupaten Kendal bertanggung jawab membangun infrastruktur dasar dan penunjang yang memadai dan bersama masyarakat menjaga keberlanjutan infrastruktur tersebut.

10. Strategi 10: Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup

Isu-isu mengenai lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat semua negara di dunia. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya penuh dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan



lingkungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan mengedepankan kelestarian alam. Sedangkan maksud dari pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya berencana secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk

mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan hidup.

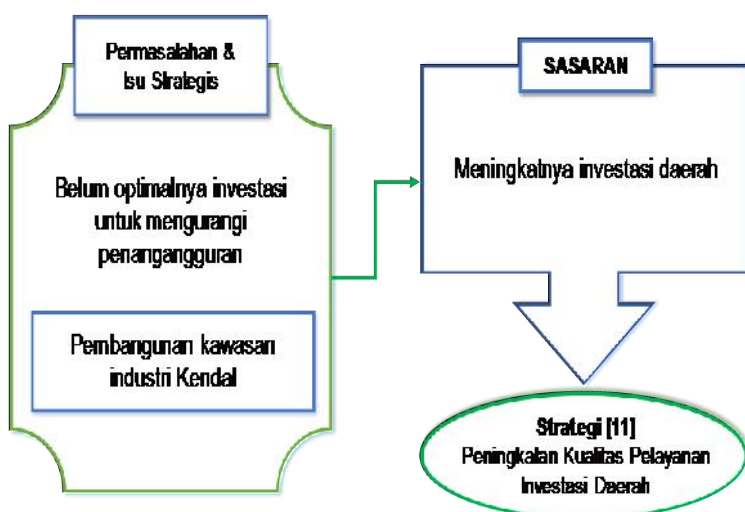
Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam strategi peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang agar dapat mendayagunakan segala potensi dengan tepat untuk pencapaian pembangunan daerah. Selain itu, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta peningkatan kualitas udara dan perairan perlu dilakukan demi mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik maka perlu disadari bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif dan adil perlu dilaksanakan agar keseimbangan integritas undang-undang dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga. Persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian dilakukan dengan mensinergikan peningkatan perekonomian dan peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, perlu disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian terutama yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko perubahan ekosistem dengan dampak negatif maupun positif. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembangunan sebaiknya dilakukan sinkronisasi terkait pembangunan berwawasan sosial ekonomi dengan berwawasan lingkungan. Secara nyata, hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan luas tutupan lahan dan penerapan konsep strategi

pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas dan terjaganya komponen ekosistem alam dan kehidupan manusia.

11. Strategi 11: Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi Daerah

Salah satu upaya mengurangi pengangguran di Kabupaten Kendal adalah dengan meningkatkan investasi langsung (*direct investment*) di daerah. Investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting mengakselerasi pembangunan daerah. Namun untuk merangsang investasi di butuhkan



agenda-agenda yang jelas dan komperhensif yang secara internal dikreasikan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Agenda-agenda tersebut antara lain: merumuskan kebijakan investasi, memperbaiki peraturan dan regulasi, memperbaiki dukungan dan pelayanan

birokrasi, mengembangkan promosi daerah, mengembangkan kemitraan, mengembangkan *regional management*, mengembangkan *business networking*.

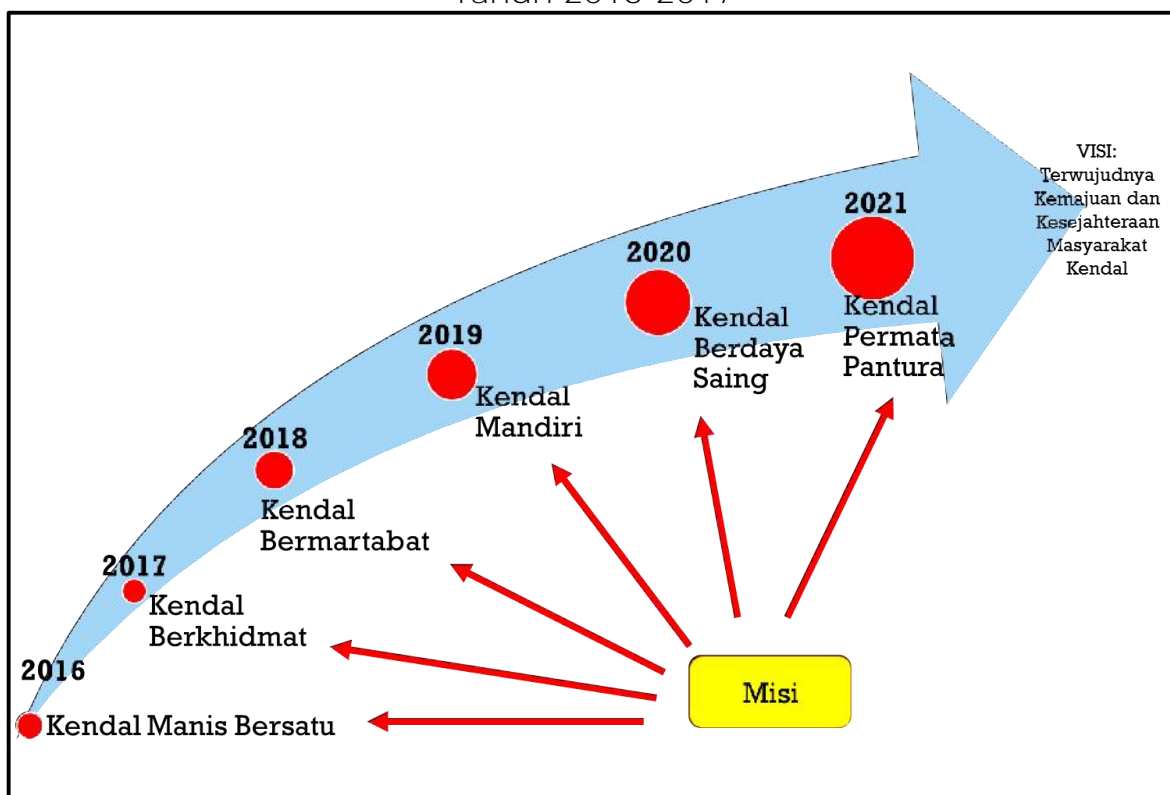
Dalam upaya menarik investasi Kabupaten Kendal telah membangun kawasan industri yang dapat memberikan kemudahan dan daya tarik investasi. Pada dasarnya kawasan industri kendal ini dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, impor da perdagangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Faktor penentu daya tarik investasi yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi, meliputi faktor kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan infrastruktur fisik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan strategi investasi daerah. Pembuatan skala prioritas dalam pembangunan menjadi langkah yang harus dilakukan untuk proyek pembangunan kawasan industri kendal agar dapat berjalan dengan baik dan efisien efektif.

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah penjabaran strategi dalam mencapai sasaran RPJMD serta jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Dengan demikian, arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam mencapai tujuan. Untuk itu, arah kebijakan harus dapat merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya. Fokus/tema pembangunan Kabupaten Kendal setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar. 6.2
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Kendal
Tahun 2016-2017



Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap

tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan perubahan RPJMD Kabupaten Kendal ini untuk tahun pertama (2016) dan kedua (2017) berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan dokumen RKPD tahun 2016 dan 2017. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal periode 2016-2021.

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2016)

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2016 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya. Pada tahun 2016 menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah tahun 2016. Tema pembangunan pada tahun 2016 adalah "KENDAL MANIS BERSATU".

Kendal manis bersatu, menitikberatkan pada konsolidasi berkelanjutan dan pembenahan internal pemerintahan Kabupaten Kendal agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik melalui beberapa upaya seperti peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan terpadu, perumusan kebijakan yang mengacu pada dokumen perencanaan, pemanfaatan teknologi informasi untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan penanggaran terpadu. Diharapkan setelah manajemen organisasi internal Kabupaten Kendal berjalan optimal dan profesional di harapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2017)

Arah kebijakan pada tahun 2017, pembangunan di Kabupaten Kendal berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2016, pada tahun 2016 pembangunan yang masih di titikberatkan pada tata kelola pemerintahan maka pada tahun 2017 pembangunan Kabupaten Kendal mulai fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2017 adalah "KENDAL BERKHIDMAT".

Infrastruktur merupakan sarana utama dalam melaksanakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi serta pengembangan daerah. Tanpa jalan dan akses penghubung, pembangunan fasilitas masyarakat dan fasilitas pemerintah sulit di realisasikan. Setelah

perbaikan tata kelola pemerintahan pada tahun. Dalam upaya Kabupaten Kendal meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur berbagai upaya dilakukan dengan peningkatan pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta penataan kawasan kumuh.

Selain infrastruktur, pelayanan publik yang prima merupakan salah satu prioritas pembangunan di tahun 2017. Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kendal harus mencakup pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang di berikan kepada mereka. Upaya yang di lakukan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima yang di dukung dengan penggunaan teknologi informasi dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sehingga APBD Kabupaten Kendal bisa tepat sasaran. Selain itu, arah kebijakan pada tahun 2017 ini juga masih melaksanakan arah kebijakan pada tahun 2016 seperti peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2018)

Arah kebijakan pada tahun 2018, pembangunan Kabupaten Kendal berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan prima yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2018 beberapa kebijakan tersebut masih akan dilanjutkan pada tahun 2018, di samping fokus pembangunan di tahun 2018 itu sendiri. Pada tahun 2018 pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pada pembangunan pemerataan infrastruktur, sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pendidikan berkualitas dan kesehatan murah dan terjangkau. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2018 adalah "KENDAL BERMARTABAT".

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan mempunyai makna yang luas, tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga harus diperlakukan

sama, guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang di milikinya secara optimal. Dalam mencapai pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan berbagai upaya dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan formal, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan kualitas pendidikan nonformal maupun informal.

Selain pendidikan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga memperhatikan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus di pandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau merupakan fokus pembangunan pada tahun 2018 ini yang di capai melalui peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan, peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembangunan lingkungan sehat.

Selain itu, arah kebijakan pada tahun 2018 ini juga melaksanakan arah kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya seperti peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur seperti peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta penataan penanganan kawasan kumuh.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2019)

Arah kebijakan pada tahun 2019, pembangunan Kabupaten Kendal berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan-kebijakan pembangunan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemerataan pembangunan infrastruktur masih akan dilanjutkan pada tahun 2019, di samping fokus pembangunan di tahun 2019 itu sendiri. Pada tahun 2019 pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, penurunan kemiskinan dan penurunan pengangguran di samping itu juga memperhatikan keterlibatan pemuda dalam pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2019 adalah "KENDAL MANDIRI".

Fundamentasi ekonomi kerakyatan merupakan langkah awal bagaimana agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki fokus garapan yang jelas dan memiliki pengaruh yang signifikan. Pengokohan fundamental ekonomi kerakyatan ditempuh melalui upaya-upaya menciptakan sentra-sentra ekonomi rakyat dan identifikasi komoditas unggulan daerah

didalamnya. Pengembangan sentra-sentra ekonomi kerakyatan di harapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang serta peningkatan kapasitas dan kelembagaan UMKM, Industri Kecil Menengah (IKM) dan industri rumahan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal. Pengembangan UMKM maupun IKM juga memperhatikan keterlibatan pemuda dengan memperbanyak jumlah wirausahawan pemuda pemula di Kabupaten Kendal dengan peningkatan kegiatan kepemudaan yang berorientasi pada peningkatan partisipasi dan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan serta juga tidak kalah penting adalah peningkatan pertumbuhan dan semangat kewirausahaan pemdua.

Penurunan kemiskinan merupakan salah satu agenda pada tahun 2019 ini dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan usaha ekonomi perdesaan, perbaikan masalah kesejahteraan sosial, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, peningkatan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana serta peningkatan kualitas KB.

Mewujudkan Kendal Mandiri melalui ekonomi kerakyatan dan penurunan kemiskinan juga perlu memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi penangguran. Peningkatan kualitas pelayanan investasi dilakukan melalui penguatan kebijakan/regulasi yang pro investasi.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019 ini juga masih melaksanakan arah kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya seperti peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan, peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengembangan lingkungan serta peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, ketersediaan air bersih dan sanitasi dan penataan penanganan kawasan kumuh.

e. Arah Kebijakan Tahun kelima (2020)

Arah kebijakan pembangunan tahun 2020, pembangunan Kabupaten Kendal berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan-kebijakan pembangunan peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi kerakyatan masih akan dilanjutkan pada tahun 2020,

di samping fokus pembangunan pada tahun 2019 itu sendiri. Pada tahun 2020 pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pada investasi yang maju, tata kelola pemerintahan yang profesional dan kondusifitas daerah yang baik. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2020 adalah "KENDAL BERDAYA SAING".

Peningkatan investasi di berbagai sektor menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga perlu di dorong. Investasi merupakan salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling prospektif saat ini di samping konsumsi dan nilai ekspor. Dengan pertumbuhan investasi yang tinggi akan mampu mendorong penyerapan tenaga kerja baru. Peningkatan kualitas pelayanan investasi di Kabupaten Kendal di harapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup signifikan dalam mengurangi penangguran yang dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan/regulasi yang pro investasi, peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi serta peningkatan dan perluasan kesempatan kerja. Dalam upaya meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Kendal perlu juga menjaga kondusifitas daerah dan perbaikan tata kelola pemerintahan agar investor yang melakukan investasi merasa nyaman. Perkembangan industri Kendal yang cukup signifikan harus juga memerhatikan aspek lingkungan jangan sampai pembangunan industri tersebut malah merusak lingkungan. Perusahaan-perusahaan maupun masyarakat perlu menjaga dan meningkatkan pemeliharaan kualitas lingkungan dengan cara pengendalian pencemaran air dan udara.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2020 ini juga masih melaksanakan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan formal, peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan, peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan kelembagaan UMKM, Industri Kecil Menengah (IKM) dan industri rumahan yang juga melibatkan pemuda dengan peningkatan pertumbuhan dan semangat kewirausahaan pemuda, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah melalui peningkatan ekspor produk unggulan daerah, pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata, serta peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, ketersediaan air bersih dan sanitasi dan penataan penanganan kawasan kumuh.

f. Arah Kebijakan Tahun Keenam (2021)

Arah kebijakan pada tahun 2021 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir kepemimpinan Bupati periode 2016-2021, pada tahun 2021 ini di harapkan semua prioritas Bupati dapat di selesaikan pada tahun ini. Pada tahun 2021 ini pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek guna "terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal". Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan pada akhir periode ini adalah "KENDAL PERMATA PANTURA" .

Kendal Permata pantura itu hanya sebagai spirit untuk berjuang agar Kendal beribadat seperti batu permata yang selalu indah dilihat dan nyaman pula dilihat. Harapannya agar Kabupaten Kendal selalu dilihat menarik atau wow. Pada akhir periode ini dicapai kondisi ekonomi masyarakat Kendal memiliki kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang baik. Selain itu, kemandirian ekonomi di Kabupaten Kendal mulai terwujud yang selaras dengan peningkatan perekonomian rakyat. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan keunggulan kompetitif daerah yang didukung oleh peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar dalam dan luar negeri serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Pada akhir periode pembangunan jangka menengah ini, daya saing Kabupaten Kendal meningkat melalui penguatan ekonomi kerakyatan sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan SDA secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten. Kondisi ini didukung oleh pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata keseluruhan wilayah termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum; pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berikut ini di sajikan keterkaitan strategi/prioritas pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal 2016-2021.

Tabel 6.2.
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Kendal 2016-2021

<u>Sasaran</u>	<u>Indikator Sasaran RPJMD</u>		<u>Strategi/ Prioritas Pembangunan</u>	<u>Kebijakan</u>	<u>Arah Kebijakan</u>					
					<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
					<u>Kendal Manis Bersatu</u>	<u>Kendal Berkhidmat</u>	<u>Kendal Bermartabat</u>	<u>Kendal Mandiri</u>	<u>Kendal Berdaya Saing</u>	<u>Kendal Permata Pantura</u>
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Perbaikan tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan terpadu						
				Perumusan kebijakan yang mengacu pada dokumen perencanaan						
Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Perbaikan tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima						
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	3	Opini BPK		Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel						
				Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan penangaran terpadu						

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan	Arah Kebijakan					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
					Kendal Manis Bersatu	Kendal Berkhidmat	Kendal Bermartabat	Kendal Mandiri	Kendal Berdaya Saing	Kendal Permata Pantura
Meningkatnya rata-rata lama sekolah	4	Rata-Rata Lama Sekolah	Pemerataan dan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan formal						
Meningkatnya harapan lama sekolah	5	Harapan Lama Sekolah		Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik						
				Peningkatan kualitas pendidikan nonformal maupun informal						
Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau	Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan						
				Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan						
				Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengembangan lingkungan sehat						
Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Daya Beli Masyarakat (PPP)	Peningkatan pendapatan masyarakat	Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang						

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan	Arah Kebijakan					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
					Kendal Manis Bersatu	Kendal Berkhidmat	Kendal Bermartabat	Kendal Mandiri	Kendal Berdaya Saing	Kendal Permata Pantura
				Peningkatan kapasitas dan kelembagaan UMKM, Industri Kecil Menengah (IKM) dan industri rumahan						
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	8	jumlah desa yang masuk kategori desa miskin	Pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka pengentasan kemiskinan	Penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)						
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	9	Indeks Gini		Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan						
				Perbaikan masalah kesejahteraan sosial						
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Pembangunan yang responsif gender	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan						
				Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga						
				Penguatan kelembagaan yang aktif dalam kesetaraan gender						

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan	Arah Kebijakan					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
					Kendal Manis Bersatu	Kendal Berkhidmat	Kendal Bermartabat	Kendal Mandiri	Kendal Berdaya Saing	Kendal Permata Pantura
Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana	11	Total Fertility Rate (TFR)		Peningkatan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana						
				Peningkatan kualitas pelayanan KB						
Meningkatnya pemberdayaan pemuda	12	Atlet berprestasi skala Provinsi dan Nasional	Peningkatan kesadaran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan kegiatan kepemudaan yang berorientasi pada peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda						
				Peningkatan Pembinaan Olah Raga						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	13	Laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan (%)	Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah	Optimalisasi potensi ekonomi daerah						
				Peningkatan ekspor produk unggulan daerah						
				Pengembangan industri pengolahan produk unggulan						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	14	Laju pertumbuhan		Peningkatan produksi hasil						

<u>Sasaran</u>	<u>Indikator Sasaran RPJMD</u>	<u>Strategi/ Prioritas Pembangunan</u>	<u>Kebijakan</u>	<u>Arah Kebijakan</u>						
				<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
				<u>Kendal Manis Bersatu</u>	<u>Kendal Berkhidmat</u>	<u>Kendal Bermartabat</u>	<u>Kendal Mandiri</u>	<u>Kendal Berdaya Saing</u>	<u>Kendal Permata Pantura</u>	
sektor pertanian dalam arti luas	ekonomi sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa (%)		pertanian							
	15 Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan (%)		Peningkatan produksi perikanan tangkap maupun budidaya							

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan	Arah Kebijakan					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
					Kendal Manis Bersatu	Kendal Berkhidmat	Kendal Bermartabat	Kendal Mandiri	Kendal Berdaya Saing	Kendal Permata Pantura
Meningkatnya ketersediaan bahan Pangan Daerah	16	Ketersediaan bahan pokok utama (padi)		Peningkatan ketersediaan cadangan pangan						
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kendal	17	Prosentasi kunjungan wisatawan		Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata						
	18	PAD sektor pariwisata		Pembangunan kelembagaan kepariwisataan						
				Pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran						
Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	19	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, ketersediaan air bersih dan sanitasi						
	20	Persentase permukiman kumuh (%)		Peningkatan penataan penangan						

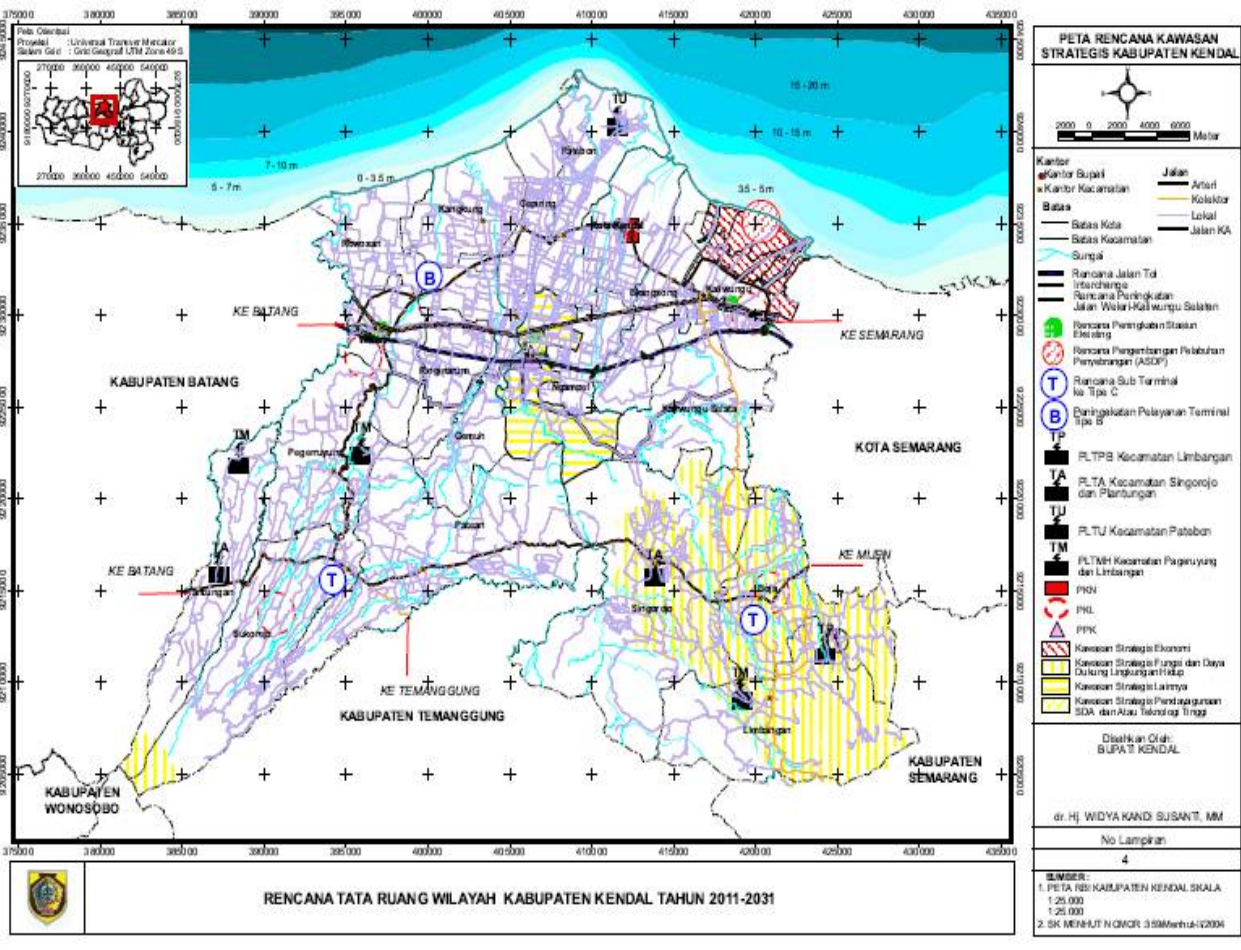
Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan	Arah Kebijakan					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
					Kendal Manis Bersatu	Kendal Berkhidmat	Kendal Bermartabat	Kendal Mandiri	Kendal Berdaya Saing	Kendal Permata Pantura
	21	Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum (%)		kawasan kumuh						
	22	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)								
Meningkatnya pemeliharaan kualitas lingkungan hidup	23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan Hidup	Pengendalian pencemaran air						
				Pengendalian pencemaran udara						
Meningkatnya investasi daerah	24	Nilai Investasi (triliyun rupiah)	Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah dan penciptaan lapangan kerja	Penguatan kebijakan/regulasi yang pro investasi						
				Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi						
				Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja						

6.3. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu dengan memerhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap sektor. Sebuah *misleading* dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memerhatikan aspek keruangan (*spasial*) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Dengan memerhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah Kabupaten Kendal akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu.

Gambar 6.3
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kendal



Sumber: Perda No. 20 tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal perlu menetapkan kawasan-kawasan prioritas (*priority region*) dalam menjawab tantangan isu dan permasalahan yang berkembang sebagai fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini

dilakukan karena peng-kluster-an wilayah mempunyai pengaruh penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan Kabupaten Kendal. Penetapan kawasan ini disusun dalam rumusan Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kawasan Strategis Ekonomi;
- b. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup; dan
- c. Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi.

Perwujudan kawasan strategis ekonomi mencakup kegiatan:

1. penyusunan studi pengembangan kawasan strategis ekonomi;
2. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan strategis ekonomi;
3. penyusunan studi penyiapan sarana perumahan pendukung kawasan industri;
4. pembangunan kawasan industri Kaliwungu;
5. pembentukan badan pengelola kawasan industri;
6. pembentukan badan pengelola kawasan strategis ekonomi; dan
7. pembangunan kawasan strategis ekonomi

Perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup mencakup kegiatan:

1. penyusunan rencana rinci kawasan lindung dan rawan bencana; dan
2. pengelolaan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Ungaran - Kendal

Perwujudan kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi mencakup kegiatan:

1. penetapan kawasan panas bumi Gunung Ungaran- **Kecamatan Limbangan**;
2. penyusunan rencana rinci kawasan panas bumi Gunung Ungaran- **Kecamatan Limbangan**; dan
3. pemanfaatan energi panas bumi Gunung Ungaran- **Kecamatan Limbangan**.

6.4. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah arah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan

RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program Bupati terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Program prioritas Bupati dirumuskan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun janji kampanye Bupati Kendal Tahun 2016-2021 yaitu:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta upaya penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, melalui program:
 1. Peningkatan peran aparatur daerah yang amanah dan profesional melalui peningkatan pembinaan kepegawaian, pendidikan kedinasan, sistem informasi kepegawaian, pemberian *reward & punishment*.
 2. Peningkatan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien melalui penguatan SOTK, sistem perencanaan dan penanggaran partisipatif, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah, sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah, penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.
 3. Peningkatan PAD Kendal dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta penguatan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah.
 4. Peningkatan pelayanan masyarakat, kualitas perda dan sistem pelayanan perijinan dengan optimalisasi penyusunan perda, penegakkan perda, sistem perijinan daerah terpadu, gratis pembuatan KTP/KK/Akte kelahiran.
 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, pelaksanaan dan pengawasan melalui akses mudah masyarakat terhadap informasi kegiatan, kebijakan pemerintahan, informasi layanan masyarakat terpadu, dialog, curah pendapat,

- pelibatan masyarakat secara aktif dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik.
6. Mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan mengimplementasikan amanat Undang-Undang keterbukaan informasi publik beserta aturan turunannya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.
- b. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan hidup aparatur pemerintah daerah maupun aparat di tingkat Desa (perangkat desa), melalui program.
1. Peningkatan kinerja dan kesejahteraan hidup bagi aparatur pemerintahan daerah melalui pemberian tunjangan kinerja PNS (insentif, lauk pauk, beras dll).
 2. Pemberian tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa, BPD serta pemberian insentif bagi ketua RT/RW.
 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor layanan publik terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti sektor pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan.
- c. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan unggul dalam daya saing kompetisi dan inovasi serta berakhlak mulia berlandaskan iman dan taqwa kepada Allah SWT dengan meningkatkan mutu pendidikan dan keberagaman, melalui program:
1. Peningkatan penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok keluarga miskin, tersedianya lapangan pekerjaan, percepatan pembangunan terisolasi dan perbatasan.
 2. Peningkatan sarana pendidikan, pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, peningkatan mutu pendidikan karakter, peningkatan manajemen berbasis sekolah dan desentralisasi pendidikan.
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan layanan kesehatan yang murah bagi masyarakat prasejahtera dan peningkatan pembangunan fasilitas umum masyarakat di sektor kesehatan, melalui program:
1. Meningkatkan layanan kesehatan berkualitas melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (polindes, puskesmas, RSUD)
 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, pengawasan obat dan makanan untuk memberikan layanan kesehatan murah bagi keluarga prasejahtera.
 3. Peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat serta peningkatan program gizi seimbang bagi masyarakat.

4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penyediaan sarana prasarana memadai terhadap alat penunjang kesehatan.
 5. Peningkatan fasilitas umum masyarakat penunjang kesehatan masyarakat.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik moril, materiil maupun siritual berlandaskan pendidikan dan pembinaan keagamaan, melalui program:
1. Peningkatan sarana prasarana tempat ibadah, majelis taklim dll.
 2. Peningkatan sarana prasarana tempat ibadah, majelis taklim dll.
 3. Pemberian dana insentif bagi guru madin, MI, MTs, MA, pondok pesantren.
- f. Pembinaan dan pemberdayaan pemuda berbasis keagamaan, olahraga, ekonomi dan seni budaya, untuk meningkatkan rasa optimisme, kepercayaan diri tinggi, kemampuan berkarya dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, melalui program:
1. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan berkelanjutan serta peningkatan sarana prasarana penunjang pemberdayaan pemuda, karang taruna komunitas pemuda/pemudi, remaja masjid/mushola, komunitas olahraga, komunitas seni budaya dll.
 2. Peningkatan kreatifitas dan keterampilan pemuda, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan masyarakat dalam bingkai NKRI.
 3. Peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi.
- g. Memberdayakan ekonomi kerakyatan dengan pembinaan berkelanjutan terhadap UKM/UMKM serta industri rumah tangga maupun pengembangan koperasi dan pasar tradisional/modern agar menghasilkan karya-karya yang mempunyai ciri kas Kabupaten Kendal dan berdaya saing dalam kompetisi di pasar global, Melalui program:
1. Peningkatan kualitas SDM dan manajemen UKM/UMKM dan koperasi.
 2. Peningkatan akses UKM/UMKM dan koperasi terhadap sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi informasi dan pasar.
 3. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kerjasama koperasi, sistem pengelolaan pasar tradisional/pasar modern yang integral.
 4. Mendorong kemudahan penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan, pegadang kecil dan sebagainya tanpa membebani.
 5. Mendorong peningkatan permodalan lembaga keuangan mikro untuk kredit dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

- h. Mengembangkan potensi wilayah pantai dan potensi wilayah pegunungan untuk mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju dengan memperhatikan secara serius faktor kerentanan terhadap bencana, faktor kearifan lokal dan faktor pengembangan ekonomi lokal di wilayah pantai maupun wilayah pegunungan, melalui program:
1. Program pelestarian kawasan hutan di sekitar gunung-gunung yang ada di wilayah Kabupaten Kendal.
 2. Program pengembangan kawasan pesisir.
 3. Membuka kemudahan akses transportasi dan komunikasi yang menghubungkan wilayah pegunungan dengan wilayah pantai agar potensi yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin demi kemajuan Kabupaten Kendal.
 4. Menerbitkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dalam rangka mengembangkan potensi pantai dan pegunungan.
- i. Mewujudkan Kabupaten Kendal dapat berperan aktif dalam pergaulan antar daerah dan nasional melalui pengembangan seni dan budaya lokal sebagai aset pariwisata serta lestarinya seni dan budaya lokal sebagai ikon budaya Kabupaten Kendal dan meningkatkan prestasi atlet-atlet dari cabang-cabang olahraga yang berpotensi berprestasi di kejuaraan tingkat daerah maupun nasional, melalui program:
1. Melestarikan seni budaya lokal melalui festival seni budaya.
 2. Memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok seni budaya.
 3. Meningkatkan sarana-prasarana olahraga.
 4. Memberikan *reward* kepada atlet-atlet berprestasi di level daerah maupun nasional.
- j. Mewujudkan Kabupaten Kendal hijau berseri melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup secara efektif dan efisien serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam bingkai semangat *Kendal Beribadat*, melalui program:
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan hidup melalui kemitraan.
 2. Peningkatan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
 3. Peningkatan pengamanan dan rehabilitasi daerah aliran sungai termasuk antisipasi bahaya banjir dan keperluan irigasi pertanian.
 4. Peningkatan rehabilitasi lahan dan konservasi sumberdaya alam.

5. Peningkatan perlindungan terhadap flora dan fauna sebagai keanekaragaman hayati yang menjadi aset bangsa dan negara.
 6. Peningkatan layanan air bersih untuk rumah tangga, pemukiman dan industri.
 7. Peningkatan layanan jaringan irigasi sampai tingkat usaha pertanian.
 8. Peningkatan jalan dan jembatan pada kawasan perbatasan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan sentra-sentra produksi.
 9. Peningkatan kualitas permukiman dan perumahan.
 10. Peningkatan pengelolaan sampah dan drainase air limbah.
 11. Peningkatan jalan umum, trotoar, taman, penerangan dan arena bermain dan olahraga bagi masyarakat.
 12. Peningkatan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan raya dan transportasi umum.
- k. Melakukan upaya secara maksimal, untuk mendorong masuknya investor ke Kabupaten Kendal dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempermudah perizinan dan insentif pembebasan dan pengurangan pajak serta restribusi sesuai peraturan perundang-undangan, melalui program:
1. Peningkatan kerjasama pemerintah dengan lembaga-lembaga penelitian untuk pengembangan sumberdaya dalam daerah, potensi wisata daerah, potensi lapangan kerja baru, potensi energi terbarukan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan sumberdaya mineral.
 2. Mengembangkan sistem informasi dan produktivitas tenaga kerja dengan pembinaan dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, daya saing dan hubungan industrial.
 3. Peningkatan sistem perijinan investasi yang mendukung promosi daerah, peningkatan layanan informasi potensi Kabupaten Kendal yang massif baik dalam negeri maupun luar negeri.

Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi atau prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait. Program perangkat daerah di masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kendal.

Untuk mendapatkan rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing-masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan.

Rumusan arah kebijakan pembangunan daerah menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Arah kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dengan berbagai faktor internal, eksternal dan dinamika politik yang sedang terjadi pelaksanaan pembangunan daerah mengalami gejolak. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi hasil capaian pembangunan daerah. Menyikapi hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dengan kondisi dan tantangan pembangunan daerah Kabupaten Kendal. Dengan demikian perlu adanya penajaman terhadap arah kebijakan dan program prioritas dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan Arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Kendal untuk periode 2016-2021.

Merujuk pernyataan di atas, arah kebijakan dan program prioritas merupakan ujung dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah. Mengingat RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017 melalui RKPD maka perlu adanya urgensi kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan terhadap kondisi daerah sekarang ini. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.3.
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021
Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Bupati

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD	Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (<i>outcome</i>)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD	
<u>Misi I: Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN</u>									
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Perbaikan tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	48	80	Inspektorat
					Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data dan informasi	6	60	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
					Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah MoU kerjasama pembangunan daerah	1	1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
					Program Perencanaan Sosial Budaya	Prosentase pencapaian sasaran bidang sosial budaya	100	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
					Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Prosentase pencapaian sasaran bidang ekonomi	100	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD	Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (outcome)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	Prosentase pencapaian sasaran bidang fisik dan prasarana	100	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
				Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah	Jumlah data teknis perencanaan tata ruang wilayah	1	1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
				Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah konsep Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2	13	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
				Program Perencanaan Wilayah Kota-Kota menengah dan Besar	Jumlah konsep Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	2	5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
				Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD dan RKPD	100	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (outcome)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
				Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan penanggaran terpadu	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu	Belum	Sudah	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat	2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah pelayanan yang indeks IKMnya Baik (%)	80	100	Sekreariat Daerah
					Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat / BinteK yang difasilitasi BKD Kab. Kendal pada tahun berjalan (%)	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
					Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik (%)	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
					Program Penataan Administrasi Kependudukan	Layanan Administrasi kependudukan	74	98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program pengadaan,	Cakupan sarana prasarana	68	78	Dinas Kesehatan

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (<i>outcome</i>)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
					peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	puskesmas			
					Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jenis Layanan Berbasis Teknologi Informasi	7	19	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase struktur jabatan yang terisi	87	95	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	3.	Opini BPK		Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase PAD terhadap total pendapatan	11	23	Badan Keuangan Daerah
					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	1	3	Inspektorat

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD	Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (outcome)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD	
<u>Misi II: Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia</u>									
Meningkatnya rata-rata lama sekolah	4	Rata-Rata Lama Sekolah	Pemerataan dan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan formal	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,09	0,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0,63	0,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya harapan lama sekolah	5	Harapan Lama Sekolah	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik yang memiliki sertifikasi	51,50	54,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Peningkatan kualitas pendidikan nonformal maupun informal	Program pendidikan non formal	Angka kelulusan pendidikan non formal	81,45
Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang	Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase fasyankes yang menerapkan integrasi sistem	25	100	Dinas Kesehatan

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (outcome)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
			murah dan terjangkau			informasi kesehatan			
				Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	148,8	110	Dinas Kesehatan
						Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	10,35	8	Dinas Kesehatan
					Program perbaikan gizi masyarakat	Prevelensi balita gizi buruk (%)	0,05	0,03	Dinas Kesehatan
					Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan penduduk memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan (%)	60	90	Dinas Kesehatan
					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	prosentase orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	100	100	Dinas Kesehatan
				Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengembangan lingkungan sehat	Program pengembangan lingkungan sehat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (%)	77	90	Dinas Kesehatan
Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Daya Beli Masyarakat (PPP)	Peningkatan pendapatan masyarakat	Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang	Program peningkatan efisiensi perdagangan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses	50	95	Dinas Perdagangan

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (outcome)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
					dalam negeri	barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah (%)			
				Peningkatan kapasitas dan kelembagaan UMKM, Industri Kecil Menengah (IKM) dan industri rumahan	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Jumlah wirausaha baru mikro (unit)	31.747	32.337	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
					Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil (unit)	1.285	1.380	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase koperasi sehat	70	90	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
<u>Misi III: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan</u>									
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	8	jumlah desa yang masuk kategori desa miskin	Pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Jumlah desa tertinggal	NA	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (<i>outcome</i>)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
					Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Jumlah BUMDes yang terbentuk	0	266	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Perbaikan masalah kesejahteraan sosial	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Persentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang tertangani (%/tahun)	n.a	20	Dinas Sosial
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	10.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Pembangunan yang responsif gender	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	49,91	49,91	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase partisipasi perempuan di lembaga Legislatif (%)	22,22	22,22	
					Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Rasio KDRT yang tertangani	0,4	0,4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (<i>outcome</i>)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
									dan Perlindungan Anak
				Penguatan kelembagaan yang aktif dalam kesetaraan gender	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif (%)	6,45	77,7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana	11	Total Fertillity Rate (TFR)		Peningkatan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif (%)	80,8	82	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Peningkatan kualitas pelayanan KB	Program pelayanan kontrasepsi	Rasio akseptor KB (baru) (%)	93	95,5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (<i>outcome</i>)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
									Perlindungan Anak
<u>Misi IV: Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme</u>									
Meningkatnya pemberdayaan pemuda	12	Jumlah Atlet berprestasi skala Provinsi dan Nasional	Peningkatan Kesedaran Pemuda dalam Pembangunan	Peningkatan kegiatan kepemudaan yang berorientasi pada peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prestasi pemuda kendal di lingkup provinsi maupun nasional	60	60	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	29	33	
<u>Misi V: Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal</u>									
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	13	Laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan (%)	Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah	Optimalisasi potensi ekonomi daerah	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang (%)	0,25	4,62	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Prosentase Lokasi PKL yang tertata	0	10	Dinas Perdagangan
					Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang	75	95	Dinas Perdagangan

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (outcome)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
						kebutuhan pokok dan barang penting di daerah (%)			
				Peningkatan ekspor produk unggulan daerah	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Perkembangan nilai ekspor (%)	3	5	Dinas Perdagangan
				Pengembangan industri pengolahan produk unggulan	Program penataan struktur industri	Persentase industry Kecil dan Menengah yang telah memenuhi standar kelayakan produksi (%)	0,33	3,3	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Misi VI : Memperkuat Ketahanan Pangan, Mengembangkan Potensi Pertanian, Perikanan, dan Sumber Daya Alam Lainnya									
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	14	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan (%)		Peningkatan produksi hasil pertanian	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produksi pertanian pangan utama:			Dinas Pertanian dan Pangan
						-Padi (ton)	260,888	1.432.243	
						-Jagung (ton)	225.505	1.279.057	
						-Kedelai (ton)	1.340	8.077	
						Produksi Tanaman Perkebunan			
						- Tebu (Kwintal)	13.155	84.323	
- Tembakau (Ton)	3.860,37	11.376							

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD	Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (outcome)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
					- Kopi (Ton)	1.300,07	7.043,7	
					- Cengkeh (Ton)	158,09	1.081,5	
					- Karet (Ton)	36,26	307,43	
					- Kelapa (Ton)	598,76	2.831,9 2	
					- Kakau (Ton)	198,54	855,93	
					Produksi Tanaman Hortikultura			
					- Bawang Merah (Kwintal)	320.936	1.634.6 55	
					- Cabe (Kwintal)	40.984	267.682	
				Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan	Populasi komoditas peternakan utama			Dinas Pertanian dan Pangan
					-Sapi potong (ekor)	20,253	21.106	
					-Kambing (ekor)	37.776	38.696	
					-Domba (ekor)	30.842	31.354	
					-Ayam ras pedaging (ekor)	8.587.800	50.031.800	
					-Ayam ras petelur (ekor)	3.799.915	4.100.000	

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (<i>outcome</i>)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) (%)	Na	100,10	
	15	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan (%)		Peningkatan produksi perikanan tangkap maupun budidaya	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (kg)	1.858.904	2.096.288	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (kg)	21.967.096	155.652.231	Dinas Kelautan dan Perikanan
	16	Ketersediaan bahan pokok utama (beras)		Peningkatan ketersediaan cadangan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan bahan pokok utama/beras (%)	171,68	177	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya ketersediaan bahan Pangan Daerah	16	Ketersediaan bahan pokok utama (beras)	Peningkatan ketersediaan cadangan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan Energi per kapita	158	185	Dinas Pertanian dan Pangan	
					Ketersediaan Protein per kapita	117	117	Dinas Pertanian dan Pangan	
Misi VII : Mengembangkan Potensi Wisata dan Melestarikan Seni Budaya Lokal serta Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama									
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke	17	Prosentasi kunjungan wisatawan		Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah obyek wisata unggulan	9	10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (<i>outcome</i>)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
Kabupaten Kendal	18	PAD sektor pariwisata		Pembangunan kelembagaan kepariwisataan	Program pengembangan kemitraan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	0,45	0,71	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase obyek wisata yang dipromosikan (%)	75	100	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Misi VIII: Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup									
Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	19	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, ketersediaan air bersih dan sanitasi Pengendalian pencemaran air	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah jalan / jembatan yang terbangun	0	8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	37,1	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (<i>outcome</i>)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
					Program lingkungan sehat perumahan	Persentase kawasan kumuh (%)	69,9	0	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
	20	Persentase permukiman kumuh (%)			Program Pengembangan Perumahan	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0	100	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
					Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Prosentase capaian peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100	100	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
	21	Cakupan ketersediaan rumah layak huni			Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95,96	98,01	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
					Program pemberdayaan komunitas perumahan	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan	0	47,90	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (<i>outcome</i>)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
	22	Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum (%)			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	78	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	23	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	78	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)			Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	45	60	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya pemeliharaan kualitas lingkungan hidup	24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan Hidup	Pengendalian pencemaran air Pengendalian pencemaran udara	Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Jumlah sumber mata air yang tertangani	0	8	Dinas Lingkungan Hidup
					Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	Luas lahan kritis yang tertangani (Ha)	0	20	Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (<i>outcome</i>)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
					Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Taman dan RTH perkotaan yang tertanani	26	34	Dinas Lingkungan Hidup
					Program pengelolaan ruang terbuka hijau	RTHK Perkotaan Publik (lokasi)	26	34	Dinas Lingkungan Hidup
				Pengendalian pencemaran udara	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase Volume timbunan sampah yang tertangani	8,31	13,06	Dinas Lingkungan Hidup

Misi IX: Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja

Meningkatnya investasi daerah	25	Nilai Investasi (triliyun rupiah)	Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah dan penciptaan lapangan kerja	Penguatan kebijakan/regulasi yang pro investasi Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	Program Peningkatann promosi dan kerjasam investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	146	432	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Prosentasi Peserta Pelatihan terhadap seluruh pendaftar	100	93	Dinas Tenaga Kerja
					Program peningkatan kesempatan kerja	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	71,87	78	Dinas Tenaga Kerja

Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD		Strategi/ Prioritas Pembangunan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (<i>outcome</i>)	Data Awal	Target 2021	Nama OPD
					Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Prosentasi kasus penyelesaian hubungan industrial	96,36	90	Dinas Tenaga Kerja
				Peningkatan Kondusivitas wilayah	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase angka kriminalitas yang tertangani	100	100	Kesbangpol

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Kendal berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan dengan berbagai program pada Tahun 2016 dan 2017 yang terlihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		OPD
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)		
KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH							2.090.989.000		2.140.389.902,00		2.239.420.000,00		2.392.019.000,00		2.459.326.000,00				
BELANJA																			
Belanja Tidak Langsung							1.268.646.000		1.354.967.000,00		1.478.970.000,00		1.675.105.000,00		1.749.569.000,00				
Prioritas I									1.328.467.000,00		1.452.470.000,00		1.603.605.000,00		1.723.069.000,00				
Prioritas III									26.500.000,00		26.500.000,00		71.500.000,00		26.500.000,00				
Belanja Hibah									25.000.000,00		25.000.000,00		70.000.000,00		25.000.000,00				
Belanja Bansos									1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00				
Belanja Langsung																			
Prioritas II							822.343.000,00		785.422.902,00		760.450.000,00		716.914.000,00		709.757.000,00				
1	Urusan Wajib																		
1.01	Urusan Pendidikan																		
1.01.1.01.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	21,00	2.559.240,00	21,00	2.559.240,00	21,00	2.815.164,00	21,00	2.674.405,80	21,00	2.540.685,51	100,00	13.148.735,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.1.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100	100,00	2.800.000,00	100,00	3.175.000,00	100,00	2.800.000,00	100,00	2.660.000,00	100,00	2.527.000,00	100,00	13.962.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.1.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	0,00	1.400.000,00	0,00	-	0,00	1.400.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.263.500,00	100,00	5.393.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.1.01.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100	100	100,00	402.500,00	100,00	-	100,00	402.500,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	1.805.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.1.01.01.06	Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	6	6	6,00	242.000,00	6,00	70.000,00	6,00	72.000,00	6,00	68.400,00	6,00	75.000,00	36,00	527.400,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.01.1.01.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	1.869.000,00	87,50	1.441.580,00	87,75	1.926.663,20	88,00	1.676.333,68	88,25	1.801.946,65	88,00	8.715.523,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.15	Program pendidikan anak usia dini	APK PAUD	Prosen		43,84	64,00	565.000,00	63,00	490.000,00	64,00	565.000,00	65,00	510.000,00	66,00	510.000,00	53,00	2.640.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.16	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun						125.390.780,53		136.386.820,32		142.192.878,33		163.521.810,07		147.169.629,07		714.661.918,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	Prosen	0,09	0,09	0,08		0,07		0,06		0,04		0,02		0,02		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	Prosen	0,69	0,63	0,59		0,47		0,35		0,23		0,10		0,10		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.18	Program pendidikan non formal	Angka kelulusan pendidikan non formal	Prosen		81,45	88,51	925.000,00	90,53	982.150,00	91,24	1.347.000,00	91,60	1.745.000,00	92,00	1.745.000,00	84,00	6.744.150,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.20	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Presentase pendidik yang memiliki sertifikasi	Prosen		51,50	52,75	9.085.000,00	54,30	10.000.000,00	55,52	9.670.000,00	56,66	10.637.000,00	57,55	9.573.300,00	54,00	48.965.300,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.22	Program manajemen pelayanan pendidikan	prosentase ketersediaan data kependidikan	prosen			100,00	11.250.000,00	100,00	12.500.000,00	100,00	12.912.500,00	100,00	13.558.125,00	100,00	12.202.312,50	100,00	62.422.937,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	Urusan Kesehatan																	
1.02.1.02.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100,00	968.990,00	100,00	884.000,00	100,00	313.100,21	100,00	149.805,10	100,00	176.943,09		2.492.838,40	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen			0,00	1.200.000,00	0,00	625.000,00	0,00	675.221,16	0,00	323.064,54	0,00	381.589,40		3.204.875,10	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen		100	100,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	14.231,83	0,00	6.809,32	0,00	8.042,87		114.084,02	Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.02.1.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen			0,00	645.600,00	0,00	958.112,40	0,00	79.065,71	0,00	37.829,57	0,00	44.682,60		1.765.290,28	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan			0,00	130.000,00	0,00	150.000,00	0,00	55.346,00	0,00	26.480,70	0,00	31.277,82		393.104,52	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	446.510,00	87,00	476.600,00	87,25	119.705,48	87,25	57.273,97	88,00	67.649,46		1.167.738,91	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.15	Program obat dan perbekalan kesehatan	prosentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	Puskesmas			96,00	9.500.000,00	97,00	1.600.000,00	98,00	1.700.000,00	99,00	1.800.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	16.600.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.16	Program upaya kesehatan masyarakat	prosentase puskesmas terakreditasi	Prosen			70,00	10.000.000,00	100,00	5.769.798,00	100,00	5.579.394,67	100,00	6.137.334,13	100,00	5.934.802,11	30,00	33.421.328,90	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.17	Program pengawasan obat dan makanan	Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM / P-IRT)	Prosen			65,00	200.000,00	70,00	395.562,00	75,00	110.691,99	100,00	54.474,58	90,00	64.342,94	90,00	825.071,51	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.19	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	prosentase desa siaga aktif minimal madya	Prosen			58,00	962.600,00	60,00	970.562,00	62,00	938.533,45	100,00	907.561,85	70,00	877.612,31	70,00	4.656.869,61	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.20	Program perbaikan gizi masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Prosen			0,03	1.606.800,00	0,03	775.000,00	0,03	605.010,81	85,00	665.511,89	0,02	683.822,50	0,02	4.336.145,20	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.21	Program pengembangan lingkungan sehat	prosentase desa melaksanakan STBM				20,00	1.977.600,00	40,00	1.225.562,00	60,00	1.185.118,45	75,00	1.303.630,30	100,00	1.260.610,50		6.952.521,25	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	prosentase orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	%			100,00	1.608.875,00	100,00	1.726.124,00	100,00	1.669.161,91	100,00	1.836.078,10	100,00	1.775.487,52	100,00	8.615.726,53	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.23	Program standarisasi pelayanan kesehatan	prosentase fasyankes yang menerapkan integrasi sistem informasi kesehatan				25,00	455.200,00	40,00	500.000,00	80,00	126.505,13	116,00	204.279,68	100,00	500.000,00	100,00	1.785.984,81	Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.02.1.02.01.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan penduduk memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	orang			70,00	15.000.000,00	75,00	9.000.000,00	80,00	10.915.564,80	85,00	10.664.501,13	90,00	11.000.000,00	90,00	56.580.065,93	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan sarana prasarana puskesmas	Puskesmas			68,00	16.000.000,00	70,00	5.000.000,00	72,00	5.500.000,00	75,00	6.000.000,00	78,00	6.500.000,00	78,00	39.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.26	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah RS pemerintah yang dibangun	buah			0,00	16.754.000,00	0,00	9.977.211,00	1,00	4.743.942,55	1,00	4.539.548,55	1,00	30.000.000,00	1,00	66.014.702,10	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	prosentase warganegara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan	Prosen			100,00	380.000,00	100,00	285.562,00	100,00	14.231,83	100,00	6.809,32	100,00	45.000,00	100,00	731.603,15	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH			122,90	1.780.522,00	120,00	1.800.000,00	118,00	893.442,51	116,00	427.474,15	110,00	2.825.000,00	110,00	7.726.438,66	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	/1000 KH			8,89		8,75		8,50		8,20		8,00		8,00		
1.02.1.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Prosentase Pelayanan terhadap gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	Prosen			100	14.460.370,00	100	10.613.614,00	100	15.000.000,00	100	10.000.000,00	100	7.500.000,00	100	57.573.984,00	RSUD dr Soewondo
1.02.1.02.02.33	Program peningkatan kualitas pelayanan BLUD	Prosentase peningkatan pelayanan Blud	Prosen			100,00	94.541.837,48	100,00	97.300.000,00	100	120.000.000,00	100	132.000.000,00	100	145.200.000,00	100	589.041.837,48	RSUD dr Soewondo

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.03	Usuran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1.03.1.03.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100,00	1.257.150,00	100,00	1.465.610,00	100,00	1.612.171,00	100,00	1.531.562,45	100,00	1.378.406,21	100,00	7.244.899,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100		100,00	325.000,00	100,00	382.500,00	100,00	290.750,00	100,00	276.212,50	100,00	351.807,50	100,00	1.626.270,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100,00	150.000,00	100,00	112.500,00	100,00	123.750,00	100,00	117.562,50	100,00	219.600,00	100,00	723.412,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	12		12,00	309.000,00	12,00	139.700,00	12,00	135.089,90	12,00	148.598,89	12,00	133.739,00	60,00	866.127,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100		100,00	1.150.000,00	100,00	410.000,00	100,00	352.500,00	100,00	334.875,00	100,00	413.950,00	100,00	2.661.325,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	1.160.630,00	87,00	1.280.000,00	87,25	1.152.000,00	87,25	1.094.400,00	88,00	984.960,00	100,00	5.671.990,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Jalan dan Jembatan yang terbangun	Paket			0,00	10.219.311,08	0,00	-	2,00	15.750.000,00	3,00	25.850.000,00	2,00	16.550.000,00	8,00	68.369.311,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	prosentase saluran drainase/gorong-gorong berkondisi baik	prosen	82		84,00	6.426.770,00	88,00	3.959.832,50	91,00	3.829.158,03	94,00	4.212.073,83	98,00	3.790.866,45	98,00	22.218.700,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	prosentase Turap/Talud/Bronjong yang terbangun	prosen	25		30,00	5.719.870,00	48,00	4.485.886,50	68,00	4.337.852,25	88,00	4.771.637,47	99,00	4.294.473,72	99,00	23.609.719,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.03.1.03.01.18	Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan	prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	prosen	70		70,00	105.000.000,00	80,00	75.000.000,00	88,00	75.000.000,00	94,00	81.528.125,98	100,00	60.000.000,00	100,00	396.528.125,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.20	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Jumlah Dokumen inspeksi kondisi jalan	Dok	2		2,00	125.000,00	2,00	125.000,00	2,00	220.000,00	2,00	240.000,00	2,00	265.000,00	10,00	975.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Jumlah jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Kegiatan	0		1,00	50.000,00	1,00	60.000,00	1,00	110.000,00	1,00	121.000,00	1,00	133.100,00	5,00	474.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Dokumen data base jalan yang up to date	Dok	5		2,00	497.350,00	0,00	500.000,00	4,00	483.500,00	4,00	531.850,00	4,00	478.665,00	16,00	2.491.365,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	prosen	70		75,00	800.000,00	80,00	824.000,00	85,00	796.808,00	1	876.488,80	1	788.839,92	95,00	4.086.136,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan jasa konstruksi	prosentase pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi	prosen			100,00	700.000,00	100,00	-	100,00	1.100.000,00	100,00	1.135.000,00	100,00	1.050.000,00	0,00	3.985.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data dan informasi	prosen					100,00	105.000,00	100,00	375.000,00	100,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	1.180.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.24	Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Prosentase Daerah irigasi berfungsi baik	prosen	42		50,00	10.000.000,00	55,00	10.447.200,00	60,00	10.102.442,40	65,00	11.112.686,64	70,00	8.334.514,98	100,00	49.996.844,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.25	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	prosentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	prosen	60		65,00	2.303.200,00	70,00	2.150.000,00	75,00	2.079.050,00	80,00	2.286.955,00	85,00	2.058.259,50	85,00	10.877.464,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.03.1.03.01.26	Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Prosentase kegiatan konservasi	Prosen	16		43,66	150.000,00	45,00	400.000,00	47,5	386.800,00	49,08	374.035,60	54,5	336.632,04	54,5	1.647.467,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	prosen	79		83,00	8.000.000,00	89,00	6.300.000,00	100,00	6.300.000,00	100,00	6.930.000,00	100,00	3.465.000,00	100,00	30.995.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Proporsi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Prosen	78		76,83		70,91		64,99		55,00		50,00		50,00	-	
1.03.1.03.01.28	Program pengendalian banjir	Prosentase menurunnya luasan genangan di daerah rawan banjir	prosen	83		0,05	2.555.000,00	0,10	1.755.490,00	15,00	1.697.558,83	20,00	1.867.314,71	25,00	1.680.583,24	25,00	1.848.641,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.29	Program peningkatan infrastruktur perdesaan/perkotaan	prosentase permukiman yang dilengkapi prasarana permukiman berkualitas		3		10,00	2.949.700,00	15,00	3.255.000,00	20,00	3.147.585,00	25,00	3.462.343,50	30,00	3.116.109,15	30,00	15.930.737,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.31	Program peningkatan sarana dan prasarana umum	prosentase ketersediaan sarana prasarana umum	prosen	5		10	4.930.000,00	15	2.700.000,00	20	3.000.000,00	25	3.300.000,00	30	3.500.000,00	30	13.930.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.34	Program pemanfaatan ruang	prosentase berkurangnya simpangan peruntukan ruang	Prosen	15		13,00	869.600,00	10,00	400.000,00	8,00	775.000,00	6,00	775.000,00	4,00	800.000,00	4,00	3.619.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.35	Program pengendalian pemanfaatan ruang	prosentase berkurangnya simpangan peruntukan ruang	prosen	15		13,00	75.000,00	10,00	50.000,00	8,00	48.350,00	6,00	53.185,00	4,00	47.866,50	4,00	274.401,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.3.01.01.33	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Perencanaan Tata ruang	-	-	-	1,00	650.000,00	37,86	800.000,00	56,72	1.500.000,00	69,42	1.400.000,00	95,00	1.260.000,00	1,00	5.610.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
1.04.1.04.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	12,00	361.300,00	12,00	468.938,00	12,00	453.463,05	12,00	430.789,89	12,00	387.710,90	100,00	2.102.201,84	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	bln	12	12	12,00	150.200,00	12,00	331.000,00	12,00	320.077,00	12,00	304.073,15	12,00	273.665,84	12,00	1.379.015,99	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	12,00	50.000,00	12,00	20.250,00	12,00	50.000,00	12,00	52.000,00	12,00	46.800,00	12,00	219.050,00	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.05	Program peningkatan kapasitas SDM dalam bidang perumahan rakyat dan permukiman	peningkatan kapasitas SDM dalam bidang perumahan rakyat dan permukiman	bln	12	12	12,00	69.800,00	12,00	40.000,00	12,00	38.680,00	12,00	42.548,00	12,00	38.293,20	12,00	229.321,20	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	bln	12	12	12,00	148.000,00	12,00	40.000,00	12,00	38.680,00	12,00	36.746,00	12,00	33.071,40	12,00	296.497,40	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	330.900,00	87,00	374.000,00	87,25	361.658,00	87,25	343.575,10	88,00	309.217,59	12,00	1.719.350,69	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.15	Program pengembangan perumahan	cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	95,68	95,96	97,19	25.000.000,00	97,61	10.155.000,00	97,19	10.155.000,00	97,61	10.155.000,00	98,01	5.077.500,00	98,01	60.542.500,00	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	NA	0	25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.16	Program lingkungan sehat perumahan	prosentase kawasan permukiman kumuh	%	70,18	69,9	56,75	600.000,00	20,95	5.410.000,00	0,00	5.231.470,00	0,00	5.754.617,00	0,00	5.179.155,30	0,00	22.175.242,30	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.04.1.04.01.17	Program pemberdayaan komunitas perumahan	prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan	%	0	0,69	19,93	700.000,00	26,92	700.000,00	33,92	676.900,00	40,91	744.590,00	47,90	670.131,00	3.491.621,00	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman	
1.04.1.04.01.18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	cakupan perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial	unit	0	0	6,00	93.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	93.800,00	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman	
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																	
1.05.1.05.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100,00	697.989,00	100,00	538.000,00	100,00	520.246,00	100,00	494.233,70	100,00	444.810,33	2.695.279,03	Satpol PP dan Damkar	
1.05.1.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100	100,00	700.000,00	100,00	720.000,00	100,00	696.240,00	100,00	661.428,00	100,00	595.285,20	3.372.953,20	Satpol PP dan Damkar	
1.05.1.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100,00	89.500,00	100,00	75.000,00	100,00	72.525,00	100,00	68.898,75	100,00	65.453,81	371.377,56	Satpol PP dan Damkar	
1.05.1.05.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen			0,00	-	100,00	11.300,00	100,00	20.000,00	100,00	22.000,00	100,00	24.000,00	77.300,00	Satpol PP dan Damkar	
1.05.1.05.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	482.000,00	87,00	626.000,00	87,25	605.342,00	87,25	575.074,90	88,00	546.321,16	2.834.738,06	Satpol PP dan Damkar	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan			0,00	-	100,00	-	100,00	50.000,00	100,00	55.000,00	100,00	60.000,00	165.000,00	Satpol PP dan Damkar	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.05.1.05.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase pelaksanaan kegiatan pengamanan	keg	60	60	100,00	1.086.000,00	100,00	1.155.000,00	100,00	1.116.885,00	100,00	1.228.573,50	100,00	1.105.716,15	100,00	5.692.174,65	Satpol PP dan Damkar
1.05.1.05.01.16	Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase kasus kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100,00	686.929,00	100,00	250.000,00	100,00	241.750,00	100,00	265.925,00	100,00	239.332,50	100,00	1.683.936,50	Satpol PP dan Damkar
1.05.1.05.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	orang	100		100,00	114.190,00	100,00	50.000,00	100,00	100.000,00	100,00	110.000,00	100,00	100.000,00	100,00	474.190,00	Satpol PP dan Damkar
1.05.1.05.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Prosentase capaian kegiatan program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	%	100	100	100,00	100.000,00	100,00	160.000,00	100,00	200.000,00	100,00	220.000,00	100,00	225.000,00	100,00	905.000,00	Satpol PP dan Damkar
1.05.1.05.01.25	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Prosentase capaian kegiatan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	100	100	100,00	1.500.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	1.740.600,00	100,00	1.914.660,00	100,00	1.723.194,00	100,00	8.678.454,00	Satpol PP dan Damkar
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																-	Satpol PP dan Damkar
1.05.1.05.02.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100,00	327.700,00	100,00	343.600,00	100,00	332.261,20	100,00	315.648,14	100,00	284.083,33	100,00	1.603.292,67	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen			75,00	149.000,00	75,00	201.000,00	75,00	212.000,00	75,00	190.800,00	75,00	171.720,00		924.520,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	100,00	55.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.05.1.05.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	rata-rata Nilai SKP			6,00	7.000,00	6,00	8.000,00	6,00	9.000,00	6,00	10.000,00	6,00	11.000,00		45.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,00	145.000	87,00	116.000	87,25	136.800	87,25	137.800	88,00	138.800	12,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.05.1.05.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kasus kriminalitas yang tertangani	Kasus	150		150,00	1.314.000,00	130,00	1.460.000,00	125,00	1.411.820,00	115,00	1.553.002,00	110,00	1.397.701,80	110,00	7.136.523,80	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	orang			3.125,00	970.000,00	3.125,00	970.000,00	3.125,00	970.000,00	3.125,00	970.000,00	3.125,00	873.000,00	3.125,00	4.753.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	ormas			5,00	370.000,00	5,00	370.000,00	5,00	370.000,00	5,00	370.000,00	5,00	333.000,00		1.813.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.21	Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	prosen			76,70	1.066.500,00	78,00	1.185.000,00	79,00	1.303.500,00	80,00	1.433.850,00	80,00	1.290.465,00		6.279.315,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																	
1.05.1.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100%	501.900,00	100%	455.692,00	100%	500.000,00	100%	475.000,00	100%	427.500,00	100,00	2.360.092,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	198.635,00	12 bulan	312.500,00	12 bulan	300.000,00	12 bulan	270.000,00	12 bulan	243.000,00		1.324.135,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	OPD
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		
1.05.1.05.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100%	9.900,00	100%	9.000,00	100%	10.000,00	100%	10.000,00	100%	10.000,00	100,00	48.900,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.05.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	25 orang	3 orang	2 orang	9.500,00	2 orang	9.000,00	30 orang	100.000,00	30 orang	100.000,00	30 orang	100.000,00		318.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.05.03.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	120.205,00	87%	140.000,00	87%	140.000,00	88%	133.000,00	88%	126.350,00	88,00	659.555,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.05.03.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Prosentase peningkatan kualitas kinerja penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan kepada kordan serta Dinas Kesehatan	Prosen	100%	100%	100%	1.788.410,00	100%	1.680.000,00	100%	1.700.000,00	100%	1.725.000,00	100%	1.552.500,00		8.445.910,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.01.1.05.03.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data dan informasi	Dokumen		4 dokumen	7 dokumen	250.950,00	4 dokumen	145.000,00	3 dokumen	220.000,00	2 dokumen	120.000,00	3 dokumen	108.000,00		843.950,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	Sosial																	
1.06.1.06.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100,00	387.500,00	100,00	507.200,00	100,00	553.770,00	100,00	526.081,50	100,00	473.473,35	100,00	2.448.024,85	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100	100,00	140.000,00	100,00	310.000,00	100,00	331.500,00	100,00	298.350,00	100,00	268.515,00	100,00	1.348.365,00	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100,00	15.000,00	100,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00	87.000,00	Dinas Sosial

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	OPD
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		
1.06.1.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	0	0	3,00	15.000,00	5,00	25.000,00	5,00	25.000,00	5,00	25.000,00	5,00	25.000,00	23,00	115.000,00	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan			12,00	50.000,00	12,00	105.000,00	12,00	115.000,00	12,00	109.250,00	12,00	103.787,50	12,00	483.037,50	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	155.000,00	87,00	254.500,00	87,25	279.150,00	87,50	265.192,50	88,00	251.932,88	88,00	1.205.775,38	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang tertangani	%	100	100	100,00	200.011,99	100,00	200.986,00	100,00	200.631,00	100,00	201.236,00	100,00	201.361,00	100,00	1.004.225,99	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.17	Program pembinaan anak terlantar	prosentase Anak terlantar yang dibina	%	10	15	10,00	60.000,00	10,00	70.000,00	10,00	80.000,00	10,00	90.000,00	10,00	100.000,00	10,00	400.000,00	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase meningkatnya pembinaan anak cacat dan trauma	%		316	10,00	475.000,00	10,00	540.000,00	10,00	545.000,00	10,00	550.000,00	10,00	555.000,00	336,00	2.665.000,00	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.21	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	prosentas PSKS yang dibina	%	100	100	7,00	934.300,00	7,00	1.000.000,00	7,00	1.965.000,00	7,00	2.045.000,00	7,00	2.130.000,00	42,00	8.074.300,00	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.16	Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	prosentase PMKS yang didampingi	%			20,00	2.740.000,00	20,00	2.804.210,00	20,00	2.918.210,00	20,00	3.032.210,00	20,00	3.152.210,00	100,00	14.646.840,00	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase Meningkatnya kemampuan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)	%	0	0	10,00	200.000,00	10,00	305.092,00	10,00	495.000,00	10,00	530.092,00	10,00	540.092,00	60,00	2.070.276,00	Dinas Sosial

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.08.1.14.01.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	prosen	2,11	3,85	5,59	146.000,00	7,34	230.000,00	9,1	150.000,00	10,84	275.000,00	12,59	145.000,00	946.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.08.1.14.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	prosen	6,45	30,43	33,33	197.000,00	49,33	218.000,00	64,1	110.000,00	68,75	295.000,00	77,78	115.000,00	935.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.08.1.14.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT dan anak	Prosen	0,4	0,4	0,04	338.000,00	0,04	272.000,00	0,04	270.000,00	0,04	330.000,00	0,04	310.000,00	1.520.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.14.1.14.01.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	prosentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	prosen	22,22	22,22	22,22	155.800,00	22,22	120.000,00	22,22	130.000,00	22,22	130.000,00	22,22	130.000,00	665.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.09	Pangan																	
1.10	Pertanahan																	
1.10.3.05.01.38	Program peningkatan, penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Prosentase penerbitan sertifikat aset Pemerintah Daerah	prosen	40	40,50	40,50	305.000,00	47,00	400.000,00	57,00	1.025.000,00	68,50	900.000,00	81,00	975.000,00	3.605.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.11	Lingkungan Hidup																	
1.11.1.11.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100,00	595.656,00	100,00	661.840,00	100,00	728.024,00	100,00	691.622,80	100,00	657.041,66	3.334.184,46	Dinas Lingkungan Hidup	
1.11.1.11.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen				130.500,00		145.000,00		450.000,00		405.000,00		364.500,00	1.495.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.11.1.11.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100,00	185.000,00	100,00	215.000,00	100,00	50.000,00	100,00	47.500,00	100,00	45.125,00	100,00	542.625,00	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.11.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen		20	20,00	100.000,00	20,00	220.000,00	20,00	70.000,00	20,00	80.000,00	20,00	90.000,00	100,00	560.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.11.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan			12,00	-	12,00	215.000,00	12,00	40.000,00	12,00	38.000,00	12,00	36.100,00	12,00	329.100,00	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.11.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	262.800,00	87,00	292.000,00	87,25	321.200,00	87,50	305.140,00	88,00	289.883,00	88,00	1.471.023,00	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.11.01.15	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase volume timbunan sampah yang tertangani	prosen	8,31	8,73	9,43	450.000,00	10,46	500.000,00	11,39	550.000,00	12,39	605.000,00	13,06	544.500,00	13,06	2.649.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
1.03.1.03.01.37	Program pengembangan kinerja pengelolaan kebersihan/pertamanan	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA	Kec	NA	12	13,00	4.387.500,00	14,00	4.875.000,00	15,00	5.362.500,00	16,00	5.898.750,00	17,00	5.308.875,00	17,00	25.832.625,00	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.11.01.16	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Score	45	49,82	63,49	391.500,00	65,00	435.000,00	66,00	478.500,00	67,00	526.350,00	68,00	473.715,00	68,00	2.305.065,00	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.11.01.17	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Jumlah sumber mata air yang tertangani	Jumlah			1,00	63.000,00	1,00	70.000,00	2,00	77.000,00	2,00	84.700,00	2,00	76.230,00	8,00	370.930,00	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.11.01.18	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	Luas lahan kritis dan sumber mata air yang tertangani (Ha)	Ha	0	6	8,00	72.000,00	10,00	80.000,00	12,00	88.000,00	15,00	96.800,00	20,00	87.120,00	20,00	423.920,00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.11.1.11.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah jenis Data informasi lingkungan yang dapat diakses	Jumlah	3	3	4,00	189.000,00	4,00	210.000,00	4,00	231.000,00	5,00	254.100,00	5,00	228.690,00	5,00	1.112.790,00	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.11.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah lokasi taman dan RTH perkotaan yang tertata	Lokasi	26	26	26,00	7.636.500,00	28,00	8.485.000,00	30,00	9.850.000,00	32,00	10.835.000,00	34,00	9.751.500,00	34,00	46.558.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.11.01.25	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Prosentase pembinaan lingkungan hidup di wilayah penghasil pembakau	prosen	40	40	20,00	200.000,00	20,00	200.000,00	20,00	250.000,00	20,00	250.000,00	20,00	300.000,00	100,00	1.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
1.04.1.11.01.20	Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah makam yang dipelihara/dikelola Pemda	Lokasi	7	7	7,00	800.000,00	7,00	925.000,00	7,00	280.000,00	7,00	300.000,00	7,00	320.000,00	7,00	2.625.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
1.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
1.12.1.12.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	436.680,70	100	232.772,48	100	234.346,97	100	117.147,14	100	146.017,55	100,00	1.166.964,84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.12.1.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12	12	12	316.057,61	12	165.704,33	12	166.825,17	12	87.999,60	12	79.199,64		815.786,35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.12.1.12.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100	10.648,65	100	5.582,94	100	8.380,97	100	4.210,43	100	5.183,18	100,00	34.006,17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	NA	NA	-	-	100	-	100	34.867,66	0	17.516,76	0	21.516,82		73.901,23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.12.1.12.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	12	12	12	3.814,89	12	1.979,06	12	9.899,03	12	4.932,98	12	5.829,29		26.455,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.12.1.12.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	291.500,31	87	153.939,79	87,25	154.483,96	87,5	76.188,76	88	90.321,76	88,00	766.434,58	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.12.1.12.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber KTP	Prosen	74,20		84	1.659.784,68	88	881.738,67	92	873.924,04	96	436.023,64	98	548.390,62		4.399.861,64	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
1.13.1.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	469.381,00	100	500.918,00	100	551.010,00	100	523.459,50	100	497.286,53	100,00	2.542.055,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100	100	125.000,00	100	184.000,00	100	202.400,00	100	182.160,00	100	163.944,00	100,00	857.504,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100	24.750,00	100	22.275,00	100	24.503,00	100	18.500,00	100	17.575,00	100,00	107.603,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	0	100	100	64.450,00	100	-	100	70.000,00	100	75.000,00	100	75.000,00	100,00	284.450,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	0	100	100	60.000,00	100	73.000,00	100	80.300,00	100	76.285,00	100	72.470,75	100,00	362.055,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	267.370,00	87	260.380,00	87,25	294.107,00	87,5	279.401,65	88	265.431,57	88,00	1.366.690,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.13.1.13.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	jumlah desa tertinggal di Kabupaten Kendal	Desa			85	925.000,00	65	745.000,00	45	769.585,00	23	846.543,50	0	818.607,56	0,00	4.104.736,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah BUMDes yang terbentuk Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKJM) Aktif	unit Prosen	0 20	40 28	62 28,5	225.000,00	60 29	150.000,00	60 29,5	500.000,00	34 30	289.000,00	10 30,5	298.000,00	266,00 30,5	1.462.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Desa yg mendapatkan program TMMD	Desa	2	2	2	1.577.190,00	3	2.085.000,00	3	2.153.805,00	3	2.369.185,50	3	2.291.002,38	16,00	10.476.182,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur desa yg sudah mengikuti bintek / pelatihan peningkatan kapasitas	orang	266	266	328	460.000,00	266	523.515,00	271	540.791,00	465	594.870,09	266	575.239,38	1.862,00	2.694.415,47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
1.14.1.14.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	856.600,00	100	858.760,00	100	1.000.000,00	100	950.000,00	100	902.500,00	100,00	4.567.860,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.14.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12	12	99	275.000,00	99	263.000,00	99	254.321,00	99	228.888,90	100	206.000,01		1.227.209,91	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.14.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100	45.000,00	100	45.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100,00	240.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.15.1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	23.000.000,00	100	18.852.960,00	100	18.230.812,32	100	20.053.893,55	100	19.392.115,06	100,00	99.529.780,94	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100	100	200.000,00	100	260.000,00	100	286.000,00	100	314.600,00	100	346.060,00	100,00	1.406.660,00	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100	50.000,00	100	85.000,00	100	93.500,00	100	88.825,00	100	84.383,75	100,00	401.708,75	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100	100	100	180.000,00	100	250.000,00	100	275.000,00	100	302.500,00	100	332.750,00	100,00	1.340.250,00	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100	100	100	120.000,00	100	132.000,00	100	145.200,00	100	137.940,00	100	131.043,00	100,00	666.183,00	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	704.000,00	100	910.000,00	100	879.970,00	100	835.971,50	100	794.172,93	88,00	4.124.114,43	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Rute lintas penyeberangan	buah	2	2	2	270.000,00	2	310.000,00	3	341.000,00	3	375.100,00	3	412.610,00	3,00	1.708.710,00	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase sarana prasarana perhubungan dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	100	100	100	400.000,00	100	530.000,00	100	583.000,00	100	641.300,00	100	705.430,00	100,00	2.859.730,00	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Trayek yang terlayani	Trayek	60	60	60	150.000,00	61	155.000,00	62	170.500,00	62	187.550,00	62	206.305,00	62,00	869.355,00	Dinas Perhubungan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.15.1.15.01.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah Pelabuhan, Terminal dan Taman Parkir	unit	5	5	5	2.500.000,00	6	2.700.000,00	6	2.970.000,00	6	3.267.000,00	6	3.593.700,00	6,00	15.030.700,00	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prosentase Layanan PJJU Berbasis Smart City	%	0	0	15	28.075.000,00	30	15.755.000,00	45	15.000.000,00	60	10.000.000,00	75	5.000.000,00	75,00	73.830.000,00	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	unit	11	11	11	180.000,00	11	200.000,00	12	220.000,00	12	242.000,00	12	266.200,00	12,00	1.108.200,00	Dinas Perhubungan
1.16	Komunikasi dan Informatika																	
1.16.1.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	531.461,00	100	515.705,00	100	618.846,00	100	587.903,70	100	558.508,52	100,00	2.812.424,22	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen			100	710.000,00	100	165.000,00	100	198.000,00	100	178.200,00	100	160.380,00	100,00	1.411.580,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100	29.340,00	100	20.250,00	100	24.300,00	100	25.110,00	100	25.272,00	100,00	124.272,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen			100	143.000,00	100	-	100	171.600,00	100	177.320,00	100	178.464,00	100,00	670.384,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan			100	20.000,00	100	15.000,00	100	18.000,00	100	17.100,00	100	16.245,00	100,00	86.345,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	259.712,00	100	362.150,00	100	434.580,00	100	412.851,00	100	392.208,45	88,00	1.861.501,45	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.16.1.16.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah, Sarana komunikasi (Media Massa, Media Interpersonal, Media Luar ruang, Media Tradisional dan Media Online)	SIM		11	100	1.161.000,00	100	492.000,00	100	590.400,00	100	610.080,00	100	614.016,00	20,00	3.467.496,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah Perda / Perbup dan kajian dalam penyelenggaraan TIK	dokumen	1	1	100	165.000,00	100	140.000,00	100	168.000,00	100	173.600,00	100	174.720,00	1,00	821.320,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Prosentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Prosen			59	335.000,00	59	115.000,00	59	138.000,00	59	142.600,00	59	143.520,00	59,00	874.120,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Prosentase kerja sama informasi dengan mas media				100	100.000,00	100	85.000,00	100	102.000,00	100	105.400,00	100	106.080,00	100,00	498.480,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Prosentase optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi				100	1.415.987,00	100	1.000.000,00	100	1.100.000,00	100	1.210.000,00	100	1.331.000,00	100,00	6.056.987,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.21	Program Kehumasan	Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda				100	2.705.000,00	100	1.100.000,00	100	1.210.000,00	100	1.331.000,00	100	1.200.792,33	100,00	7.546.792,33	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																	
1.17.1.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100,00	572.904,00	100,00	603.633,00	100,00	623.552,89	100,00	592.375,24	100,00	562.756,48	100,00	2.955.221,62	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.17.1.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen			12 bl	127.500,00	12 bl	125.000,00	12 bl	129.125,00	12 bl	116.212,50	12 bl	104.591,25	12 bl	602.428,75	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	45 stel	22.287,00	100,00	22.287,00	100,00	23.022,47	100,00	26.500,00	100,00	28.000,00	100,00	122.096,47	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen			40 org	15.000,00	50 org	7.000,00	55 org	7.231,00	55 org	162.500,00	55 org	175.000,00	55 org	366.731,00	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan			125 bk	23.109,00	130 bk	35.000,00	130 bk	36.155,00	130 bk	34.347,25	130 bk	32.629,89	130 bk	161.241,14	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	102.700,00	87,00	100.000,00	87,25	103.300,00	87,50	98.135,00	88,00	93.228,25	88,00	497.363,25	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	unit	1.270		31.847	200.000,00	31.962	150.000,00	32.082	154.950,00	32.207	1.610.000,00	32.337	1.680.000,00	32.337	3.794.950,00	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha Baru mikro	unit	31.719	31.719	31.847	350.000,00	31.962	350.000,00	32.082	361.550,00	32.207	550.000,00	32.337	600.000,00	32.337	2.211.550,00	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil		1.278	1.278	1.300	1.175.000,00	1.315	935.000,00	1.355	965.855,00	1.355	933.981,79	1.380	903.160,39	1.380	4.912.997,17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam proses produksi	Orang	Na	9.088	9.138,00		9.188,00		9.238,00		9.288,00		9.338,00		9.388,00	250.000,00	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.17.1.17.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase koperasi sehat	%	70	70	72%	515.000,00	75%	300.000,00	80%	309.900,00	85%	299.673,30	90%	289.784,08	95,00	1.714.357,38	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.20	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Cakupan dukungan manajemen manajemen UMKM	kec	5	5	6 kec	100.000,00		-		-		-		20 kec	100.000,00	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.18	Penanaman Modal																	
1.18.1.18.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	1.004.320,00	100	968.613,00	100	1.000.577,23	100	967.558,18	100	935.628,76	100,00	4.876.697,17	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12		12	250.000,00	12	142.400,00	12	147.099,20	12	142.244,93	12	137.550,84	12,00	819.294,97	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100	24.750,00	100	0	100	-	100	33.000,00	100	35.750,00	100,00	93.500,00	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	20	20	40	50.000,00	40	15.000,00	40	15.495,00	40	14.983,67	40	14.489,20	40,00	109.967,87	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	9	9	11	10.000,00	11	15.000,00	11	15.495,00	11	14.983,67	11	14.489,20	11,00	69.967,87	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	192.860,00	87	192.860,00	87,25	199.224,38	87,5	192.649,98	88	186.292,53	88,00	963.886,88	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	146		241	0,00	289	0,00	336	0,00	384	0,00	342	0,00	432,00	-	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.18.1.18.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kecepatan Pelayanan Perijinan	Hari	14		7	0,00	7	0,00	7	0,00	7	0,00	7	0,00	7,00	-	Dinas Penataan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Peta potensi investasi kabupaten Kendal	kegiatan	1	1	1	50.000,00	1	50.000,00	1	51.650,00	1	49.945,55	1	48.297,35	5,00	249.892,90	Dinas Penataan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.19	Kepemudaan dan Olah Raga																	
1.19.1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100,00	1.186.485,00	100,00	1.110.000,00	100,00	1.055.000,00	100,00	1.002.250,00	100,00	952.137,50	100,00	5.305.872,50	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen			12,00	649.235,00	12,00	655.000,00	12,00	750.000,00	12,00	712.500,00	2,00	688.987,50	12,00	3.455.722,50	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	1,00	35.000,00	100,00	15.000,00	100,00	35.000,00	100,00	33.845,00	100,00	32.728,12	100,00	151.573,12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen				-		-		40.000,00		50.000,00		60.000,00		150.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan			12 Bln	75.500,00	12 Bln	65.500,00	12 Bln	75.000,00	12 Bln	90.000,00	12 Bln	95.000,00	12 Bln	401.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	697.500,00	87,00	823.076,00	87,25	945.000,00	87,50	913.815,00	88,00	883.659,11	88,00	4.263.050,11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah pemuda yang dilatih pendidikan karakter	orang	NA	NA	100,00	50.000,00	150,00	-	200,00	30.000,00	250,00	40.000,00	300,00	50.000,00	300,00	170.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.19.1.19.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Prestasi kepemudaan	Keg			8,00	1.055.000,00	8,00	970.000,00	12,00	1.002.010,00	15,00	968.943,67	15,00	936.968,53		4.932.922,20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah wirausahawan muda	orang	NA	20	20,00	200.000,00	20,00	200.000,00	20,00	206.600,00	20,00	250.000,00	20,00	250.000,00	100,00	1.106.600,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	Cabor	29	29	29,00	3.810.280,00	32,00	3.698.568,00	33,00	2.867.969,75	33,00	2.773.326,75	33,00	2.681.806,96	33,00	15.831.951,46	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	prosentase sarpras yang kondisi baik					2.394.000,00		675.000,00		697.275,00		674.264,93		652.014,18		5.092.554,11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.20	Statistik																	
1.20.1.16.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah					3	270.000,00	3	150.000,00	3	180.000,00	3	186.000,00	3	187.200,00		973.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.21	Persandian																	
1.22	Kebudayaan																	
1.22.1.01.01.15	Program pengembangan nilai budaya	Prosentase misi budaya yang dilestarikan	Prosen		75	75	570.000,00	80	390.000,00	80	429.000,00	90	414.843,00	100	401.153,18	100,00	2.204.996,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.22.1.01.01.16	Program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	0	0	0	385.000,00	0	410.000,00	1	451.000,00	2	436.117,00	3	421.725,14	3,00	2.103.842,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.22.1.01.01.17	Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah pembinaan kepada pelaku seni dan budaya	kelompok		550	565	85.000,00	575	100.000,00	580	110.000,00	585	106.370,00	585	102.859,79	585,00	504.229,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.22.1.19.01.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan budaya	Cakupan gelar seni dan budaya	Prosen			80		85	60.000,00	90	60.000,00	95	60.000,00	95	60.000,00		240.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.23	Perpustakaan																	
1.23.1.23.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	642.746,00	100	755.000,00	100	755.000,00	100	717.250,00	100	681.387,50	100,00	3.551.383,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
1.23.1.23.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen			100	65.000,00	100	185.000,00	100	185.000,00	100	185.000,00	100	185.000,00	100,00	805.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.23.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100	12.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100,00	132.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.23.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen			2,055	10.000,00	3,42	30.000,00	3,42	30.000,00	3,42	30.000,00	3,42	30.000,00	15,75	130.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.23.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan			100	10.000,00	100	12.500,00	100	12.500,00	100	12.500,00	100	12.500,00	100,00	60.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.23.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	236.860,00	87	243.700,00	87,25	243.700,00	87,5	243.700,00	88	243.700,00	88,00	1.211.660,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.23.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	prosentase perpustakaan dalam kondisi baik	Prosen			55	367.500,00	60	225.000,00	65	225.000,00	70	225.000,00	75	225.000,00	75,00	1.267.500,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.02.1.02.01.34	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	prosentase penderita diabetes melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Prosen			100	1.608.875	100	1.726.124	100	1.669.161,91	100	1.555.930	100	1.276.135	100,00	7.836.226,21	Dinas Kesehatan
		prosentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Prosen			100		100		100		100		100		100,00		Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
		prosentase penderita ODGJ berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Prosen			100		100		100		100		100		100,00		Dinas Kesehatan
1.24.1.02.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	prosentase arsip dinamis dan statis yang diselamatkan	Prosen	4		4	10.000,00	12	0,00	12	5.060,21	12	2.421,09	12	2.859,69	12,00	20.340,99	Dinas Kesehatan
1.24.1.23.01.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	prosentase Sarana dan Prasarana Kearsipan sesuai standar		75		77,500	34.000,00	80,00	10.000,00	85,00	10.000,00	90,00	10.000,00	95,00	10.000,00	95,00	74.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.1.23.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	prosentase arsip dinamis dan statis yang diselamatkan	Prosen			12,000	308.000,00	12,00	105.000,00	12,00	105.000,00	12,00	105.000,00	12,00	105.000,00	10,00	728.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.1.23.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	prosentase perpustakaan dalam kondisi baik	Prosen			12,000	15.000,00	12,00	15.000,00	12,00	15.000,00	12,00	15.000,00	12,00	15.000,00		75.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.1.23.01.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	prosentase Sarana Prasarana Arsip dalam kondisi baik				12,000	40.000,00	12,00	30.000,00	12,00	30.000,00	12,00	30.000,00	12,00	30.000,00		160.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Urusan Pilihan																	
2.01	Kelautan dan Perikanan																	
2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	708.200,00	100	674.500,00	100	621.500,00	100	590.425,00	100	560.903,75	100,00	3.155.528,75	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12	12	12	385.500,00	12	144.000,00	12	165.000,00	12	156.750,00	12	148.912,50	12,00	1.000.162,50	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100		15.000,00	100	15.000,00	100	17.500,00	100	19.250,00	100	21.175,00	100,00	87.925,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
2.01.2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen				60.000,00		75.000,00		75.000,00		82.500,00		90.750,00		383.250,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	7	7	8	65.000,00	8	75.000,00	8	41.000,00	8	45.100,00	8	49.610,00	8,00	275.710,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	227.250,00	87	232.000,00	87,25	215.000,00	87,5	204.250,00	88	194.037,50	88,00	1.072.537,50	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	kegiatan peningkatan kapasitas nelayan dalam bidang keselamatan pelayaran	kegiatan	4	4	4	120.000,00	4	130.000,00	4	130.000,00	4	143.000,00	4	157.300,00	24,00	680.300,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (kg)	kg	21.967.096	22.883.000	24.027.885	4.495.000,00	25.229.279	3.070.000,00	26.490.743	4.179.000,00	27.815.280	4.596.900,00	29.206.044	5.056.590,00	155.652.231,00	21.397.490,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan Tangkap (kg)	kg	1.858.904	2.096.288	2.138.213	5.040.000,00	2.180.977	4.230.000,00	2.224.596	3.190.000,00	2.269.087	3.509.000,00	2.314.469	3.859.900,00	13.223.629,74	19.828.900,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	Orang	Na			200.000,00		150.000,00		210.000,00	2.269.087	231.000,00	2.314.469	254.100,00	13.223.629,74	1.045.100,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya (kg)	kg	21.967.096	22.883.000	24.027.885	750.000,00	25.229.279	500.000,00	26.490.743	475.801,00	27.815.280	523.381,10	29.206.044	575.719,21	132.769.231,00	2.824.901,31	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tingkat konsumsi ikan penduduk (kg/kap/th)	kg/kap/th	14,53		15,43	555.000,00	16,2	635.000,00	17,01	340.000,00	17,86	374.000,00	18,75	411.400,00	18,75	2.315.400,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.02	Pariwisata																	
2.02.1.01.01.17	Program pengembangan	1. Cakupan Organisasi Seni	Prosen		80	85	200.000,00	90	438.550,00	90	650.000,00	95	750.000,00	95	750.000,00	95,00	2.788.550,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
	kemitraan	2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Prosen															
2.02.1.19.01.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Prosentase OW yang dipromosikan	Prosen			80	350.000,00	85	390.000,00	90	435.000,00	95	540.000,00	100	490.000,00	100,00	2.205.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.02.1.19.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah OW unggulan	DTW			9	2.080.000,00	9	1.647.500,00	9	1.977.000,00	10	2.042.241,00	10	1.974.847,05	10,00	9.721.588,05	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.02.1.19.01.17	Program pengembangan Kemitraan	1. Cakupan Organisasi Seni 2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Prosen			0,5	255.000,00	0,5	650.000,00	0,5	650.000,00	0,5	1.170.000,00	0,5	650.000,00		3.375.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.03	Pertanian																	
2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	1.403.735,00	100	922.500,00	100	1.014.750,00	100	964.012,50	100	915.811,88	100,00	5.220.809,38	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen				1.443.259,00		495.000,00		544.500,00		517.275,00		491.411,25		3.491.445,25	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	212	101.760,00	100	0,00	100	112.000,00	100	117.565,00	100	117.565,00	100,00	448.890,00	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen			43	205.000,00	40	50.000,00	40	55.000,00	40	55.000,00	40	75.000,00		440.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan				160.520,00		80.000,00		88.000,00		83.600,00		79.420,00		491.540,00	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	606.650,00	87	580.000,00	87,25	638.000,00	87,5	606.100,00	88	575.795,00	88,00	3.006.545,00	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
2.03.2.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Prosen	NA	NA	NA	1.164.134,00	100,04	415.000,00	100,06	456.500,00	100,08	441.435,50	100,1	426.868,13	100,10	2.903.937,63	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan						2.698.550,00		1.115.000,00		1.226.500,00		1.186.025,50		1.146.886,66		7.372.962,16	Dinas Pertanian dan Pangan
		Ketersediaan bahan pokok utama/beras (%)	prosen	165	171,68	157,57		173,00		175,00		177,00		177,00		177,00		Dinas Pertanian dan Pangan
		Ketersediaan Energi per kapita	Kkal/kapita	177	158	175,00		179,00		183,00		185,00		185,00		185,00		Dinas Pertanian dan Pangan
		Ketersediaan Protein per kapita	Kkal/kapita	117	117	115,00		115,00		116,00		116,00		117,00		117,00		Dinas Pertanian dan Pangan
		Penguatan cadangan pangan	%	20,09	27,42	30,00		35,00		40,00		45,00		45,00		45,00		Dinas Pertanian dan Pangan
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	90	90	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Dinas Pertanian dan Pangan
		Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	%	67,8	70	72,00		75,00		78,00		80,00		80,00		80,00		Dinas Pertanian dan Pangan
		Penanganan daerah rawan pangan	%	35,7	42,8	50,00		50,00		50,10		50,10		50,10		50,10		Dinas Pertanian dan Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	87,9	82,1	84,10		86,80		86,80		87,00		87,50		87,50		Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80	83,5	80,00		80,00		83,30		83,30		86,00		86,00		Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Keikutsertaan dalam pameran promosi produk pertanian	event	4	3	5,00	436.450,00	5,00	300.000,00	5,00	330.000,00	5,00	319.110,00	5,00	308.579,37	28,00	1.694.139,37	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Cakupan bina kelompok tani	kelompok	51	71	70,00	1.264.200,00	71,00	290.000,00	72,00	319.000,00	72,00	308.473,00	73,00	298.293,39	429,00	2.479.966,39	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
2.03.2.03.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi pertanian pangan utama					5.583.668,00		2.791.386,00		3.070.524,60		2.969.197,29		2.871.213,78		17.285.989,67	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Padi	ton	289.870	260.888	231.975		233.135		234.301		235.472		236.472		1.432.243		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Jagung	ton	209.032	225.505	209.869		210.289		210.710		211.131		211.553		1.279.057		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kedelai	ton	3.032	1.340	1.341		1.344		1.347		1.351		1.354		8.077		Dinas Pertanian dan Pangan
		Produksi Tanaman Hortikultura														-		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Bawang Merah	kwintal	254.993	320.936	258.832		260.773		262.729		264.700		266.685		1.634.655		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Cabe	kwintal	45.001	40.984	45.114		45.226		45.339		45.453		45.566		267.682		Dinas Pertanian dan Pangan
		Produksi tanaman perkebunan														-		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Tebu	Ton	21.124	19.170	18.167		14.998		17.650		17.650		18.709		106.344		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Tembakau	Ton	4.729	806	1.020		1.195		1.280		1.332		1.366		6.998		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kopi	Ton	1.082	1.300	1.115		1.132		1.148		1.166		1.183		7.044		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Cengkeh	Ton	422	158	100		179		198		218		229		1.082		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Karet	Ton	52	36	53		54		54		55		55		307		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kelapa	Ton	771	599	547		549		548		549		549		3.339		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kakao	Ton	124	199	128		130		131		133		135		856		Dinas Pertanian dan Pangan
		Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi air tanah dangkal/dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan)	Ha	3.500	2.000	1.280		1.050		1.150		1.250		1.350		8.080		Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
		Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Ha	22.666	22.666	22.666		22.666		22.666		22.666		22.666		135.996		Dinas Pertanian dan Pangan
		Panjang jalan usaha tani/jalan produksi yang dibangun/diperbaiki	meter			1.600		2.500		2.750		3.000		3.250		13.100		Dinas Pertanian dan Pangan
		Luas lahan yang mendapat pemupukan menggunakan pupuk bersubsidi	Ha	30.000	31.000	32.000		33.200		33.500		34.000		35.000		198.700		Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	122	122	122,00	741.730,00		670.000,00		737.000,00		712.679,00		689.160,59	122,00	3.550.569,59	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Angka kematian / mortalitas ternak					994.100,00		295.000,00		324.500,00		313.791,50		303.436,38		2.230.827,88	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Sapi potong	Prosen	3	2,74	2,80		2,70		2,60		2,50		2,40		2,40		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kambing	Prosen	2,61	2,52	2,51		2,46		2,41		2,39		2,15		2,15		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Domba	Prosen	2,61	2,3	2,51		2,46		2,41		2,39		2,15		2,15		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Ayam ras	Prosen	4,8	4,78	5,40		5,30		5,20		5,10		5,00		5,00		Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi Komoditas Peternakan Utama					435.000,00		100.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		685.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Sapi potong	ekor	21.440	20.523	20.606		20.738		20.856		20.986		21.106		21.106		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kambing	ekor	36.718	37.776	37.558		37.934		38.140		38.313		38.696		38.696		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Domba	ekor	29.839	30.842	30.438		30.742		30.884		31.044		31.354		31.354		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Ayam ras pedaging	ekor	8.587.800	8.587.800	8.254.000		8.263.000		8.295.000		8.312.000		8.320.000		50.031.800		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Ayam ras petelur	ekor	3.583.300	3.799.915	4.000.000		4.000.000		4.050.000		4.100.000		4.100.000		4.100.000		Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
2.03.2.03.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Produksi daging dan telur ayam ras					194.000,00		70.000,00		77.000,00		74.459,00		72.001,85		487.460,85	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Daging sapi	kg	418.140	640.543	742.500		745.000		750.000		750.000		762.500		4.390.543		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Daging kambing	kg	14.513	108.801	112.750		115.350		115.500		116.720		117.250		686.371		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Daging domba	kg	5.374	16.393	14.950		15.225		15.430		15.645		15.825		93.468		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Daging ayam ras pedaging	kg	3.649.815	5.916.994	5.821.500		5.833.200		5.885.600		5.895.710		5.912.235		35.265.239		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Telur ayam ras	kg	28.827.900	36.204.920	37.720.250		37.720.250		37.965.000		38.345.000		38.345.000		226.300.420		Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Populasi Komoditas Peternakan hasil penerapan teknologi peternakan					239.800,00		150.000,00		165.000,00		159.555,00		154.289,69		868.644,69	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Sapi potong	ekor	21.440	20.523	20.606		20.738		20.856		20.986		21.106		21.106		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kambing	ekor	36.718	37.776	37.558		37.934		38.140		38.313		38.696		38.696		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Domba	ekor	29.839	30.842	30.438		30.742		30.884		31.044		31.354		31.354		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Ayam ras pedaging	ekor	8.587.800	8.587.800	8.254.000		8.263.000		8.295.000		8.312.000		8.320.000		50.031.800		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Ayam ras petelur	ekor	3.583.300	3.799.915	4.000.000		4.000.000		4.050.000		4.100.000		4.100.000		4.100.000		Dinas Pertanian dan Pangan
2.05	Energi dan Sumber Daya Mineral																	
2.05.1.17.01.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Cakupan pembinaan dan pengendalian usaha pertambangan dan air bawah tanah	Prosen		100	154 oh	35.000	154 oh	30.000	154 oh	85.000	154 oh	85.000	154 oh	85.000	100,00	320.000,00	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.015.1.17.01.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang kelenagalistrikan	Cakupan pembinaan dan pengembangan kelenagalistrikan	Prosen		100	77 oh	15.000	77 oh	12.500	77 oh	15.000	77 oh	15.000	77 oh	15.000	100,00	72.500,00	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
		Prosentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi			0	0,44		0,66		0,88		1,10		1,31		1,31		
2.015.1.17.01.18	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan bidang Energi	cakupan pembinaan dan sosialisasi gugus tugas hemat energi dan air	Orang		100	103 org	50.000	103 org	50.000	103 org	50.000	103 org	50.000	103 org	50.000	478,00	250.000,00	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.06	Perdagangan																	
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	1.247.015,00	100	934.900,00	100	1.028.390,00	100	976.970,50	100	928.121,98	100,00	5.115.397,48	Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen			12	3.076.563,20	12	423.125,00	12	625.000,00	12	593.750,00	12	564.062,50	12,00	5.282.500,70	Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	158	79.035,00	100	80.000,00	100	85.000,00	100	95.000,00	100	105.000,00	100,00	444.035,00	Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen			5	25.000,00	3	15.000,00	5	30.000,00	5	40.000,00	7	50.000,00	106,00	160.000,00	Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan			12	258.400,00	12	208.875,00	12	210.887,50	12	200.343,13	12	190.325,97	12,00	1.068.831,59	Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	664.600,00	87	639.650,00	87,25	700.000,00	87,5	665.000,00	88	631.750,00	88,00	3.301.000,00	Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	prosentase UTTP yang ditera				100	400.000,00	100	1.000.000,00	100	400.000,00	100	500.000,00	100	550.000,00	100,00	2.850.000,00	Dinas Perdagangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.01.3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	95%	723.200,00	95%	732.750,00	95%	708.569,25	95%	685.186,46	95%	662.575,31	100,00	3.512.281,03	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12	12	95%	277.850,00	95%	300.000,00	95%	300.000,00	95%	300.000,00	95%	300.000,00	60,00	1.477.850,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	95%	29.000,00	95%	20.250,00	95%	20.250,00	95%	20.250,00	95%	20.250,00	250,00	110.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	12	12	95%	219.900,00	95%	75.000,00	95%	72.525,00	95%	75.000,00	95%	75.000,00	183,00	517.425,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	-	-	95%	130.000,00	95%	55.000,00	95%	55.000,00	95%	55.000,00	95%	55.000,00	500,00	350.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	338.400,00	87	332.000,00	87,25	332.000,00	87,5	332.000,00	88	332.000,00	88,00	1.666.400,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.1.13.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data dan informasi	Dokumen	0	0	93%	1.015.000,00	93%	1.225.000,00	93%	1.347.500,00	93%	1.303.032,50	93%	1.260.032,43	266,00	6.150.564,93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.01.3.01.01.15	Program pengembangan data/informasi	Jumlah data dan informasi	dokumen	6	12	12	445.000,00	12	800.000,00	12	880.000,00	12	850.960,00	12	822.878,32	60,00	3.798.838,32	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah MOU kerjasama perencanaan pembangunan daerah	dokumen	1	70%	75.000,00	-	-	0	-	0	-	0	-	1,00	75.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
3.01.3.05.01.17	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama yang dilindaklanjuti menjadi MoU setiap tahun					250.000,00		262.500,00		275.625,00		289.406,25		303.876,49	0,00	1.381.407,74	Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.01.3.01.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah konsep Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	dokumen	2		70%	336.000,00	70%	175.000,00	70%	175.000,00	70%	250.000,00	70%	250.000,00	13,00	1.186.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.19	Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar	Jumlah konsep Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	dokumen	2		70%	213.000,00	70%	100.000,00	70%	100.000,00	70%	100.000,00	70%	150.000,00	5,00	663.000,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase konsistensi program RKPD dengan RPJMD	prosen	-		93%	1.115.000,00	93%	820.000,00	93%	792.940,00	93%	766.772,98	93%	741.469,47	70,00	4.236.182,45	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Prosentase aspirasi DPRD yang diakomodir dalam RKPD	Prosen	35	40	46	50	55	60	65	65,00							
3.01.3.05.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase konsistensi program RKPD dengan RPJMD				4,9%	1.485.000,00	4,8%	1.570.000,00	4,7%	1.518.190,00	4,6%	1.468.089,73	4,5%	1.419.642,77	0,00	7.460.922,50	Sekretariat Daerah
3.01.3.01.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rata-rata pencapaian sasaran bidang ekonomi	prosen	-		70%	560.000,00	70%	245.000,00	70%	236.915,00	70%	229.096,81	70%	221.536,61	100,00	1.492.548,42	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Prosentase konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD bidang sosial dan budaya	Prosen	11		70%	500.600,00	70%	445.000,00	70%	430.315,00	70%	416.114,61	70%	402.382,82	55,00	2.194.412,43	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Prosentase konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD bidang fisik dan prasarana	prosen			70%	786.000,00	70%	475.000,00	70%	459.325,00	70%	444.167,28	70%	429.509,75	100,00	2.594.002,03	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.02	Keuangan																	
3.02.3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	1.924.645,00	100	2.044.437,00	100	1.976.970,58	100	1.878.122,05	100	1.784.215,95	100,00	9.608.390,58	Badan Keuangan Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.02.3.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	60%	65%	70%	1.330.780,00	73%	557.358,00	75%	538.965,19	80%	521.179,33	85%	503.980,42		3.452.262,94	Badan Keuangan Daerah
3.02.3.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100	68.000,00	100	68.000,00	210	65.756,00	210	62.468,20	100	59.344,79		323.568,99	Badan Keuangan Daerah
3.02.3.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	60	60	60	65.000,00	65	75.000,00	75	72.525,00	75	70.131,68	80	67.817,33		350.474,00	Badan Keuangan Daerah
3.02.3.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	-	100	100	553.163,00	100	319.968,00	100	309.409,06	100	293.938,60	100	279.241,67		1.755.720,33	Badan Keuangan Daerah
3.02.3.02.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	1.820.000,00	87	959.077,00	87,25	927.427,46	87,5	881.056,09	88	837.003,28	88,00	5.424.563,83	Badan Keuangan Daerah
3.02.3.02.01.15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase PAD terhadap total pendapatan	Prosen	10	10	10	9.262.882,00	10	8.271.780,00	10	7.998.811,26	10	7.734.850,49	10	7.479.600,42		40.747.924,17	Badan Keuangan Daerah
3.02.3.05.01.15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase PAD terhadap total pendapatan	Prosen	-	-	-	412.955,20	-	265.527,60	-	272.550,00	-	282.000,00	-	287.521,00	0,00	1.520.553,80	Sekretariat Daerah
3.02.1.13.01.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	0	0	100	275.000,00	100	99.234,00	100	95.959,28	100	92.792,62	100	89.730,47	266,00	652.716,37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.02.3.05.01.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100		100	505.000,00	100	830.250,00	100	606.762,50	100	634.600,63	100	4.613.830,66	0,00	7.190.443,78	Sekretariat Daerah
3.03	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan																	
3.03.3.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	747.794,00	100	899.363,00	100	869.684,02	100	826.199,82	100	784.889,83	100,00	4.127.930,67	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12 bulan		100	214.400,00	100	200.000,00	100	193.400,00	100	187.017,80	100	180.846,21		975.664,01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100	33.155,00	100	33.155,00	100	50.000,00	100	47.500,00	100	45.125,00		208.935,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.03.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	86,50	86,50	87,75	186.250,00	87	240.000,00	87,25	250.000,00	100	250.000,00	88	250.000,00		1.176.250,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	prosentase Aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat/Bintek yang difasilitasi BKPP Kab. Kendal pada tahun berjalan	Prosen	100	100	100	1.415.345,50	100	2.414.000,00	100	2.334.338,00	100	2.257.304,85	100	2.182.813,79		10.603.802,13	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.03.01.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase struktur jabatan yang terisi	Prosen	86,50	83,07	87	3.089.464,50	87	2.548.835,50	90	2.464.723,93	90	2.383.388,04	95	2.304.736,23	95,00	12.791.148,20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.03.3.03.01.17	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	prosentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	Prosen	100	100	100	241.926,00	100	280.000,00	100	270.760,00	100	261.824,92	100	253.184,70	100,00	1.307.695,62	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.03.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang menggunakan E-Gov	jenis	7	8	10	495.115,00	12	722.164,50	14	698.333,07	16	675.288,08	19	653.003,57	19,00	3.243.904,23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.04	Penelitian dan Pengembangan																	
3.05	Fungsi Lain																	
3.05.3.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	80	7.790.000,40	85	8.655.556,00	90	7.790.000,40	95	7.011.000,36	100	6.309.900,32	100,00	37.556.457,48	Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100		100	7.910.100,00	100	8.789.000,00	100	7.910.100,00	100	7.119.090,00	100	6.407.181,00	100,00	38.135.471,00	Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100	407.455,00	100	415.000,00	100	425.000,00	100	430.000,00	100	435.000,00	100,00	2.112.455,00	Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100		100	525.000,00	100	550.000,00	100	600.000,00	100	600.000,00	100	600.000,00	100,00	2.875.000,00	Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan			100%	2.240.822,60		2.319.940,55		2.756.431,55		2.738.585,55		2.782.751,50		12.838.531,75	Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	577.200,00	100	658.000,00	100	690.000,00	100	705.000,00	88	715.000,00	88,00	3.345.200,00	Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.01.17	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Prosentase bangunan yang berijin dan laik fungsi		40				5	75.000,00	10	380.000,00	15	485.000,00	20	520.000,00	20,00	1.460.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.05.3.05.01.18	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Rata-rata waktu pelayanan produk hukum daerah		Hari Kerja		30	656.100,00	30	729.000,00	30	801.900,00	30	882.090,00	30	970.299,00		4.039.389,00	Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.20	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Prosen			55	935.000,00	60	1.260.000,00	65	1.075.000,00	75	1.015.000,00	80	945.000,00	80,00	5.230.000,00	Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.21	Program Kehumasan	Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda	prosen	100		100	435.000,00	100	485.000,00	100	516.500,00	100	552.300,00	100	595.000,00	100,00	2.583.800,00	Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.22	Program Pengembangan Perekonomian Daerah	Inflasi	%	6,65	6,29		2.054,59		2.227,00		2.575.000,00		2.760.000,00		3.185.000,00	4,76	8.524.281,59	Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.23	Program Pembinaan Masyarakat Beragama, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, serta Kesejahteraan Rakyat	Jumlah jamaah yang terlayani transportasi, komunikasi dan silaturahmi	nilai angka			70	1.687.500,00	75	1.875.000,00	80	1.687.500,00	85	1.856.250,00	90	2.041.875,00		9.148.125,00	Sekretariat Daerah
3.05.3.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100,00	1.650.458,19	100,00	1.670.628,00	100,00	1.201.352,30	100,00	1.300.256,00	100,00	1.450.000,00	100,00	7.272.694,49	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	%	100	100,00	944.274,91	100,00	1.362.425,00	100,00	2.056.000,00	100,00	1.250.000,00	100,00	1.350.000,00	100,00	6.962.699,91	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen			12,00	1.862.772,01	12,00	2.329.053,00	12,00	2.948.000,00	12,00	3.840.000,00	12,00	3.950.000,00	12,00	14.929.825,01	Sekretariat DPRD

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	12	12	12,00	81.912,73	12,00	50.240,00	12,00	60.000,00	12,00	65.000,00	12,00	75.000,00	12,00	332.152,73	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.02.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	251.014,94	87,00	465.168,00	87,25	487.679,00	87,50	500.000,00	88	535.000,00	88,00	2.238.861,94	Sekretariat DPRD
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	prosentase arsip dinamis dan statis yang diselamatkan	Prosen	NA	NA	-	-	-	30.000,00	-	35.000,00	-	36.000,00	-	55.000,00	0,00	156.000,00	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.02.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Pembahasan Raperda, hearing, rapat-rapat DPRD, Reses dan Kunjungan Kerja	Dokumen				17.369.189,20		19.299.099,11		21.229.009,02		23.351.909,92		25.687.100,92		106.936.308,17	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.02.18	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Propemperda yang disetujui	kajian		1	6,00	66.388,94	6,00	265.500,00	6,00	270.000,00	6,00	280.000,00	7,00	290.000,00	7,00	1.171.888,94	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.02.21	Program Kehumasan	Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ lamu Pemda	prosen	100		100,00	507.967,90	100,00	892.124,00	100,00	975.000,00		980.000,00		990.000,00		4.345.091,90	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	585.720,00	100	755.000,00	100	1.930.500,00	100	1.737.450,00	100	1.563.705,00	100,00	6.572.375,00	Kecamatan KotaKendal
3.05.3.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100%	100	2.116.561,50	100	2.351.735,00	100	2.232.390,03	100	2.009.151,03	100	1.808.235,93	1,00	10.518.073,49	Kecamatan KotaKendal
3.05.3.05.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100	90.000,00	100	81.000,00	100	89.100,00	100	80.190,00	100	72.171,00	1,00	412.461,00	Kecamatan KotaKendal

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.03.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	90.000,00	100	81.000,00	100	89.100,00	100	80.190,00	88	72.171,00	88,00	412.461,00	Kecamatan KotaKendal
3.05.3.05.03.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN		100%	100%	100	154.065,00	100	240.000,00	100	1.034.000,00	100	930.600,00	100	837.540,00	1,00	3.196.205,00	Kecamatan KotaKendal
3.05.3.05.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	84,00	170.800,00	84,00	192.200,00	84,00	207.576,00	84,00	197.197,20	84,00	187.337,34	420,00	955.110,54	Kecamatan Patebon
3.05.3.05.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100	41,00	161.460,00	41,00	179.400,00	32,00	144.978,00	31,00	137.729,10	31,00	130.842,65	176,00	754.409,75	Kecamatan Patebon
3.05.3.05.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	35,00	15.750,00	35,00	17.500,00	35,00	18.900,00	35,00	17.955,00	35,00	17.057,25	175,00	87.162,25	Kecamatan Patebon
3.05.3.05.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	NA	NA	1,00	60.000,00	1,00	15.000,00	1,00	16.200,00	1,00	15.390,00	1,00	14.620,50	5,00	121.210,50	Kecamatan Patebon
3.05.3.05.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100	100	5,00	5.500,00	5,00	5.500,00	5,00	5.940,00	5,00	5.643,00	5,00	5.360,85	25,00	27.943,85	Kecamatan Patebon
3.05.3.05.04.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	104.400,00	25,00	108.000,00	43,00	116.640,00	25,00	110.808,00	88	105.267,60	88,00	545.115,60	Kecamatan Patebon

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100	100	100	36.000,00	100	39.600,00	100	42.768,00	100	40.629,60	100	38.598,12	156,00	197.595,72	Kecamatan Patebon
3.05.3.05.04.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100	100	43,00	363.400,00	43,00	371.472,00	42,00	298.545,00	42,00	283.617,75	42,00	269.436,86	212,00	1.586.471,61	Kecamatan Patebon
3.05.3.05.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	0,80	155.300,00	0,85	150.930,00	0,90	144.970,00	0,95	137.721,50	1,00	130.835,43	100,00	719.756,93	Kecamatan Pegandon
3.05.3.05.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	99,10 %	98,97%	0,80	379.100,00	0,85	96.400,00	0,90	149.070,00	0,95	141.616,50	1,00	134.535,68	1,00	900.722,18	Kecamatan Pegandon
3.05.3.05.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	31,00	15.420,00	31,00	13.950,00	27,00	12.150,00	27,00	11.542,50	27,00	10.965,38	100,00	64.027,88	Kecamatan Pegandon
3.05.3.05.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	89,20%	100%	0,80	5.000,00	0,85	-	0,90	13.980,00	0,95	13.281,00	1,00	12.616,95	1,00	44.877,95	Kecamatan Pegandon
3.05.3.05.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	%	0%	0,80	-	0,85	8.000,00	0,90	8.000,00	0,95	7.600,00	1,00	7.220,00	0,00	30.820,00	Kecamatan Pegandon

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.05.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	80.240,00	0,85	94.600,00	0,90	96.840,00	0,95	91.998,00	88	87.398,10	88,00	451.076,10	Kecamatan Pegandon
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	100	24.000,00	100	12.000,00	100	9.800,00	0,95	9.310,00	1,00	8.844,50	1,00	63.954,50	Kecamatan Pegandon
3.05.3.05.05.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100%	100%	0,80	191.000,00	0,85	201.500,00	0,90	142.570,00	0,95	135.441,50	1,00	128.669,43	1,00	799.180,93	Kecamatan Pegandon
3.05.3.05.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	174.296,00	100 %	227.000,00	100 %	241.770,00	100 %	229.681,50	100 %	218.197,43	100	1.090.944,93	Kecamatan weleri
3.05.3.05.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	%	100%	100 %	305.350,00	1,00	3.211.000,00	100	115.850,00	100	110.057,50	100	104.554,63	100	3.846.812,13	Kecamatan weleri
3.05.3.05.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	1,00	14.000,00	1,00	14.400,00	100	14.400,00	100	13.680,00	100	12.996,00	100	69.476,00	Kecamatan weleri
3.05.3.05.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	%	100%	1,00	-	1,00	9.000,00	100	9.000,00	100	8.550,00	100	8.122,50	100	34.672,50	Kecamatan weleri

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	%	100%	1,00	3.000,00	1,00	5.000,00	4,00	5.750,00	4,00	5.462,50	4,00	5.189,38	16,00	24.401,88	Kecamatan weleri
3.05.3.05.06.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	117.700,00	1,00	118.800,00	100	106.200,00	100	100.890,00	88	95.845,50	100	539.435,50	Kecamatan weleri
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	1,00	-	1,00	-	100	16.000,00	100	15.200,00	100	14.440,00	100	45.640,00	Kecamatan weleri
3.05.3.05.06.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100%	100%	1,00	103.554,00	1,00	197.900,00	100	93.000,00	100	88.350,00	100	83.932,50	100	566.736,50	Kecamatan Weleri
3.05.3.05.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100,00	192.434,00	100,00	212.560,00	100,00	177.500,00	100,00	168.625,00	100,00	160.193,75	100,00	911.312,75	Kecamatan Gemuh
3.05.3.05.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100%	1,00	350.455,00	1,00	57.000,00	1,00	65.000,00	1,00	61.750,00	1,00	58.662,50	1,00	592.867,50	Kecamatan Gemuh
3.05.3.05.07.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100,00	12.000,00	100,00	8.400,00	1,00	10.000,00	100,00	9.500,00	100,00	9.025,00	100,00	48.925,00	Kecamatan Gemuh

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	1,00	-	1,00	-	1,00	9.000,00	1,00	9.450,00	1,00	9.922,50	1,00	28.372,50	Kecamatan Gemuh
3.05.3.05.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100%	100%	1,00	-	1,00	-	1,00	15.000,00	1,00	14.250,00	1,00	13.537,50	1,00	42.787,50	Kecamatan Gemuh
3.05.3.05.07.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	116.500,00	87,00	105.000,00	87,25	115.000,00	87,50	109.250,00	88	103.787,50	88,00	549.537,50	Kecamatan Gemuh
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	1,00	10.976,00	1,00	8.000,00	1,00	20.000,00	1,00	21.000,00	1,00	22.050,00	1,00	82.026,00	Kecamatan Gemuh
3.05.3.05.07.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100%	100%	1,00	121.460,00	1,00	143.560,00	1,00	145.500,00	1,00	152.775,00	1,00	160.413,75	1,00	723.708,75	Kecamatan Gemuh
3.05.3.05.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	2.108,00	281.880,00	2.617,00	304.350,00	3.108,00	299.300,00	3.612,00	284.335,00	4.108,00	270.118,25		1.439.983,25	Kecamatan Cepiring
3.05.3.05.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen			32,00	3.807.842,00	31,00	2.113.500,00	31,00	125.000,00	32,00	118.750,00	32,00	112.812,50		6.277.904,50	Kecamatan Cepiring

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.08.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	18,00	16.200,00	18,00	16.200,00	20,00	17.000,00	20,00	16.150,00	20,00	15.342,50		80.892,50	Kecamatan Cepiring
3.05.3.05.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen			28,00	11.980,00	28,00	12.500,00	28,00	13.000,00	28,00	12.350,00	28,00	11.732,50		61.562,50	Kecamatan Cepiring
3.05.3.05.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan			25,00	34.026,00	25,00	36.500,00	4,00	39.500,00	4,00	37.525,00	4,00	35.648,75		183.199,75	Kecamatan Cepiring
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen			144,00	159.607,00	162,00	184.500,00	100,00	27.500,00	100,00	26.125,00	100,00	24.818,75		422.550,75	Kecamatan Cepiring
3.05.3.05.08.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	prosen				4.595,00		11.000,00	100,00	13.000,00	100,00	12.350,00	100,00	11.732,50		52.677,50	Kecamatan Cepiring
3.05.3.05.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100%	197.750,00	100%	235.287,75	100%	286.000,00	100%	271.700,00	100%	258.115,00	100%	1.248.852,75	Kecamatan Kaliwungu
3.05.3.05.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100	100%	352.050,00	100%	582.050,00	100%	297.000,00	100%	282.150,00	100%	268.042,50	100%	1.781.292,50	Kecamatan Kaliwungu

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.09.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100%	12.750,00	100%	14.662,50	100%	8.550,00	100%	8.122,50	100%	7.716,38	100%	51.801,38	Kecamatan Kaliwungu
3.05.3.05.09.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	116.500,00	100%	151.522,50	100%	117.147,50	100%	111.290,13	88	105.725,62	88%	602.185,74	Kecamatan Kaliwungu
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100	100	100%	10.000,00	100%	12.000,00	100%	10.000,00	100%	9.500,00	100%	9.025,00	100%	50.525,00	Kecamatan Kaliwungu
3.05.3.05.09.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	%	100	100%	195.970,00	100%	230.291,00	100%	90.000,00	100%	85.500,00	100%	81.225,00	100%	682.986,00	Kecamatan Kaliwungu
3.05.3.05.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100%	295.162,50	100%	249.219,00	100%	363.700,00	100%	345.515,00	100%	328.239,25	100%	1.581.835,75	Kecamatan Brangsong
3.05.3.05.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100%	100%	388.331,00	100%	257.611,00	100%	362.000,00	100%	343.900,00	100%	326.705,00	100%	1.678.547,00	Kecamatan Brangsong
3.05.3.05.10.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100%	12.300,00	100%	12.150,00	100%	11.250,00	100%	10.687,50	100%	10.153,13	100%	56.540,63	Kecamatan Brangsong

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	12.000	100%	11.400,00	100%	10.830,00	100%	34.230,00	Kecamatan Brangsong
3.05.3.05.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	17.600,00	100%	16.720,00	100%	15.884,00	100%	50.204,00	Kecamatan Brangsong
3.05.3.05.10.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	48.920,00	100%	101.520,00	100%	107.940,00	100%	102.543,00	88	97.415,85	88%	458.338,85	Kecamatan Brangsong
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	100%	44.480,00	100%	30.290,00	100%	30.290,00	100%	28.775,50	100%	27.336,73	100%	161.172,23	Kecamatan Brangsong
3.05.3.05.10.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100%	100%	100%	167.006,50	100%	225.010,00	100%	216.795,00	100%	205.955,25	100%	195.657,49	100%	1.010.424,24	Kecamatan Brangsong
3.05.3.05.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100,00	148.416,50	100,00	303.045,00	100,00	267.804,60	100,00	254.414,37	100,00	241.693,65	100,00	1.215.374,12	Kecamatan Boja
3.05.3.05.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100%	100,00	383.817,50	100,00	88.828,00	100,00	175.000,00	100,00	166.250,00	100,00	157.937,50	100,00	971.833,00	Kecamatan Boja

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.11.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100,00	16.870,00	100,00	19.250,00	100,00	19.250,00	100,00	18.287,50	100,00	17.373,13	100,00	91.030,63	Kecamatan Boja
3.05.3.05.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	%	100%	100,00	-	100,00	-	100,00	9.000,00	100,00	8.550,00	100,00	8.122,50	100,00	25.672,50	Kecamatan Boja
3.05.3.05.11.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	%	100%	100,00	4.170,00	100,00	12.270,00	100,00	14.920,00	100,00	14.174,00	100,00	13.465,30	100,00	58.999,30	Kecamatan Boja
3.05.3.05.11.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	120.154,00	87,00	121.260,00	87,25	126.260,00	87,50	119.947,00	88	113.949,65	88,00	601.570,65	Kecamatan Boja
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	100,00	18.754,00	100,00	10.685,00	100,00	12.500,00	100,00	11.875,00	100,00	11.281,25	100,00	65.095,25	Kecamatan Boja
3.05.3.05.11.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100%	100%	100,00	110.923,00	100,00	210.512,00	100,00	159.000,00	100,00	151.050,00	100,00	143.497,50	100,00	774.982,50	Kecamatan Boja
3.05.3.05.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100,00	131.868,00	100,00	152.071,00	100,00	176.781,00	100,00	167.941,95	100,00	159.544,85	100,00	788.206,80	Kecamatan Limbangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100%	61,00	494.261,00	106,00	311.194,00	56,00	330.591,00	55,00	250.000,00	55,00	200.000,00	321,00	1.586.046,00	Kecamatan Limbangan
3.05.3.05.12.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100,00	12.480,00	100,00	12.480,00	100,00	12.480,00	100,00	15.000,00	100,00	17.500,00	100,00	69.940,00	Kecamatan Limbangan
3.05.3.05.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	%	-	0,00	-	4,00	5.750,00	4,00	5.000,00	4,00	5.500,00	4,00	6.500,00	16,00	22.750,00	Kecamatan Limbangan
3.05.3.05.12.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	114.147,00	87,00	133.229,00	87,25	104.142,00	87,50	105.000,00	88	107.500,00	88,00	564.018,00	Kecamatan Limbangan
3.05.3.05.12.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan DATEN	%	100%	100%	303,00	89.997,00	457,00	137.708,00	457,00	130.904,00	457,00	190.450,00	457,00	192.462,00	2.131,00	741.521,00	Kecamatan Limbangan
3.05.3.05.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	153.890,00	1,00	157.140,00	1,00	172.000,00	1,00	163.400,00	1,00	155.230,00	1,00	801.660,00	Kecamatan Singorojo
3.05.3.05.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100%	1,00	1.341.000,00	1,00	1.441.000,00	1,00	130.000,00	1,00	123.500,00	1,00	117.325,00	1,00	3.152.825,00	Kecamatan Singorojo
3.05.3.05.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	1,00	-	1,00	14.000,00	1,00	11.000,00	1,00	11.550,00	1,00	12.127,50	1,00	48.677,50	Kecamatan Singorojo

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.13.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	126.480,00	87,00	111.780,00	87,25	128.000,00	87,50	121.600,00	88	115.520,00	1,00	603.380,00	Kecamatan Singorojo
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	1,00	26.000,00	100%	52.000,00	100%	11.000,00	100%	11.550,00	100%	12.127,50	1,00	112.677,50	Kecamatan Singorojo
3.05.3.05.13.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100%	100%	1,00	140.800,00	1,00	153.000,00	1,00	69.000,00	1,00	72.450,00	1,00	76.072,50	1,00	511.322,50	Kecamatan Singorojo
3.05.3.05.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	174.655,40	1,00	184.700,00	100	175.000,00	100	166.250,00	100	157.937,50	100	858.542,90	Kecamatan Sukorejo
3.05.3.05.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100%	1,00	133.916,00	1,00	497.800,00	100	82.500,00	100	78.375,00	100	74.456,25	100	867.047,25	Kecamatan Sukorejo
3.05.3.05.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	1,00	13.500,00	1,00	13.500,00	100	13.500,00	100	12.825,00	100	12.183,75	100	65.508,75	Kecamatan Sukorejo
3.05.3.05.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	1,00		1,00		100	9.000,00	100	8.550,00	100	8.122,50	100	25.672,50	Kecamatan Sukorejo

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.14.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	67.706,00	87,00	48.405,00	87,25	51.480,00	87,50	48.906,00	88	46.460,70	100	262.957,70	Kecamatan Sukorejo
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	1,00		100%	18.000,00	100	18.000,00	100	17.100,00	100	16.245,00	100	69.345,00	Kecamatan Sukorejo
3.05.3.05.14.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	Prosen	100%	100%	1,00	194.095,60	1,00	210.688,00	100	152.795,00	100	145.155,25	100	137.897,49	100	840.631,34	Kecamatan Sukorejo
3.05.3.05.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100		254.600,00		278.760,00	100	175.000,00	100	175.000,00	100	175.000,00	100	1.058.360,00	Kecamatan Patean
3.05.3.05.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100		300.000,00		357.000,00	100	150.000,00	100	135.000,00	100	121.500,00	100	1.063.500,00	Kecamatan Patean
3.05.3.05.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100		12.000,00		12.960,00	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00	100	60.960,00	Kecamatan Patean
3.05.3.05.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100	100		40.000,00		40.000,00	100	-	100	-	100	-	100	80.000,00	Kecamatan Patean

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.15.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	NA	NA		5.000,00		5.000,00	4	5.000,00	4	5.000,00	4	5.000,00	16	25.000,00	Kecamatan Patean
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	prosen	100	100		14.000,00		21.000,00	100	12.000,00	100	12.500,00	100	12.500,00	100	72.000,00	Kecamatan Patean
3.05.3.05.15.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan DATEN	prosen	%	100		355.000,00		381.440,00	100	125.000,00	100	125.000,00	100	125.000,00	100	1.111.440,00	Kecamatan Patean
3.05.3.05.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	246.750,00	1,00	147.800,00	100	140.000,00	100	133.000,00	100	126.350,00	1,00	793.900,00	Kecamatan Pageruyung
3.05.3.05.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100	1,00	309.600,00	1,00	130.000,00	100	136.000,00	100	129.200,00	100	122.740,00	1,00	827.540,00	Kecamatan Pageruyung
3.05.3.05.16.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	1,00	7.200,00	1,00	11.700,00	100	9.000,00	100	8.550,00	100	8.122,50	1,00	44.572,50	Kecamatan Pageruyung
3.05.3.05.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	NA	NA	0,00	-	0,00	-	4,00	2.000,00	4,00	1.900,00	4,00	1.805,00	16,00	5.705,00	Kecamatan Pageruyung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.16.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	119.050,00	87,00	101.400,00	87,25	107.400,00	87,50	102.030,00	88	96.928,50	100	526.808,50	Kecamatan Pageruyung
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100	100	100%	14.000,00	100%	-	100	14.000,00	100	13.300,00	100	12.635,00	100	53.935,00	Kecamatan Pageruyung
3.05.3.05.16.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	%	100	1,00	235.300,00	100,00	212.750,00	100	115.000,00	100	109.250,00	100	103.787,50	100	776.087,50	Kecamatan Pageruyung
3.05.3.05.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	147.698,70	1,00	194.286,60	100	175.104,23	100	166.349,02	100	158.031,57	100	841.470,12	Kecamatan Plantungan
3.05.3.05.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen			1,00	428.431,50	1,00	224.813,40	100	65.000,00	100	61.750,00	100	58.662,50	100	838.657,40	Kecamatan Plantungan
3.05.3.05.17.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	1,00	9.900,00	1,00	9.900,00	100	12.403,13	100	11.782,97	100	11.193,82	100	55.179,91	Kecamatan Plantungan
3.05.3.05.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen			-	-	-	-	100	16.537,50	100	15.710,63	100	14.925,09	100	47.173,22	Kecamatan Plantungan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan			-	-	-	-	4,00	4.630,50	4,00	4.398,98	4,00	4.179,03	16,00	13.208,50	Kecamatan Plantungan
3.05.3.05.17.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	97.360,00	87,00	87.500,00	87,25	150.000,00	87,50	142.500,00	88	135.375,00	100	612.735,00	Kecamatan Plantungan
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen			100%	12.000,00	-	-	100%	41.343,75	100	39.276,56	100	37.312,73	100	129.933,05	Kecamatan Plantungan
3.05.3.05.17.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%			1,00	205.075,00	1,00	152.570,00	100	172.000,00	100	163.400,00	100	155.230,00	100	848.275,00	Kecamatan Plantungan
3.05.3.05.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	219.289,00	100	246.173,00	100%	276.250,00	100%	262.437,50	100%	249.315,63	100,00	1.253.465,13	Kecamatan Rowosari
3.05.3.05.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100%	100	409.111,00	100	84.420,00	100%	83.540,00	100%	79.363,00	100%	75.394,85	1,00	731.828,85	Kecamatan Rowosari
3.05.3.05.18.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100	8.110,00	100	8.100,00	100%	9.000,00	100%	8.550,00	100%	8.122,50	100,00	41.882,50	Kecamatan Rowosari

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	-	-	-	-	100%	9.000,00	100%	8.550,00	100%	8.122,50	1,00	25.672,50	Kecamatan Rowosari
3.05.3.05.18.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100%	100%	86,75	95.720,00	87,00	105.800,00	87,25	105.200,00	87,50	99.940,00	88,00	94.943,00	88,00	501.603,00	Kecamatan Rowosari
3.05.3.05.18.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	95.720,00	87,00	105.800,00	87,25	98.500,00	87,50	93.575,00	88	88.896,25	1,00	482.491,25	Kecamatan Rowosari
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	100	16.000,00	100	-	100%	16.000,00	100%	15.200,00	100%	14.440,00	1,00	61.640,00	Kecamatan Rowosari
3.05.3.05.18.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100%	100%	100	112.434,00	100	79.540.000,00	100%	55.500,00	100%	52.725,00	100%	50.088,75	1,00	79.810.747,75	Kecamatan Rowosari
3.05.3.05.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	201.361,00	1,00	188.100,00	100	154.250,00	100	161.962,50	100	170.060,63	100	875.734,13	Kecamatan Kangkung
3.05.3.05.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen		%	1,00	378.850,00	1,00	58.000,00	100	91.000,00	100	95.550,00	100	100.327,50	100	723.727,50	Kecamatan Kangkung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	1,00	13.440,00	0,32	13.500,00	100	11.500,00	100	12.075,00	100	12.678,75	100	63.193,75	Kecamatan Kangkung
3.05.3.05.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen			0,00	-		-	100		-	100		-	100	-	Kecamatan Kangkung
3.05.3.05.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	%	%	0,00	-	0,00	-	100		-	100		-	100	-	Kecamatan Kangkung
3.05.3.05.19.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	100.745,00	87,00	82.485,00	87,25	102.000,00	87,50	107.100,00	88	112.455,00	100	504.785,00	Kecamatan Kangkung
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	100%	15.000,00	100%	-	100		-	100		-	100	15.000,00	Kecamatan Kangkung
3.05.3.05.19.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100%	100%	1,00	87.662,00	1,00	121.000,00	100	104.800,00	100	110.040,00	100	115.542,00	100	539.044,00	Kecamatan Kangkung
3.05.3.05.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100%	100%	131.944,50	100%	130.698,00	100%	135.030,00	100%	136.050,00	100%	137.550,00	100%	671.272,50	Kecamatan Ringinarum

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100%	9.000,00	100%	8.100,00	100%	9.000,00	100%	9.000,00	100%	9.000,00	100	44.100,00	Kecamatan Ringinarum
3.05.3.05.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	-	-	-	-	100%	9.000,00	100%	9.000,00	100%	9.000,00	100%	27.000,00	Kecamatan Ringinarum
3.05.3.05.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100%	100%	100%	7.646,00	100%	4.977,00	100%	8.650,00	100%	8.650,00	100%	9.650,00	100%	39.573,00	Kecamatan Ringinarum
3.05.3.05.20.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	156.065,00	87,00	142.615,00	87,25	163.565,00	87,50	155.386,75	88	147.617,41	88	765.249,16	Kecamatan Ringinarum
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	-	-	-	-	100%	12.000,00	100%	12.000,00	100%	12.000,00	100%	36.000,00	Kecamatan Ringinarum
3.05.3.05.20.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100%	100%	100%	150.461,10	100%	174.576,00	100%	135.226,00	100%	135.226,00	100%	135.226,00	100%	730.715,10	Kecamatan Ringinarum
3.05.3.05.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100%	100%	100%	163.240	100%	188.850	100%	190.000	100%	180.500,00	100%	171.475,00	100	894.065,00	Kecamatan Ngampel

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	OPD
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)			
3.05.3.05.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	50%	75%	80%	363.570	85%	530.000	90%	62.000	95%	65.100	100%	68.355	100	1.089.025,00	Kecamatan Ngampel
3.05.3.05.21.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100%	10.500	100%	9.000	100%	9.500	100%	9.975	100%	10.474	100	49.448,75	Kecamatan Ngampel
3.05.3.05.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	0%	100%	100%	-	100%	40.000	100%	-	100%	-	100%	-	100	40.000,00	Kecamatan Ngampel
3.05.3.05.21.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	0%	100%	100%	4.500	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.250	100%	5.513	100	25.262,50	Kecamatan Ngampel
3.05.3.05.21.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	121.500	87,00	127.050	87,25	131.000	87,50	137.550	88	144.428	100	661.527,50	Kecamatan Ngampel
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	100%	5.860	100%	18.000	100%	6.000	100%	6.300	100%	6.615	100	42.775,00	Kecamatan Ngampel
3.05.3.05.21.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100%	100%	100%	112.240	100%	127.000	100%	133.000	100%	139.650	100%	146.633	100	658.522,50	Kecamatan Ngampel

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100%	208.805,00	100%	244.000,00	100%	208.100,00	100%	197.695	100%	187.810	100,00	1.046.410,25	Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.05.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100%	100%	300.000,00	100%	314.650,00	100%	36.920,00	100%	35.074	100%	33.320	1,00	719.964,30	Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.05.22.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	100%	10.000,00	100%	15.000,00	100%	12.000,00	100%	11.400	100%	10.830	100,00	59.230,00	Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.05.22.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	100%	40.000,00	100%	50.000,00	100%	-	100%	30.000	100%	28.500	1,00	148.500,00	Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.05.22.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100%	100%	100%	-	100%	10.000,00	100%	10.000,00	100%	9.500	100%	9.025	1,00	38.525,00	Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.05.22.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	103.000,00	87,00	123.000,00	87,25	81.480,00	87,50	77.406	88	73.536	88,00	458.421,70	Kecamatan Kaliwungu Selatan
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	100%	12.000,00	100%	15.000,00	100%	18.000,00	100%	17.100	100%	16.245	1,00	78.345,00	Kecamatan Kaliwungu Selatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
3.05.3.05.22.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEM	%	100%	100%	100%	362.600,00	100%	370.000,00	100%	202.100,00	100%	191.995	100%	182.395	1,00	1.309.090,25	Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.05.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	525.100,00	1,00	581.300,00	1,00	809.000,00	1,00	866.500,00	1,00	952.500,00	100,00	3.734.400,00	Inspektorat
3.05.3.05.23.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100	1,00	60.000,00	1,00	515.000,00	1,00	738.000,00	1,00	775.000,00	1,00	775.000,00	100,00	2.863.000,00	Inspektorat
3.05.3.05.23.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	prosen	100	100	1,00	25.000,00	1,00	25.000,00	1,00	30.000,00	1,00	33.000,00	1,00	35.000,00	100,00	148.000,00	Inspektorat
3.05.3.05.23.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100	100	1,00	13.760,00	1,00	25.000,00	1,00	125.000,00	1,00	130.000,00	1,00	140.000,00	100,00	433.760,00	Inspektorat
3.05.3.05.23.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100	100	1,00	26.000,00	1,00	30.000,00	1,00	64.000,00	1,00	75.000,00	1,00	90.000,00	100,00	285.000,00	Inspektorat
3.05.3.05.23.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	86,50	87,75	157.240,00	87,00	169.800,00	87,25	203.000,00	87,50	217.500,00	88	232.000,00	100,00	979.540,00	Inspektorat
3.05.3.05.23.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan	1. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level SPIP	1	1	100%	2.268.405,00	100%	2.004.000,00	100%	4.270.000,00	100%	4.666.000,00	100%	4.925.000,00	3	18.133.405,00	Inspektorat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												OPD	
					2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target		Rp. (ribu)
	pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2. Rasio temuan rekomendasi yang ditindaklanjuti secara tuntas	%	62%	70%	0,75		0,80		0,82		0,83		0,85		0,85	-	
		3. prosentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima	%	100%	100%	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	-	
		4. Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKIP)	Skor	C	C	CC		CC		CC		B		B		B	-	
3.05.3.05.23.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	prosentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	39	39	1,00	33.600,00	1,00	31.700,00	1,00	55.000,00	1,00	60.000,00	1,00	65.000,00	100,00	245.300,00	Inspektorat
3.05.3.05.23.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level	1	2	1,00	27.000,00	1,00	30.000,00	1,00	45.000,00	1,00	50.000,00	1,00	55.000,00	3,00	207.000,00	Inspektorat
	TOTAL BELANJA LANGSUNG						822.268.892,00		785.422.902,00		760.450.000,00		716.914.000,00		709.757.000,00		3.952.247.249,98	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja utama suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan visi misi Bupati dan wakil Bupati beserta jajarannya. Penetapan indikator kinerja utama merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun masa mendatang. Berikut ini penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Kendal tahun 2016-2021.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kendal 2016-2021

No	Indikator	Data Awal	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	48	55	60	65	75	80
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	82	83	84	85
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Rata-Rata Lama Sekolah	6,73	6,93	7,13	7,33	7,53	7,73
5	Harapan Lama Sekolah	12,65	13,07	13,44	13,81	14,18	14,5
6	Angka Harapan Hidup	74,2	74,25	74,3	74,35	74,4	74,45
7	Pengeluaran per kapita (PPP)/thn	10.631.000,04	10.820.231,84	11.012.831,97	11.208.860,38	11.408.378,09	11.611.447,22
8	Jumlah desa tertinggal	Na	85	65	45	23	0
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,00	75,5	76	76,5	77	77,5

No	Indikator	Data Awal	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
10	Total Fertility Rate (TFR)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
11	Atlet berprestasi skala Provinsi dan nasional	52	195	105	110	120	125
12	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Sektor industri pengolahan (%)	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26
13	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan (%)	NA	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
14	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan (%)	4,10	5	5	5	5	5
15	Ketersediaan bahan pokok utama/ Beras (%)	171,68	157,57	173	175	177	177
16	Prosentase kenaikan kunjungan wisatawan	164.106	5	5	5	5	5
17	PAD sektor pariwisata (Ribu)	1.345.315	1.479.846	1.627.830	1.790.613	1.969.674	2.166.641
18	Prosentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	63,3	70	80	88	94	100
19	Prosentase permukiman kumuh (%)	69,9	56,75	20,95	0	0	0
20	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95,96	96,37	96,78	97,19	97,61	98,01
21	Prosentase rumah tangga yang menggunakan air minum (%)	79	83	89	100	100	100
22	Prosentase rumah tinggal bersanitasi (%)	78	80	85	100	100	100

No	Indikator	Data Awal	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	49,82	50	52	55	57	60
24	Nilai Investasi (juta rupiah)	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.000	1.610.000

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator "hasil" lebih utama daripada sekedar "keluaran" karena "hasil" (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2016 merupakan capaian pembangunan dan tahun 2017-2021 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai

dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen perubahan RPJMD diuraikan dalam tabel 8.2 sebagai berikut:

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Kendal

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1)	Pertumbuhan ekonomi	%	5,17	5,2 - 5,6	5,4 - 5,8	5,6 -6,0	5,8 - 6,2	6,0-6,4	6,2-6,6	6,2-6,6	Lintas PD
2)	PDRB per Kapita ADHK	Juta Rp	26,01	26,97	27,97	29,01	30,08	31,19	32,35	32,35	Lintas PD
3)	Inflasi	%	6,65	6,29	5,95	5,63	5,32	5,03	4,76	4,76	Lintas PD
4)	Tingkat Kemiskinan	%	11,62	11,37	11,10	10,80	10,68	10,45	9,8	9,8	Lintas PD
5)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,57	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	75,5	Lintas PD
6)	Pengeluaran per Kapita	Rupiah/kapita/tahun	10.419.000	10.517.000	10.613.000	10.725.000	10.835.000	10.912.000	11.014.000	11.014.000	Lintas PD
7)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,22 (2014)	93,35	93,5	93,7	93,9	94,2	94,5	94,5	Lintas PD
8)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,54 (2014)	75,00	75,5	76	76,5	77	77,5	77,5	Lintas PD
9)	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	10,35	9,00	8,89	8,75	8,5	8,2	8	8	Lintas PD
10)	Angka Kematian Balita	per 1000 KH	12,41	11,5	11,0	10,5	10,2	10	9,5	9,5	Lintas PD
11)	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,05	0,048	0,045	0,040	0,035	0,030	0,030	0,030	Lintas PD

12)	Angka Kematian Ibu	per 10000 O KH	148,8	129,4	122,9	120	118	116	102,0	1100	Lintas PD
13)	Opini BPK	Indeks	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Lintas PD
14)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	1	2	2	3	3	3	3	3	Inspektorat
15)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	Na	48	55	60	65	75	80	80	Setda
16)	Prosentase perangkat daerah pelayanan yang indeks IKMnya Baik	%	80	80	85	90	95	100	100	100	Setda
17)	Prosentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda	Prosen	100	100	100	100	100	100	100	100	Setda
18)	Jumlah jamaah yang terlayani transportasi, komunikasi dan silaturahmi	Nilai angka	0	0	70	75	80	85	90	90	Setda
19)	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,64	6,73	6,93	7,13	7,33	7,53	7,73	7,73	Dinas pendidikan dan kebudayaan
20)	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,41	12,65	13,07	13,44	13,81	14,18	14,5	14,5	Dinas pendidikan dan kebudayaan
21)	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,15	74,20	74,25	74,30	74,35	74,40	74,45	74,45	Dinas kesehatan
22)	Total Fertility Rate (TFR)	Indeks	2,07	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	Dinas P2KBP2PA
23)	Prosentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang tertangani	%	NA	NA	20	20	20	20	20	20	Dinas Sosial
24)	Prosentase fakir miskin dan PMKS yang mendapat pembinaan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
25)	Persentas PSKS yang dibina	%			10	10	10	10	10	10	Dinas Sosial

26)	Prosentase PMKS yang didampingi	%	NA	NA	20	20	20	20	20	100	Dinas Sosial
27)	Prosentase Anak terlantar yang dibina	%	NA	NA	10	10	10	10	10	10	Dinas Sosial
28)	Jumlah meningkatnya pembinaan anak cacat dan trauma	anak		316	10	10	10	10	10	366	Dinas Sosial
29)	Prosentase Meningkat-nya kemampuan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)	%	NA	10	10	10	10	10	10	60	Dinas Sosial
30)	Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP2PA
31)	Jumlah pemuda yang yang dilatih pendidikan karakter	Orang			100	150	200	250	300	300	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
32)	Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	52	57	90	95	100	120	125	125	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
33)	Prestasi pemuda kendal di lingkup provinsi maupun nasional	orang	58	60	60	60	60	60	60	60	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
34)	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Unit	1.270	1.285	1.300	1.315	1.335	1.355	1.380	1.380	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
35)	Prosentase koperasi sehat	%	70	70	72	75	80	85	90	90	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
36)	Ketersediaan pangan Utama /beras	%	165	167	170	173	175	177	177	177	Dinas pertanian dan Pangan

37)	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan Budidaya	%	1,75	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	Dinas Kelautan dan Perikanan
38)	Prosentase pertumbuhan kunjungan wisata	% / Tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
39)	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar budaya	Na	Na	Na	1	1	2	3	3	Dinas pendidikan dan kebudayaan
40)	Jumlah kasus konflik antar umat beragama	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	Kesbangpol
41)	Jumlah Dokumen inspeksi kondisi jalan	Dok	2	2	2	2	2	2	2	2	DPU dan Penataan Ruang
42)	Tersedianya dokumen data base jalan yang up to date	Dok	5	0	2	2	4	4	4	16	DPU dan Penataan Ruang
43)	Prosentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	59,33	63,30	70	80	88	94	100	100	DPU dan Penataan Ruang
44)	Jumlah jalan/ jembatan yang terbangun	Jalan/ jembatan	0	0	1		2	3	2	8	DPU dan Penataan Ruang
45)	Prosentase Daerah irigasi berfungsi baik	%	NA	42	50	55	60	65	70	70	DPU dan Penataan Ruang
46)	Jumlah kegiatan konservasi	%	15,872	0	43,66	45	47,5	49,08	54,5	54,5	DPU dan Penataan Ruang
47)	prosentase Turap/Talud/Bronjong yang terbangun	%	25	0	30	48	68	88	99	99	DPU dan Penataan Ruang
33)	Prosentase Kawasan Kumuh	%	70,18	69,9	56,75	20,95	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
48)	Prosentase rumah tangga yang menggunakan air minum	%	75	79	83	89	100	100	100	100	DPU dan Penataan Ruang
49)	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	%	72,9	78	80	85	100	100	100	100	DPU dan Penataan Ruang

50)	Nilai Investasi	Trilyun Rupiah	0,083	1,000	1,100	1,210	1,331	1,464	1,610	7,715	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
51)	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,90	7,00	6,70	6,50	6,30	6,00	5,70	5,70	Disnaker
52)	Prosentase angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol
ASPEK PELAYANAN UMUM											
<u>Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</u>											
1. Pendidikan											
1)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%		43,84	45	47	49	51	53	53	Dinas pendidikan dan kebudayaan
2)	Prosentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	%	37,23	39,00	41,50	43,50	46,00	48,00	50,00	50,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
3)	Angka kelulusan pendidikan non formal	%		81,45	81,96	82,48	83,00	83,51	84	84	Dinas pendidikan dan kebudayaan
4)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A	%	106,29	103,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
5)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	98,57	98,90	99,20	99,50	99,80	100,00	100,00	100,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
6)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	%	84,73	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
7)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	60,24	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	66,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
8)	Angka Putus Sekolah (APS) SD	%	0,11	0,10	0,08	0,06	0,04	0,03	0,02	0,02	Dinas pendidikan dan kebudayaan

9)	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	%	0,83	0,71	0,59	0,47	0,35	0,23	0,10	0,10	Dinas pendidikan dan kebudayaan
10)	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
11)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/ MA	%	88,35	88,45	88,55	88,70	88,80	88,90	90,00	90,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
12)	Prosentase Ruang Kelas SD Kondisi Baik	%	60,19	61,30	62,41	63,52	64,63	65,74	66,85	66,85	Dinas pendidikan dan kebudayaan
13)	Prosentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik	%	69,71	75,23	79,75	82,26	84,77	87,28	89,79	89,79	Dinas pendidikan dan kebudayaan
14)	Prosentase SD Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	29,95	40,56	47,38	52,62	57,87	63,11	68,36	68,36	Dinas pendidikan dan kebudayaan
15)	Prosentase SMP Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	67,65	71,57	71,57	76,47	81,37	86,27	91,18	91,18	Dinas pendidikan dan kebudayaan
16)	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SD		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
17)	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SMP		0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
18)	Rasio Guru/Siswa SD		0,07	0,067	0,063	0,06	0,057	0,053	0,05	0,05	Dinas pendidikan dan kebudayaan
19)	Rasio Guru/Siswa SMP		0,06	0,059	0,058	0,056	0,054	0,052	0,05	0,05	Dinas pendidikan dan kebudayaan

20)	Prosentase Penduduk Usia 15 - 60 Tahun Melek Huruf	%	96,41	96,58	96,76	96,94	97,12	97,30	97,50	97,50	Dinas pendidikan dan kebudayaan
21)	Prosentase PKBM Memiliki Akreditasi	%	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	75,00	75,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
22)	Presentase pendidik yang memiliki sertifikasi	%	Na	51,5	52	52,5	53	53,5	54	54	Dinas pendidikan dan kebudayaan
23)	Prosentase Pendidik TK Memiliki Sertifikasi	%	42,74	42,95	43,16	43,37	43,58	43,79	44,00	44,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
24)	Prosentase Pendidik SD Memiliki Sertifikasi	%	54,89	55,75	56,60	57,45	58,30	59,15	60,00	60,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
25)	Prosentase Pendidik SMP Memiliki Sertifikasi	%	56,96	57,80	58,60	59,50	60,40	61,20	62,00	62,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
26)	prosentase ketersediaan data kependidikan	%	Na	100	100	100	100	100	100	100	Dinas pendidikan dan kebudayaan
2	Kesehatan										
1)	Prosentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	%	77	80	83	85	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
2)	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3)	Cakupan sarana prasarana puskesmas	Puskesmas			68	70	72	75	78	78	Dinas Kesehatan
4)	Jumlah RS pemerintah yang dibangun	Buah					1	1	1	1	Dinas Kesehatan
5)	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas	1	12	9	8	0	0	0	30	Dinas Kesehatan
6)	Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM / P-IRT)	%	62	64	65	70	75	80	85	85	Dinas Kesehatan

34)	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,27	94	94,5	95	95	95	95	95	Dinas Kesehatan
35)	Cakupan penduduk memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	%	60	65	70	75	80	85	90	90	RSUD Dr.H. Soewondo
36)	Prosentase Pelayanan terhadap gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	Prosen	100	100	100	100	100	100	100	100	RSUD Dr.H. Soewondo
37)	BOR (Bed Occupancy Rate)	%	75	75	75	75	75	75	75	75	RSUD Dr.H. Soewondo
38)	AVLOS (Average Length Of Stay)	Hari	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	RSUD Dr.H. Soewondo
39)	NDR (Net Date Rate)	%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	RSUD Dr.H. Soewondo
40)	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	Nilai	80	80	81	82	83	84	85	85	RSUD Dr.H. Soewondo
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1)	Prosentase saluran drainase/gorong-gorong berkondisi baik	%	40,57	42,19	81	84	87	90	93	93	DPU dan Penataan Ruang
2)	Prosentase cakupan drainase lingkungan kondisi baik	%		69	75	86	95	100	100	100	DPU dan Penataan Ruang
3)	Prosentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	%	60	Na	65	70	75	80	85	85	DPU dan Penataan Ruang
4)	prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	78	78	84	88	92	95	100	100	DPU dan Penataan Ruang
5)	Prosentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.	%	1,3	2	4	6	8	10	12	12	DPU dan Penataan Ruang, DLH
6)	Prosentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	%	0	0	20	40	60	80	100	100	DPU dan Penataan Ruang, Baperlitbang

11)	Jumlah Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	orang	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	Kantor Kesbangpol
12)	Jumlah Organisasi Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	ormas	5	5	5	5	5	5	5		Kantor Kesbangpol
13)	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	%	76,7	0	0	78	81	80	80	80	Kantor Kesbangpol
14)	Jumlah data dan informasi	Dokumen	1	4	7	4	3	2	3	23	BPBD
15)	Prosetase bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
16)	meningkatnya kualitas kinerja penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan kepada kordan serta Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
17)	Prosentase Meningkatnya kemampuan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)	%	0	0	10	10	10	10	10	10	BPBD
6	Sosial										
1)	Prosentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang tertangani	%/tahun	NA	NA	20	20	20	20	20	20	Dinsos
2)	Prosentase pembinaan Anak terlantar yang tertangani	%/tahun	NA	NA	10	10	10	10	10	10	Dinsos
3)	Jumlah pembinaan anak cacat dan trauma yang tertangani	Anak	NA	316	10	10	10	10	10	366	Dinsos
4)	Prosentase Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	%/tahun	7	7	7	7	7	7	7	7	Dinsos
5)	Prosentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani	%/tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos
Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											

5)	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	%	2,11	3,85	6	7	9	11	13	13	Dinas P2KBP2PA
6)	Cakupan Pengelola Industri rumahan (IR) yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	%	16,	21,62	26,40	31,18	35,96	40,7	45,52	45,52	Dinas P2KBP2PA
3	Pangan										
1)	Ketersediaan energi perkapita	%	177	158	175	179	183	185	185	185	Dinas Pangan dan Pertanian
2)	Ketersediaan protein perkapita	%	117	117,11	115	115	116	116	117	117	Dinas Pangan dan Pertanian
3)	Penguatan Cadangan Pangan	%	20,09	27,42	30	35	40	45	45	45	Dinas Pangan dan Pertanian
4)	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	90	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Pangan dan Pertanian
5)	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	67,8	70	72	75	78	80	80	80	Dinas Pangan dan Pertanian
6)	Penanganan daerah rawan pangan	%	35,7	42,8	42,8	50	50	50,1	50,1	50,1	Dinas Pangan dan Pertanian
7)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	87,9*) Perhitungan versi lama	82,1	84,1	86,8	86,8	87	87,5	87,5	Dinas Pangan dan Pertanian
8)	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80	83,5	80	80	83,3	83,3	86	86	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Pertanahan										
1)	Lahan Pemda Bersertifikat	Bidang	0	0	45	45	45	45	45	225	DPU dan Penataan Ruang
2)	Jumlah konflik pertanahan milik Pemda	kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	DPU dan Penataan Ruang
5	Lingkungan Hidup										
1)	Terpenuhinya IKLH	Skor	45	49,82	63,49	65	66	67	68	68	DLH
2)	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA	Kec.	12	12	13	14	15	16	17	17	DLH
3)	Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata	Lokasi	26	26	26	28	30	32	34	34	DLH

4)	Jumlah jenis data informasi lingkungan hidup yang dapat diakses	jumlah	3	3	4	4	4	5	5	5	DLH
5)	Jumlah sumber mata air yang tertangani	titik	Na	Na	1	1	2	2	2	2	DLH
6)	Luas Lahan kritis dan sumber mata air yang tertangani	Ha	0	6	8	10	12	15	20	20	DLH
7)	Prosentase Volume timbulan sampah yang tertangani	%	8,31	8,73	9,43	10,46	11,39	12,39	13,06	13,06	DLH
8)	Prosentase pembinaan lingkungan hidup di wilayah penghasil tembakau	%	40	20	20	20	20	20	20	100	DLH
9)	Jumlah makam yang dipelihara/ dikelola Pemda	lokasi	7	7	7	7	7	7	7	7	DLH
10)	RTHK Perkotaan Publik	%	0	20	20	20	20	20	20	20	DPU dan Penataan Ruang
6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1)	Rasio Penduduk ber KTP	%	74,20	80	84	88	92	96	98	98	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2)	Rasio Anak berakte kelahiran	%	86,6	90	92	94	96	98	99	99	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3)	Kepemilikan akta kelahiran	%	63,22	70	75	80	85	90	95	95	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4)	Rasio Pasangan berakte nikah	%	1	3	5	7	9	11	13	13	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5)	Cakupan Akte Kematian	%	2	10	25	45	70	80	100	100	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1)	Jumlah desa tertinggal	Desa			85	65	45	23	0	0	Dinpermasdes
2)	Jumlah BUMDes yang terbentuk	Unit	0	40	62	60	60	34	10	266	Dinpermasdes
3)	Desa yang mendapatkan program TMMD	Desa	2	2	3	3	3	3	3	16	Dinpermasdes
4)	Jumlah aparatur desa yg sudah mengikuti bintek / pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	266	266	266	266	266	266	266	266	Dinpermasdes
5)	Jumlah data dan informasi	Dokumen	266	266	266	266	266	266	266	266	Dinpermasdes
6)	Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	20	28	28,50	29	29,50	30	30,50	30,50	Dinpermasdes
7)	Jumlah desa yang memiliki RPJMDes, APBDes, dan RKPDes	desa	266	266	266	266	266	266	266	266	Dinpermasdes
8	Pengendalian Penduduk dan KB										
1)	Rasio akseptor KB (baru)	%	93	93	94	94	95	95	95,5	95,5	Dinas P2KBP2PA
2)	Cakupan peserta KB aktif	%	80,6	80,9	81	81,3	81,6	81,8	82	82	Dinas P2KBP2PA
3)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	79,21	79,23	79,25	79,27	79,28	79,3	79,32	79,32	Dinas P2KBP2PA
4)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1,45	1,43	1,40	1,35	1,30	1,25	1,2	1,2	Dinas P2KBP2PA
5)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidakterpenuhi (Unmet Need)	%	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas P2KBP2PA
6)	Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria	%	1,1	1,1	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,4	Dinas P2KBP2PA

7)	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang	%	63,8	64,1	65,5	66,08	67,13	68,1	69,23	69,23	Dinas P2KBP2PA
8)	Prosentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	20	21	22	24	26,6	28,8	31,1	31,1	Dinas P2KBP2PA
9)	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	77,59	78,9	80	80	80	80	80	80	Dinas P2KBP2PA
9	Perhubungan										
1)	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	unit	4	5	5	5	6	6	6	6	Dishub
2)	Jumlah Rute lintas penyeberangan	buah	2	2	2	2	3	3	3	3	Dishub
3)	Jumlah Pelabuhan, Terminal dan Taman Parkir	unit	5	5	5	6	6	6	6	6	Dishub
4)	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	unit	504	554	608	670	780	875	940	940	Dishub
5)	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dishub
6)	Jumlah uji KIR angkutan umum				12.235	12.336	12.594	12.845	12.930	12.930	Dishub
7)	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	unit	4	4	4	4	5	5	5	5	Dishub
8)	Jumlah Trayek yang terlayani	Trayek	60	60	60	61	62	62	62	62	Dishub
9)	prosentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%		53,33	63	66	78	80	86	86	Dishub

8)	Jumlah Perda / Perbup dan kajian dalam penyelenggaraan TIK	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Diskominfo
11	Koperasi UMKM										
1)	Jumlah wirausaha baru mikro	unit	31.647	31.747	31.847	31.962	32.082	32.207	32.337	32.337	Dinas Perindustrian, koperasi, UKM
2)	Cakupan dukungan manajemen UMKM	Kec	5	5	5	0	10	0	10	20	Dinas Perindustrian, koperasi, UKM
3)	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Unit	1.270	1.285	1.300	1.315	1.335	1.355	1.380	1.380	Dinas Perindustrian, koperasi, UKM
4)	Prosentase Koperasi aktif	%	71,4%	71,4%	75,76%	76,55%	77,30%	78%	78,65%	78,65%	Dinas Perindustrian, koperasi, UKM
12	Pernanaman Modal										
1)	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Sektor	5	5	5	5	5	5	5	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Jumlah	146	194	241	289	336	384	432	432	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3)	Peta potensi investasi kabupaten Kendal	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4)	Kecepatan pelayanan perizinan	hari	14	7	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Kepemudaan dan Olahraga											
1)	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	8	8	8	12	12	15	15	70		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2)	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	8	8	8	12	12	15	15	70		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3)	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	kelompok	13	15	15	18	20	22	24	24		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4)	Jumlah wirausaha muda pemula	orang	Na	200	40	40	40	40	40	400		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5)	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	cabor	29	29	29	32	33	33	33	33		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6)	Jumlah klub olahraga	klub	58	60	62	64	66	68	70	70		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

7)	Jumlah gedung olahraga	unit	7	7	7	8	9	10	10	10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
8)	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	52	195	105	110	120	125	130	130	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
14	Statistik										
1)	Buku Kendal dalam Angka	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Diskominfo
2)	Buku PDRB dalam Angka	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Diskominfo
15	Persandian										
1)	Prosentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi	%	1,53	1,00	1,25	1,50	2,00	2,25	2,50	2,50	Bag. Umum
16	Kebudayaan										
1)	Prosentase Penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	50	50	50	80	80	90	90	90	Dinas pendidikan dan kebudayaan
2)	Prosentase misi budaya yang dilestarikan	%	75	75	80	80	90	90	100	100	Dinas pendidikan dan kebudayaan
3)	Jumlah pembinaan kepada pelaku seni dan budaya	Kelompok	NA	550	565	575	580	585	585	585	Dinas pendidikan dan kebudayaan
4)	Jumlah grup kesenian	Kelompok	550	550	565	575	580	585	600	600	Dinas pendidikan dan kebudayaan

1)	tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	23.770	26.770	29.770	32.770	35.770	38.770	41.770	41.770	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2)	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	13.720	15.092	16.601	18.261	20.087	22.096	24.306	116.443	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan											
1	Kelautan dan Perikanan										
1)	Produksi perikanan budidaya	Kg	21.967.096	22.883.000	24.027.885	25.229.279	26.490.743	27.815.280	29.206.044	155.652.231	DKP
2)	Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	0,42	5	5	5	5	5	5	5	DKP
3)	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	Kelompok/tahun	14	10	10	10	10	10	10	10	DKP
4)	Produksi perikanan tangkap	Kg	1.858.904	2.096.288	2.138.213	2.180.977	2.224.596	2.269.087	2.314.469	13.223.630	DKP
5)	Prosentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam kondisi baik	%	0	20	40	60	80	100	100	100	DKP
6)	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok/tahun	24	10	10	10	10	10	10	10	DKP
7)	Tingkat konsumsi ikan penduduk (kg/kap/th)	kg/kap/th	14,53		15,43	16,2	17,01	17,86	18,75	18,75	DKP
2	Pariwisata										
1)	Kunjungan wisata	orang	239.899	239.899	263.889	290.277	319.304	351.234	386.358	1.850.961	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2)	Prosentase obyek wisata yang dipromosikan	%	75	80	85	85	90	95	100	100	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3)	Jumlah obyek wisata unggulan	DTW	9	9	9	9	10	10	10	10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,45	0,56	0,50	0,51	0,53	0,61	0,71	0,71	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	Pertanian										
1)	Cakupan bina kelompok petani	kelompok	51	71	70	71	72	72	73	429	Dinas Pertanian dan Pangan
2)	Produksi pertanian tanaman pangan utama										Dinas Pertanian dan Pangan
	- Padi	Ton	289.870	260.888	231.975	233.135	234.301	235.472	236.472	1.432.243	
	- Jagung	Ton	209.032	225.505	209.869	210.289	210.710	211.131	211.553	1.279.057	
	- Kedelai	Ton	3.032	1.340	1.341	1.344	1.347	1.351	1.354	8.077	
	Produksi tanaman hortikultura										
	- Bawang merah	Kwintal	254.993	320.936	258.832	260.773	262.729	264.700	266.685	1.634.655	
	- Cabe	Kwintal	45.001	40.984	45.114	45.226	45.339	45.453	45.566	267.682	
	Produksi tanaman perkebunan										Dinas Pertanian dan Pangan

	- Tebu	Ton	21.124	19.169,8	18.167	14.998,3	17.650	17.650	18.709	106.344,1	
	- Tembakau	Ton	4.728,66	806,13	1.020	1.194,9	1.280,3	1.331,5	1.365,6	6.998,43	
	- Kopi	Ton	1.082,00	1.307,07	1.114,78	1.131,50	1.148,47	1.165,70	1.183,18	7.043,70	
	- Cengkeh	Ton	422,41	158,09	99,96	179,25	197,91	217,71	228,58	1.081,50	
	- Karet	Ton	52,11	36,26	53,16	53,69	54,23	54,77	55,32	307,43	
	- Kelapa	Ton	771,42	598,76	546,58	548,55	547,5	548,7	549,1	3.339,19	
	- Kakao	Ton	123,85	198,54	127,59	129,51	131,45	133,42	135,42	855,93	
	Keikutsertaan dalam pameran promosi produk pertanian	Even	4	3	5	5	5	5	5	28	
	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok	51	71	70	71	71	72	73	429	Dinas Pertanian dan Pangan
	Populasi komoditas peternakan utama										
	- Sapi potong	ekor	21.440	20.523	20.606	20.738	20.856	20.986	21.106	21.106	
	- Kambing	ekor	36.718	37.776	37.558	37.934	38.140	38.313	38.696	38.696	
	- Domba	ekor	29.839	30.842	30.438	30.742	30.884	31.044	31.354	31.354	
	Ayam ras pedaging	ekor	8.587.800	8.587.800	8.254.000	8.263.000	8.295.000	8.312.000	8.320.000	50.031.800	

	- Ayam ras petelur	ekor	3.583.300	3.799.915	4.000.000	4.000.000	4.050.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	
	- Meningkatnya produksi daging dan telur										
	- daging sapi	kg	418.140	640.543	742.500	745.000	750.000	750.000	762.500	4.390.543	
	- daging kambing	kg	14.513	108.801	112.750	115.350	115.500	116.720	117.250	686.371	
	Daging domba	kg	5.374	16.393	14.950	15.225	15.430	15.645	15.825	93.468	
	- Daging ayam ras pedaging	kg	3.649.815	5.916.994	5.821.500	5.833.500	5.885.600	5.895.710	5.912.235	35.265.239	
	- Telur ayam ras	kg	28.827.900	36.204.920	37.720.250	37.720.250	37.965.000	38.345.000	38.345.000	226.300.420	
	- Angka kematian / mortalitas ternak										
	- Sapi potong	%	3	2,90	2,80	2,70	2,60	2,50	2,40	2,40	
	- Domba	%	2,61	2,56	2,51	2,46	2,41	2,39	2,15	2,15	
	- Kambing	%	2,61	2,56	2,51	2,46	2,41	2,39	2,15	2,15	
	- Ayam ras	%	4,80	5,60	5,40	5,30	5,20	5,10	5,00	5,00	

	Luas Lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal/dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan	Ha	3.500	2.000	1.280	1.050	1.150	1.250	1.350	8.080	Dinas Pertanian dan Pangan
	Luas Lahan Pertanian Panga Berkelanjutan (LP2B)	Ha	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	Dinas Pertanian dan Pangan
	Panjang jalan usaha tani/jalan produksi yang dibangun/diperbaiki	Ha			1.600	2.500	2.750	3.000	3.250	13.100	Dinas Pertanian dan Pangan
	Luas lahan yang mendapat pemupukan menggunakan pupuk bersubsidi	Ha	30.000	31.000	32.000	33.200	33.500	34.000	35.000	35.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	122	122	122	122	122	122	122	122	Dinas Pertanian dan Pangan
4	Perdagangan										
1)	Prosentase UTTP yang ditera	%	0	0	0	50	70	80	90	90	Dinas perdagangan
2)	Perkembangan nilai ekspor	%	3	5	5	5	5	5	5	5	Dinas perdagangan
3)	Cakupan bina kelompok pedangag/ jumlah pedangag	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas perdagangan
4)	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	50	75	80	85	90	95	95	95	Dinas perdagangan
5)	Prosentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	0	0	0	8,33 (1 pasar)	8,33 (1 pasar)	16,66 (2 pasar)	16,66 (2 pasar)	16,66 (2 pasar)	Dinas perdagangan

6)	Prosentase lokasi PKL yang tertata	%	0	0	10	10	10	10	10	10	Dinas perdagangan
5	Perindustrian										
1)	Prosentase industri kecil dan menengah yang berkembang	%	0,2	0,25	0,55	1,62	2,77	4,01	4,62	4,62	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
2)	Prosentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT	%	12,0	12,42	13,24	14,13	15,12	16,47	17,89	17,89	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
3)	Prosentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	%	0,33	0,33	0,33	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
4)	Prosentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	0,33	0,33	0,66	1,22	1,98	2,64	3,30	3,30	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
5)	Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam PDRB	%	40,74	40,97	41,2	41,43	41,67	41,9	42,14	42,14	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
6	Transmigrasi										
1)	Jumlah calon transmigran yang dilatih tentang kemampuan dasar sesuai dengan lokasi dan kebutuhan kompetensi.	KK	0	10	4	4	4	3	3	28	Disnaker

2)	Prosentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	%	0	100	50	40	40	30	20	20	Disnaker
Urusan Penunjang											
1	Kepegawaian										
1)	Prosentase Aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat/ BinteK yang difasilitasi BKPP Kabupaten Kendal pada tahun berjalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2)	Prosentase struktur jabatan yang terisi	%	86,5	87,3	87	87	90	90	95	95	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3)	Jumlah jenis pelayanan berbasis teknologi informasi	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang menggunakan E-Gov	7	8	10	12	14	16	19	19	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4)	Prosentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2	Pengawasan										
1)	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	62	70	75	80	82	83	85	85	Inspektorat
2)	prosentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	39	39	90	100	100	100	100	100	Inspektorat

3)	Prosentase aduan masyarakat atas layanan public yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
4)	Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKJIP)	Huruf	C	C	CC	CC	CC	B	B	B	Inspektorat
5)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	1	1	2	2	3	3	3	3	Inspektorat
6)	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	1	2	2	2	3	3	3	3	Inspektorat
7)	Prosentase Aparatur Sipil Negara yang melaporkan hasil kekayaan	%	39	90	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
3	Pengelolaan Keuangan dan Aset										
1)	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	11	13	15	17	19	21	23	23	Badan Keuangan Daerah
4	Pemerintahan Umum										
1)	Jumlah Perda yang dibahas dan ditetapkan.	buah	15	15	16	16	17	17	18	84	Setwan
2)	Prosentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda	Prosen	100	100	100	100	100	100	100	100	Setwan
3)	% PD yang bernilai IKM baik	%	80	80	85	90	95	100	100	100	Bag. Organisasi
4)	% Pelaksanaan Urusan Sesuai SPM yang telah diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bag. Organisasi
5)	Jumlah Produk Kerjasama Daerah	Dokumen	7	7	8	7	7	8	8	45	Bag. Tapem

5	Perencanaan Pembangunan										
1)	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	35	40	46	50	55	60	65	65	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
2)	Prosentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD	%	NA	50	60	65	70	80	90	90	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
3)	Prosentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	%	100	Na	93	93	93	93	93	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
4)	Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5)	Prosentase aspirasi DPRD yang diakomodir dalam RKPD	%	35	40	46	50	55	60	65	65	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
6)	Jumlah MOU kerjasama perencanaan pembangunan daerah	dok	1	-	1	-	-	-	-	1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
ASPEK DAYA SAING											
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah											
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1)	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	unit	88	88	88	89	90	91	92	92	Lintas PD

2)	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	unit	25	25	26	26	26	26	26	26	Lintas PD
Lingkungan Hidup											
1)	Prosentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	75	79	83	89	94	100	100	100	Lintas PD
Fokus Iklim Berinvestasi											
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1)	Angka kriminalitas	Kasus	150	145	130	125	120	115	110	110	Lintas PD
2)	Lama proses perijinan	hari	14	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Fokus Sumber Daya Manusia											
1)	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	4,89	4,89	5	5,2	5,4	5,6	5,8	5,8	BPS
2)	Rasio ketergantungan	Rasio	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	BPS

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana mengoperasionalkan RPJMD, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat dalam koordinasi Baperlitbang

10.1. PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya bupati baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi bupati terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, bupati pada tahun terakhir masa jabatannya, yaitu pada tahun 2021, menyusun dokumen:

a. RPJMD Teknokratik untuk periode 2021-2026

Penyusunan RPJMD Teknokratik mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat yang selanjutnya digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai bupati dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya. Penekanan dokumen teknokratik dimaksud adalah pada analisis capaian kinerja RPJMD lalu (minimal empat tahun pertama realisasi kinerja

pembangunan), analisis kapasitas riil keuangan daerah lima tahun mendatang, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah RPJMD teknokratik ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rancangan Awal RPJMD, setelah bupati terpilih dilantik.

b. RKPD Tahun 2022

Penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada RPJMD teknokratik untuk periode 2021-2026 jika telah tersedia. Diharapkan, pada masa transisi pergantian kepala daerah tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD Tahun 2022 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Selanjutnya, RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD 2022.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik pada tanggal 17 februari 2016 sebagai rujukan utama penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Kendal. Suatu keberhasilan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD diindikasikan oleh sejauh mana berbagai *outcome* dapat tercapai dan secara tepat memicu pencapaian sasaran (*impact*) RPJMD. Oleh karena itu, Baperlitbang sebagai penyelenggara pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen ini dengan mekanisme dan kerangka fikir sebagai berikut:

1. Sasaran pembangunan dalam jangka lima tahun dicapai melalui kinerja birokrasi, masyarakat, dan swasta secara simultan;
2. Dalam koordinasi antartingkatan pemerintahan, sasaran pembangunan pemerintah provinsi dicapai melalui:
 - a. Dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa tengah dan kerjasama pemerintah daerah Kabupaten/Kota lain/sekitarnya; dan

- b. Pendekatan untuk merealisasikan pembangunan, baik sektoral maupun kewilayahan;
 - c. Pencapaian *impact* dan *outcome* Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kendal..
3. Koordinasi pencapaian pembangunan Kabupaten Kendal, melalui:
 - a. Integrasi arsitektur kinerja sasaran RPJMD dan RKPD Kabupaten Kendal;
 - b. Integrasi arsitektur kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Kendal;
 - c. Integrasi dan sinkronisasi prioritas pembangunan daerah; serta
 - d. Koordinasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dengan kerangka fikir di atas, RPJMD Kabupaten Kendal 2016-2021 diselenggarakan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah). Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan berpedoman pada RPJMD dengan periode yang sama, yaitu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Renstra Perangkat Daerah tersebut selanjutnya harus dilaksanakan atau menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya;
2. RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD Tahun 2017 -2021, dengan ketentuan pokok:
 - a. RKPD merupakan instrumen yang strategis dalam mengoperasionalkan RPJMD dari tahun ke tahun;
 - b. Sasaran (tahunan), prioritas pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dijelaskan pada Bab V dan VI RPJMD ini harus dipedomani sebagai prioritas dan sasaran pembangunan RKPD 2017 - 2021 dalam Bab IV untuk tahun atau periode berkenaan; dan

- c. Indikasi program prioritas seluruh bidang urusan sebagaimana dijabarkan pada Bab VIII Perubahan RPJMD ini harus dipedomani sebagai Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam Bab V RKPD sesuai tahun atau periode berkenaan.
3. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 kepada masyarakat;
4. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dianggap tidak sesuai dengan yang ditetapkan;
5. RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 merupakan dasar untuk mengevaluasi laporan atas hasil kinerja Kepala Daerah terpilih untuk masa 5 (lima) tahun dan tahunan; serta
6. Baperlitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.

BAB X PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016–2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kendal selama 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu, RPJMD ini juga merupakan arahan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran selama periode tahun 2017–2021.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kendal untuk dapat mewujudkan visi bupati "Aparatur Amanah masyarakat Maju Sejahtera", perlu didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas, dan demokratis; (2) Tata Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*); (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kendal; (4) Keberpihakan kepada rakyat (*pro-poor policy*); (5) Partisipasi aktif masyarakat, media massa dan dunia usaha; serta (6) Mekanisme pengendalian dan pengawasan (*check and balance*) serta akuntabilitas publik yang baik.

Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal diharapkan akan membawa masyarakat yang maju dan sejahtera sebagai mana yang telah ditetapkan oleh bupati terpilih.

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA